

KATA PENGHANTAR

Laporan Akhir Tahun kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun 2012 ini merupakan dokumen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2012, yang dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 dalam rangka mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Berdasarkan Keadilan dan Kebenaran, yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan Nasional serta Program dan Kegiatan.

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang sedang dan masih dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja para birokrat melalui akuntabilitas kinerjanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong dan terus berupaya dalam perbaikan kinerja demi terwujudnya transparansi untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Secara garis besar Laporan ini menyajikan berbagai prestasi kerja sepanjang tahun 2012 pada masing-masing unit Eselon Utama yang disajikan berdasarkan pencapaian Grand Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Menciptakan Supremasi Hukum, Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara nasional, dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi manusia.

Menyadari adanya berbagai keterbatasan, Laporan Akhir Tahun ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas yang disyaratkan dalam proses Reformasi Birokrasi, serta bermanfaat dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil kebijakan di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA KERJA	4
A. VISI DAN MISI	4
B. TUJUAN	4
C. SASARAN	5
D. ARAH KEBIJAKAN	5
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	8
F. ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2012	11
BAB III PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	18
1. KEGIATAN/HASIL-HASIL YANG DICAPAI	18
Bidang Peraturan Perundang-undangan	18
Bidang Administrasi Hukum Umum	37
Bidang Pemasyarakatan.....	45
Bidang Imigrasi	66
Bidang Hak Kekayaan Intelektual	162
Bidang Hak Asasi Manusia	179
Bidang Pengawasan	200
Bidang Pembinaan Hukum Nasional	239
Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia	244
Bidang Kesekretariatan.....	260
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	301
BAB IV PENUTUP	302
A. KESIMPULAN	302
B. SARAN.....	302

Rencana Kerja Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan pada tahun 2012 terikat dengan arah pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2010 – 2014. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan Program Pemerintah yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kementerian Lembaga, Dan Lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan Dan Lintas Kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

Pembangunan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari koridor kebijakan umum dan program yang ditetapkan sesuai dengan sasaran dari tugas dan fungsi kelembagaan. Pada tahun 2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia melalui pelaksanaan 12 program utama yaitu : Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional, Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembentukan Hukum, Administrasi Hukum Umum, Pembinaan Penyelenggaraan Pemasarakatan, Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pembinaan Hukum Nasional yang diharapkan akan mewujudkan visi lembaga untuk tahun 2010 – 2014 yaitu : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

Penjabaran dan implementasi visi, misi dan strategi kelembagaan telah dan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi target capaian hasil yang dimonitor perkembangannya secara periodik dalam laporan para pimpinan unit kerja pada rapat kerja yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain program utama yang direncanakan dan dikembangkan serta dilaporkan, terdapat juga program – program lintas kementerian/lembaga yang merupakan upaya pembaharuan dan percepatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara serentak dan terpadu.

Kementerian Hukum dan HAM secara aktif melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dan memberikan laporan serta informasi data perkembangan pelaksanaan pembangunan internal yang mendukung terlaksananya kebijakan nasional seperti Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian dan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik semua program tersebut adalah prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan lptek serta penguatan daya saing perekonomian. Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan dengan pedoman Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi telah dipahami dan diterapkan

oleh seluruh unit kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan menunjukkan progres ya optimal dalam penerapannya.

Reformasi Birokrasi telah mengubah pola dan metode pelayanan organisasi/lembaga kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan nasional. Di sisi lain masyarakat sebagai stake holder mengalami peningkatan kepercayaan kepada aparat sebagai implikasi dari pelayanan birokrat yang berkualitas.

Pada tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM telah meresmikan operasional 32 satuan kerja baru khususnya dalam upaya mengantisipasi over kapasitas dan meningkatkan pelayan publik terhadap masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong pembangunan di sektor perekonomian.

Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada sebagian warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum juga diupayakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan. Dengan adanya Sistem Database Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM secara formal dan aktual memberikan perhatian dan penanganan khusus kepada warga binaan khususnya dalam menetapkan kebijakan internal, perlakuan para petugas dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Peran Kementerian Hukum dan HAM secara aktif juga berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing perekonomian melalui kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan melalui perencanaan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi dan pasar. Selain itu kebijakan internal dalam pelayanan legislasi, registrasi dan pengawasan keimigrasian, hak kekayaan intelektual, pengesahan badan hukum dan pengawasan kenotariatan juga sangat berperan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan usaha perekonomian.

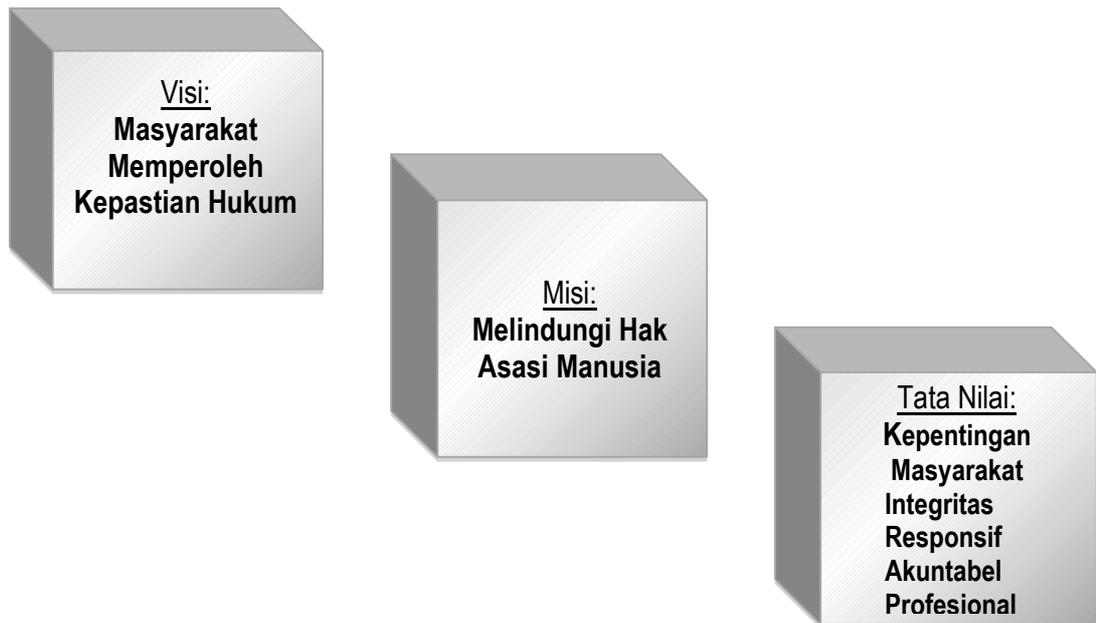
Kementerian Hukum dan HAM dengan komitmen yang tinggi dan konsen pada pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas profesional apartur telah menggerakkan seluruh elemen meliputi bidang sekretariat administrasi, teknis, pengawasan internal maupun pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Hasil yang diraih berupa prestasi yang menggembirakan berhasil diperoleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012 khususnya dalam peningkatan kualifikasi pelaporan akuntansi keuangan yang dievaluasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah juga mengalami peningkatan dari CC ke B. Selain itu Kementerian Hukum dan HAM juga mendapat penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya dari Presiden Republik Indonesia saat Perayaan Hari Ibu ke-84.

Keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM diharapkan akan tetap terpelihara dan akan mengukir prestasi lain di berbagai sektor dan bidang sampai seluruh elemen mengalami kemajuan dan memenuhi capaian target yang diharapkan dan ditetapkan setiap tahunnya melalui pengendalian dan evaluasi yang terus-menerus dan kebersamaan dengan instansi dan kementerian/lembaga lainnya.

Selanjutnya kami uraikan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012 serta rencana tahun 2013.

A. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi sebagai berikut :



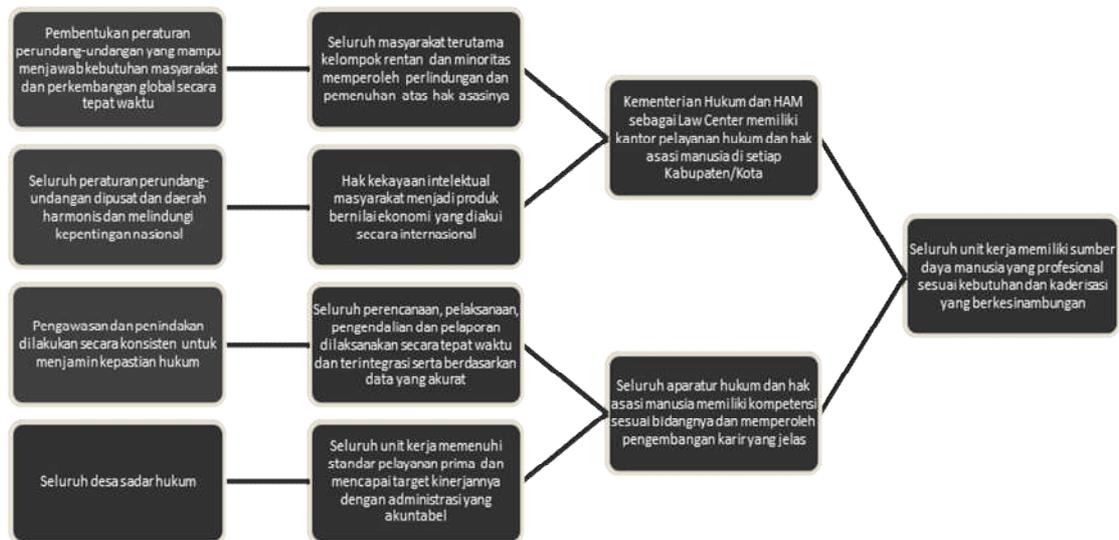
B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :



C. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :



D. Arah Kebijakan

Beberapa kegiatan prioritas Nasional maupun prioritas Bidang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelayanan Tahanan Dan Pembinaan Narapidana;
 - d. Pembinaan Kegiatan Di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak;
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
 - f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - g. Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan hak asasi manusia;

- h. Pendidikan Kedinasan;
 - i. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - j. Pengawasan Inspektorat Khusus.
2. Prioritas Nasional 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan kegiatan :
 - a. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan kegiatan :
 - a. Kerjasama hak asasi manusia;
 - b. Penguatan hak asasi manusia;
 - c. Diseminasi hak asasi manusia; dan
 - d. Informasi hak asasi manusia.
 4. Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian, dengan kegiatan :
Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.
 5. Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan fokus prioritas :
 - a. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; dan
 - c. Peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di samping itu arah dan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang pembangunan hukum untuk lima tahun mendatang direncanakan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional terkait dengan perbaikan substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum, sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan kualitas penelitian/pengkajian dan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kualitas penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan (*Legislative Drafters*);
 - c. Penguatan mekanisme Prolegnas dan Prolegda;

- d. Pembenahan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.
2. Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan fungsi Pemasyarakatan;
 - b. Peningkatan fungsi Keimigrasian;
 - c. Peningkatan fungsi Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - d. Peningkatan fungsi Administrasi Hukum Umum.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, melalui prioritas kegiatan :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi KAK 2003;
 - b. Peningkatan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit;
 - c. Penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara; dan
 - d. Peningkatan kualitas informasi hasil pemeriksaan BPK.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Penyusunan kegiatan pelayanan publik;
 - b. Penyusunan pedoman pengaduan masyarakat;
 - c. Penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pelatihan pelayanan publik;
 - d. Pembinaan pelaksanaan kebijaksanaan pelayanan publik;
 - e. Penyelenggaraan kampanye peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
5. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pembinaan penerapan e-government;
 - b. Kebijakan reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah;
 - c. Penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan;
 - d. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - e. Pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan diklat kepemimpinan; dan
 - f. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

6. Pengawasan/Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi, melalui kegiatan prioritas :
 - a. pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Penataan pegawai dalam rangka implementasi reformasi birokrasi instansi.
7. Peningkatan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, melalui kegiatan prioritas :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk perda yang berperspektif hak asasi manusia dan tidak diskriminatif;
 - b. Penyusunan kebijakan terkait pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. Tindak lanjut pokja RANHAM yang telah dibentuk di daerah; dan
 - d. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan.

E. Program Dan Kegiatan

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam pembangunan bidang hukum, selanjutnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Kegiatan-kegiatan pokok meliputi : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dalam rangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan hubungan luar negeri, pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengkajian dan pengembangan kebijakan, pengelolaan pelayanan daktiloskopi, pengembangan dan pendayagunaan telematika, pengelolaan administrasi, pelayanan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi: pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah serta kantor Satuan Kerja.

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah pengawasan kinerja inspektur wilayah, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi penelitian, evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosbud, pelanggaran hak asasi manusia berat, hak-hak kelompok rentan, dukungan manajemen dan teknis lainnya
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan manajemen, diklat teknis, diklat fungsional hak asasi manusia, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
6. Program Pembentukan Hukum
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : perancangan peraturan perundang-undangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, publikasi, kerjasama dan pengundangan peraturan perundang-undangan, litigasi peraturan perundang-undangan, dan fasilitasi perancangan peraturan daerah, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
7. Program Administrasi Hukum Umum
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain administrasi hukum perdata, pidana, tatanegara, internasional, badan hukum, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
8. Program Pembinaan Pemasyarakatan
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, perawatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, registrasi dan informasi, bimkemas dan anak, pelayanan tahanan dan pembinaan napi, dukungan teknis dan administrasi.
9. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Kegiatan pokok dilakukan meliputi pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian, perumusan kebijakan teknis dokumen perjalanan, visa, ijin masuk, izin bertolak, dan fasilitas keimigrasian, persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian, perumusan kebijakan teknis izin tinggal, alih status keimigrasian,

status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat, pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian, perumusan rancangan kebijakan teknis intelejen keimigrasian, penyidikan dan penindakan pelaku tindak pidana keimigrasian, penyajian data jegah tangkal, perumusan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan keimigrasian, kerjasama luar negeri keimigrasian, perumusan kebijakan teknis lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional, aplikasi on line 24 jam, perumusan kebijakan teknis sistim informnasi keimigrasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

10. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayan Intelektual

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi : penyelenggaraan penyidikan HKI, penyelenggaraan sistem hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, penyelenggaraan sistem paten, penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis, penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan HKI, penyelenggaraan sistem teknologi informasi HKI, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

11. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia;

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain: desiminasi hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia, teknologi informasi hak asasi manusia, harmonisasi dan kerjasama hak asasi manusia, pelayanan komunikasi hak asasi manusia, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

12. Program Pembinaan Hukum Nasional;

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian, penelitian, pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan pembangunan hukum, analisa dan evaluasi, penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan, kerjasama bidang hukum, publikasi dan pengolahan data, pengembangan penyuluhan hukum, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

F. Alokasi Anggaran dan Penyerapan Per Program Tahun 2012

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 1 November 2011 Nomor : SE-01/MK.02/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012, anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2012 ditetapkan sejumlah Rp.6.977.807.206.000,-. Jika dibandingkan dengan total Pagu

APBN-P Tahun 2011 sejumlah Rp.7.075.646.564.000,- mengalami penurunan sejumlah Rp.97.839.358.000,- atau 1,38%.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2012 telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012. Program-program yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2010-2014 juga telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan 21 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja :

No	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.237.001.054.600	3.109.162.220.604	96,05 %
2	Belanja Barang	2.754.722.934.400	2.272.662.174.456	82,50 %
3	Belanja Modal	987.931.320.000	842.730.958.617	85,30 %
Jumlah Total		6.979.655.309.000	6.224.555.353.677	89,18 %

2. Rincian Anggaran menurut Unit Eselon I :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Sekretariat Jenderal	5.500.773.364.000	5.030.354.668.359	91,45%
2.	Inspektorat Jenderal	28.777.871.000	28.060.456.352	97,51 %
3.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	170.669.730.000	159.168.945.723	93,26%
4.	Ditjen Pemasarakatan	82.151.818.000	77.723.052.812	94,61%
5.	Ditjen IImigrasi	879.122.468.000	654.084.296.041	74,40%
6.	Ditjen Hak Kekayaan Intelektual	89.179.263.000	77.416.002.853	86,81%
7.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	52.931.701.000	35.310.710.002	66,71%
8.	Ditjen Hak Asasi Manusia	27.484.307.000	26.130.489.314	95,07%
9.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	46.664.761.000	40.365.557.181	86,50%
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	22.026.679.000	21.199.454.359	96,24%
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	79.873.347.000	74.741.720.681	93,58%
JUMLAH		6.979.655.309.000	6.224.555.353.677	89,18%

3. Realisasi Anggaran menurut Program :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	5.134.931.404.000	4.684.738.843.076	91,23%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	365.841.960.000	345.615.825.283	94,47%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	28.777.871.000	28.060.456.352	97,51 %
4	Program Administrasi Hukum Umum	170.669.730.000	159.168.945.723	93,26%
5	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	82.151.818.000	77.723.052.812	94,61%
6	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	879.122.468.000	654.084.296.041	74,40%
7	Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	89.179.263.000	77.416.002.853	86,81%
8	Program Pembentukan Hukum	52.931.701.000	35.310.710.002	66,71%
9	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	27.484.307.000	26.130.489.314	95,07%
10	Program Pembinaan Hukum Nasional	46.664.761.000	40.365.557.181	86,50%
11	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	22.026.679.000	21.199.454.359	96,24%
12	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	79.873.347.000	74.741.720.681	93,58%
Jumlah Total		6.979.655.309.000	6.224.555.353.677	89,18%

4. Realisasi Penerimaan Anggaran yang bersumber dari PNBK sampai dengan triwulan ke III tahun 2012 :

Tahun 2012 target PNBK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejumlah Rp.2.178.648.000.000,- Sampai dengan triwulan ke III tahun 2012 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejumlah Rp.1.741.255.403.449,- atau sebesar 80%. Dengan asumsi rata-rata per triwulan penerimaan sejumlah Rp.580.000.000.000,-, maka pada akhir triwulan ke IV target PNBK

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2012 akan terlampoi atau sejumlah Rp.2.321.255.403.449,- atau sebesar 106,54%

5. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh satuan kerjanya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Pelayanan Jasa Hukum; yaitu penerimaan yang berasal dari penerimaan Ditjen Administrasi Hukum Umum (Penerimaan Badan Hukum, Perdata Umum, Notariat, Fidusia, Sidik Jari, Kewarganegaraan);
- b. Balai Harta Peninggalan; yaitu penerimaan dari 5 Kantor BHP (penerimaan Pendaftaran Akta Wasiat, Penjualan Harta Kekayaan dan Kepailitan, Pengurusan Harta Kekayaan dalam Pengelolaan BHP);
- c. Keimigrasian; yaitu penerimaan yang berasal dari Kantor Imigrasi dan Ditjen Imigrasi (penerimaan Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor, VISA, Izin Keimigrasian, Izin Masuk Kembali, Surat Keterangan Keimigrasian);
- d. Hak Kekayaan Intelektual (Penerimaan Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, dan Merek);
- e. Jasa Tenaga Kerja Narapidana (penerimaan jasa tenaga narapidana dari Lapas/Rutan yang berhubungan dengan pihak ke III dengan tarif sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama).

Target PNBP Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut diatas bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Target 2012
1	Pelayanan Jasa Hukum;	165.156.556.000
2	Balai Harta Peninggalan	3.023.000.000
3	Keimigrasian	1.786.614.000.000
4	Hak Kekayaan Intelektual	207.050.000.000
5	Jasa Tenaga Kerja Narapidana	3.641.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	13.163.444.000
TOTAL		2.178.648.000.000

Sebagian dana PNBP di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digunakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat, ijin penggunaan sebagian dana PNBP Tahun 2012 sebagai berikut :

No	Sumber PNBP	Ijin Penggunaan	Landasan Hukum
1	PNBP Keimigrasian	70,94 %	KMK nomor : 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
2	PNBP Administrasi Hukum Umum	76,43 %	KMK nomor : 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
3	PNBP Hak Kekayaan Intelektual	25 %	SK Menteri Keuangan No. S178/MK.017/2000 Ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Dep. Hukum dan Perundang Undangan
4	PNBP Pemasyarakatan	30 %	SK Menteri Keuangan No. S178/MK.017/2000 Ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Dep. Hukum dan Perundang Undangan
5	PNBP Balai Harta Peninggalan (BHP)	30 %	SK Menteri Keuangan No. S178/MK.017/2000 Ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Dep. Hukum dan Perundang Undangan

G. Alokasi Anggaran Tahun 2013 Dan Usulan Penambahan Anggaran

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor : S-769/MK.02/2012, tanggal 23 Oktober 2012, hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2013, anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 dialokasikan sejumlah Rp.7.575.268.489.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Semula (Pagu Sementara) = Rp.7.273.933.169.000,-
- 2. kenaikan = Rp. 301.335.320.000,-
- 3. Total alokasi anggaran 2013 = Rp.7.575.268.489.000,-

Kenaikan anggaran dikarenakan adanya penambahan dari :

- 1. Sumber pendanaan PNBP sejumlah = Rp.176.335.320.000,-
- 2. Sumber Rupiah Murni sejumlah = Rp.125.000.000.000,-
- 3. Kenaikan anggaran dari sumber PNBP dialokasikan pada :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, untuk Kanim;
- b. Program Administrasi Hukum Umum, untuk Ditjen AHU;
- c. Program Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Keimigrasian, untuk Ditjen Imigrasi;
- d. Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI, Untuk Ditjen HKI.

Kenaikan anggaran dari sumber rupiah murni dialokasikan pada :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alokasi anggaran sejumlah Rp.7.575.268.489.000,- digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) program, pada 796 satuan kerja, dan 43.883 pegawai, dengan rincian per program, sebagai berikut :

No	Program	Alokasi Anggaran T.A. 2013		Jumlah
		Rupiah Murni	PNBP	
1.	Program Dukungan Manajemen Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.	4.871.342.306.00,-	678.294.039.000,-	5.549.636.345.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkumham	476.757.000.000,-	-	476.757.000.000,-
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	29.744.554.000,-	-	29.744.554.000,-
4.	Program Administrasi Hukum Umum	54.260.184.000,-	141.348.266.000,-	195.608.450.000,-
5.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	65.894.868.000,-	-	65.894.868.000,-
6.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	161.989.041.000,-	760.120.769.000,-	922.109.810.000,-
7.	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI	38.321.071.000,-	58.524.000.000,-	96.845.071.000,-

8.	Program Pembentukan Hukum	53.949.333.000,-	-	53.949.333.000,-
9.	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	31.949.586.000,-	-	31.949.586.000,-
10.	Program Pembinaan Hukum Nasional	48.457.447.000,-	-	48.457.447.000,-
11.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	23.659.117.000,-	-	23.659.117.000,-
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80.656.908.000,-	-	80.656.908.000,-
JUMLAH		5.936.981.415.000,-	1.638.287.074.000,-	7.575.268.489.000,-

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan bahwa seluruh Kementerian Negara/Lembaga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui kebijakan flat policy pada belanja barang operasional dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, serta menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan output dan kemampuan penyerapan anggaran. RKA-K/L pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah memenuhi ketentuan tersebut.

Di sisi lain dengan diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada tanggal 2 Nopember 2011, mengamanatkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas baru yaitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang anggarannya belum ditetapkan pada pagu anggaran.

Di samping itu untuk mengatasi over kapasitas pada Lapas dan Rutan, pada tahun 2013 akan dioperasikan UPT Pemasayarakatan sebanyak 15 Satker, peningkatan

pelayanan keimigrasian juga akan dioperasikan Kantor Imigrasi 4 Satker. Maka pada penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih memerlukan penambahan anggaran sejumlah Rp. 481.695.031.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Bantuan Hukum sejumlah Rp. 63.000.000.000,- :
 - a. Penyaluran Bantuan Hukum sejumlah Rp. 53.000.000.000,-
 - b. Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
 - c. Evaluasi dan Laporan Lembaga Bantuan Hukum sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
 - d. Sosialisasi dan Pengawasan Bantuan Hukum sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
 - e. Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
2. Untuk operasionalisasi 19 satuan kerja baru sejumlah Rp.35.443.910.000,-;
3. Disamping 19 satuan kerja tersebut hingga saat ini telah disetujui pembentukan 21 satuan kerja baru melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Agustus 2012 nomor : B/2265/M.PAN-RB/8/2012, dan sedang dalam proses penerbitan kode satuan kerja pada Kementerian Keuangan. Untuk mengoperasikan 21 satuan kerja dimaksud diperlukan penambahan anggaran Rp.31.398.503.000,-.
4. Guna melanjutkan pembangunan Lapas/Rutan baru yang diawali pembangunannya tahun 2010 sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010, dalam rangka penanggulangan over kapasitas Lapas/Rutan pada 29 unit pelaksana teknis, diperlukan anggaran sejumlah Rp.351.852.618.000,-

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2012 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing Unit Eselon I yang secara konsisten dapat melaksanakannya baik hingga berakhirnya tahun anggaran 2012, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan sebagai suatu bentuk pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan. Namun demikian bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas. Akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2012 dapat disampaikan sebagai berikut:

A. KEGIATAN/ HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Bidang Peraturan Perundang-undangan

1. Sekretariat

Dari Penjabaran Kegiatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sampai dengan Triwulan IV (Oktober - Nopember 2012) dapat diketahui Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 35.310.710.002,- dari Pagu DIPA sebesar Rp. 52.931.701.000,- atau 67,01 % tetapi terdapat pengembalian belanja sebesar (Rp.159.767.588,-) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kode	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
I.	Program Pembentukan Hukum	01.03.06	52.931.701.000,-	35.310.710.002,-	67,01
	A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	01.03.06.1603	23.774.601.000,-	21.775.679.021,-	92,2
	B. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	01.03.06.1598	1.700.000.000,-	1.123.999.100,-	66,12
	a. Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah	01.03.06.1598.01	144.000.000,-	96.904.450,-	67,29
	b. Fasilitasi Perda dan Raperda Wilayah I	01.03.06.1598.02	610.300.000,-	397.894.300,-	65,2
	c. Fasilitasi Perda dan Raperda Wilayah II	01.03.06.1598.03	495.600.000,-	292.421.750,-	59,0
	d. Fasilitasi Perda dan Raperda Wilayah III	01.03.06.1598.04	450.100.000,-	336.778.600,-	74,82
	C. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1599	5.700.000.000,-	2.857.889.289,-	50,14
	a. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang politik, hukum dan keamanan	01.03.06.1599.01	1.112.818.000,-	707.049.691,-	63,54
	b. Pengharmonisasian Rancangan	01.03.06.1599.02	918.388.000,-	473.459.698,-	51,55

	Peraturan Perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan				
	c. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang industri dan perdagangan	01.03.06.1599.03	1.327.248.000,-	592.817.800,-	44,67
	d. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang sumber daya alam, riset dan teknologi	01.03.06.1599.04	820.308.000,-	409.570.800,-	49,93
	e. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat	01.03.06.1599.05	960.378.000,-	530.317.950,-	55,22
	f. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup	01.03.06.1599.06	560.860.000,-	144.673.350,-	25,79
	D. Litigasi Perundang-undangan	01.03.06.1600	1.563.400.000,-	1.255.762.000,-	80,32
	a. Keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian Undang- undang	01.03.06.1600.01	651.640.000,-	537.101.100,-	82,42
	b. Keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian peraturan dibawah Undang-undang	01.03.06.1600.02	284.980.000,-	192.766.250,-	67,64
	c. Analisis dan dokumentasi putusan pengujian Peraturan Perundang- undangan	01.03.06.1600.04	626.780.000,-	525.894.650,-	83,9
	E. Perancangan Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1601	18.357.100.000,-	6.900.846.202,-	37,64
	a. Rancangan Undang-undang	01.03.06.1601.01	2.742.063.000,-	1.968.990.114,-	71,83
	b. Rancangan Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang	01.03.06.1601.02	2.757.288.000,-	1.994.029.406,-	72,32
	c. Rancangan Undang-undang yang dibahas di DPR	01.03.06.1601.03	10.148.573.000,-	1.456.980.800,-	14,36
	d. Pengembangan tenaga Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1601.04	1.804.036.000,-	1.222.721.900,-	68,26
	e. Dokumentasi bidang Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1601.05	390.600.000,-	137.989.332,-	35,33
	f. Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan Saksi dan Korban	01.03.06.1601.06	261.470.000,-	120.134.650,-	45,95
	g. Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemberantasan Korupsi	01.03.06.1601.07	253.070.000,-	0,-	0
	F. Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1602	1.836.600.000,-	1.396.534.390,-	76,39
	a. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1602.01	238.307.000,-	187.568.750,-	76,71
	b. Peraturan Perundang-undangan publikasi	01.03.06.1602.02	638.107.000,-	448.453.700,-	70,28
	c. Kerjasama Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1602.03	830.134.000,-	660.395.290,-	80,34
	d. Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan	01.03.06.1602.04	130.052.000,-	100.116.650,-	76,98
	Total Jumlah Belanja :		52.931.701.000,-	35.310.710.002,-	67,01

2. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang

Berdasarkan data diatas rekapitulasi rancangan Peraturan Perundang-Undang Bidang Keuangan dan Perbankan hasil pengharmonisasian adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peraturan Perundang-Undang	Selesai Harmonisasi	Proses Harmonisasi
1	RUU	4	0
2	RPP	59	2
3	RPERPRES	2	0
Jumlah		65	2

a. Harmonisasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pembahasan rancangan undang-undang baik inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah sebanyak 9 RUU.
- 2) Melaksanakan Finalisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 Rancangan Peraturan perundang-undangan
- 3) Menghadiri rapat antar Kementerian sebanyak 8 kali.

Rekapitulasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pengharmonisasian

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Selesai Harmonisasi	Proses Harmonisasi	Rancangan dikembalikan
1	RUU	15	1	1
2	RPP	10	3	1
3	RPERPRES	9	1	
Jumlah		34	5	2

Rekapitulasi rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Indagristek

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Selesai		Dalam Proses
		Selesai Proses Harmonisasi	Dikembalikan Ke Pemrakarsa	
1	RUU	4	1	0
2	RPP	21	4	8
3	RPERPRES	10	0	5
4	RPERMEN	0	1	0
Jumlah		35	6	13

b. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 Selama tahun 2012 Subdit Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menerima sebanyak 79 permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.



Dari 79 rancangan peraturan perundang-undangan, sebanyak 60 rancangan peraturan perundang-undangan sudah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, yang terdiri dari 22 RPP dan 38 Rancangan Perpres.

Dari 79 rancangan peraturan perundang-undangan, sebanyak 12 rancangan peraturan perundang-undangan belum selesai proses pengharmonisasian,

pembulatan, dan pematapan konsepsi, yang terdiri dari 11 RPP dan 1 Rancangan Perpres.

Dari 79 rancangan peraturan perundang-undangan, sebanyak 7 rancangan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dikembalikan, yang terdiri dari 5 RPP dan 2 Rancangan Perpres.

Tabel Rekapitulasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangn Hasil Pengharmonisasian

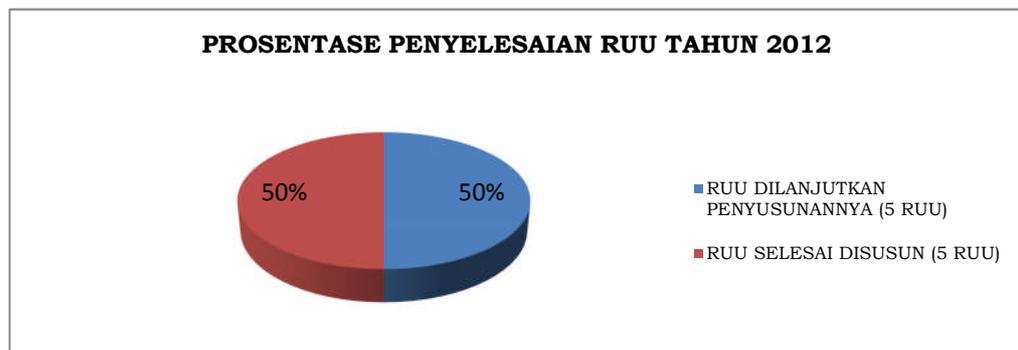
No	Jenis Peraturan Perundang-Undangn	Selesai Harmonisasi	Proses Harmonisasi	Dikembalikan
1	RUU	0	0	0
2	RPP	22	11	5
3	RPERPRES	38	1	2
Jumlah		60	12	7
Jumlah total		79		

3. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangn

a. Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang

Pada Tahun 2012 Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang telah menyelesaikan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyusunan Antar Kementerian Rancangan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dari 10 Rancangan Undang-Undang yang disusun, 1 RUU telah diharmonisasi dan 4 RUU akan disampaikan untuk diharmonisasikan, RUU tersebut yaitu:

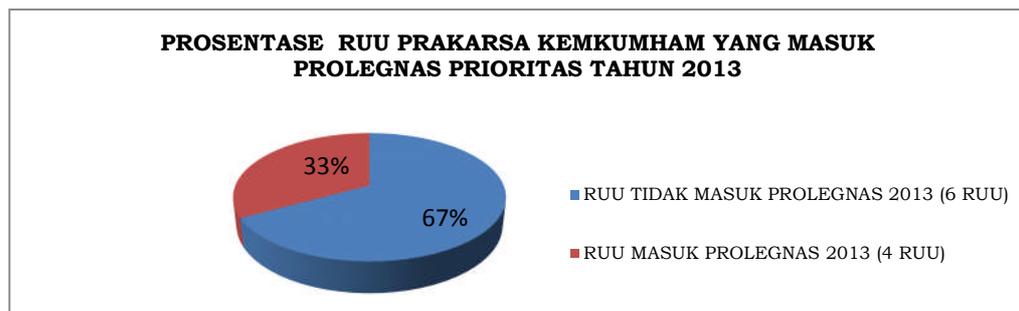
No	Judul RUU	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	akan disampaikan untuk diharmonisasikan
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Korea tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	akan disampaikan untuk diharmonisasikan
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India	akan disampaikan untuk diharmonisasikan
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	akan disampaikan untuk diharmonisasikan
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Paten	selesai diharmonisasi

2) Kegiatan Rapat yang diadakan Kementerian atau Instansi lain



Kegiatan Rapat yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kementerian atau instansi lain sebanyak 95 kegiatan

3) Pengajuan 9 RUU Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2013



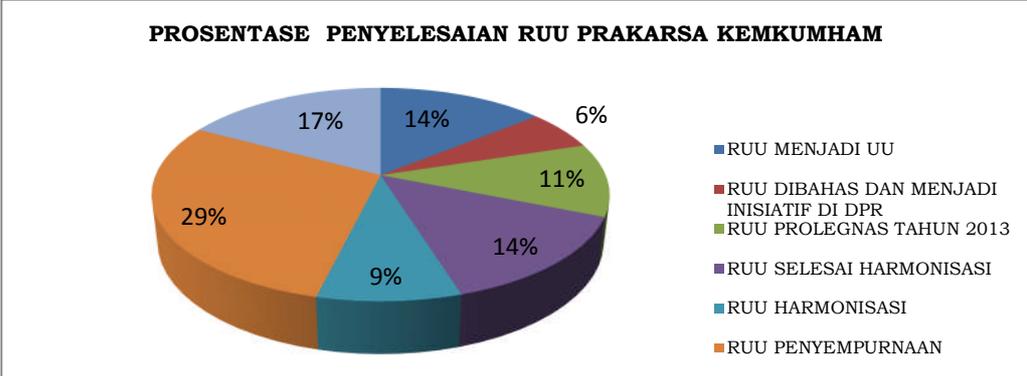
Dari 9 RUU Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diajukan, 4 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2013 yaitu:

- a) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - d) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Perkembangan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dari 4 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2012, 1 RUU tahap Pembahasan Tingkat I, 2 RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR, dan 1 RUU telah disampaikan kepada Presiden

5) Perkembangan 35 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Dari 35 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, 5 RUU telah menjadi UU, 1 RUU sedang dibahas di DPR, 1 RUU menjadi Inisiatif DPR, 4 RUU masuk dalam Prolegnas Tahun 2013, 5 RUU selesai harmonisasi, 3 RUU sedang diharmonisasi, 10 RUU disempurnakan kembali, 6 RUU belum disusun Antarkementerian.

b. Penyusunan Rpp,Rperpres, Dan Rpermen

Pada Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri telah menyelesaikan beberapa kegiatan sebagai berikut:

no	Rancangan Peraturan	Jumlah
1	Rancangan Peraturan Pemerintah	6 buah
2	Rancangan Peraturan Presiden	2 buah

3	Rancangan Peraturan Menteri Kemenkumham	46 buah
---	---	---------

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- 1) RPermen tentang Tata Cara Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Biaya Keimigrasian di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- 2) RPermen tentang Standar Operating Prosedur Penanganan Komunikasi Masyarakat;

c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

- 1) RUU yang berasal dari DPR sebanyak 5 RUU.
- 2) RUU yang berasal dari Presiden sebanyak 5 RUU
- 3) RUU Kumulatif Terbuka

RUU tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

4. Direktorat Pengundangan, Publikasi, Dan Kerja Sama Peraturan Perundang-Undang

a. Pengundangan Peraturan Perundang-Undang

Sejak tanggal 2 Januari dengan tanggal 27 Desember 2012 Subdit Pengundangan telah menerima permohonan pengundangan menempatkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam:

No	Keterangan	Jumlah
1	Lembaran Negara	284 peraturan
2	Tambahan Lembaran Negara	114 peraturan
3	Berita Negara	1.345 peraturan
4	Tambahan Berita Negara	1 peraturan

Yang telah diselesaikan dalam bentuk lembaran lepas sebanyak :

No	Keterangan	Jumlah
1	Lembaran Negara	267 peraturan
2	Tambahan Lembaran Negara	103 peraturan
3	Berita Negara	1.280 peraturan
4	Tambahan Berita Negara	1 peraturan

b. Penyusunan Pengklasifikasian Peraturan Perundang-undangan

Menginventarisir dan menyusun perkembangan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan ditetapkan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Peraturan perundang-undangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Undang-Undang	192 peraturan
2	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	13 peraturan
3	Peraturan Pemerintah	399 peraturan
4	Peraturan Presiden	96 peraturan
5	Peraturan Bank Indonesia	148 peraturan
6	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	10 peraturan
7	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga Pemerintah	1.487 peraturan

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	2010	2009	2008	2007	2006
		LN	LN	LN	LN	LN
Peraturan Perundang undangan						
1	Undang Undang	13	52	56	48	23
2	PERPU		4	5	2	2
3	Peraturan Pemerintah	95	78	89	82	55
4	Peraturan Presiden	24	17	27	17	11
5	Peraturan Bank Indonesia	26	33	40	19	30
6	Peraturan BPK	4		3	3	
Jumlah		162	184	220	171	121
Jenis Peraturan		BN	BN	BN	BN	
Kementerian						
1	Peraturan Menteri Pertahanan	28	29	30		
2	Peraturan Menteri Perindustrian	33	40	27		
3	Peraturan Menteri Agama	17	41	1	34	
4	Peraturan Menteri Kehutanan	51	71	32		
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	18	30	4	4	
6	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	17	2	12		
7	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA	26	5			
8	Peraturan Menteri ESDM	18	32			
9	Peraturan Menteri Pertanian	21	30			
10	Peraturan Menteri Keuangan	264	167			
11	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	13				
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri	39				
13	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	14				
14	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	5				
15	Peraturan Menteri Perdagangan	37	51			
16	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	14			
17	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan		1			
18	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	10				
19	Peraturan Menteri Riset dan Teknologi	2				
20	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2				
21	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	11				
22	Peraturan Menteri Kesehatan	12				
Jumlah		648	513	106	38	

Non Kementerian/LPNK						
1	Peraturan KAPOLRI	27	21	12	14	
2	Peraturan Kepala Sandi Negara	18	10			
3	Peraturan Kepala LPSK	6	4			
4	Peraturan Kepala PPATK	2	1			
5	Peraturan Kepala BKPM	5	10	1		
6	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	6	1			
7	Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional	1				
8	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat	1				
9	Peraturan Badan Wakaf Nasional	4				
10	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	5				
11	Peraturan Komisi Informasi	2				
12	Peraturan Komisi Nasional HAM	1				
13	Peraturan Kepala BMKG	2				
14	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	12				
15	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	7				
16	Peraturan Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional	1				
17	Peraturan LAN	1				
18	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3		4		
Jumlah		104	47	17	14	
Keseluruhan(Kementerian dan Non Kementerian)		752	560	123	52	

c. Pendokumentasian Naskah Asli Peraturan Perundang-undangan

- 1) Mengelola dan menyusun naskah asli peraturan perundang-undangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara	Berita Negara	Tambahan BN
2007	171	124	52	-
2008	220	156	123	-
2009	183	130	558	-
2010	161	93	749	3
2011	169	85	959	-
Jumlah	904	588	2.441	3

- 2) Rekapitulasi Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Yang Diundangkan Dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Dan Berita Negara Tanggal 02 Januari S/D 27 Desember Tahun 2012

NO.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Lembaran Negara	Tambahan LN
Peraturan Perundang-Undangan			
1	Undang-Undang	24	24
2	PERPU		
3	Peraturan Pemerintah	113	65
4	Peraturan Presiden	123	1
5	Peraturan Bank Indonesia	24	24
6	Peraturan BPK		
Jumlah		284	114

NO.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
Kementerian			
1	Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan	1	
2	Peraturan Bersama Jaksa Agung, Menkumham, Menteri Keuangan, MA	1	
3	Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri	1	
4	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan	1	
5	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	1	
6	Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri	1	
7	Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	1	
8	Peraturan Bersama Menakertrans dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	1	
9	Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP	1	
10	Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN	1	
11	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	4	
12	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM	1	
13	Peraturan Menteri Pertahanan	44	
14	Peraturan Menteri Perindustrian	86	
15	Peraturan Menteri Agama	31	
16	Peraturan Menteri Kehutanan	47	
17	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	21	
18	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	22	
19	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA	17	
20	Peraturan Menteri ESDM	31	
21	Peraturan Menteri Pertanian	37	
22	Peraturan Menteri Keuangan	239	
23	Peraturan Menteri Sosial	32	
24	Peraturan Menteri Dalam Negeri	80	
25	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	71	
26	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	23	
27	Peraturan Menteri Luar Negeri	6	
28	Peraturan Menteri Perdagangan	57	
29	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	
30	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	25	
31	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	15	
32	Peraturan Menteri Perhubungan	41	
33	Peraturan Menteri Riset & Teknologi	9	
34	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	10	
35	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	44	
36	Peraturan Menteri Kesehatan	36	
37	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	23	
38	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	
39	Peraturan Sekretariat Negara	2	
40	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	
41	Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal	2	

42	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	9	
Jumlah		1107	
Non Kementerian/LPNK			
1	Peraturan KAPOLRI	20	
2	Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia	8	1
3	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	10	
4	Peraturan Kepala Sandi Negara	13	
5	Peraturan Kepala LPSK	4	
6	Peraturan Kepala PPAK	7	
7	Peraturan Kepala BKPM	8	
8	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	13	
9	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional	5	
10	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	10	
11	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik	12	
12	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI	8	
13	Peraturan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat	3	
14	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	1	
15	Peraturan Badan Wakaf Indonesia	3	
16	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	3	
17	Peraturan Komisi Informasi		
18	Peraturan Komisi Nasional HAM	3	
19	Peraturan Kepala BMKG	15	
20	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	17	
21	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi	1	
22	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	24	
23	Peraturan BP Hilir Minyak dan Gas Bumi	3	
24	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional	2	
25	Peraturan LAN	6	
26	Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan	1	
27	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	15	
28	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	13	
29	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10	
Jumlah		238	1
Jumlah Keseluruhan (Kementerian + Non Kementerian)		1345	1

d. Publikasi

- 1) Penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia sebanyak 4 buah
- 2) Pencetakan buku peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya sebanyak 2 (dua) cetakan.
- 3) Penerjemahan bahan pendukung peraturan perundang-undangan sebanyak 15 (lima belas) dokumen peraturan perundangundangan.
- 4) Kegiatan pendistribusian dan penyebarluasan bahan pendukung peraturan perundang-undangan sebanyak 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) buku.

e. Kerja Sama

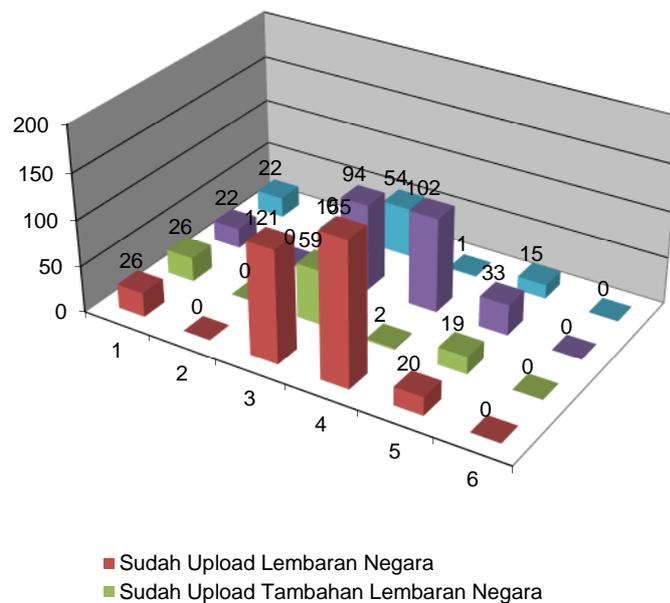
- 1) Selama tahun mengikuti kegiatan sebanyak 61 kegiatan.
- 2) Mengikuti kegiatan dalam rangka kerjasama dalam negeri sebanyak 26 kegiatan
- 3) Mengikuti kegiatan dalam rangka kerjasama luar negeri sebanyak 2 kegiatan

- 4) Sosialisasi Rancangan Undang-Undang di Pusat dan di Daerah sebanyak 3 kegiatan
- f. Sistem Informasi
- 1) Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan hingga saat ini masih melayani pengunjung secara optimal dengan jumlah pengakses situs www.djpp.depkumham.go.id dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2012 jumlah sebanyak 12.315.252 pengunjung/hari.
 - 2) Konten Kilas Berita/Berita Informasi Hukum Januari–Desember 2012 sebanyak 111 judul berita.
 - 3) Konten Berita Kegiatan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Januari–Desember 2012 sebanyak 103 judul berita.
 - 4) Pembuatan Film Dokumenter Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi Pada Direktorat Pengundangan, Publikasi Dan Kerja Sama Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Pengelolaan Database

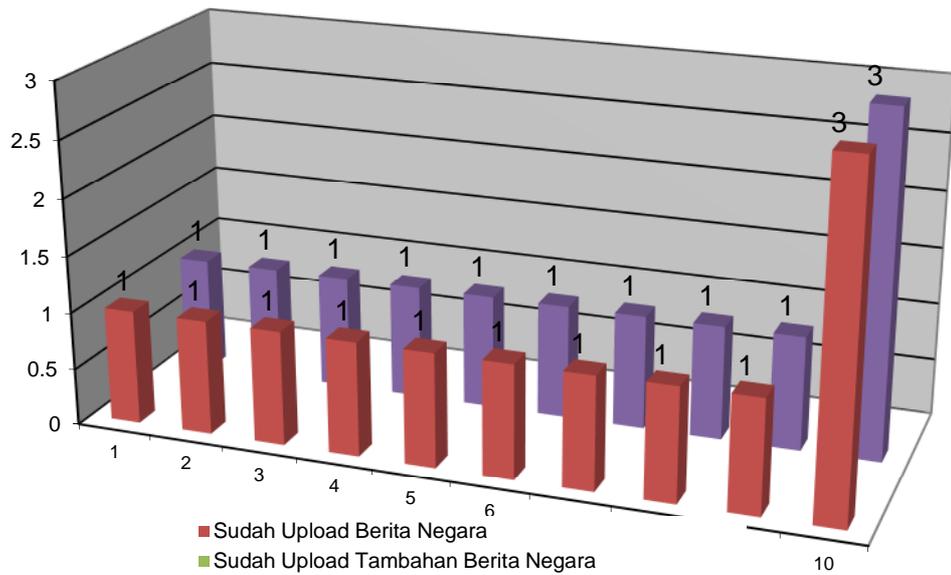
NO.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Sudah Upload		Excel	
		Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara	Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Perundang-Undangan					
1	Undang-Undang	26	26	22	22
2	PERPU				
3	Peraturan Pemerintah	121	59	94	54
4	Peraturan Presiden	155	2	102	1
5	Peraturan Bank Indonesia	20	19	33	15
6	Peraturan BPK				
JUMLAH		322	106	251	92
NO.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Sudah Upload		Excel	
		Berita Negara	Tambahan Berita Negara	Berita Negara	Tambahan Berita Negara
Kementerian					
1	Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kehutanan	1		1	
2	Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Dalam Negeri	1		1	
3	Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BKN	1		1	
4	Peraturan Bersama Menakertrans dan Kepala BKN	1		1	
5	Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP	1		1	
6	Peraturan Bersama Menakertrans dan Dalam Negeri	1		1	
7	Peraturan Bersama Menteri Negara dan Teknologi dan Dalam Negeri	1		1	
8	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Perhubungan	1		1	
9	Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan BKN	1		1	

10	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan KY	3		3	
11	Peraturan Menteri Pertahanan	19		21	
12	Peraturan Menteri Perindustrian	70		70	
13	Peraturan Menteri Agama	30		30	
14	Peraturan Menteri Kehutanan	35		36	
15	Peraturan Menteri Luar Negeri	2		2	
16	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	15		16	
17	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat	19		19	
18	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA	15		16	
19	Peraturan Menteri Negara PAN dan RB	18		20	
20	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	6		5	
21	Peraturan Menteri ESDM	22		17	
22	Peraturan Menteri Pertanian	24		27	
23	Peraturan Menteri Keuangan	171		172	
24	Peraturan Menteri Sosial	28		30	
25	Peraturan Menteri Dalam Negeri	48		50	
26	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	62		65	
27	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	22		22	
28	Peraturan Menteri Perdagangan	40		42	
29	Peraturan Menteri Perhubungan	34		36	
30	Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal	2		2	
31	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9		9	
32	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13		14	
33	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	21		21	
34	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	14		14	
35	Peraturan Menteri Riset & Teknologi	6		7	
36	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7		7	
37	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1		1	
38	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	37		37	
39	Peraturan Menteri Kesehatan	29		31	
JUMLAH		831	0	851	0
Non Kementerian/LPNK					
1	Peraturan KAPOLRI	12		13	
2	Peraturan Kepala Sandi Negara	7		7	
3	Peraturan Kepala LPSK	3		3	
4	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6		8	
5	Peraturan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan	1		1	
6	Peraturan Kepala PPAK	3		6	
7	Peraturan Kepala BKPM	6		7	
8	Peraturan Kepala BK N	7		7	

9	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	6		8	
10	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional	3		3	
11	Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI	6		8	
12	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik	10		10	
13	Peraturan Jaksa Agung	7		7	
14	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat	1		1	
15	Peraturan Badan Wakaf Indonesia	3		3	
16	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia	2		2	
17	Peraturan Komisi Informasi	0		0	
18	Peraturan Komisi Nasional HAM	0		0	
19	Peraturan Kepala BMKG	10		12	
20	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	10		10	
21	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	11		11	
22	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	19		20	
23	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	5		7	
24	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional	3		4	
25	Peraturan LAN	1		1	
26	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	7		7	
27	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	12		13	
Jumlah		161	0	179	0
Jumlah Keseluruhan (Kementerian + Non Kementerian)		992	0	1030	0

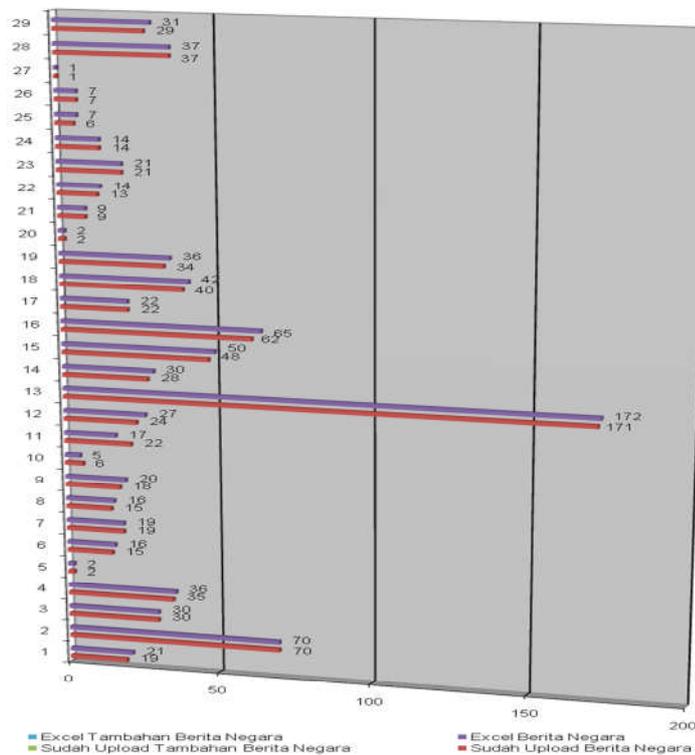


Gambar 1
Peraturan perundang-undangan yang telah diunggah



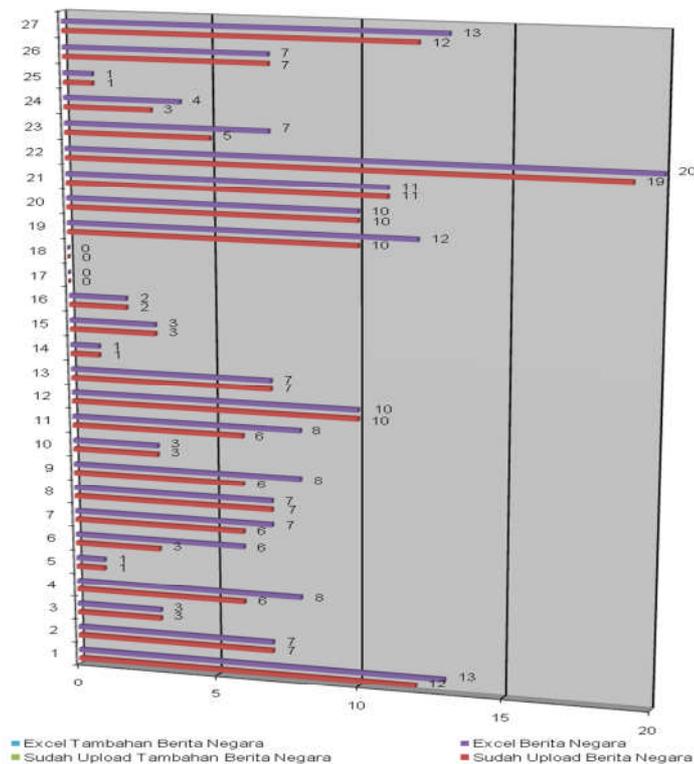
Gambar 2

Peraturan Bersama dari Kementerian dan LPNK yang telah diunggah



Gambar 3

Peraturan Kementerian yang telah diunggah



Gambar 4

Peraturan LPNK yang telah diunggah

g. **Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan yang berkaitan dengan tugas Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan selama tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

- 1) Penulisan Artikel sebanyak 3 artikel
- 2) Mengikuti Rapat di DPR sebanyak 8 kali
- 3) Menyusun tanggapan sebanyak 5 kali
- 4) Mengikuti ceramah peningkatan pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bimbingan Teknis) sebanyak 7 kali
- 5) Kegiatan mengajar sebanyak 2 kali

h. **Tata Usaha**

- 1) Surat masuk 774 surat dan surat keluar 138 surat
- 2) Melakukan kegiatan sebanyak 34 kali

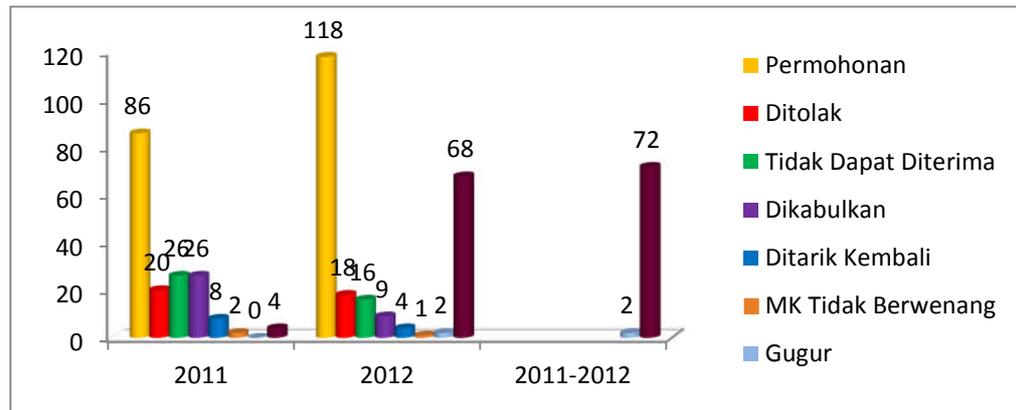
5. **Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan**

Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam periode Januari - Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Permohonan/Tahun	Jumlah Permohonan
1	Permohonan yang diterima pada Tahun 2010 yang diputus pada Tahun 2012	8 Permohonan
2	Permohonan yang diterima pada Tahun 2011 yang diputus pada Tahun 2012	29 Permohonan
3	Permohonan yang diterima sampai dengan Desember 2012	118 Permohonan

1) Rekapitulasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

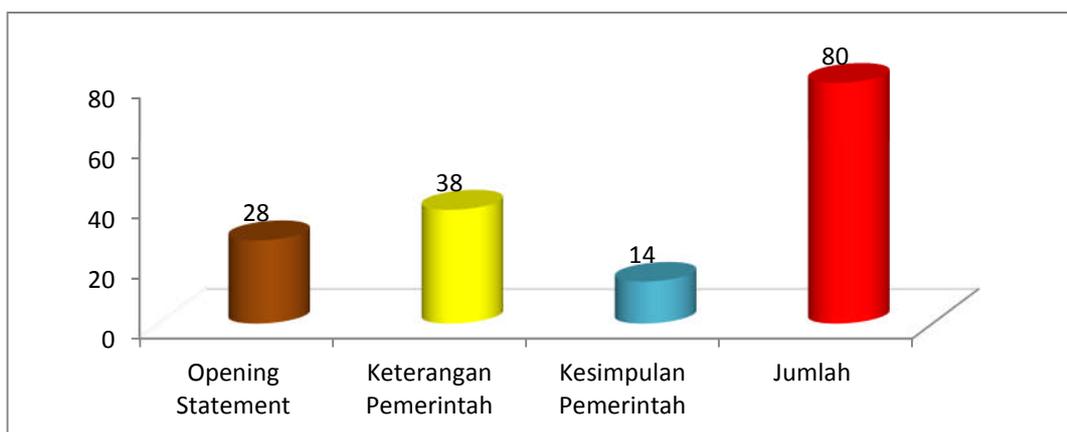


2) Rekapitulasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian sebanyak 71 Undang-Undang.

1) Menyusun Keterangan Pemerintah, *Opening Statement* dan Kesimpulan Pemerintah Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang ditangani pada Tahun 2012 yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

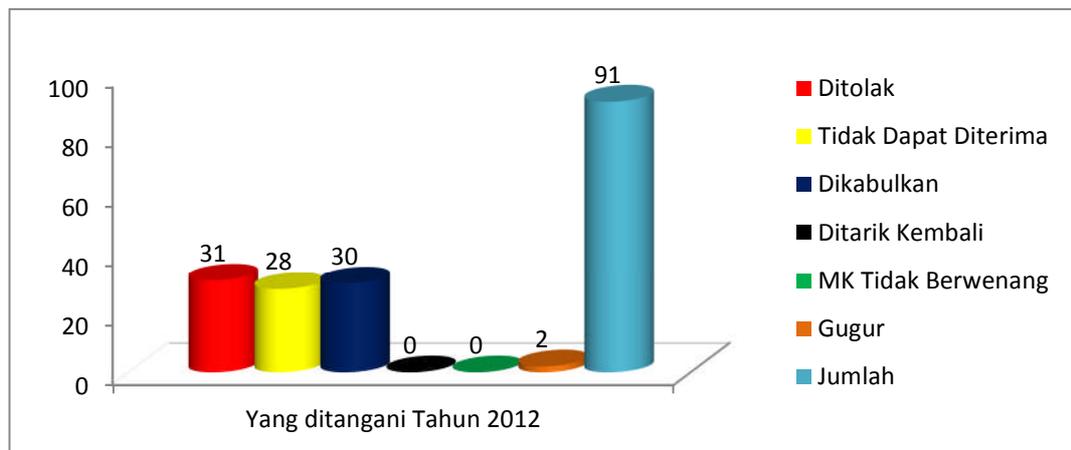
- 1) Keterangan pemerintah yang dikerjakan pada tahun 2012 sebanyak 38 permohonan.
- 2) *Opening Statement* sebanyak 28 permohonan.
- 3) Kesimpulan Pemerintah sebanyak 14 permohonan.

Berikut kami sajikan grafik penyusunan *Opening Statement*, Keterangan Pemerintah, dan Kesimpulan Pemerintah Tahun 2012:



- 4) Menyusun Jawaban Pemerintah 10 permohonan dan *legal Opening* 10 permohonan.
- 5) Menyusun telaahan terhadap berbagai permasalahan yang di tugaskan pimpinan kepada Direktorat Litigasi Perundang-undangan sebanyak 22 telaahan.
- 6) Membuat laporan putusan Mahkamah Kontitusi yang diputus tahun 2012 sebanyak 92 permohonan.

Berikut kami sajikan grafik Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditangani pada Tahun 2012:



6. Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah

- a) Pemetaan Peraturan Daerah di 8 provinsi.
- b) Kegiatan Publikasi

Adapun Peraturan Daerah yang dimuat dalam Sistem Informasi Peraturan Daerah untuk Tahun 2012 berjumlah 1972 Peraturan Daerah, yang diperoleh dari hasil kegiatan Pemetaan Peraturan Daerah, kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Per undang-undangan dan sumber lainnya.

1) Subdirektorat Wilayah I

Hasil yang dicapai tahun 2012 untuk Subdit Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I adalah:

a. Kegiatan mediasi dan konsultasi

1). Mediasi

Kegiatan mediasi yang telah dilaksanakan 10 kegiatan.

2). Konsultasi

Kegiatan konsultasi dilakukan melalui 2 cara yaitu konsultasi langsung dan konsultasi tertulis. Konsultasi langsung dilakukan sebanyak 57 dan konsultasi tertulis dilakukan dengan menerima permintaan untuk mengkaji

rancangan peraturan daerah, permasalahan hukum di daerah, atau pemberian pendapat hukum sebanyak 54 kegiatan.

b. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah

Untuk kegiatan kajian dan inventarisasi peraturan daerah untuk wilayah I sebanyak 19 daerah telah dijalankan.

c. Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Serang - Banten yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Oktober 2012.

2) Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II

Hasil yang dicapai pada kegiatan tahun 2012 untuk Subdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II adalah:

a) terinventarisirnya data peraturan daerah berdasarkan kegiatan kajian dan inventarisasi Perda sebanyak 188 perda untuk tahun 2011 dari 15 kabupaten/kota;

b) tersusunnya hasil kajian dari 188 perda dari kegiatan Kajian dan Inventarisasi Perda;

c) Terlaksananya kegiatan mediasi dan konsultasi pada 7 Provinsi, Kabupaten/Kota;

3) Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III

Hasil yang dicapai pada kegiatan tahun 2012 untuk Subdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III adalah:

a) Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan melalui metode inventarisasi Peraturan Daerah Tahun 2011 ke 9 Kabupaten/Kota.

b) Kegiatan penerimaan kunjungan mediasi dan konsultasi sebanyak 80 kali.

c) Kegiatan mediasi yang dilakukan berdasarkan atas permintaan pemerintah provinsi/kab/kota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan sebanyak 6 kali.

d) Bimbingan Teknik Perancangan Peraturan Daerah dilaksanakan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 - 21 September 2012.

e) Permintaan Tanggapan Tertulis sebanyak 9 buah.

Bidang Administrasi Hukum Umum

1. Pelayanan Jasa Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial

Capaian kinerja program kegiatan terkait dengan pelayanan publik khususnya pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial sebagai berikut:

a. Program Kegiatan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas

Pada tahun 2012 kondisi untuk kegiatan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas sebagai berikut: Persetujuan pemakaian Nama Perseroan Terbatas oleh Menteri sesuai dengan peraturan maksimal 3 (tiga) hari kerja, namun pada kenyataannya persetujuan pemesanan nama Perseroan Terbatas melebihi apa yang ditetapkan oleh peraturan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemeriksaan yang semi manual dan masih di dominasi oleh subjektifitas pemeriksa (korektor). Kinerja pelayanan menjadi rendah karena banyak komplain dari masyarakat.

Sedangkan program kegiatan yang akan dicapai untuk kegiatan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas pada Tahun 2013 sebagai berikut: Tahun 2013 akan diimplementasikan pemesanan nama berbasis IT dengan sistem User Choice. Masyarakat dapat memesan nama Perseroan Terbatas melalui website SABH dengan *Term and Condition* yang telah ditetapkan. Masyarakat tidak bisa menggunakan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar yang identik, mesin akan langsung menolak (PT. Sejahtera Abadi dengan PT Sedjahtera Abadi, PT Sejahtera Abadi , PT Sejahtera Abaddi). Dalam pemesanan nama melalui website masyarakat sudah diberitahukan resiko penggunaan nama yang mirip (sesuai dengan *Term and Condition*) dengan resiko akan dibatalkan apabila pemilik nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar keberatan terhadap penggunaan nama tersebut. (PT. Sejahtera Abadi Makmur dengan PT. Sejahtera Abadi Sentosa Jaya).

Pemesanan nama diberikan waktu maksimum 48 jam setelah nama disetujui dan harus membayar ke bank persepsi sebelum batasan waktu tersebut. Setelah dilakukan pembayaran ke bank persepsi pemesanan nama harus menggunakan nama Perseroan Terbatas tersebut maksimal 60 hari setelah persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak digunakan maka nama tersebut dapat digunakan oleh pihak lain.

b. Program Kegiatan Pengesahan Menteri Pendirian Perseroan Terbatas Maksimal 1 (satu) hari

Pada tahun 2012 kondisi untuk kegiatan Pengesahan Menteri Pendirian Perseroan Terbatas Maksimal 1 (satu) hari yaitu: Semangat pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha sampai saat ini belum dapat dicapai secara maksimal.

Beberapa kali perubahan prosedur telah dilakukan termasuk perubahan jangka waktu dari 90 hari menjadi 60 hari (tahun 2009), lalu dipersingkat menjadi 30 hari (2009), setelah itu menjadi 14 hari (2010), dan terakhir menjadi 7 hari (2011). Perubahan lainnya yang telah dilakukan adalah memotong prosedur yang tidak perlu untuk menghindari lingkaran pengurusan yang tak berujung. Perubahan tersebut pada dasarnya sudah memberikan dampak yang signifikan kepada dunia usaha dengan indeks peringkat kemudahan berusaha dari World Bank IFC yang meningkat. Namun hal tersebut masih perlu diperbaiki terus karena negara lain terus memperbaiki sistem pendaftaran usahanya sehingga posisi Indonesia setiap tahun menjadi turun peringkat.

Sedangkan program kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2013 adalah dengan Pengesahan Menteri Pendirian Perseroan Terbatas Maksimal 1 hari akan memberikan dampak kepada pelayanan publik yang lebih baik dan kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.

2. Administrasi Pelayanan Notariat

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan publik khususnya pelayanan jasa hukum bidang notariat. Sampai tahun 2011 setiap Notaris yang akan diangkat wajib mengikuti pelatihan SABH yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan pembebanan biaya pelatihan yang dikenakan oleh INI dengan alasan pembinaan anggota luar biasa INI. Akibat adanya permasalahan internal dalam kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia maka pembinaan anggota luar biasa dan pelatihan Notaris pada tahun 2012 tidak terlaksana. Sehingga kinerja pelayanan publik menjadi terganggu dan implementasi peraturan perundang-undangan tidak tercapai.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013 adalah program kegiatan Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Gratis untuk Calon Notaris di 8 (delapan) kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Makassar, Medan, Batam.

Agar kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik dan amanah peraturan perundang undangan dapat dilaksanakan, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melaksanakan sendiri pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut dengan menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan peserta tidak dipungut biaya alias Gratis.

3. Pelayanan Surat Wasiat dan Legalitas Kurator/Pengurus

Pada pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerjanya sebesar 90%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar

136,05% dengan target 73,5%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Perdata khususnya pada pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus berlangsung dengan cukup baik. Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan publik khususnya pemberian surat keterangan wasiat dari notaris dan SK pengangkatan kurator/pengurus yang diterbitkan.

4. Masyarakat Yang Memiliki Status Kewarganegaraan

Program kegiatan pada tahun 2012 antara lain:

- a. Memberikan legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4.030 Warga Negara Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, yang tergolong dalam Pendatang Asing Tanpa Identitas (PATI). Pemberian legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia ini bertujuan untuk mencegah Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya (*Stateless*) dan menjadi tanpa kewarganegaraan (*Apatride*) di Malaysia selama 30 (tiga puluh) hari, dimulai sejak tanggal 11 Maret 2012 dan akan selesai pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Johor Bahru, Pahang dan Segamat serta Melaka Malaysia.
- b. Memberikan legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4.541 Warga Negara Indonesia di Tawau, Malaysia pada tanggal 14 November-02 Desember 2012.
- c. Seminar Lokakarya Refleksi 6 (enam) Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 15-17 Oktober 2012.

5. Proses Pemberian Status Badan Hukum Partai Politik

Program kegiatan pada tahun 2012 antara lain diadakannya Seminar Lokakarya Penguatan Kelembagaan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi diselenggarakan di 3 Kota yaitu:

- a. Gedung Koesnadi Hadjasoemantri, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila pada tanggal 27-29 September 2012.
- b. Rektorat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang bekerja sama dengan LPPM UIN Malang pada tanggal 8-10 Oktober 2012.
- c. Aula Terapung Universitas Indonesia, Depok bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik UI pada tanggal 11-13 Oktober 2012.

6. Pendapat Hukum dibidang Grasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima 2 (dua) berkas Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dari kantor Kementerian Sekretaris Negara antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/G tahun 2012 Tanggal 21 Januari 2012. a.n. Sdr. Sa'rimo dkk sebanyak 7 Terpidana.

7. Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi

Program kegiatan yang telah dicapai Tahun 2012 antara lain:

- a. Penandatanganan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka percepatan Pemberantasan Korupsi.
- b. Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Perancis dalam rangka Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA).
- c. Perundingan Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Pemerintah Vietnam.
- d. Pelaksanaan ASEAN Senior Office Meeting di Bandung tanggal 5-7 November 2012 dengan output membuat standar form dalam rangka Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi.

Senior Official Meeting on Mutual Legal Assistance Treaty (SOMMLAT) sebagai pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat senior negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang khusus membahas mengenai tindak lanjut Perjanjian bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty/ASEAN MLAT). Tujuan penyelenggaraan *6th Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in the Criminal Matters* adalah untuk meningkatkan kinerja para penegakan hukum dalam memberantas kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara yang berwenang dalam hal pencegahan, penyidikan dan penuntutan melalui Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

- e. Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Kasus Pesawat Sukhoi oleh Pemerintah Rusia.
 - f. Forum Negosiasi Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi diselenggarakan di Nusa Dua, Bali tanggal 26-28 Juni 2012. Forum ini dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai sistem hukum MLA dan Ekstradisi di kedua negara.
- #### 8. Penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, Instansi Internal Kementerian Hukum dan HAM, Permohonan Perorangan, Serta Insidentil)

Program kegiatan yang menonjol tahun 2012 yaitu kegiatan penyelesaian pengelolaan dan pengolahan sidik jari Warga Negara Indonesia (WNI) di Johor Bahru Malaysia yang merupakan sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengambilan sidik jari, pengamatan dan penelitian sidik jari yang dapat digunakan sebagai data pendukung dalam pengesahan/legalisasi kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Pengelolaan Sidik Jari Warga Negara Indonesia di Malaysia selama 30 hari dimulai sejak tanggal 11 Maret 2012 dan akan selesai pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Johor Bahru, Pahang dan Segamat serta Melaka Malaysia, Jumlah Warga Negara Indonesia di Malaysia yang terlayani dalam pengambilan sidik jari sebanyak 4.018 orang.

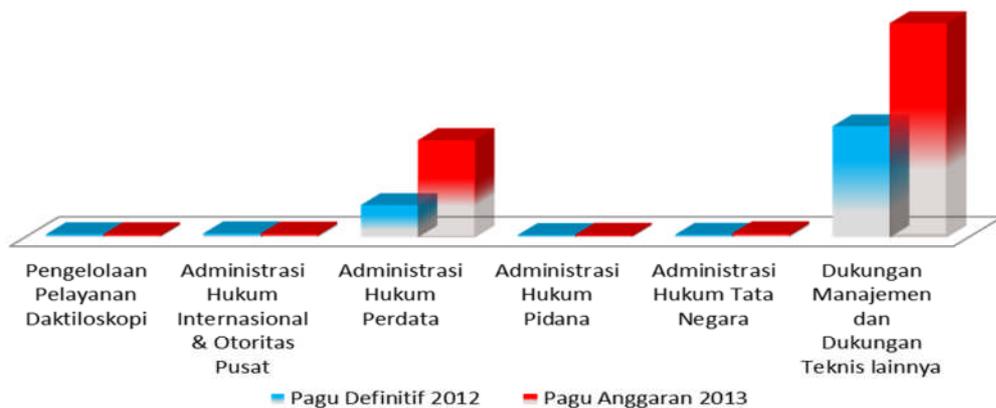
9. Akuntabilitas Keuangan

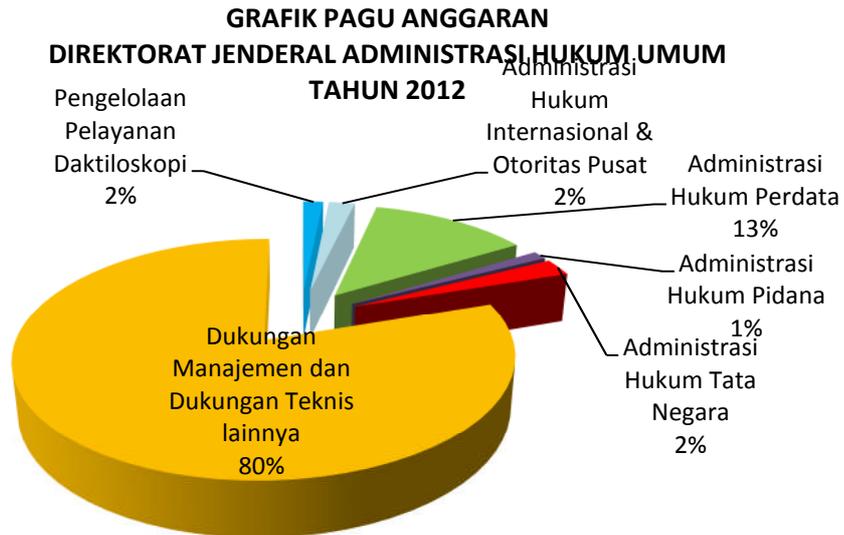
Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Nomor 0008/013-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Maret 2012. DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh dukungan anggaran pada tahun 2012 sebesar **Rp.93.995.228.000,-**. Dengan adanya penambahan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maka menjadi sebesar **Rp.170.669.730.000,-** Dengan perincian sebagai berikut:

No	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2012	Pagu Anggaran & PNBP 2012
	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	93.995.228.000	170.669.730.000
1	1571	Administrasi Hukum Daktiloskopi	1.965.298.000	2.695.270.000
2	1572	Administrasi Hukum Internasional & Otoritas Pusat	2.475.900.000	3.513.034.000
3	1573	Administrasi Hukum Perdata	19.472.000.000	21.469.019.000
4	1574	Administrasi Hukum Pidana	1.574.000.000	2.020.974.000
5	1575	Administrasi Hukum Tata Negara	1.727.996.000	4.122.600.000
6	1576	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	66.780.034.000	136.848.833.000

Grafik RKA-KL
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

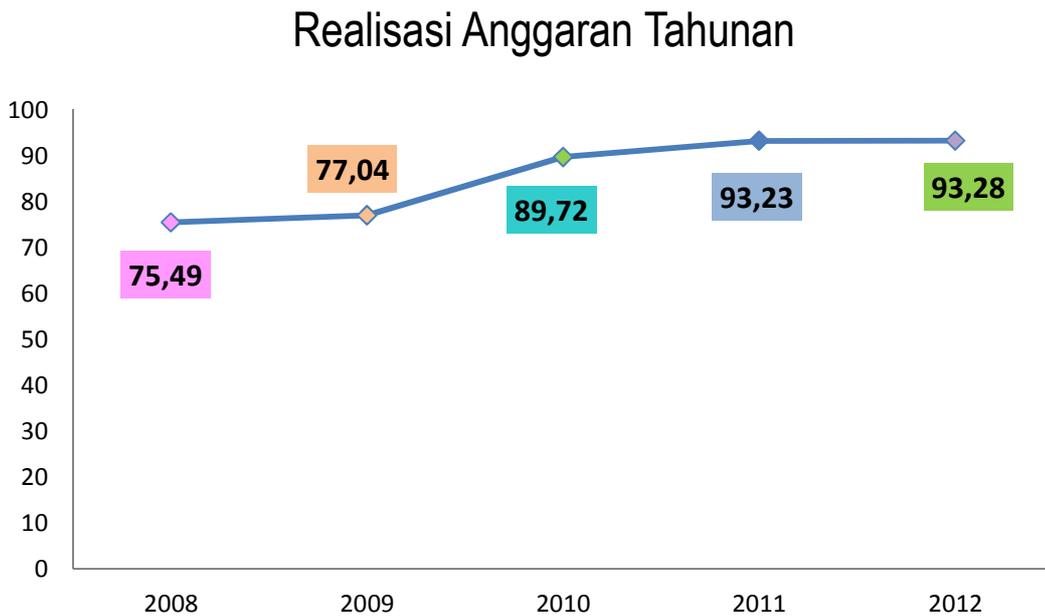




Dari gambaran alokasi anggaran tersebut, terlihat bahwa Administrasi Hukum Daktiloskopi memperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu Rp.2.695.270.000,- dengan persentase 2%, Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat memperoleh alokasi anggaran yaitu Rp.3.513.034.000,- atau persentase sekitar 2%, Administrasi Hukum Perdata memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.21.469.019.000,- dengan persentase 13%, Administrasi Hukum Pidana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.2.020.974.000,- dengan persentase 1%, Administrasi Hukum Tata Negara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.4.122.600.000,- atau persentase sekitar 2% sedangkan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu Rp.136.848.833.000,- dengan persentase 80% dari total alokasi anggaran. Sedangkan dari realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari – 31 Desember) Tahun 2012 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

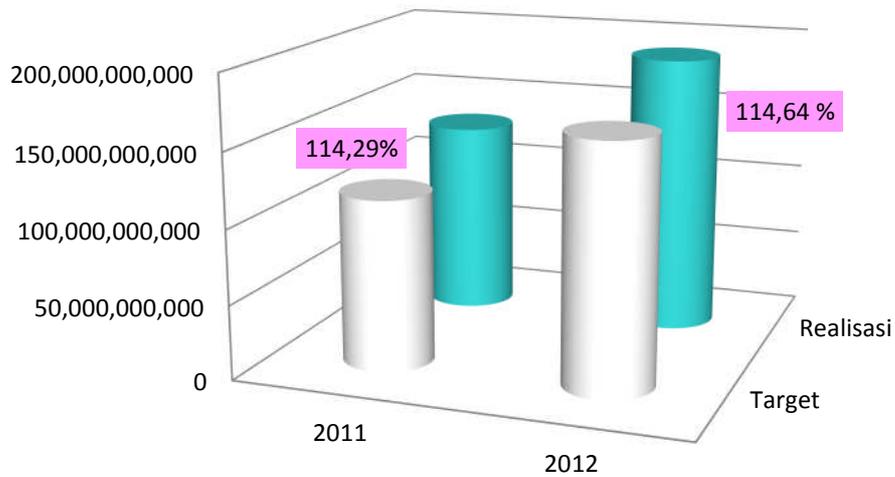
No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1.	Administrasi Hukum Daktiloskopi	2.695.270.000	2.423.953.111	89,93%
2.	Administrasi Hukum Internasional & Otoritas Pusat	3.513.034.000	2.827.633.930	80,49%
3.	Administrasi Hukum Perdata	21.469.019.000	21.109.554.954	98,33%
4.	Administrasi Hukum Pidana	2.020.974.000	1.384.660.822	68,51%
5.	Administrasi Hukum Tata Negara	4.122.600.000	3.450.666.852	83,70%
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	136.848.833.000	128.007.148.755	93,54%
Jumlah		170.669.730.000	159.203.618.423	93,28%

Tabel Persentase Tingkat Realisasi/Capaian Anggaran Tahun 2012



Dari grafik tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan dapat dikategorikan cukup baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2012 belum mencapai 100% yaitu sebesar 93,28%, namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2012 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Target Penerimaan dan Realisasi PNBP



Target Pagu anggaran Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp.165.156.556.000,-. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.189.328.585.595,- atau dengan persentase sekitar 114,64%.

Bidang Pemasarakatan

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan

a. Realisasi Anggaran Ditjen Pemasarakatan T.A. 2012 menurut jenis belanja (per 10 Desember 2012)

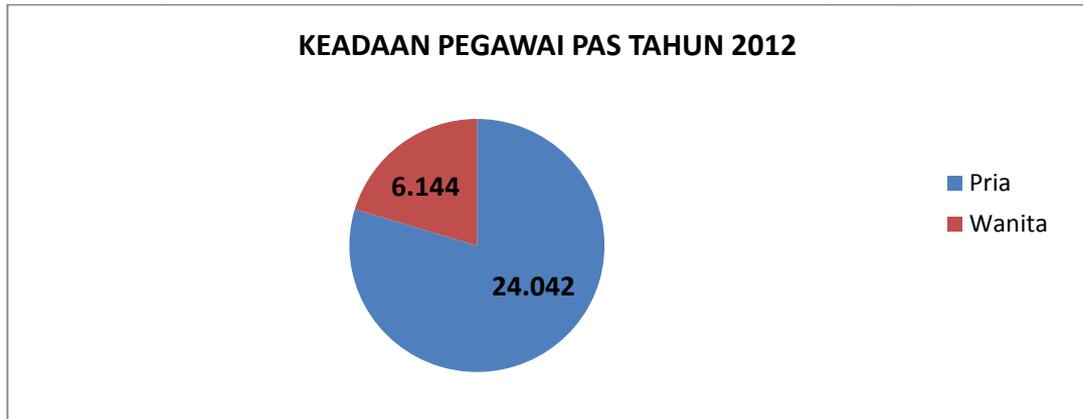
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	25.961.211.000	23.506.152.658	2.455.058.342	90,54%
Belanja Barang	27.787.252.000	20.925.755.109	6.861.496.891	75,31%
Belanja Modal	23.474.075.000	7.674.450.950	15.799.624.050	32,69%
Jumlah	77.222.538.000	52.106.358.717	25.116.179.283	67,48%

Realisasi Anggaran Ditjen Pemasarakatan Tahun 2012 Menurut Kegiatan (per 10 Desember 2012)

Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	77.222.538.000	58.411.543.975	18.810.994.025	75,64%
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	2.513.542.000	2.123.433.450	390.108.550	84,47%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Humas, Database, dan Kerjasama (Informasi dan Komunikasi)	1.085.500.000	1.047.002.039	38.497.961	96,45%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan	1.500.000.000	1.283.647.565	216.352.435	85,57%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana	1.109.900.000	965.840.535	144.059.465	87,02%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	990.000.000	979.563.500	10.436.500.	98,94%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1.300.000.000	1.170.053.370	129.946.630	90%
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi di Lingkungan Ditjen Pemasarakatan	68.723.596.000	50.842.003.516	17.881.592.484	73,45%

b. Pemetaan Kebutuhan pegawai Pemasarakatan

Jumlah pegawai pemasarakatan saat ini adalah 30.186 orang dengan perincian :



Secara kuantitas jumlah tersebut masih mengalami kekurangan. Untuk mencapai kondisi ideal jumlah pegawai pemasarakatan, maka dibutuhkan sebanyak 14.719 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

KEBUTUHAN RIIL PEGAWAI									Total Keb
SLTA Sederajat (SMA / MA / SMEA)	STM			D3		S1		Lain-Lain	
	Listrik	Msn	Bgnn	Perawat	Komp	Dokter Umum	Dokter Gigi		
9,666	728	673	617	623	1,014	286	180	932	14,719

- c. Pemetaan dan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan
- d. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- e. Penyusunan Harga Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan teknis pemasarakatan.
- f. Penyusunan RKA-KL Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasarakatan TA. 2013.
- g. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang
- h. Pedoman Sistem Klasifikasi akses dan keamanan arsip dinamis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i. Penertiban aset Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- j. Pengadaan barang dan jasa Tahun 2012.
- k. Rekonsiliasi Simak Barang Milik Negara.
- l. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam bidang mutasi, pemberhentian dan pension serta umum kepegawaian. .
- m. Aseessment Profil Petugas Pemasarakatan.
- n. Penyusunan Analisa Jabatan.
- o. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai pemasarakatan.

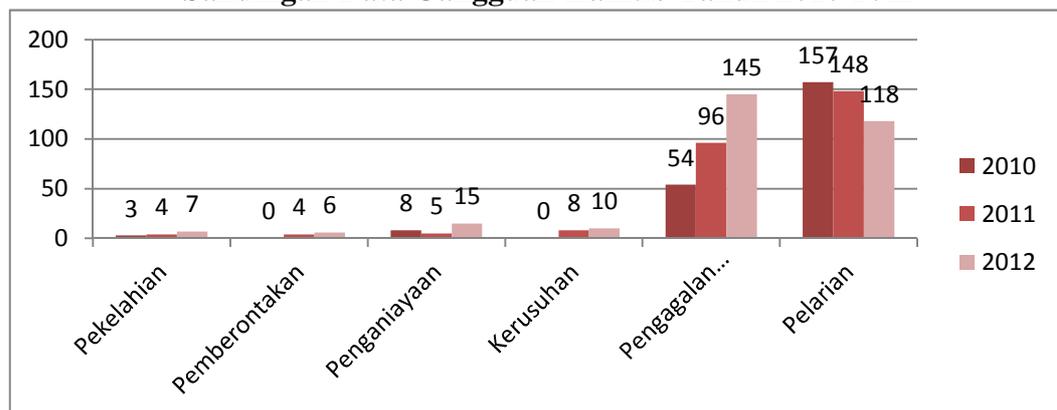
- p. Penyusunan sasaran kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- 2. Direktorat Keamanan Dan Ketertiban

Pada Tahun Anggaran 2012 Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban memperoleh alokasi anggaran melalui DIPA Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebesar Rp.1.300.000.000,- , adapun capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

 - a. Prosentase Rutan dan Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan untuk tahun 2012 ditargetkan 15%. dari jumlah Rutan dan Lapas yang diidentifikasi sebanyak 70 unit ditemukan sebanyak 52 unit atau 67,89 % dari keseluruhan yang diidentifikasi telah memenuhi standar hunian dan keamanan, sedangkan sebanyak 17 unit atau 32,11 % masih memerlukan pembenahan. dari sebanyak 52 unit Rutan dan Lapas yang telah memenuhi standar hunian dan keamanan, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Rutan dan Lapas yang mencapai 430 unit, maka dapat dinyatakan bahwa Rutan dan Lapas Yang Memenuhi Standar Hunian dan Keamanan untuk tahun 2012 mencapai 16,2 %.
 - b. Penanganan kasus pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pamasarakatan di UPT Pemasarakatan untuk tahun 2012 sebagai berikut :

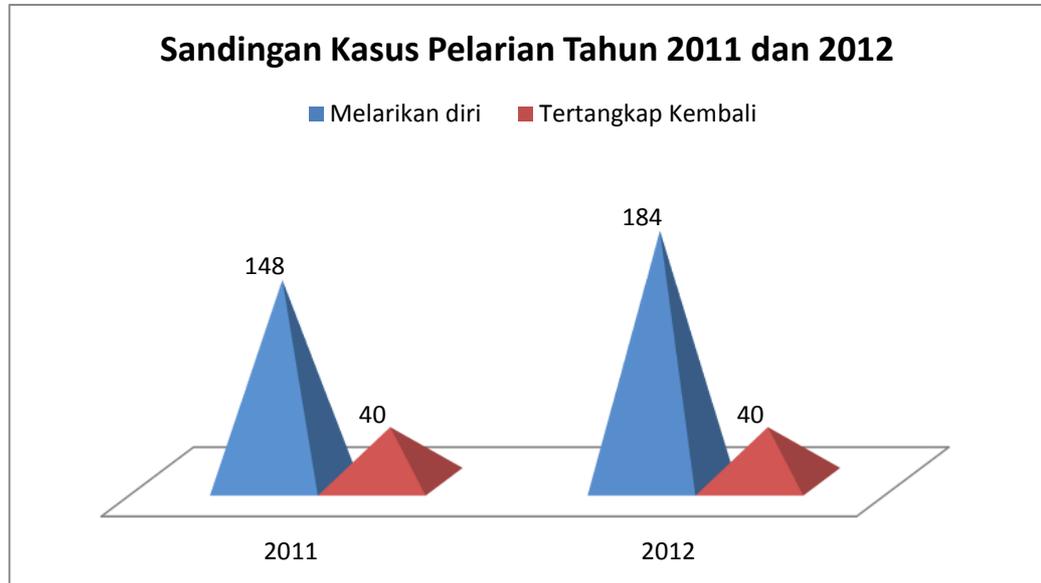
Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah UPT	Jumlah yang Terlibat
Perkelahian	7	6	37
Pemberontakan	6	6	144
Penganiayaan / Kekerasan	15	13	65
Kerusuhan	10	8	26
Penggagalan Narkoba	145	59	Napi = 117 Tah = 62 Petugas = 19 Pengunjung = 30 NN = 7
Pelarian	118	88	184
Lain-lain	16	13	16
Jumlah	317	193	707

Sandingan Data Gangguan Kamtib Tahun 2010-2012



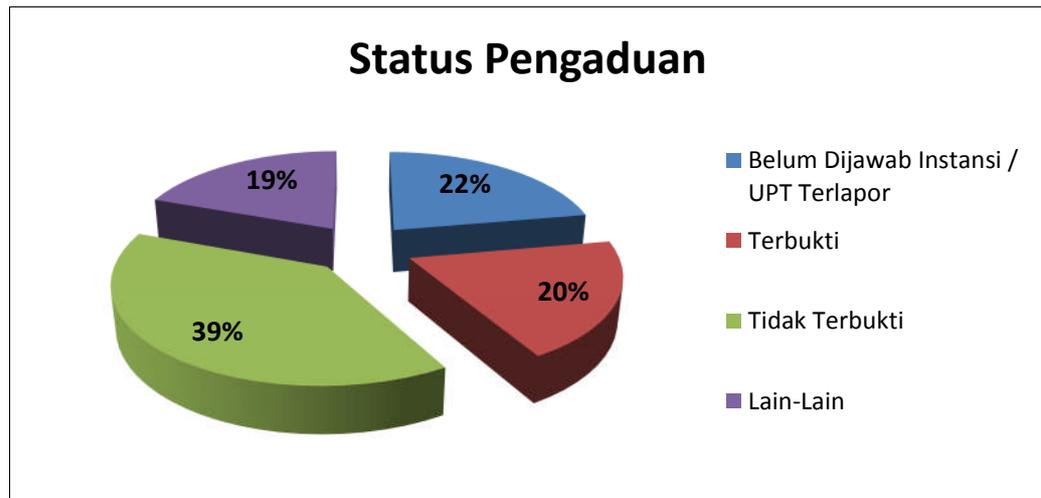
Data Kasus Pelarian 2012 per 10 Desember 2012

Keadaan Penghuni	Narapidana	Tahanan	Jumlah
Melarikan diri	143	41	184
Tertangkap Kembali	28	28	40
Prosentase Tertangkap Kembali	19 %	29 %	22 %



- c. Telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat maupun tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pengaduan				Selesai	JML
		Belum Dijawab Instansi / UPT Terlapor	Sudah Ditindaklanjuti				
			Terbukti	Tidak Terbukti	Lain-Lain		
1.	Januari	-	3	4	1	8	8
2.	Februari	2	2	4	2	8	8
3.	Maret	-	-	-	2	2	2
4.	April	4	-	4	3	7	11
5.	Mei	1	2	2	-	4	5
6.	Juni	2	3	3	3	9	11
7.	Juli	2	2	6	-	8	10
8.	Agustus	1	1	3	3	7	8
9.	September	-	1	-	-	1	1
10.	Oktober	4	-	1	-	1	5
11.	Nopember	-	-	1	-	1	1
12.	Desember						
Jumlah		16	14	28	14	56	72



- d. Telah menindaklanjuti pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemsayarakatan di UPT Pemsayarakatan

Tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemsayarakatan di UPT Pemsayarakatan tahun 2012 ditargetkan 50%, realisasi sebanyak 190 orang seluruh Indonesia yang terkena Hukuman Disiplin sebanyak 140 orang. Kategori penindaklanjutan hukuman disiplin sebanyak 140 orang adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman ringan : 60 orang
- 2) Hukuman sedang : 40 orang
- 3) Hukuman berat : 40 orang

- e. Sosialisasi Standarisasi Sarana Hunian pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan Kegiatan dilaksanakan di Wisma Industri tanggal 21 s/d 23 Februari 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang kepala Lapas/Rutan/Cabang Rutan seluruh Indonesia.
- f. Bimtek Sarana Hunian dan Keamanan Lapas dan Rutan Kegiatan dilaksanakan di Wisma Industri tgl. 19 s/d 21 Juni 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang kasi administrasi keamanan dan ketertiban dari perwakilan Lapas/Rutan seluruh Indonesia.
- f. Penyusunan Buku Pedoman Standarisasi Sarana Keamanan Buku ini berisi pedoman dalam penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan sarana keamanan di Lapas/Rutan/Cab. Rutan sesuai kondisi objektif masing-masing;
- g. Monitoring dan Evaluasi Standarisasi Hunian pada 5 wilayah.
- h. Kegiatan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Kamtib pada pada 6 wilayah, 1 rutan dan 1 lapas.

- i. Bimbingan Teknis Satgas Pencegahan dan Penindakan Gangguan Kamtib
Kegiatan ini telah memperoleh hasil output :
 - 1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan barang bukti hasil sidak satgas pencegahan dan penindakan gangguan kamtib.
 - 2) Tercapainya kesamaan persepsi dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas satgas pencegahan dan penindakan gangguan kamtib.
 - 3) Adanya regulasi mengenai tugas, struktur organisasi, mekanisme pertanggung jawaban dan pelaporan satgas pencegahan dan penindakan tingkat wilayah dan pusat.
- j. Bimbingan Teknis Pelayanan Pengaduan bagi petugas di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan
Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menerima, menelusuri/investigasi dan klarifikasi pengaduan secara cepat, tepat dan memenuhi harapan semua pihak. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 3 s/d 5 April 2012 di Wisma Industri Puncak – Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang dari perwakilan Lapas/Rutan seluruh Indonesia.
- k. Laporan perjalanan dinas untuk penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan pada 5 wilayah.
- m. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dibidang Keamanan dan Ketertiban pada 7 wilayah.
- n. Bimbingan Teknis Pengawasan Internal Bagi Petugas Pemasarakatan
Peserta dari kegiatan ini sebanyak 31 orang terdiri dari perwakilan para Kepala UPT, Kepala Bidang Keamanan dan ketertiban kanwil, dan Ditjenpas.
- o. Optimalisasi Pelaksanaan Penegakkan Disiplin dan Kode Etik Petugas Pemasarakatan;
- p. Sosialisasi Peraturan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
Pelaksanaan kegiatan di Wisma Industri Puncak – Bogor, Jawa Barat. Materi peraturan yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PW.01.01 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan, Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Pedoman Standarisasi Sarana Hunian dan Keamanan, Layanan Pengaduan, dan Permen Bebas Demi Hukum.



3. Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan Capaian 2012:
 - a. Melaksanakan perawatan dan pelayanan kesehatan untuk narapidana dan tahanan.
 - b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan (Preventif/KIE) kepada 47.737 orang napi/tahanan.
 - c. Melaksanakan pengobatan (Kuratif) kepada 135.267 orang napi/tahanan.

**Keadaan Kesehatan Narapidana Dan Tahanan
(Per 30 Nopember 2012)**

HIV/AIDS	TBC	Hepatitis	Penyakit Pernafasan	Penyakit Pencernaan	Peny. Ginjal & Saluran Kemih	Peny. Susunan Syaraf	Peny. Jantung & Pembuluh Darah	Pykt Kulit	Penyakit Mata	Gangguan Jiwa/Depresi	Peny. Lain	Jumlah
496	691	5	8098	3473	313	787	610	6914	344	52	4329	26.200

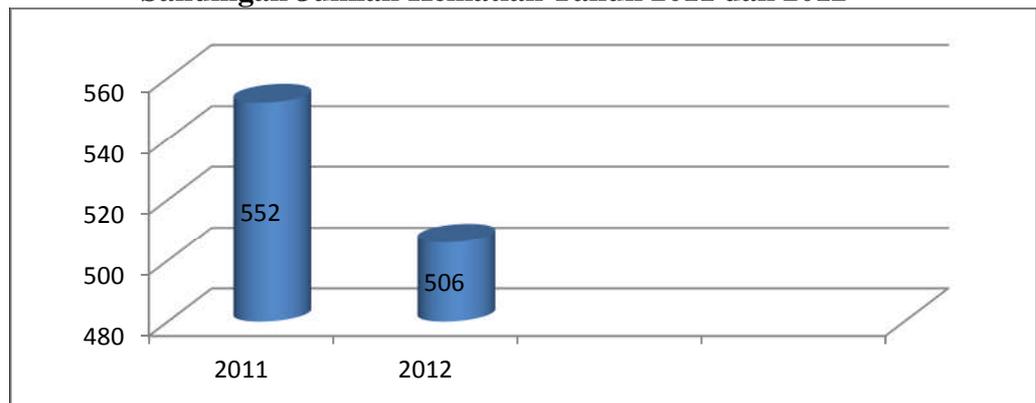
- d. Melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan dan resiko tinggi :
 - 1) Melaksanakan perlindungan terhadap 7.052 kelompok rentan termasuk perlindungan terhadap 38 bayi, 13 orang ibu hamil, dan 28 orang ibu menyusui
 - 2) Melaksanakan perlindungan kepada 2.128 orang tahanan/narapidana resiko tinggi (HIV, TB, Hepatitis, IMS, jantung dan kanker)
- e. Melaksanakan kegiatan rawat inap kepada 6.599 tahanan/narapidana dengan perincian sebagai berikut :

No	WBP	Rawat Inap	
		Dalam Lapas	Luar Lapas
1.	Narapidana	4.233 orang	1.501 orang
2.	Tahanan	2.666 orang	329 orang
	Jumlah	6.899 orang	1.830 orang

Data Kematian Tahun 2012

Status	Jumlah Kematian
Narapidana	374 orang
Tahanan	132 orang
Jumlah	506 orang

Sandingan Jumlah Kematian Tahun 2011 dan 2012



- f. Penyusunan buku Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Anak, Wanita, lansia dan WBP/Tahanan dengan kondisi sakit permanen di Lapas/Rutan
- g. Workshop Perawatan kesehatan Anak Didik Pemasarakatan di lapas/Rutan
- h. Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan, Perawatan Pakaian , Perlengkapan Tidur Narapidana dan tahanan dan Anak Didik Pemasarakatan
- i. Sosialisasi Penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan , Perawatan Pakaian , Perlengkapan Tidur Narapidana, Tahanan dan Anak Didik Pemasarakatan
- j. Penyusunan Panduan Bimtek Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana, tahanan dan anak Didik Pemasarakatan di Lapas/Rutan
- k. Penyusunan Buku Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan Narapidana, tahanan dan Andikpas
- l. Penyusunan Buku Pedoman Umum Sanitasi Lingkungan di Lapas/Rutan
- m. Penyusunan Modul Bimtek Program Pelayanan Kesehatan dan Perawatan
- n. Workshop Pelayanan Kesehatan bagi petugas kesehatan
- o. Bimtek dan Sosialisasi Buku Pedoman Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
- p. Monitoring dan Evaluasi Kesehatan dan Perawatan Kesehatan
- q. Workshop Penyelenggaraan Progran TR
- r. Peningkatan Kapasitas Pokja Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Napza
- s. Revisi Buku Renstra Penanggulangan TB di Lapas
- t. Pemeriksaan Rontgen bagi pasien TB di Lapas/Rutan
- u. Penyusunan Juklak Juknis IO
- v. Pelatihan TB DOTS bagi dokter dan perawat di Lapas/Rutan
- w. Kegiatan Supervisi dan Monev Program Pengendalian TB di Lapas/Rutan wilayah Sulawesi Utara
- x. Pelatihan Kader Kesehatan Bagi Petugas Lapas/Rutan
- y. Penyuluhan KIE Bagi Petugas UPT di 39 Lapas/Rutan di 25 Propinsi
- z. Pelatihan Konselor VCT dan Adiksi Bagi Petugas Lapas/Rutan di 25 Propinsi
- aa. Pelatihan Administrasi Keuangan dan Pencatatan pelaporan Bagi Petugas lapas/Rutan di 25 Propinsi
- bb. Sosialisasi Program Getting to Zero bagi Kepala Divisi pamasarakatan dan Kalapas/Karutan di 25 Propinsi
- cc. Pelatihan Konselor Adiksi bagi 39 petugas Lapas/Rutan
- dd. Pelatihan IMAI bagi 39 petugas Lapas/Rutan
- ee. Pelatihan Laboratorium bagi 39 petugas Lapas/Rutan

- ff. Pelaksanaan Layanan VCT di 120 (seratus dua puluh) Lapas/Rutan di 25 (dua puluh lima) propinsi
 - gg. Tersedianya Buku Saku Kader Kesehatan Lapas dan Rutan (GF SSF)
4. Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Capaian 2012:
- a. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran Tahun Anggaran 2012

Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Penyusunan Buku Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Terhadap Basan dan Baran.	70.084.000,-	69.660.000,-	424.000,-	99,40%
Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Penerimaan dan Penilaian Basan Baran.	178.457.000,-	178.016.000,-	441.000,-	99,75%
Kegiatan Pemetaan Bidang Penerimaan dan Penilaian Basan dan Baran di Rupbasan.	104.556.000,-	104.552.500,-	3500,-	99,99%
Monitoring dan Evaluasi (MONEV) di Rupbasan.	140.240.000,-	139.823.700,-	416.300,-	99,70%
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengamanan dan Pemeliharaan Basan dan Baran	148.257.000,-	148.254.500,-	2.500,-	99,99%
Kegiatan Penyusunan Dokumen (SOP) Pengamanan Basan Baran.	83.268.000,-	82.894.700,-	373.300,-	99,55%
Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Basan Baran.	108.802.000,-	107.307.000,-	1.495.000,-	98,62%
Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pengamanan Basan Baran.	35.472.000,-	34.624.000,-	848.000,-	97,60%
Kegiatan Penyusunan Modul Peningkatan Teknis Pengawasan Basan Baran.	62.074.000,-	62.019.000,-	55.000,-	99,91%
Penyusunan SOP Pengawasan Basan Baran di Rupbasan.	58.790.000,-	57.514.000,-	1.276.000,-	97,82%

- b. Pemetaan Kebutuhan pegawai Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran. Jumlah pegawai Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran saat ini adalah 30 orang. Secara kuantitas jumlah tersebut masih mengalami kekurangan. Untuk mencapai kondisi ideal jumlah pegawai Direktorat Bina Pengelolaan Basan dan Baran , maka dibutuhkan sebanyak 12 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

No	Standar Kompetensi Akademik	Jumlah
1.	S1 Hukum	3
2.	S1 Sastra Inggris	1
3.	S1 Komputer	3
4.	D3 Komputer	3
5.	STM Listrik	1
6.	STM Bangunan	1
Jumlah		12

c. Pengklasifikasian Basan dan Baran seluruh Indonesia :

No	Jenis	Tingkat Pemeriksaan					Jumlah
		Kepolisian	Kejaksaan	PN	PT	MA	
1	Benda Sitaan	65.190	596.561	1.449	6	138.401	801.587
2	Barang Rampasan	-	-	1.583	34	49	1.626
3	BTB	-	-	-	-	-	478
Jumlah		65.190	596.561	3.032	40	187.401	803.691

Ket :

Benda Sitaan (Proses Sidang)

Barang Rampasan (Sudah Inkrah)

BTB : Barang Tidak Bertuan

- d. Penyusunan buku pedoman tata cara dan teknik identifikasi terhadap basan baran.
 - e. Penyusunan buku pedoman penerimaan dan penilaian basan baran
 - f. Pemetaan bidang penerimaan dan penilaian basan baran
 - g. Monitoring dan evaluasi pengelolaan basan baran di Rupbasan.
 - h. Bimbingan teknis pengamanan dan Pemeliharaan basan baran
 - i. Penyusunan dokumen SOP pengamanan basan baran.
 - j. Penyusunan buku pedoman pengamanan basan baran.
 - k. Penyusunan standarisasi biaya pemeliharaan basan baran.
 - l. Penyusunan modul peningkatan teknis pengawasan basan baran
 - m. Penyusunan SOP pengawasan basan baran di Rupbasan.
5. Direktorat Pembinaan Narapidana Dan Pelayanan Tahanan Capaian 2012 :
- a. Melaksanakan registrasi dan klasifikasi terhadap narapidana dan tahanan seluruh Indonesia.

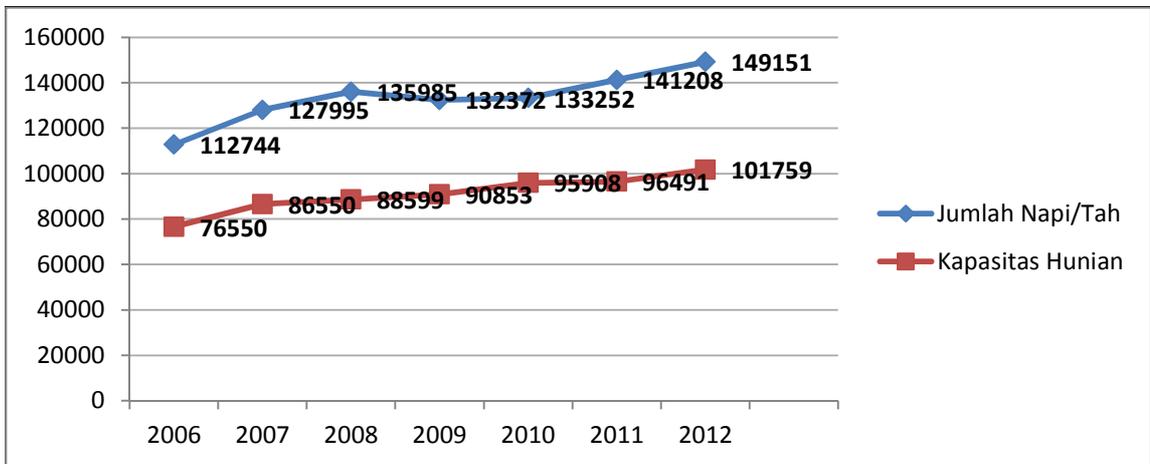
Data Penghuni dan Kapasitas Hunian Tahun 2006-2012

Uraian	Tahun						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (30-11-12)
Penghuni :							
Tahanan Dewasa dan Pemuda	47.121	51.949	54.628	56.083	47.617	48.785	47.538
Tahanan Anak	1.582	2.360	2.966	2.188	1.932	2.201	1.862
Narapidana Dewasa	62.189	71.507	75.447	79.023	79.953	86.905	96.568
Anak Didik	1.852	2.179	2.944	3.540	3.750	3.317	3.183
Jumlah	112.744	127.995	135.985	132.372	133.252	141,208	149.151
Selisih Penambahan Penghuni		15.251	7.990	(3.613)	880	7.956	7.943
Kapasitas	76.550	86.550	88.599	90.853	95.908	96,491	101.759
Selisih Penambahan Kapasitas		10.000	2.049	2.254	5.055	583	5.268

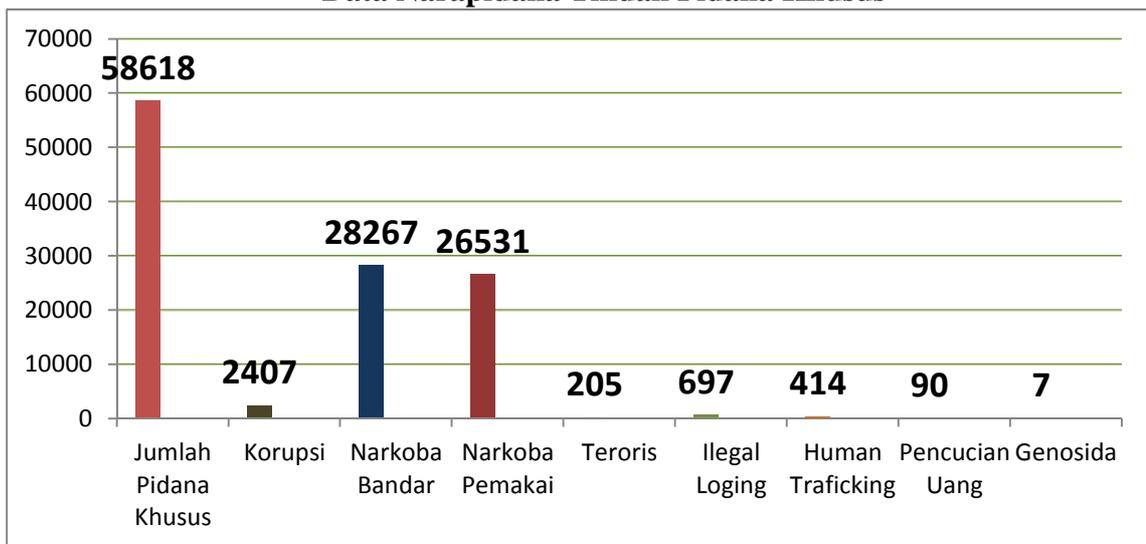


Over Kapasitas		41.445	47.386	41.519	37.344	44,717	47.392
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Grafik Perkembangan Tingkat Hunian dan Kapasitas Lepas/Rutan



Data Narapidana Tindak Pidana Khusus

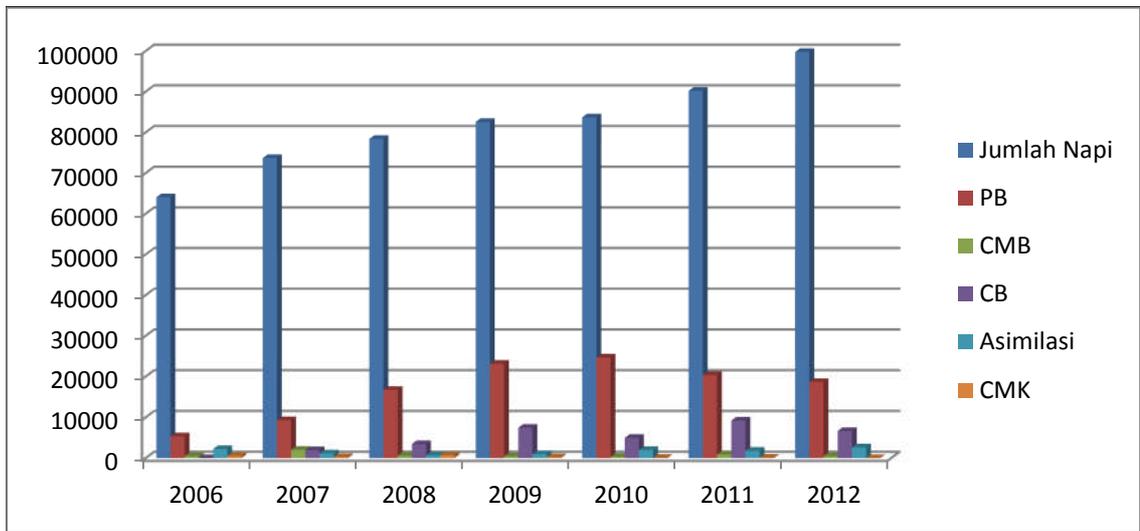


- b. Melaksanakan program reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

Tahun 2006-2012 (Per 30 Nopember 2012)

NO.	Uraian	Tahun						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pembebasan Bersyarat	5.346	9.308	16.728	23.134	24.676	20.347	18.669
2.	Cuti Menjelang Bebas	494	2.044	597	446	310	891	497
3.	Cuti Bersyarat	0	1.962	3.447	7.460	4971	9202	6.647
4.	Asimilasi	2.248	1.168	705	999	2.011	1819	2.635
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga	511	254	705	223	68	100	8
Jumlah		6.351	13.568	21.477	31.263	30.025	31.056	28.456

Grafik Pelaksanaan Program Reintegrasi Tahun 2006-2012



c. Melaksanakan pemberian remisi umum I dan khusus I kepada narapidana.
Tahun 2006-2012 (Per 30 Nopember 2012)

NO	Uraian	Tahun						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Remisi Umum I	50.411	57.251	55.687	54.640	53.612	51.660	56.349
2.	Remisi Khusus I Hari Raya Idul Fitri	45.581	49.944	51.442	47.822	41.408	43.423	48.988
3.	Remisi Khusus I Hari Raya Natal	6.536	7.516	6.803	7.681	7.132	6.110	-
4.	Remisi Khusus I Hari Raya Nyepi	306	355	343	359	333	374	328
5.	Remisi Khusus I Hari Raya Waisak	584	830	756	749	716	521	736
6.	Remisi Khusus I Hari Raya Imlek	0	0	7	11	7	11	11
JUMLAH		103.418	115.896	115.038	111.262	103.208	101.762	106.412

Data Remisi Umum II Dan Remisi Khusus II (Remisi Bebas), (Per 30 Nopember 2012)

No	Uraian	Tahun						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Remisi Umum II	5.730	6.641	5.797	5.232	4.788	3.584	2.246
2.	Remisi Khusus II (Hari Raya Idul Fitri)	2.402	2.373	1.880	1.793	1.415	1.229	793
3.	Remisi Khusus II (Hari Raya Natal)	206	312	221	247	192	170	-
4.	Remisi Khusus II (Hari Raya Nyepi)	17	16	5	12	11	15	5
5.	Remisi Khusus II (Hari Raya Waisak)	24	32	8	17	11	18	3
6.	Remisi Khusus II (Hari Raya Imlek)	0	0	7	0	0	0	0
Jumlah		8.379	9.374	7.918	7.301	4.799.	37.947	3.047

d. Melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas/Rutan.

- 1) Narapidana yang terserap dalam kegiatan bimbingan latihan keterampilan dan bimbingan kerja lingkungan adalah 54.900 orang, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kanwil	UPT	WBP
1	NAD	20	1,743
2	Sumatera Utara	35	1,664
3	Sumatera Barat	20	466
4	Riau	12	692
5	Kep. Riau	7	510
6	Jambi	8	2,115
7	Sumatera Selatan	18	1,331
8	Bangka Belitung	4	461
9	Lampung	13	845
10	Bengkulu	4	1,042
11	Banten	10	4,063
12	DKI Jakarta	7	1,731
13	Jawa Barat	23	5,726
14	Yogyakarta	7	1,386
15	Jawatengah	46	10,122
16	Jawa Timur	38	6,529
17	Kalimantan Barat	12	233
18	Kalimantan Tengah	7	316
19	Kalimantan Selatan	12	287
20	Kalimantan Timur	9	854
21	Sulawesi Utara	2	3,227
22	Gorontalo	13	-
23	Sulawesi Tengah	10	281
24	Sulawesi Selatan	24	2,243
25	Sulawesi Barat	5	138
26	Selawesi Tenggara	6	622
27	Bali	10	1,473
28	NTB	7	218
29	NTT	15	3,473
30	Maluku	13	86
31	Maluku Utara	7	283
32	Papua	9	469
33	Papua Barat	5	271
Jumlah		438	54.900

Per 30 Nopember 2012

Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja industry dan jasa pada tahun 2012

Per 30 Nopember 2012 adalah 6.023 orang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kantor Wilayah	Jumlah UPT	Kegiatan Kerja Industri		Kegiatan Kerja Jasa	
			Jumlah Tenaga Terserap		Jumlah Tenaga Terserap	
			WBP	PEG	WBP	PEG
1	NAD	20	34	0	5	0
2	Sumatera Utara	35	227	10	18	2
3	Sumatera Barat	20	13	4	1	1
4	Riau	12	24	1	7	7
5	Kepulauan Riau	7	33	14	7	3
6	Jambi	8	233	5	31	0
7	Sumatera Selatan	18	97	5	8	8
8	Kep Bangka Belitung	4	51	34	7	3
9	Lampung	13	68	11	8	1

10	Bengkulu	4	33	6	1	0
11	Banten	10	398	11	23	1
12	DKI Jakarta	7	115	8	28	3
13	Jawa Barat	23	548	47	90	22
14	D.I Yogyakarta	7	128	7	28	1
15	Jawa Tengah	46	945	34	103	9
16	Jawa Timur	38	1573	182	72	19
17	Kalimantan Barat	12	29	3	28	3
18	Kalimantan Tengah	7	20	2	8	1
19	Kalimantan Selatan	12	26	5	10	3
20	Kalimantan Timur	9	61	14	35	4
21	Gorontalo	2	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	13	114	16	2	1
23	Sulawesi Tengah	10	14	1	0	0
24	Sulawesi Selatan	24	209	19	22	4
25	Sulawesi Barat	5	13	1	2	0
26	Sulawesi Tenggara	6	28	6	13	3
27	Bali	10	93	8	6	0
28	Nusa Tenggara Barat	7	49	8	18	4
29	Nusa Tenggara Timur	15	128	2	24	2
30	Maluku	13	0	0	3	0
31	Maluku Utara	7	38	5	6	0
32	Papua	9	28	4	8	2
33	Papua Barat	5	21	0	10	0
Total		438	5391	473	632	107
Jumlah Narapidana Yang Terserap Dalam Kegiatan Kerja Industri Dan Jasa : 6.023 orang						

Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja pertanian dan perkebunan pada tahun 2012 Per 30 Nopember 2012 adalah 759 orang dengan perincian sebagai berikut :

No	UPT	Jumlah UPT	Pertanian		Perkebunan	
			WBP	PEG	WBP	PEG
1	NAD	20	6	0	2	0
2	Sumut	35	9	1	3	0
3	Sumbar	20	16	2	0	0
4	Riau	12	6	0	0	0
5	Kepulauan Riau	7	0	0	0	0
6	Jambi	8	16	0	4	0
7	Sumsel	18	2	0	0	0
8	Bangka Belitung	4	14	2	0	0
9	Lampung	13	21	0	7	0
10	Bengkulu	4	12	3	5	0
11	Banten	10	78	4	7	1
12	DKI Jakarta	7	2	0	0	0
13	Jabar	23	64	4	32	0
14	D.I Yogyakarta	7	1	0	1	0
15	Jateng	46	90	1	26	0
16	Jatim	38	90	4	7	1
17	Kalbar	12	24	2	7	0
18	Kalteng	7	11	1	2	0
19	Kalsel	12	19	1	0	0
20	Kaltim	9	14	2	37	0
21	Sulawesi Utara	13	11	3	0	0
22	Gorontalo	2	0	0	0	0

23	Sulawesi Tengah	10	1	0	8	0
24	Sulawesi Selatan	24	36	2	3	0
25	Sulawesi Barat	5	2	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	6	4	0	1	0
27	Bali	10	13	3	2	0
28	NTB	7	2	0	0	0
29	NTT	15	25	1	12	0
30	Maluku	13	0	0	0	0
31	Maluku Utara	7	4	0	0	0
32	Papua	9	0	0	0	0
33	Papua Barat	5	0	0	0	0
Total		438	593	36	166	2
Jumlah Narapidana Yang Terserap Dalam Kegiatan Kerja Pertanian dan Perkebunan : 759 orang.						

2) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja perikanan dan peternakan pada tahun 2012 adalah 707 orang dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Kanwil	Jumlah UPT	Tenaga Kerja Yang Terserap Di Perikanan		Tenaga Kerja Yang Terserap Di Peternakan	
			WBP	PEG	WBP	PEG
1	NAD	20	11	3	14	4
2	Sumatera Utara	35	29	6	32	5
3	Sumatera Barat	20	9	2	0	0
4	Riau	12	8	2	0	0
5	Kep. Riau	7	0	0	2	1
6	Jambi	8	8	4	4	2
7	Sumatera Selatan	18	3	2	6	2
8	Kep. Bangka Belitung	4	8	6	0	0
9	Lampung	13	2	1	3	2
10	Bengkulu	4	22	4	12	4
11	Banten	10	49	4	13	1
12	DKI Jakarta	7	10	2	4	1
13	Jawa Barat	23	50	8	45	8
14	D.I Yogyakarta	7	8	3	3	1
15	Jawa Tengah	46	104	17	36	15
16	Jawa Timur	38	27	9	13	3
17	Kalimantan Barat	12	7	3	2	2
18	Kalimantan Tengah	7	4	2	3	1
19	Kalimantan Selatan	12	1	1	0	0
20	Kalimantan Timur	9	8	3	5	2
21	Sulawesi Utara	13	0	0	9	2
22	Gorontalo	2	0	0	0	0
23	Sulawesi Tengah	10	0	0	1	1
24	Sulawesi Selatan	24	9	4	22	8
25	Sulawesi Barat	5	0	0	2	1
26	Sulawesi Tenggara	6	4	1	6	1
27	Bali	10	15	5	3	2
28	Nusa Tenggara Barat	7	4	1	15	2
29	Nusa Tenggara Timur	15	8	2	20	4
30	Maluku	13	2	1	1	1
31	Maluku Utara	7	8	2	3	2
32	Papua	9	3	1	7	2
33	Papua Barat	5	0	0	0	0
Jumlah		438	421	99	286	80
Jumlah Narapidana Yang Terserap Dalam Kegiatan Kerja Perikanan dan peternakan adalah 707 orang.(per 30 November 2012)						

Melaksanakan pembinaan kepribadian di Lapas/Rutan Jumlah Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian Tahun 2012 Per 30 Nopember 2012

Pembinaan Agama					Olah Raga	Kesenian	Kejar Paket A,B,C	Pramuka
Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha				
45.759	1.291	5.226	410	370	58.086	5.202	83	3.800

- e. Pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada narapidana bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.
 - f. Pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada narapidana bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
 - g. Pelaksanaan Pameran Haisil Karya Narapidana di Gedung SMESCO
 - h. Sosialisasi Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pembinaan di Lapas dan Rutan.
 - i. Penyusunan Modul Pelayanan Tahanan, Penyukuhan Hukum dan Bantuan Hukum.
 - j. Pemetaan Kegiatan Kerja di Lapas/Rutan.
 - k. Bimtek Sistem Aplikasi Registrasi Narapidana dan Tahanan
 - l. Pengadaan Sistem Aplikasi Asimilasi, PB, CMB, dan CB dan pelaksanaan Bimtek.
 - m. Pelaksanaan Tim Pengamat Pemasarakatan Pusat.
 - n. Monitoring dan Evaluasi di bidang Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.
6. Direktorat Informasi Dan Komunikasi Capaian 2012 :
- a. Pengelolaan, pengembangan dan pengamanan jaringan dan data server Ditjen Pemasarakatan sebanyak 3 dokumen.
 - b. Penyusunan Buku Panduan (Manual Book) Pengelolaan Server Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebanyak 1 buah.
 - c. Bimbingan Teknis Operator SDP Modul Lapas dan Rutan sebanyak 117 orang.
 - d. Kegiatan Konferensi Pers dan Peliputan dengan hasil 8 dokumen.
 - e. Penyelenggaraan Kegiatan Pameran dan Publikasi sebanyak 6 pameran.

Data Kegiatan Pameran Dan Publikasi Tahun 2012

No	Pameran	Hari/Tgl	Tempat
1.	Pameran "Kampung Hukum" dalam rangka Laporan Tahunan MA 2012	27-28 Februari '12	Area parkir MA, Jakarta
2.	Pameran UKM Fesyen 7 Aksesoris EXPO ke-4 tahun 2012	Rabu-Minggu 11 -15 April '12	Gd. SME Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta
3.	Pameran Koperasi dan UKM Festival ke-10 tahun 2012	Rabu-Minggu 6 -10 Juni '12	Gd. SME Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta
4.	Pameran Legal Expo dalam rangka Hari Dharma Karya dhika 2012	19-20 Oktober '12	Taman Pintar, DI Yogyakarta
5.	Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2012	Rabu-Minggu 21-25 Nopember '12	Epiwalk Epicentrum, Kuningan, Jaksel
6.	Pameran Karya Napi Indonesia	Senin-Sabtu 17-21 Desember '12	Gd. The East, lt. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta

- f. Penerbitan Majalah Warta Pemasarakatan sebanyak 4 edisi dan 1000 buah buku Agenda Kerja Pemasarakatan.

- g. Penyusunan Pedoman Kerjasama di Bidang Pemsyarakatan sebanyak 1 dokumen.
- h. Kegiatan Pelaksanaan Penandatanganan MoU di bidang Pemsyarakatan sebanyak 13 buah MoU. 3 MoU dengan Lembaga/Organisasi Asing dan 10 MoU dengan Lembaga/Organisasi Dalam Negeri.

Data Kegiatan Pelaksanaan Penandatanganan Mou di bidang Pemsyarakatan 2012

No	Tingkat Kerjasama	Mitra Kerjasama	Tentang	No. Mou Dan Jangka Waktu
Lembaga / Organisasi Asing				
1.	Direktur Jenderal Pemsyarakatan	International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)	Pengembangan Kapasitas Manajemen Untuk Napi Resiko Tinggi	29 Maret 2012 s.d 29 Maret 2014
2.	Direktur Jenderal Pemsyarakatan	Search for Common Ground (SFCG)	Program Penguatan Kapasitas pemsyarakatan	5 Juni 2012 s.d 5 Juni 2015
3.	Direktur Jenderal Pemsyarakatan	The Asia Foundation (TAF)	Dukungan Peningkatan Pelaksanaan Sistem PAS di Indonesia	6 Juli 2012 s.d 6 Juli 2015
Lembaga / Organisasi Dalam Negeri				
1.	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kementerian Kesehatan dan IDI	Mekanisme Permintaan Second Opinion dan Penilaian Medis bagi Napi, Tahanan dan Andik PAS di Lapas/Rutan/Cabrutan	M.HH.1.HM.03.02 Th. 2012 001/Menkes/SK/I/2012 3867/PB/A.3/01/2012 5 Januari 2012 s.d 5 Januari 2013
2.	Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	LPK Puspa Antariksa	Pemasaran Hasil Karya Napi di Galeri Pengayoman	PAS2.PK.01.08.03-244 403/LPK/YPA/09/02/12 21 Februari 2012 s.d 21 Februari 2013
3.	Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	SMK Bakti Nusantara 666	Pemasaran Hasil Karya Napi melalui Subdomain	PAS2.PK.01.08.03-220 4.147/SMK-BN666/ E.11/HBN2/II/2012 21 Februari 2012 s.d 21 Februari 2012
4.	Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan PA	SMK Bakti Nusantara 666	Uji Kualifikasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Berbasis Website	PAS4.KP.01.06.01-100 4.245/SMK-BN666/ E.11/HBN2/II/2012 21 Februari 2012 s.d 21 Februari 2012
5.	Direktorat Jenderal Pemsyarakatan	Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)	Program Pembinaan Narapidana	PAS-31.HM.03.03 Th. 2012 001/SK/DPPPITI/IV/2012 27 April 2012 s.d 27 April 2017
6.	Direktorat Jenderal Pemsyarakatan	PASOPATI Nusantara	Peningkatan Tehnologi Telekomunikasi dan Informasi pemsyarakatan	PAS-32.HM.03.03 Th. 2012 004/PNIWARTELSUS/IV/2012 27 April 2012 s.d 27 April 2017
7.	Kementerian Hukum dan HAM RI	PT. SARINAH (Persero)	Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Karya WBP	M.HH-02.HM.03-03 Th 2012 117/DIREKSI/Perj./V/2012 24 Mei 2012 s.d 24 Mei 2017
8.	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kementerian Perindustrian RI	Peningkatan Pembinaan Pelatihan Keterampilan WBP	M.HH-04.HM.03.02 Tahun 2012 – 08-09 24 Mei 2012 s.d 24 Mei 2017
9.	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kementerian Perdagangan RI	Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Karya	M.HH-05.hm.03.02 Dan 840.1/M-

			WBP	DAG/MOU/5/2012 24 Mei 2012 s.d 24 Mei 2012
10	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kementerian Pekerjaan Umum RI	Peningkatan Keterampilan Narapidana di bidang Konstruksi dan Pengelolaan Air Limbah serta Sampah	M.HH-06.HM.03.02 Th 2012 03/PKS/M/2012 17 Agustus 2012 s.d 17 Agustus 2012

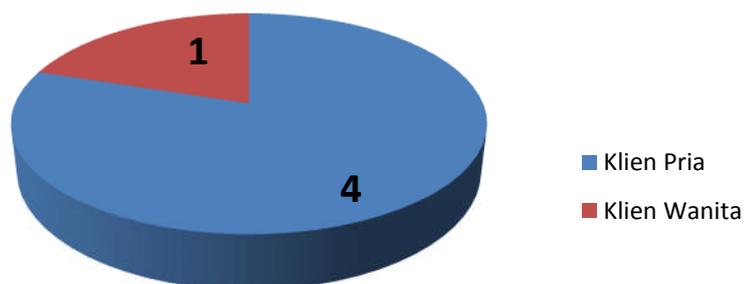
- i. Sosialisasi Pedoman Kerjasama di bidang Pemasyarakatan sebanyak 28 orang.
 - j. Peningkatan Kualitas Manajemen SDM Petugas pada Direktorat Infokom sebanyak 24 orang.
 - k. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan di bidang Infokom sebanyak 18 dokumen.
7. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak Capaian Tahun 2012 :
- a. Melaksanakan registrasi dan klasifikasi terhadap anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Data Tahanan Anak dan Anak Didik Di Seluruh Indonesia Per 30 Nopember 2012

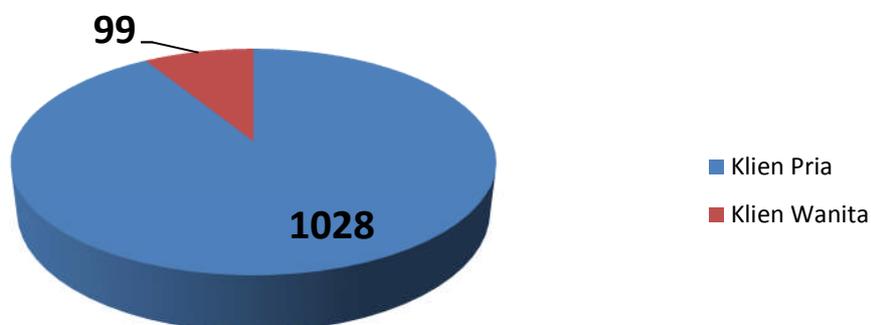
No	Nama Kantor Wilayah	Tahanan Dan Anak Didik Pas						Jumlah Penghuni		
		Tahanan (Anak)			Anak Didik PAS			P	W	JML
		P	W	JML	P	W	JML			
1	N.A.D	21	-	21	30	-	30	51	-	51
2	Sumatera Utara	212	5	217	342	10	352	554	15	569
3	Sumatera Barat	39	-	39	26	-	26	65	-	65
4	Riau	35	1	36	77	3	80	112	4	116
5	Kepulauan Riau	13	-	13	34	-	34	47	-	47
6	Jambi	13	-	13	76	1	77	89	1	90
7	Sumsel	204	2	206	139	-	139	343	2	345
8	Babel	23	-	23	19	-	19	42	-	42
9	Lampung	48	1	49	47	2	49	95	3	98
10	Bengkulu	41	-	41	59	2	61	100	2	102
11	Banten	57	1	58	194	12	206	251	13	264
12	DKI Jakarta	121	14	135	34	5	39	155	19	174
13	Jawa Barat	138	3	141	205	7	212	343	10	353
14	D.I. Yogyakarta	39	-	39	33	-	33	72	-	72
15	Jawa Tengah	206	8	214	302	8	310	508	16	524
16	Jawa Timur	228	6	234	426	6	432	654	12	666
17	Kalbar	24	-	24	113	2	115	137	2	139
18	Kalteng	19	-	19	32	-	32	51	-	51
19	Kalsel	57	1	58	91	1	92	148	2	150
20	Kaltim	36	1	37	67	3	70	103	4	107
21	Sulawesi Utara	54	4	58	72	3	75	126	7	133
22	Gorontalo	-	-	-	31	1	32	31	1	32
23	Sulteng	23	-	23	26	-	26	49	-	49

24	Sulsel	85	1	86	131	2	133	216	3	219
25	Sulawesi Barat	7	-	7	15	1	16	22	1	23
26	Sultra	38	-	38	57	-	57	95	-	95
27	Bali	10	1	11	20	1	21	30	2	32
28	NTB	8	-	8	28	-	28	36	-	36
29	NTT	20	-	20	125	-	125	145	-	145
30	Maluku	16	-	16	4	-	4	20	-	20
31	Maluku Utara	5	-	5	23	-	23	28	-	28
32	Papua	16	-	16	30	1	31	46	1	47
33	Papua Barat	1	-	1	11	-	11	12	-	12
JUMLAH		1.857	49	1.906	2.919	71	2.990	4.776	120	4.896

Data Klien Anak Kasus Narkotika Seluruh Indonesia Per 30 Nopember 2012



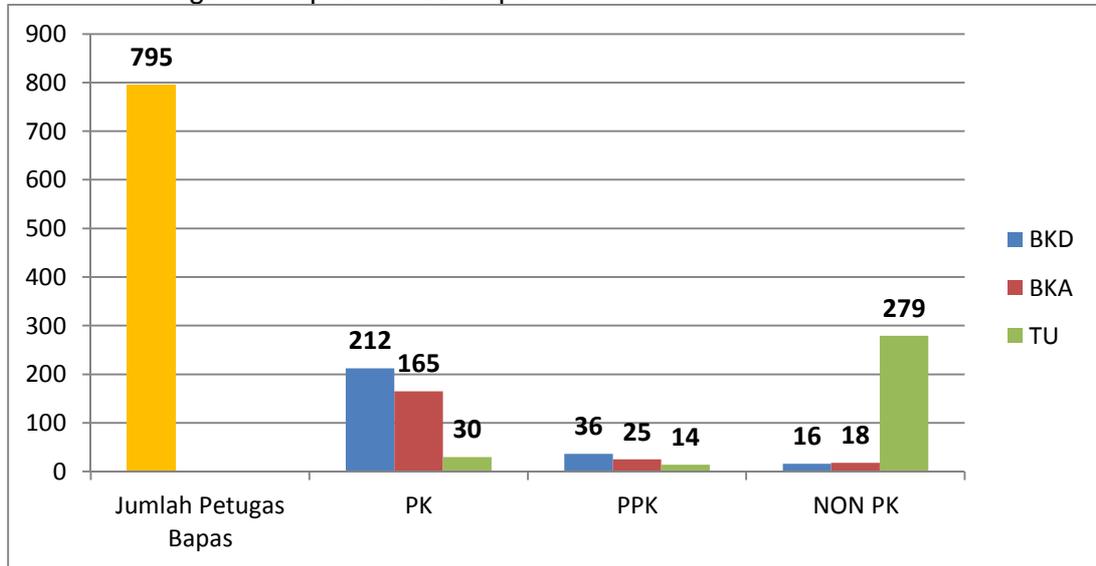
Data Klien Dewasa Kasus Narkotika Seluruh Indonesia Per 30 Nopember 2012



Data Klien Yang Dibimbing Per 30 Nopember 2012

Saran PK								Jumlah		Jml
Home Visit				Klien Datang Melapor				Dewasa	Anak	
Dewasa		Anak		Dewasa		Anak				
L	P	L	P	L	P	L	P			
363	16	49	1	1.216	95	82	3	1.690	135	1.825

Data Jumlah Pegawai Bapas Per 30 Nopember 2012



b. Melaksanakan pendampingan terhadap anak.

Data Hasil Sidang Putusan Hakim Anak Per 30 Nopember 2012

Jenis Putusan										Jml
AKOT		PIB		Anak Negara		Depsos		Penjara		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
13	0	20	4	1	0	11	0	65	0	114

c. Melaksanakan penyusunan Litmas Sidang Anak.

Data Litmas Pengadilan Anak Seluruh Indonesia Per 30 Nopember 2012

Saran Pk										Jml
AKOT		PIB		Anak Negara		Depsos		Penjara		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
66	4	86	4	3	0	17	0	171	2	353

d. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, Data Jumlah Klien yang Melakukan Pelanggaran Seluruh Indonesia Per 30 Nopember 2012

Klien				Jumlah
Dewasa		Anak		
P	W	P	W	
7	0	0	0	7

e. Bimtek dan sosialisasi SOP Perlindungan dan Pengentasan Anak

f. Sosialisasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice* bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

g. Penyusunan Modul penyuluhan penanganan ABH melalui pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice* bagi petugas Pemasyarakatan.

- h. Bimtek penanganan ABH melalui pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice* bagi petugas Pemasyarakatan.
- i. Penyusunan program dan model pembinaan (Intervensi) bagi WBP.
- j. Penyusunan Draft RUU Pemasyarakatan (Bab Anak).
- k. Penyempurnaan modul pelatihan dan manual pelatihan Pembimbing Kepasyarakatan Bapas.
- l. Penyusunan SOP dan Pedoman perlindungan dan perlakuan anak dalam sistem pemasyarakatan.
- m. Penyusunan Sistem assessment Resiko dan Kebutuhan bagi WBP (penyusunan instrument assessment, Caseplan bagi klien Bapas, Roadmap pengembangan assessment).
- n. Pelaksanaan TOT dan Bimtek assessment resiko untuk petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas, dan Bapas.
- o. Penyusunan kajian bahan aplikasi database Bimkemas dan Anak.
- p. Penyusunan modul sidik jari klien Bapas dan Anak didik Pemasyarakatan.
- q. Pengelolaan Bimtek Jarak Jauh (melalui website) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan, Penyusunan Model Bimbingan Keterampilan dan Penyaluran Kerja.
- r. Penyusunan Model Penelitian Kemasyarakatan dan Modul Pembimbing Kemasyarakatan online.
- s. Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi SOP Pendidikan di UPT Pemasyarakatan.

Bidang Imigrasi

A. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sebagai akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bagian Program dan Pelaporan.

Menghasilkan peraturan-peraturan yang terkait dengan keimigrasian sebagaimana tabel :

NO	Jenis Peraturan	Nomor	Tentang/ Perihal	Tgl. Pengeluaran
1.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012	Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.	04 Januari 2012
2.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012	Perubahan Kelima Atas Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.	04 Januari 2012
3.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2012	Penetapan Unit Kerja Kementerian hukum dan HAM Sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II Bulan Januari Tahun 2012	03 Januari 2012
4.	Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-059.PL.05.01 Tahun 2012	Pemusnahan Arsip Fisik Paspor Biasa pada Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia	10 Januari 2012
5.	Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-143.KP.06.10 Tahun 2012	Tata Tertib Jam Kerja Di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi	30 Januari 2012
6.	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-061.KP.03.04 Tahun 2012	Pedoman Pengangkatan Jabatan Eselon V di Jajaran Keimigrasian	11 Januari 2012
7.	Peraturan Hukum dan HAM RI	M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	28 Februari 2012
8.	Surat Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH.OT.01.01-01	Usul Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Takengon di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	08 Februari 2012

NO	Jenis Peraturan	Nomor	Tentang/ Perihal	Tgl. Pengeluaran
9.	Surat Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-PL.06.01-815	Permintaan Penempatan Kantor Imigrasi di Wakatobi	21 Februari 2012
10.	Surat Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-PR.06.01-962	.Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi Tamiang Layang	29 Februari 2012
11.	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-UM.01.10-556	Pungutan Biaya di luar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	07 Februari 2012
12.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-01a.GR.01.06 Tahun 2012	Tata Cara Penertapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa	14 Maret 2012
13.	Surat Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-UM.01.01-1087	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	07 Maret 2012
14.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	5 Tahun 2012	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	23 April 2012
15.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	07 Tahun 2012	Spesifikasi Teknis Pengamanan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	11 Mei 2012
16.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	08 Tahun 2012	Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa.	11 Mei 2012
17.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	09 Tahun 2012	Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia .	11 Mei 2012
18.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012	Negara Calling Visa.	02 Mei 2012
19.	Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi	IML1-1178.PR.09.10 Tahun 2012	Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Rangka Embarkasi/Debarkasi Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji tahun 1433 H/2012 M.	11 Mei 2012
20.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	11 Tahun 2012	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian	14 Juni 2012
21.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2012	Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi	15 Juni 2012
22.	Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-1332.UM.01.10 Tahun 2012	Peningkatan Kepedulian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kepada Pegawai Imigrasi dan Penerbitan Proses Pelayanan Keimigrasia di Seluruh Kantor Imigrasi.	04 Juni 2012
23.	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-UM.01.01-3382	Keterbukaan Informasi Keimigrasian	26 Juni 2012

NO	Jenis Peraturan	Nomor	Tentang/ Perihal	Tgl. Pengeluaran
24.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	12 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksnana Paspur	13 Juli 2012
25.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	13 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tingga Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa	13 Juli 2012
26.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	15 Tahun 2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur.	03 Agustus 2012
27.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2198.IL.01.10 Tahun 2012	Mekanisme Publikasi Hasil Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi	25 September 2012
28.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2148.IL.01.10 Tahun 2012	Pengawasan Eksternal Direktorat Jenderal Imigrasi	26 September 2012
29.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2149.IL.01.10 Tahun 2012	Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi	26 September 2012
30.	Prosedur Tetap Direktur Jenderal Imigrasi	IMI-2175.IL.01.10 Tahun 2012	Mekanisme Perlindungan Pelapor Pelanggaran Direktorat Jenderal Imigrasi	27 September 2012
31.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI	19 Tahun 2012	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan	22 November 2012
32.	MOU Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi	B/42/XI/2012 dan IMI-2555.UM.01.01 Tahun 2012	Mou Kerjasama Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika, Obat, dan bahan berbahaya yang dilakukan oleh Orang Asing	13 November 2012

Secara kelembagaan yaitu :

- a. telah terbentuk Kantor Imigrasi baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.OT.01.01 tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Takengon dan Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo ;

- b. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Siak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Dari sisi penyusunan rencana dan anggaran telah melakukan kegiatan-kegiatan, seperti : Melakukan konsinyering pendampingan untuk membahas dan menyusun RKA-K/L Tahun Anggaran 2013 ;

- a. Melakukan penyelesaian tahapan untuk penerbitan DIPA 2013, seperti :

- 1) Penyusunan pagu indikatif ;
- 2) Pembahasan pagu anggaran; dan
- 3) Penetapan pagu definitif.

- b. Penerbitan Surat Pengesahan DIPA Ditjenim 2013 oleh Kementerian Keuangan ;
c. Tersusunnya rencana pengadaan (*Procurement Plan*), rencana penyerapan anggaran (*Disbursement Plan*) dan rencana kerja Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2013.

Terkait dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi keimigrasian, telah dilakukan hal-hal seperti :

- a. Penyajian data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan;
- b. Pengumpulan data sebagai bahan dan data dukung pembuatan Laporan Tengah Tahun (LAPTENG), Laporan Tahunan (LAPTAH) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. Pengumpulan data sebagai bahan dan data dukung pembuatan laporan pertriwulan terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Pengumpulan data terkait dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari seluruh direktorat dan bagian pada Ditjen Imigrasi sebagai data dukung penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2013;

Dari sisi evaluasi dan penyusunan laporan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, seperti :

- a. Menyajikan laporan dari hasil kegiatan dan evaluasi yang dibutuhkan pimpinan;
- b. Membuat laporan periodik kinerja Ditjen Imigrasi seperti Laporan Tengah Tahun (LAPTENG), Laporan Tahunan (LAPTAH) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. Membuat laporan pertriwulan terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disampaikan kepada UKP4 dan KPK melalui Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Bagian Kepegawaian.

a. Manajemen dan pembinaan personil

NO.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pejabat imigrasi yang telah diterbitkan sk mutasi Pejim	318 orang
	Eselon V	252 orang
	Eselon IV	448 orang
	Eselon III	220 orang
	Eselon II	46 orang
2.	Formasi pegawai pada ditjenim	
	Eselon I	1 orang
	Eselon II	7 orang
	Eselon III	28 orang
	Eselon IV	80 orang
	Staf	303 orang
3.	SK CPNS di lingkungan ditjeim	
	Yang diusulkan Yang diterbitkan	- 21 SK
4	SK PNS di lingkungan ditjeim	
	Yang diusulkan Yang diterbitkan	- -
5	Kenaikan pangkat PNS Ditjenim	
	Kenaikan pangkat yang diusulkan	76 orang
	Kenaikan pangkat yang sudah keluar	71 orang
	Kenaikan pangkat yang belum keluar	5 orang
6	Mutasi pejim diseluruh Indonesia	384 orang
	Mutasi pejim yang diusulkan	318 orang
	SK yang sudah keluar	
7	Mutasi staf TU pada Ditjenim	
	SK yang sudah keluar	384 orang
8	Kenaikan gaji berkala - SK yang sudah keluar	150 orang
9	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (spmt) SPMT yang sudah keluar	115 orang
10	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (spmj)	
	SPMJ yang diusulkan SPMJ yang sudah keluar	115 orang 115 orang

b. Kegiatan Pengembangan dan Pemberhentian

NO.	Uraian	Jumlah
1	Hukuman disipin	36 orang
2	Pensiun	21 orang
3	Penghargaan lencana karya satya	45 orang
4	Purna Pengayoman	19 orang
5	DATA DIKLAT PEGAWAI	
	Diklat teknis Diksuskim	65 orang
	Diklatpim IV	2 orang
	Diklatpim III	2 orang
	Diklat Administrasi Akuntansi Keuangan	33 orang
	Diklat Perencanaan Anggaran	
	Diklat Bendaharawan	36 orang
Diklat Barang dan Jasa	50 orang	
Diklat Intelijen	23 orang	

NO.	Uraian	Jumlah
	Diklat Pemeriksa Dokument	90 orang
	Diklat di Luar negeri	40 orang
	ELT Qeesland University Australia	13 orang
	Kursus Bahasa Mandarin	1 orang
	Immigration and Checkpoint Authority (ICA) Singapore	2 orang
	Invitation for Participate in Immigration and Checkpoint Competencies Training Program (ICCTP)	2 orang
	Beasiswa Luar Negeri	2 orang
	S2 NCPU Taiwan	3 orang
	S2 Flinders University Australia	
	Pelatihan/Workshop di Luar Negeri	15 orang
	Immigration Service Management, KOICA Korea	
	The PTSS Alumni Community of Interest Workshop in Germany	1 orang
	Test IELTS	50 orang
	Bimbingan Manajemen Pelayanan Publik	120 orang

3. Bagian Humas dan Tata Usaha.

a. Penyebaran Informasi

1) Melalui Media TV

- a) advertorial yang ditayangkan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2012 di acara Metro Siang dan *Managing The Nation*, Metro TV.
- b) Penyebaran Informasi Keimigrasian dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam bentuk animasi

2) Melalui Media Radio

Penyebaran informasi keimigrasian melalui radio berupa pemutaran adlibs, bekerja sama dengan Radio Seputar Indonesia dan radio Elshinta. Adlibs di Radio Seputar Indonesia diputar sebanyak 123 spot pada Periode Januari-Desember 2012. Pemutaran adlibs di Radio Elshinta telah dilakukan pada 40 spot di hari Sabtu-Minggu setiap bulan selama Juli-Desember 2012.

3) Melalui Media Cetak

Penyebaran informasi keimigrasian melalui media cetak dilakukan bekerja sama dengan majalah Gatra dan Harian Rakyat Merdeka.

4) Melalui Media Internet

Penyebaran informasi keimigrasian melalui media internet dilakukan bekerja sama dengan www.gatra.com,

5) Melalui Pembuatan Buku Profil Imigrasi

Penyebaran informasi keimigrasian melalui Penyebaran informasi keimigrasian melalui pembuatan buku profil imigrasi sebanyak 350 eksemplar yang akan didistribusikan kepada jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

6) Melalui pembuatan DVD Profil Imigrasi

b. Penyelenggaraan Press Tour

Press Tour telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, pada tanggal 27-29 Maret 2012 di lingkungan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Medan); 17-19 September 2012 di lingkungan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (Pekanbaru); 12-14 November 2012 di lingkungan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Manado) sebagai sampel layanan keimigrasian yang diinformasikan kepada masyarakat.

Pada periode Januari s.d. Desember 2012, konferensi pers diadakan sebanyak 6 kali dan *press release* dibuat sebanyak 24 berita. Kemudian Pengiriman klipng selama bulan Januari s.d. Desember 2012 sebanyak 5292 eksemplar (252 hari kerja x 21 eksemplar), serta Penerbitan tabloid Lintas Imigrasi bulan Januari s.d. Desember 2012 sebanyak 3000 eksemplar.

c. Sosialisasi Bidang Kehumasan

Telah dilaksanakan Sosialisasi Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada tanggal 07 Mei 2012, kepada 50 orang wartawan yang mewakili Media cetak dan Elektronik.

d. Pameran Pelayanan Publik

Pada tahun 2012, Subbagian Humas mewakili Ditjen imigrasi ikut berpartisipasi dalam Pameran Pelayanan Publik, Gebyar Wisata Budaya Indonesia di Jakarta Convention Centre pada tanggal 31 Mei - 03 Juni 2012 diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Di bulan Oktober, Subbagian Humas mewakili Ditjen imigrasi ikut berpartisipasi dalam Pameran Pelayanan Publik Legal Expo di Taman Pintar, Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Oktober 2012 oleh Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM RI.

e. Pengelolaan Informasi Publik

1) Menerima permohonan informasi publik sebanyak 1.646 permohonan, baik melalui telepon, datang langsung maupun melalui e-mail seperti dijabarkan dalam tabel berikut:

No	Bulan	Permohonan Informasi			Jumlah
		Telepon	Datang langsung	Email	
1	Januari	46	83	115	224
2	Februari	43	17	107	167
3	Maret	50	20	117	187

4	April	86	34	217	337
5	Mei	54	30	78	162
6	Juni	65	30	29	124
7	Juli	57	26	10	93
8	Agustus	31	16	21	68
9	September	25	18	41	84
10	Oktober	17	15	22	54
11	November	38	19	45	102
12	Desember	30	12	33	75
Jumlah		542	320	835	1697

- 2) Humas Ditjen Imigrasi melakukan *update* penayangan informasi melalui media informasi digital (TV Plasma) di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi setiap hari;
- 3) Humas Ditjen Imigrasi Melakukan kegiatan Bakohumas periode Januari s.d. Desember 2012 sebanyak 36 kali;
- 4) Melakukan Liputan Kegiatan Keimigrasian periode Januari s.d. Desember 2012 sebanyak 188 kali;
- 5) Menerima permohonan informasi dari Wartawan yang datang langsung sebanyak 39 orang selama tahun 2012

f. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Sejak Januari - Desember 2012 Humas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerima pengaduan dari Masyarakat yang disampaikan melalui berbagai sarana, seperti telepon, Surat Pembaca (dalam surat kabar), datang langsung, Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat, Faksimili, Twitter dan e-mail sebanyak 113 pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

NO	BULAN	PENGADUAN								JUMLAH
		Melalui Telepon	Surat Pembaca	Surat	Datang Langsung	Sistem Pengaduan Masyarakat	FAX	Twitter	E-mail	
1	Januari	8	0	0	0	0	0	0	22	30
2	Februari	3	0	0	0	0	1	0	11	15
3	Maret	3	1	0	1	0	0	0	20	25
4	April	3	1	0	0	2	0	0	2	8
5	Mei	1	0	0	0	0	0	0	8	9
6	Juni	5	1	1	1	1	0	0	2	11
7	Juli	0	0	1	4	0	0	0	0	5
8	Agustus	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	September	0	0	1	0	0	0	0	1	2
10	Oktober	0	0	1	1	0	0	0	0	2
11	November	1	1	0	0	1	1	1	0	5
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	4	5	7	4	2	1	66	113

Selain melalui sarana-sarana pengaduan yang telah disebutkan, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengompilasi Laporan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dari Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia seperti dijabarkan dalam tabel berikut:

STATISTIK PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA															
TAHUN 2012															
NO	NAMA KANTOR IMIGRASI	BULAN												JUMLAH	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Kanim Kelas I Khusus Batam	2	2	0	3	0	3	0	2	1	0	0	0	13	
2	Kanim Kelas I Khusus Surabaya	7	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14	
3	Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
4	Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat	0	3	4	7	3	4	1	1	0	1	0	0	24	
5	Kanim Kelas I Bandar Lampung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
6	Kanim Kelas I Bandung	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
7	Kanim Kelas I Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
8	Kanim Kelas I Palembang	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
9	Kanim Kelas I Polonia	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
10	Kanim Kelas I Pontianak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
11	Kanim Kelas I Samarinda	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
12	Kanim Kelas I Semarang	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
13	Kanim Kelas I Tanjung Perak	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
14	Kanim Kelas I Tanjung Pinang	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
15	Kanim Kelas I Tanjung Priok	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	
16	Kanim Kelas II Bogor	4	3	3	0	3	7	5	0	0	0	0	0	25	
17	Kanim kelas II Cilacap	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
18	Kanim kelas II Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
19	Kanim Kelas II Karawang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	Kanim Kelas II Lhokseumawe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
21	Kanim Kelas II Madiun	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4	
22	Kanim Kelas II Pati	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
23	Kanim Kelas II Pemalang	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
24	Kanim Kelas II Sambas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
25	Kanim Kelas II Sibolga	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
26	Kanim Kelas II Wonosobo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	JUMLAH	30	29	17	17	10	16	8	6	1	3	0	0	137	

g. Pengelolaan Website

Selama Periode Januari-Desember 2012, Humas Ditjen Imigrasi melakukan *update* berita website periode periode Januari s.d. Desember 2012 sebanyak 228 berita serta melakukan *update* informasi keimigrasian di portal imigrasi sso.imigrasi.go.id secara insidental, sesuai dengan kebutuhan.

h. Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat (PKKT)

Kegiatan Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat (PKKT) diadakan pada tanggal 22-24 Oktober 2012, dengan peserta para Pejabat Imigrasi setingkat eselon II dan III yang bertugas di jajaran Ditjen Imigrasi dan di luar jajaran Ditjen Imigrasi yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta para Kabid/Kasubid Imigrasi pada perwakilan RI, yang seluruhnya berjumlah 228 peserta.

i. Sosialisasi Peraturan Keimigrasian

Tahun 2012, Sosialisasi Peraturan Keimigrasian tidak diadakan karena sosialisasi materi yang akan disampaikan melalui kegiatan dimaksud telah terwakilkan oleh Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat dan kegiatan serupa yang diadakan Direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

j. Administrasi Dan Persuratan

Selama periode Januari s.d. Desember 2012, subbagian Humas menerima surat masuk sebanyak 2915 surat dan membuat konsep surat dan nota dinas sebanyak 448 surat, baik untuk internal maupun eksternal Ditjen Imigrasi.

NO	BULAN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Januari	170	45
2	Februari	195	38
3	Maret	187	27
4	April	369	24
5	Mei	394	23
6	Juni	302	38
7	Juli	341	60
8	Agustus	213	25
9	September	254	23
10	Oktober	262	66
11	November	186	59
12	Desember	42	20
		2915	448

4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pengelolaan BMN dan RT melaksanakan rencana program Layanan Perkantoran dan Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan yang Tepat Waktu dan Terintegrasi dan Akuntabel yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas Piket Gedung Kantor Lantai dan Ruangan.
- b. Belanja Pengadaan Obat-Obatan.
- c. Terlaksananya Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan.
- d. Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai.
- e. Tersedianya Pakaian Kerja Khusus.
- f. Terlaksananya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu.
- g. Terawatnya Gedung Kantor.
- h. Perbaikan Peralatan Kantor.
- i. Tersedianya Perlengkapan Kantor ATK.
- j. Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 & Roda 6.
- k. Terawatnya Kendaraan Operasional Roda 2.
- l. Tetap Berfungsinya Sarana Gedung Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.
- m. Tersedianya Langganan Daya dan Jasa.
- n. Terselenggaranya Operasional Pimpinan Keimigrasian.
- o. Jasa Pos/Giro.
- p. Pelaksanaan Donor Darah.
- q. Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor.
- r. Pengadaan Perangkat Tes Laboratorium Reflotron, Urisys, dan Accutrend.
- s. Pengadaan Speedboat Patroli Imigrasi.
- t. Pengadaan Genset untuk Rumah Deteni Imigrasi.
- u. Pengadaan Perangkat Indeks Kepuasan Masyarakat.
- v. Pengadaan Alat Kejut Keamanan Imigrasi.
- w. Pengadaan Peralatan Komunikasi Keimigrasian.
- x. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasionalisasi Kesisteman Ditjen Imigrasi.
- y. Pengadaan Satuan Pengamanan secara Outsourcing Ditjen Imigrasi.
- z. Pengadaan Application Performance Management.
- aa. Pengadaan Kendaraan Tahanan Imigrasi.
- bb. Pengadaan Laboratorium Forensik Keimigrasian.
- cc. Admininstrasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Imigrasi.
- dd. Lanjutan Pemasangan Alluminium Composite Panel Ditjen Imigrasi.
- ee. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara.
- ff. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- gg. Monitoring Pengelolaan BMN.
- hh. Pengemasan/Pengiriman/Pengangkutan Perangkat Kesisteman Keimigrasian yang mengalami kerusakan dari UPT.
- ii. Pelatihan Paramedis Poliklinik Imigrasi.

- jj. Pengelolaan Penilaian dan Penghapusan BMN.
- kk. Pengelolaan SIMAK BMN.
- ll. Penyusunan/Penterjemahan/Pencetakan UU Keimigrasian dalam 2 Bahasa.
- mm. Pengadaan Sarana Laboratorium Peningkatan Kualitas SDM Imigrasi.
- nn. Rapat Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga.

B. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa Dan Fasilitas Keimigrasian

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Doklanvisfaskim selama tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Subdirektorat Visa

Bahwa dalam upaya peningkatan pemahaman teknis dalam mekanisme pemberian persetujuan Visa Republik Indonesia bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 telah dicetak Stiker Visa sejumlah 8.473.337 Stiker yang terdiri dari 645.000 format lama dan 6.828.337 format baru dengan rincian sebagai berikut:

Data Pencetakan Stiker Visa Tahun Anggaran 2012

No	Jenis Stiker	Format Stiker		Jumlah
		Format Lama	Format Baru	
1	VKSK Roll	200,000	-	200,000
2	Visa Biasa	180,000	447,255	627,255
3	Visa VKSK	-	3,690,541	3,690,541
4	VKSK US\$ 25	-	2,690,541	3,690,541
5	VKSK	265,000	-	265,000
Jumlah		645,000	6,828,337	8,473,337

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-280.DL.04.10 Tahun 2012 tentang Tim Bimbingan Teknis Visa, dalam Tahun Anggaran 2012 telah Subdit. Visa telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis pada:

- a. Bimbingan Teknis Visa di Hotel Aryaduta Jakarta, pada tanggal 25 s.d 27 April 2012;
- b. Bimbingan Teknis Visa di Hotel Aryaduta Makassar, pada tanggal 15 s.d 17 Juli 2012; dan
- c. Bimbingan Teknis Visa di Hotel Harmoni One Batam, pada tanggal 9 s.d 12 Oktober 2012.

Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap Seksi pada Subdit visa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Seksi Visa Kunjungan

Pada seksi visa kunjungan pelaksanaan kegiatan periode Tahun Anggaran 2012 per tanggal 12 Desember 2012 telah menerbitkan permohonan visa kunjungan sebanyak 14.927 orang dan visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebanyak 25.764 orang dengan total persetujuan sebanyak 40.691 orang dengan rincian sebagai berikut:

Pemberian Persetujuan Visa Kunjungan

NO.	Periode	Visa Kunjungan	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan
1.	Januari	1.008	2.021
2.	Pebruari	1.105	2.230
3.	Maret	1.106	2.097
4.	April	1.427	2.385
5.	Mei	1.462	2.188
6.	Juni	1.584	2.344
7.	Juli	1.219	2.069
8.	Agustus	1.141	1.905
9.	September	1.249	2.192
10.	Oktober	1.372	2.353
11.	Nopember	1.091	2.071
12.	Desember	1.163	1.909
Jumlah		14.927	25.764

b. Seksi Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Pada seksi visa kunjungan saat kedatangan pelaksanaan kegiatan periode Tahun Anggaran 2012 telah menerbitkan permohonan visa kunjungan saat kedatangan bagi negara yang bukan subjek VKSK berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.02-IZ.01.10 tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.08.GR.01.06 Tahun 2009. Adapun tabel pemberian VKSK subyek Pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Pemberian VKSK Subyek Pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
Januari 2012			
Nihil			
Februari 2012			
1.	IMI.2-UM.01.10-2.160	16/02/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Pertemuan Pertama IPHRC di Jakarta
2.	IMI.2-GR.01.06-2.180	20/02/2012	Pemberian Visa Kunjungan Mahasiswa LKY-NUS ke Lemhanas RI

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
3.	IMI.2-GR.01.06-2.200	24/02/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Pertemuan <i>Asia Pacific Network (APN) 17th IGM/SPG</i>
4.	IMI.2-GR.01.06-2.211	29/02/2012	Permohonan VKSK Bagi <i>Special Envoys</i> Perdana Menteri Bhutan ke Indonesia Tanggal 1-2 Maret 2012
Maret 2012			
1.	IMI.2-UM.01.01-2.852	02/03/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Kegiatan <i>Regional Seminar on The Implementation of The United Nations Programme of Action (POA) on Small Arms and Light Weapons</i> di Bali
2.	IMI.2-GR.01.06-2.866	02/03/2012	Pemberian VKSK An. Binod Kumar Karmacharya
3.	IMI.2-GR.01.06-2.878	05/03/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Pertama Global Counter Terrorism Forum (GTCF) South East Asia Working Group di Semarang Tanggal 6-7 Maret 2012
4.	IMI.2-GR.01.06-2.877	05/03/2012	Pemberian VKSK An. Jupiter Yves Ngangué
5.	IMI.2-UM.01.01-2.228	05/03/2012	Pelaksanaan Sidang ASEAN-India WGAF
6.	IMI.2-GR.01.06-2.991	09/03/2012	Pemberian VKSK Bagi Pembeli (<i>Buyers</i>) Iffina yang Ke-5 Tanggal 11-14 Maret 2012 di JIEXPO
7.	IMI.2-GR.01.06-2.1052	14/03/2012	Permohonan VKSK Bagi Tamu dari Kaukus DPR RI untuk Palestina Dalam Kegiatan <i>Asia Pacific Community Conference For Palestina (ASPAC)</i> di Jakarta Tanggal 15 Maret 2012
8.	IMI.2-UM.01.01-2.273	16/03/2012	Permohonan VKSK Bagi Perwakilan Delegasi Kegiatan 3rd CTI-CFF MPA-REX, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP
9.	IMI.2-UM.01.01-2.274	16/03/2012	Pemberian VKSK Bagi The 6th MOPG EAAFP di Palembang, Kementerian Kehutanan RI
10.	IMI.2-GR.01.06-2.280	20/03/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta 8th Session of the Governing Council Meeting Center For Alleviation of Poverty Through Sustainable Agriculture di Yogyakarta
11.	IMI.2-GR.01.06-2.294	21/03/2012	Permohonan VKSK An. Warsi Sahid (Sponsor Komisi I DPR)
12.	IMI.2-GR.01.06-2.298	22/03/2012	Pemberian VKSK An. Karmanov Kairat
13.	IMI.2-GR.01.06-2.307	27/03/2012	Pemberian VKSK An. Kazbolatbayev Abilkair
14.	IMI.2-GR.01.06-2.1302	28/03/2012	Pemberian VKSK An. Munawar Jamal Qureshi
15.	IMI.2-GR.01.06-2.318	28/03/2012	Pemberian VKSK An. Ahmad Ali Farid Hasan Qasem
APRIL 2012			
1.	IMI.2-GR.01.06-2.1427	05/04/2012	Permohonan VSSK Bagi Pemain Tim Kelantan FA dari Malaysia
2.	IMI.2-GR.01.06-2.351	05/04/2012	Permohonan VSSK Bagi Buyers INACRAFT 2012
3.	IMI.2-GR.01.06-2.1429	05/04/2012	Permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) An. Olga Savenchuk
4.	IMI.2-GR.01.06-2.1419	05/04/2012	Permohonan VSSK An. Ahmed Saed Hasan, Cs
5.	IMI.2-GR.01.06-2.1536	12/04/2012	Permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VSSK) bagi Presiden Kazakhstan beserta rombongannya ke Indonesia tanggal 12 April 2012
6.	IMI.2-GR.01.06-2.1538	12/04/2012	Permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) An. Aluthgedara Karunasena
7.	IMI.2-GR.01.06-2.1537	12/04/2012	Permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan An. Hani Aden Mohamed (Sponsor Dubes Somalia)

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
8.	IMI.2-GR.01.06-2.399	20/04/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Kegiatan GPOI United Nations Logistics Officers (UNLOG) Course
9.	IMI.2-GR.01.06-2.410	24/04/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Pelaksanaan Sidang The AWGATE ke-19
10.	IMI.2-GR.01.06-2.406	24/04/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Study Visit on RH, FP and Gender Related Issues of Rajasthan Officials-India
11.	IMI.2-GR.01.06-2.1670	20/04/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Kegiatan GPOI UNSOC dan UNLOG
12.	IMI.2-GR.01.06-2.1705	25/04/2012	Pemberian VKSK bagi peserta seminar internasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
13.	IMI.2-GR.01.06-2.434	30/04/2012	Permohonan VKSK An. Garcia Barea Augusto Cesar
MEI 2012			
1.	IMI.2-GR.01.06-2.1863	03/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Pemain Asing Tim Navibank Saigon
2.	IMI.2-GR.01.06-2.1881	03/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Familirization Trip 2012
3.	IMI.2-GR.01.06-2.1910	04/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Pembicara Radio Asia Conference
4.	IMI.2-GR.01.06-2.1893	04/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta International Training on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific and African Countries
5.	IMI.2-GR.01.06-2.1894	04/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta International Training on Fisheries Processing Product for Melanesian Spearhead Group Countries/Members
6.	IMI.2-GR.01.06-2.449	07/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Pembicara dan Peserta World Prayer Assembly
7.	IMI.2-GR.01.06-2.1957	09/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Tamu PT. Muara Krakatau
8.	IMI.2-GR.01.06-2.471	10/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Sidang Excom AIPA dan Sidang ke-9 AIFOCOM
9.	IMI.2-GR.01.06-2.472	10/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Workshop Population and Family Planning Indonesia
10.	IMI.2-GR.01.06-2.483	11/05/2012	Permohonan VKSK an Salah J.M. Naji Ruqaia, Cs (Anggota Komisi I DPR RI)
11.	IMI.2-GR.01.06-2.071	16/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Pemain Asing Tim Negeri Sembilan
12.	IMI.2-GR.01.06-2.072	16/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Training Course on Entrepreneurship Development for Rural Women
13.	IMI.2-GR.01.06-2.494	16/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Jakarta International 10 K
14.	IMI.2-GR.01.06-2.502	22/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Pembicara Kegiatan the 15th Consul Meeting and General Conference Tahun 2012
15.	IMI.2-GR.01.06-2.505	23/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Delegasi dari Bangladesh Seamen's Association (BSA)
16.	IMI.2-GR.01.06-2.506	23/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Pemain Asing Tim Perak FA, Malaysia
17.	IMI.2-GR.01.06-2.2183	24/05/2012	Pemberian VKSK Aluthgedara Karunasena
18.	IMI.2-GR.01.06-2.2204A	25/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Bali Process Technical Expert's Workshop on Combating Trafficking in Persons di Bali Tanggal 28-30 Mei 2012



NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
19.	IMI.2-GR.01.06-2.2245	29/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Kolaborator CIFOR an. Oliver Allan Tobalbal
20.	IMI.2-GR.01.06-2.534	30/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Kegiatan Regional Meetings for The Development of The Strategic Guidance Framework (SGF) for International Police Peace Keeping 11-15 Juni 2012 di JCLEC Semarang
21.	IMI.2-GR.01.06-2.532	30/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Salah Satu Tim NRA Assessment dari WHO
22.	IMI.2-GR.01.06-2.530	30/05/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Pertemuan Internasional Drug Enforcement Conference (IDEC) XXIX
23.	IMI.2-GR.01.06-2.531	30/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Workshop Perlindungan Saksi & Korban Dalam Tindak Pidana Lintas Nasional Terorganisasi
24.	IMI.2-GR.01.06-2.533	30/05/2012	Pemberian VKSK Bagi Delegasi dari Negara Sri Lanka An Dr. Madurappulige Dharmadasa
JUNI 2012			
1	IMI.2-GR.01.06.2-551	07/06/2012	Permohonan VKSK Bagi Delegasi dari Nepal dan Tonga dalam rangka kegiatan Medrete Tahun 2012 di Malang tgl. 17-24 Juni 2012
2	IMI.2-GR.01.06.2-572	12/06/2012	Permohonan VKSK Bagi Staf Kementerian Pemerintahan Negara Bangladesh
3	IMI.2-GR.01.06.2-579	14/06/2012	Permohonan VKSK an. Dahal Kedar, Cs
4	IMI.2-GR.01.06.2-588	15/06/2012	Permohonan VKSK Bagi Kapal Layar Asing Pribadi (Yacht) S/Y Kaori
5	IMI.2-GR.01.06.2-2603	20/06/2012	Permohonan VKSK bagi Tamu dari Majelis Pesantren dan Ma'dah Dakwah Indonesia (MAPADI) dan Komisi X DPR RI
6	IMI.2-GR.01.06.2-2604	20/06/2012	Permohonan VKSK bagi tamu dari Pos Keadilam Peduli Umat (PKPU) dan Komisi VIII DPR RI
7	IMI.2-GR.01.06.2-2673	22/06/2012	Permohonan VKSK bagi 3 peserta dari Negara Venezuela dalam kejuaran Karate Tingkat Dunia WKF
8	IMI.2-GR.01.06.2-2717	26/06/2012	Permohonan VKSK Bagi Inspektur Wasit an. Abdullaev Farkhad
9	IMI.2-GR.01.06.2-2742	27/06/2012	Permohonan VKSK bagi peserta Workshop on Public Sector Productivity
10	IMI.2-GR.01.06.2-2644	29/06/2012	Permohonan VKSK an. Fida Hussain
11	IMI.2-GR.01.06.2-2799	29/06/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Tim AFC U22 Championship 2013-Qualifiers Grup E
12	09606/PK/06/2012/63	27/06/2012	Permohonan Bantuan untuk kelancaran Kedatangan Peserta Kegiatan Training Course for Practitioners : Constitution Building for Democracy, di Bali tanggal 02-06 Juli 2012
JULI 2012			
1.	IMI.2-GR.01.06.2-653	04/07/2012	Permohonan VSSK Bagi Peserta 14 th Asian School Tenpin Bowling Championship
2.	IMI.2-GR.01.06-2889	04/07/2012	Pemberian VKSK an. Alsuraimi Abdullah Ali Hussein
3.	IMI.2-GR.01.06-	04/07/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Tim AFC U22 Championship 2013-Qualifiers Grup E

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
4.	IMI.2-GR.01.06-2.2890	04/07/2012	Permohonan VKSK an. Mr. Rajan Parajuli
5.	IMI.2-GR.01.06-2.2888	04/07/2012	Permohonan VKSK Kolaborator CIFOR an. Karamura Deborah Alice
6.	IMI.2-GR.01.06-2.2902	05/07/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta High Level Meeting (HLM) di Bali
7.	IMI.2-GR.01.06-2.671	06/07/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta SDM AMAF ke-33 dan special SOMAMAF+3 ke-11
8.	IMI.2-GR.01.06-2.2962	10/07/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta kick-off Meeting for The South and South East Asia Region in regards to The Project : "Trade Promotion through Environmental Standards for the SESA Region"
9.	IMI.2-GR.01.06-2.2961	10/07/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Perayaan HUT ke-60 Full Gospel Bussiness Men's Fellowship International (FGBMFI) dan World Convention 2012.
10.	IMI.2-GR.01.06-2.2960	10/07/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta International Workshop on Public Administration Reforms for Good Governance
11.	IMI.2-GR.01.06-2.4017	16/07/2012	Permohonan VKSK an. Syed Wasif Gillani
12.	IMI.2-GR.01.06-2.4135	23/07/2012	Pemberian VKSK bagi tamu PT. Indonesia Air Asia an. Santos Suelley Nadine Fernandes
13.	B/645/VII/2012	04/07/2012	Surat Permohonan Bantuan Pengurusan Keimigrasian Bagi Peserta PSOS (Peace Support Operation Seminar)
14.	B-054/kemsetneg/setmen/KTLN/KL.05/07/2012	02/07/2012	Daftar Peserta HLM Bali dari Negara Calling Visa untuk mendapatkan Fasilitas Kekonsuleran
15.	096/KEMENHAM/JULY/8/12	13/07/2012	Permohonan Visa On Arrival
AGUSTUS 2012			
1.	IMI.2-GR.01.06-2.787	16/08/2012	Permohonan VKSK bagi delegasi dari Negara Mongolia dalam kegiatan Pandemic Influenza Workshop and Optimizing Collaborative Regional Health Response
2.	IMI.2-GR.01.06-4542	28/08/2012	Permohonan VKSK bagi delegasi dalam kegiatan Pandemic Influenza Workshop and Optimizing Collaborative Regional Health Response
3.	IMI.2-GR.01.06-.806	31/08/2012	Permohonan VKSK bagi instruktur dan peserta kegiatan Global Peacekeeping Operations Instructor Course (UNPKOIC) dan United Nations Peacekeeping Operations Contingent Commanders' Course (UNPKOCC)
4.	IMI.2-GR.01.06-2.805	31/08/2012	Permohonan VKSK bagi delegasi Pertemuan Health Ministerial Meeting (HMM) ke-30 dan WHO Regional Committee Meeting (RCM) ke-65
SEPTEMBER 2012			
1	IMI.2-GR.01.06-2.816	03/09/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Sidang Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) Working Group on Agricultural Investment and Food Security
2	IMI.2-GR.01.06-2.815	03/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Kegiatan V-Net Conference
3	IMI.2-GR.01.06-2.825	03/09/2012	Permohonan VKSK An Mr. Raj Kumar Malia
4	IMI.2-GR.01.06-2.4668	04/09/2012	Pemberian VKSK bagi Peserta Workshop APO Study

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
			Meeting on Performance Management for Public Sector
5	IMI.2-GR.01.06-2.838	06/09/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Kegiatan The 15 th Session of the Commission for Basic Systems (CBS-XV) of the World Meteorological Organization
6	IMI.2-GR.01.06-2.840	07/09/2012	Permohonan VKSK bagi Tambahan Peserta Kegiatan The 15 th Session of the Commission for Basic Systems (CBS-XV) of the World Meteorological Organization
7	IMI.2-GR.01.06-2.839	07/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Sidang Umum ke-33 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
8	IMI.2-GR.01.06-2.4795	11/09/2012	Permohonan VKSK An Chilalika Francis Sacks
9	IMI.2-GR.01.06-2.850	12/09/2012	Permohonan VKSK bagi Tamu The Inspection and Coordination Committee Meeting
10	IMI.2-UM.01.01-2.860	13/09/2012	Pemintaan Untuk Menghadiri Undangan Indonesia-Australia Joint Awareness Campaign on Anti-People Smuggling di Bali tanggal 17 September 2012
11	IMI.2-GR.01.06-2.861	13/09/2012	Permohonan VKSK bagi 4 orang BIKSU Menghadiri Kegiatan Pilgrimage Journey to Borobudur
12	IMI.2-GR.01.06-2.862	13/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Sidang Umum ke-33 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
13	IMI.2-GR.01.06-2.866	14/09/2012	Permohonan VKSK bagi Tamu WHO dari The Global Fun CCM-Bhutan
14	IMI.2-GR.01.06-2.865	14/09/2012	Permohonan VKSK An Obabiyi Aishan Ajibola (Finalis World Muslimah Beauty)
15	IMI.2-GR.01.06-2.869	17/09/2012	Permohonan Bantuan Untuk Memperoleh VKSK kepada Peserta Pertemuan G20 Development Working Group ke-4 2012
16	IMI.2-GR.01.06-2.887	19/09/2012	Permohonan VKSK bagi Wn Bhutan An Dechen Zam
17	IMI.2-GR.01.06-2.4999	21/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Seminar CECS LEVEL IV REFRESHSER WORKSHOP
18	IMI.2-GR.01.06-2.919	24/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta APT Workshop on Digital Economy
19	IMI.2-GR.01.06-2.5008	24/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta "1 st CISM Asia Military Parachuting Championship and Indonesia Military Parachuting Open" Tahun 2012
20	IMI.2-GR.01.06-2.1111	24/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Kongres Arsitek Arcasia yang ke-15
21	IMI.2-GR.01.06-2.933	26/09/2012	Permohonan VKSK bagi Tamu dari H.M. Anis Matta, Lc., Wk. Ketua DPR RI A-96 / Periode 2009-2014
22	IMI.2-GR.01.06-2.935	26/09/2012	Pemberian VKSK bagi Peserta the 4 th United Cities and Local Government Asia Pasific Congress (UCLG ASPAC Congress)
23	IMI.2-GR.01.06-2.934	26/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta In Person International Steering Committee Meeting Global Youth Forum
24	IMI.2-GR.01.06-2.938	27/09/2012	Pemberian VKSK bagi Delegasi Sidang Codex Committee on Fish and Fisheries Product (CCFFP) ke-32 An Andrade Lopes Maria Ivone
25	IMI.2-GR.01.06-2.940	27/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta pertemuan The 3 rd D-8 Agricultural Ministerial Meeting on Food Security



NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
26	IMI.2-GR.01.06-2.939	28/09/2012	Pemberian VKSK bagi Peserta Pertemuan Clinical Trial Authorization
27	IMI.2-GR.01.06-2.943	28/09/2012	Permohonan VKSK bagi Delegasi Olympic Council of Asia (OCA)
OKTOBER 2012			
1.	IMI.2-GR.01.06-2.5108	01/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Aerobic Gymnastic 2012 3 rd Asian Championships Asia Age Competition dari Negara Mongolia
2.	IMI.2-GR.01.06-2.5097	01/10/2012	Permohonan VKSK Dan Kedatangan melalui Bandara Ngurah Rai Untuk Ambassador Rogelio. G
3.	IMI.2-GR.01.06-2.5109	01/10/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Kegiatan 32 nd Codex Committee on Fish and Fishery Product An Mr. Emma Belai
4.	IMI.2-GR.01.06-2.968	03/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta APT Workshop on Digital Economy
5.	IMI.2-GR.01.06-2.983	03/10/2012	Permohonan VKSK bagi tamu dari H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A Anggota DPR RI/Wk. Ketua Komisi VIII A-63/Periode 2009-2014
6.	IMI.2-GR.01.06-2.985	03/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Tambahan Delegasi APT Workshop on Digital Economy
7.	IMI.2-GR.01.06-2.5206	04/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta 5 th AMCDRR (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction)
8.	IMI.2-GR.01.06-2.989	05/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Sidang Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) Working Group on Agricultural Investment and Food Security
9.	IMI.2-GR.01.06-2.990	05/10/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Cartagena Dialogue for Progressive Actions ke-9
10.	IMI.2-UM.01.01-2.1010	09/10/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta World Export Development Forum (WEDF) 2012
11.	IMI.2-GR.01.06-2.944	28/09/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta ICAO-INDONESIA Developing Countries Training Programme
12.	IMI.2-GR.01.06-2.1013	10/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Tamu CIFOR untuk Kegiatan Governance for Forest, Nature and People 2012 Meeting
13.	IMI.2-GR.01.06-2.1022	11/10/2012	Permohonan VKSK bagi Tamu Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
14.	IMI.2-GR.01.06-2.5374	11/10/2012	Permohonan VKSK An Osman Kodoruth, Peserta Pendidikan dan Pelatihan Safety Management System (SMS International)
15.	IMI.2-GR.01.06-2.5425	12/10/2012	Permohonan VKSK bagi Tim Senam Aerobik dari Negara Sri Lanka
16.	IMI.2-GR.01.06-2.5426	15/10/2012	Permohonan VKSK An Rana Krishant
17.	IMI.2-GR.01.06-2.5422	12/10/2012	Permohonan VKSK bagi Delegasi dari Negara Sri Lanka Untuk Kegiatan Sidang Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)
18.	IMI.2-GR.01.06-2.5427	15/10/2012	Permohonan VKSK bagi Tambahan Peserta 5 th AMCDRR (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction)
19.	IMI.2-GR.01.06-2.5428	15/10/2012	Permohonan VKSK bagi Perwakilan Delegasi Pertemuan CTI-SEA Inception Workshop dan CTI Monitoring and Evaluation Working Group Meeting

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
20.	IMI.2-GR.01.06-2.5429	15/10/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Kegiatan-Kegiatan EXLIMA dan INDOTRACE
21.	IMI.2-GR.01.06-2.1048	16/10/2012	Permohonan VKSK bagi Tambahan Peserta 5 th AMCDRR (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction)
22.	IMI.2-GR.01.06-2.1049	16/10/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Kegiatan Pameran Indo Defence, Indo Aerospace & Indo Marine (IDAM) 2012
23.	IMI.2-GR.01.06-2.5470	17/10/2012	Pemberian VKSK bagi Menteri Keuangan Republik Eriteria An Hagos Ghebrehiwet W/Kidan
24.	IMI.2-GR.01.06-2.5566	19/10/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Workshop on Value Chain Management in Agribusiness dan Workshop on Innovation in the Food and Agribusiness Industry
25.	IMI.2-GR.01.06-2.1073	19/10/2012	Permohonan VKSK An Ahmad Ali Farid Hasan Qasem, Tamu dari Drs. Al Muzzammil Yusuf, Anggota Komisi I DPR RI
26.	IMI.2-GR.01.06-2.5612	24/10/2012	Permohonan VKSK bagi Atlit Dansa Dari China
27.	IMI.2-GR.01.06-2.1110	25/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta 5 th AMCDRR (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction)
28.	IMI.2-GR.01.06-2.5689	29/10/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Sidang Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) Working Group on Agricultural Investment and Food Security
29.	IMI.2-GR.01.06-2.1135	31/10/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Cartagena Dialogue for Progressive Actions ke-9
NOPEMBER 2012			
1	IMI.2-VM.01.01_5696A	02/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Asian Seed Congress 2012
2	IMI.2-GR.01.06-2.5810	02/11/2012	Pemberian VKSK Bagi Peserta Bali Democracy Forum V (BDF V)
3	IMI.2-GR.01.06-2.1160	02/11/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Simposium Internasional APSCO dari Negara Mongolia
4	IMI.2-UM.01.01-5696A	02/11/2012	Permohonan Jalur Khusus Acara Asian Seed Congress 2012
5	IMI.2-GR.01.06-2.1166	06/11/2012	Permohonan VKSK bagi Delegasi Kegiatan Persiapan Peringatan 10 Tahun Bali Process
6	IMI.2-GR.01.06-2.1163	06/11/2012	Permohonan VKSK An Mintah Benjamin Kumah, Pengajar Regional Training "Food Safety and HACCP"
7	IMI.2-GR.01.06-2.5890	08/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Narasumber Pertemuan "Lessons from Undinesia Experiences in Disaster Reconstruction and Preparedness " an International Conference to mark the Closure of the MDF and JRF Programns
8	IMI.2-GR.01.06-2.1188	08/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Pembicara Konferensi "Lessons from Undinesia Experiences in Disaster Reconstruction and Preparedness "
9	IMI.2-UM.01.01-1147	08/11/2012	Daftar Peserta kegiatan Lomba Dayung Internasional "Musi Triboaton 2012" yang Diajukan Permohonan VKSK
10	IMI.2-GR.01.06-2.1195	09/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Tambahan Peserta Kegiatan 10 th Anniversary of Bali Process
11	IMI.2-GR.01.06-1196	08/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Kolabolator CIFOR An Mrs. Bimbika Basnett
12	IMI.2-GR.01.06-2.1189	09/11/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Parliamentary Event on Interfaith Dialogue
13	IMI.2-GR.01.06-2.1213	13/11/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta International Conference



NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
			Principles for Anti-Corruption Agencies
14	IMI.2-GR.01.06-2.1214	13/11/2012	Permohonan VKSK bagi Pemain, Pelatih dan Official Tim Kamerun
15	IMI.2-GR.01.06-2.1218	14/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Tamu LPPI Dalam Kegiatan Exposure Visit Program on Microfinance in Indonesia
16	IMI.2-GR.01.06-2.1219	14/11/2012	Permohonan VKSK bagi Kolaborator Catholic Relief Services
17	IMI.2-GR.01.06-2.1236	20/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Tamu Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia
18	IMI.2-GR.01.06-2.1235	20/11/2012	Permohonan VKSK bagi Fasilitator Komisi Nasional untuk UNESCO dalam Kegiatan Associated School Project (ASPnet) Workshop on Learning to Life Together
19	IMI.2-GR.01.06-2.1238	20/11/2012	Permohonan VKSK Bagi Tamu Bank Indonesia An. Tahir Muhammad, Cs
20	IMI.2-GR.01.06-2.1241	21/11/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Global Youth Forum 2012
21	IMI.2-GR.01.06-2.6121	22/11/2012	Permohonan VKSK An Dr. Paras Kumar Pokharel
22	IMI.2-GR.01.06-2.6122	22/11/2012	Permohonan VKSK An Sangay Zangmo
23	IMI.2-GR.01.06-2.6137	23/11/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Kegiatan Nint Session of the UNESCO IOC Intergovernmental Coordination for the Group Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System
24	IMI.2-GR.01.06-2.1270	27/11/2012	Permohonan VKSK bagi Delegasi The Fourth Ministerial Conference on the Role of Women in Development of OIC Member States
25	IMI.2-GR.01.06-2.1269	27/11/2012	Permohonan VKSK bagi Tambahan Peserta Global Youth Forum: Youth Rights at the Hear of Development
26	IMI.2-GR.01.06-2.1275	28/11/2012	Pemberian VKSK An Al Meqdad Salem Abdullah Saeed
27	IMI.2-GR.01.06-2.1284	28/11/2012	Permohonan VKSK An Tshewang Namgay, Peserta CECS Level III Course on Sprints/Hurdles
28	IMI.2-GR.01.06-2.1289	29/11/2012	Permohonan VKSK bagi Delegasi The Fourth Ministerial Conference on The Role of Women in Development of OIC Member States
29	IMI.2-GR.01.01-2.1291	30/11/2012	Bantuan Penyelesaian Keimigrasian untuk Kunjungan Kenegaraan Seri Paduka Bagindan Yang Di-Pertuan Agung XIV Malaysia ke Indonesia
DESEMBER 2012			
1	IMI.2-GR.01.06-2.1299	03/12/2012	Permohonan VKSK An Malaka Cynthia La-Toya Parker, Peserta Global Youth Forum: Young Rights at the Heart of Development dari Negara Antigua dan Barbuda
2	IMI.2-GR.01.06-2.5097	03/12/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Tambahan Global Youth Forum: Young Rights at the Heart of Development dari
3	IMI.2-GR.01.06-2.1300	03/12/2012	Permohonan VKSK An Binoy Krishna Bala, Peserta Senior Mission Leader Course
4	IMI.2-GR.01.06-2.6383	06/12/2012	Pemberian VKSK Bagi Delegasi dari Negara Kamerun dalam Kegiatan The Fourth Ministerial Confernece on the Role of Women in Development of OIC
5	IMI.2-GR.01.06-2.1311	06/12/2012	Permohonan VKSK An Panik Sanja, Pelatih Tim Handball Iran
6	IMI.2-GR.01.06-2.1321	07/12/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta The International

NO.	No. Surat	Tanggal	Perihal
			Development Research Centre (IDRC), Final Research Synthesis Meeting dari Negara Mongolia
7	IMI.2-GR.01.06-2.1323	07/12/2012	Permohonan VKSK Bagi Peserta Expert Meeting on the IPCC Guidelines and Software
8	IMI.2-GR.01.06-2.1322	07/12/2012	Permohonan VKSK An Ghale Pragyana, Anak dari Anggota Staf WHO di Jakarta
9	IMI.2-GR.01.06-2.6522	13/12/2012	Permohonan VKSK An Rana Krishant, Anak dari Anggota Staf WHO di Jakarta
10	IMI.2-UM.01.01-2.6523	13/12/2012	Pemberian VKSK An Francis Forkey Doe, Pemain Klub FC Selangor Malaysia
11	IMI.2-GR.01.06-2.1299	13/12/2012	Permohonan VKSK Bagi Pemain Klub FC Selangor Malaysia An Obinna Nwaneri, Cs
12	IMI.2-GR.01.06-2.5097	13/12/2012	Permohonan VKSK An Rana Anudan Jung, Cs, Tamu dari Dr. Bardan Jung Rana
13	IMI.2-GR.01.06-2.5097	13/12/2012	Permohonan VKSK An Multi Kamara Abubakarr
14	IMI.2-GR.01.06-2.6504	13/12/2012	Permohonan VKSK An Al Meqdad Salem Abdullah Saeed
15	IMI.2-GR.01.06-2.6501	13/12/2012	Permohonan VKSK bagi Kepala Pelatih Sepakbola Malaysia An Alves Divaldo Da Silva Teixeira
16	IMI.2-GR.01.06-2.6657	20/12/2012	Permohonan VKSK bagi Peserta Seminar IAAF Pilot Project Athletics for School
17	IMI.2-GR.01.06-2.6656	20/12/2012	Permohonan VKSK Bagi Pemain Klub FC Selangor Malaysia An Obinna Nwaneri, Cs

Sedangkan data perlintasan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang terdapat di Seluruh VKSK adalah sebagai berikut:

Type Visa	TAHUN 2012												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mar	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	
Vksk 30 Hari	292.545	252.146	272.078	263.862	259.048	284.907	336.728	298.163	313.645	303.053	249.950	114.088	3.240.213
Vksk Non Subyek Negara 30 Hari	250	235	844	236	283	365	333	150	249	377	163	222	3.707
Vksk 7 Hari	17.827	12.735	13.847	12.771	11.163	11.652	11.763	14.083	12.011	14.024	12.700	6.221	150.797
Vksk Non Subyek Negara 7 Hari	58	52	2	3	20	3	1	1	7	1	31	3	182
TOTAL	310.680	265.168	286.771	276.872	270.514	296.927	348.825	312.397	325.912	317.455	262.844	120.534	3.394.899

c. Seksi Visa Tinggal Terbatas

Pelaksanaan kegiatan periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 telah menerbitkan permohonan visa tinggal terbatas (VTT) sebanyak 77.730 orang.

Rekapitulasi VTT Periode Januari s.d Desember 2012

No.	Periode	Visa Tinggal Terbatas	Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
1.	Januari	5.894	65
2.	Pebruari	5.900	281
3.	Maret	5.549	61
4.	April	6.440	214
5.	Mei	6.315	253
6.	Juni	7.779	149
7.	Juli	7.782	87
8.	Agustus	6.251	137
9.	September	5.380	333
10.	Oktober	7.364	336
11.	November	6.700	444
12.	Desember*	6.829	156
Jumlah		78.183	2.516

Selain Visa yang diberikan persetujuan, juga ada visa yang ditolak hal ini dikarenakan antara lain :

- 1) permohonan atau persyaratan dari pemohon yang tidak lengkap;
- 2) nama identik atau terdapat dalam daftar cekal, yang diharuskan untuk diklarifikasi terlebih dahulu, sehingga permohonan ditolak;
- 3) belum mendapat EPO (Exit Permit Only) biasanya bagi pemegang vitas;
- 4) input data dari pemohon yang tidak lengkap dan salah.

d. Seksi Visa Negara Tertentu

- 1) Rapat *Calling Visa* di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengundang instansi terkait yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-095.PR.09.06 Tahun 2011 Tanggal 17 Januari 2011 dengan anggota dari instansi terkait seperti BAIS TNI, BIN, Dephan dan lain sebagainya. Pelaksanaan Rapat dilaksanakan setiap hari Selasa setiap minggunya, dan dihasilkan persetujuan permohonan sebanyak 3.097, permohonan yang ditunda/diundang/cek sebanyak 5.751 dan permohonan

yang ditolak sebanyak 1.556 dengan rincian data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rekapitulasi Persetujuan Pemberian Calling Visa Januari s.d Desember 2012

No	Warga Negara	Disetujui					Ditunda / Diundang / Cek					Ditolak					
		Vs	Vk	Vkbp	Vtt	Jml	Vs	Vk	Vkbp	Vtt	Jml	Vs	Vk	Vkbp	Vtt	Jml	
1	Afghanistan	3	62	0	4	69	2	196	10	17	225	0	11	0	3	3	116
2	Bangladesh	4	84	15	40	143	0	295	44	54	393	0	10	4	15	13	132
3	Guinea	2	11	25	2	40	1	12	8	2	23	0	16	0	0	0	16
4	Irak	3	33	7	4	47	1	125	10	1	137	0	68	5	1	74	
5	Israel	9	485	1	0	495	2	172	1	0	175	0	62	3	1	66	
6	Kamerun	40	109	134	12	295	2	54	14	5	75	0	18	2	2	22	
7	Korea Utara	0	4	0	0	4	0	30	0	0	30	0	12	0	0	12	
8	Liberia	3	15	47	2	67	0	5	4	0	9	0	2	0	0	2	
9	Niger	4	7	28	0	39	2	7	11	1	21	0	4	2	0	6	
10	Nigeria	69	359	347	43	818	1	1,590	472	93	2,156	0	45	7	33	24	514
11	Pakistan	77	567	135	101	880	5	1,177	228	89	1,499	0	43	1	44	21	496
12	Somalia	3	17	0	5	25	4	21	3	18	46	0	22	3	4	29	
13	Srilanka	1	99	43	32	175	6	883	46	27	962	1	57	11	2	71	
Total						3,097					5,751					1,556	
JUMLAH PEMOHON																	

2) Pengecekan Lapangan Terhadap Permohonan Persetujuan Visa Warga Negara Asing yang Memerlukan *Calling Visa*.

Pengecekan lapangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara yang Ditetapkan Sebagai Negara *Calling Visa* tanggal 14 Januari 2012. Rincian kegiatan pengecekan lapangan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Rincian Kegiatan Cek Lapangan (dalam kota)

No	Nama	Nomor Sprint	Tanggal Sprint	Keterangan Dan Lokasi	Hasil
1	Kurniadie, SH, MH Muhammad Akmal, SH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH	IMI.4.GR.02.01-4.0049	05 Januari 2012	PT Bintani Megah Indah Wisma Indocement, Lt.17, Jl. Jenderal Sudirman Kav 70-71 Jakarta	Disetujui permohonan Calling Visa
				PT Maxmoda Indo Global Jl. Boulevard Raya Timur, Blok NE I/38C Kelapa Gading, Jakut	
				PT Asia Duta International Artha Gading Niaga, Blok A/15 A Jakarta	
				PT Benua Asia Vision Citra Graha Building Suite 1002, Lt.10. Jl. Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jaksel	
				PT Mulia Prima Permai Jl Kesehatan, No.5 A Bintaro Jakarta	
2	Kurniadie, SH, MH	IMI.4.GR.02.01-4.0164	20 Januari 2012	An. Imelda Manampiring/Imelda Rose Manampiring	Disetujui permohonan Calling Visa
	Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH				
	Suleman				
3	Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH	IMI.4.GR.02.01-4.0278	30 Januari 2012	WN Korea An. Moon Myung Ha Jl Telaga Biru No.60, Taman Mediterranean, Tangerang	Disetujui permohonan Calling Visa
	Lukman				
4	Kurniadie, SH, MH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH Ajinur Seno	IMI.4.GR.02.01-4.0417	08 Februari 2012	PT Pacific Interlink SDN BHD Menara Kadin Indonesia, HR Rasuna Said Blok X-6 Kav 2-3 Jakarta	Disetujui permohonan Calling Visa
	Kurniadie, SH, MH Muhammad Akmal, SH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH			PT Pacific Indomas Menara Kadin Indonesia, HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Jakarta	
5	Kurniadie, SH, MH	IMI.4.GR.02.01-4.0556	22 Februari 2012	PT Pacific Royale Airways Tanah Abang II No.59 Jakarta Pusat	Disetujui permohonan Calling Visa
	Muhammad Akmal, SH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH				
6	Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH Arie Wibowo, Amd.Im Ajinur Seno	IMI.4.GR.02.01-4.0885	16 Maret 2012	Sponsor An. Rosmina Silaban	
7	Kurniadie, SH, MH S Indrayana Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH Suleman	IMI.4.GR.02.01-4.911	19 Maret 2012	PT BASF Indonesia Plaza GRI 11th Floor, Blok X2/1 Jl HR Rasuna Said, Jakarta	
				Islamic Relief Komp. Bungur Indah No.1 Jl Bungur Kemanga Tengah	

No	Nama	Nomor Sprint	Tanggal Sprint	Keterangan Dan Lokasi	Hasil
				Bangka, Jaksel	
8	Muhammad Akmal, SH Fauzi Arie Wibowo, Amd.Im Ajinur Seno	IMI.4.GR.02.01-4.912	19 Maret 2012	PT Indo Afghan Trading and Logistic Plaza Pasific Blok A2 No.36 Jl Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakut PT Aventis Pharma	
9	Kurniadie, SH, MH Ari Tri E Moeljantoro, Arie Wibowo, Amd.Im	IMI.4.GR.02.01-4.1025	28 Maret 2012	PT CL Jakarta Container Jl. Lombok Blok A29-30 Jakarta	
10	Kurniadie, SH, MH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH Ajinur Seno	IMI.4.GR.02.01-4.1067	02 April 2012	PT Indo Asia Multi Trading Jl. Danau Toba No.104 Jakarta Pusat	
				PT Katano International Indonesia Metro Sunter Apt Jakarta	
11	Kurniadie, SH, MH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH	IMI.4.GR.02.01-4.1179a	13 April 2012	Kitas WN. Iran an. Fazeli Sayed Ahmad Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan	Melanggar UU Keimigrasian No.6 tahun 2011 Ditolak Izin Tinggal Terbatas
12	Kurniadie, SH, MH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH	IMI.4.GR.02.01-4.1185	16 April 2012	PT Lauser Baterindo Utama Jl. Siaga Raya No.12 G, Pejaten Jakarta Selatan	
13	Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH Ajinur Seno Suleman	IMI.4.GR.02.01-4.1236	18 April 2012	Kutipan Akta Nikah An. Ezebuiro Madua Kolam Nobleu (Wn. Nigeria) & Istri WNI An. Sri Hariyanti KUA Kec. Taruma Jaya, Bekasi Jabar	
14	Kurniadie, SH, MH Ahmad Jeffry, Amd. Im, SH	IMI.4.GR.02.01-4.1455	04 Mei 2012	PT Kewalram Indonesia Plasa BII, Menara 2 Lt.2 Jl MH Thamrim No.51 Jakarta	Disetujui permohonan Calling Visa utk negara2 rawan
15	Kurniadie, SH, MH Ari Tri E Moeljantoro, SH, MH S. Indrayana Fauzi	IMI.4.GR.02.01-4.2281	20 Juli 2012	PT Surya Toto Indonesia Jl. Tomang Raya No.18 Jakarta	Disetujui permohonan Calling Visa Ditolak permohonan Calling Visa
				PT Antrinco Mulia Sejati Jl. KH Wahid Hasyim No.185B Jakarta	
16	Kurniadie, SH, MH S Indrayana	IMI.4.GR.02.01-4.2774	17 September 2012	PT Phinisi Tri Mandiri Jl KH Mas Mansyur, No.56 Jakarta	

No	Nama	Nomor Sprint	Tanggal Sprint	Keterangan Dan Lokasi	Hasil
	Ahmad Jeffry Arie Wibowo, Amd.Im				
17	Kurniadie, SH, MH Muhammad Akmal, SH Fauzi	IMI.4.GR.02.01- 4.3051	15 Oktober 2012	PT Lucky Carpets Radio Dalam No.123 Gandaria Jakarta Selatan	

b. Luar kota

No	Nama	Nomor Sprint	Tanggal Sprint	Tanggal Keberangkatan	Keterangan Dan Lokasi	Hasil
1	Ari Tri E Moeljantoro, SH, MH S. Indrayana Jimmy Suleman	IMI.4.GR.02.01 -4.0531	16 Pebruari 2012	24-26 Februari 2012	Bogor	
2	Ari Tri E Moeljantoro, SH, MH Rizal Fahlevie Yakup Kuncara	IMI.4.GR.02.01 -4.1056	30 Maret 2012	11-13 April 2012	PT. STARWOOD FURNITURE INDONESIA Jepara, Jawa Tengah	Permohonan disetujui karena secara kelengkapan administrasi sudah memenuhi persyaratan
3	Ari Tri E Moeljantoro, SH, MH S. Indrayana Anggiat Napitupulu Ajinur Seno	IMI.4.GR.02.01 -4.1278A	4-Apr-12	03-05 Mei 2012	PT. NILA AGRO NIAGA MODERAM EN GEREJA BATAK KARO PROTESTA N Medan, Sumatera Utara	Disetujui dgn kelengkapan adm Disetujui permohonan Calling Visa
4	Kurniadie, SH, MH Tato J Hidayawan Dedi Cahyadi I, S.Sos, MM Sopyan	IMI.4.GR.02.01 -4.1278A	20-Apr-12	16-18 Mei 2012	PT. PERMATA HIJAU SAWIT Medan, Sumatera Utara	Permohonan disetujui karena secara kelengkapan administrasi sudah memenuhi persyaratan
5	Ari Tri Esthi M, SH, MH	IMI.4.GR.02.01 -4.		20-22 Juni 2012	Mengecek Surat Nikah AN. TRIANINGSI H	Setelah dilakukan pengecekan,

No	Nama	Nomor Sprint	Tanggal Sprint	Tanggal Keberangkatan	Keterangan Dan Lokasi	Hasil
	Suaib Kuncara				Yogyakarta	Permohonan disetujui karena, semua data dan surat pernikahannya sah dan asli
6	Iwan Irawan, SH Kuncara Yakup Erikson Simanjuntak	IMI.4.GR.02.01-4.		24-26 Oktober 2012	Mengecek Surat Nikah AN. Leonny Gunawan Singaraja, Bali	Setelah dilakukan pengecekan, Permohonan disetujui karena, semua data dan surat pernikahannya sah dan asli
7	Mas Agus Santoso, S.Sos Muhammad Akmal, SH Wirdo Nefisco Abas Basori	IMI.4.GR.02.01-4.		24-26 Oktober 2012	PT. Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna Surabaya, Jawa Timur	Perusahaan bonafid dan Data Perusahaan Lengkap Permohonan visa disetujui
8	S. Indrayana Ari Tri Esthi M, SH. MH Jimmy Sopyan	IMI.4.GR.02.01-4.1137	31 Oktober 2012	12-14 November 2012	PT. Glamour International Trading	Permohonan Visa disetujui Klengkapan data perusahaan lengkap
9	S. Indrayana Ari Tri Esthi M, SH. MH Tato Juliadin H Sopyan	IMI.4.GR.02.01-4.		02-04 Desember 2012	Pengecekan Data-Data Kesiapan utk Pernikahan dengan Penjamin Bapak. Sunardi Malang, Jawa Timur	Permohonan Visa disetujui Klengkapan data kesiapan nikah lengkap
10	Wardhany, S.Ip, MH Rachmat S. Lubis Fauzi Ahmad Jeffry, SH	IMI.4.GR.02.01-4.		28-30 November 2012		Permohonan disetujui
11	Erik Simanjuntak Mohamad Soleh Wirdo Nefisco Kuncara	IMI.4.GR.02.01-4.		25-27 November 2012	Pengecekan Surat Nikah AN. Sumarni Kudus, Jawa Tengah	Permohonan disetujui
12	S. Indrayana Iwan Irawan	IMI.4.GR.02.01-4.		28-30 November 2012	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung,	Permohonan dibatalkan

No	Nama	Nomor Sprint	Tanggal Sprint	Tanggal Keberangkatan	Keterangan Dan Lokasi	Hasil
	Yakup Sopyan				Jawa Barat	
13	Lili Ramli, SH Ari Tri E Moeljantoro, SH, MH Jimi Hardian Kuncara	IMI.4.GR.02.01-4.		28-30 November 2012	Pengecekan Surat Nikah An. Dida Rosmiati KUA di Batam Kepri	Permohonan disetujui

Dalam pelaksanaan tugas di bidang persetujuan dan pelayanan visa, Subdit. Visa menyusun berbagai peraturan maupun kebijakan baik yang bersifat mengatur (*regelling*) maupun mengarahkan. Berbagai peraturan, kebijakan maupun rumusan kebijakan teknis di bidang visa sebagai berikut:

a. Peraturan-peraturan

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 08 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 08 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*;
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara *Calling Visa*.

b. Surat Edaran

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.2-UM.01.01-2.094 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penolakan Visa yang Dikeluarkan Konsul Kehormatan RI. Surat Edaran ini sebagai direktif/petunjuk kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia yang membawahi TPI untuk menilak pemberian tanda masuk bagi Warga Negara Asing yang mendapatkan Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsul Kehormatan RI di luar negeri;
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-UM.01.01-1120 tanggal 29 Februari 2012 perihal Penggunaan *Emergency Travel*

Document oleh Warga Negara Asing. Surat Edaran ini sebagai direktif/petunjuk kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) agar tidak memberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) kepada pemohon warga negara asing pemegang *Emergency Travel Document*, tidak terkecuali bagi negara-negara yang merupakan subyek fasilitas VKSK.

c. Rancangan Peraturan/Kebijakan:

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bidang Visa.

2. Subdirektorat Izin Masuk, Bertolak dan TPI

Dalam upaya peningkatan pemahaman teknis dalam mekanisme pemberian Izin Keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-717.PR.09.10 Tahun 2012 tentang Tim Bimbingan Teknis Pemberian Izin Keimigrasian Tahun 2012, Subdirektorat Izin Masuk, Bertolak dan TPI (Subdit. Inmaslak dan TPI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberian Izin Keimigrasian pada:

- a. Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Juni s.d 01 Juni 2012
- b. Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2012
- c. Jakarta, DKI Jakarta pada tanggal 17 s.d 19 September 2012
- d. Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 07 s.d 10 Nopember 2012
- e. Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 19 s.d 22 Nopember 2012.

Serta untuk meningkatkan pemahaman teknis di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bagi Pejabat/Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri, Subdit. Inmaslak dan TPI menyelenggarakan Bimtek Doklanvisfaskim Pada 4 Perwakilan pada:

- a. Seminar tentang “ICAO Regional Seminar on Machine Readable Travel Documents, Biometrics and Border Security” yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 17 s.d 19 April 2012;
- b. Seminar tentang Diaspora Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 06 s.d 08 Juli 2012;
- c. Lokakarya tentang “Optimalisasi Upaya Perlindungan Pekerja Migran asal Indonesia di Luar Negeri dan Tanggapan Kebutuhan Masyarakat Indonesia di Belanda, dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 08 September 2012;

d. Sosialisasi tentang “Kebijakan Bidang Pelayanan Publik dan Good Governance” yang dilaksanakan di Ankara, Turki pada tanggal 10 s.d 11 September 2012”.

Berdasarkan tugas dan fungsi Subdit. Inmaslak dan TPI telah melaksanakan Pemberian Izin Keimigrasian dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012. Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap Seksi pada Subdit. Inmaslak dan TPI dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Seksi Izin Masuk

Pemberian izin keimigrasian pada Seksi Izin Masuk periode Jan s.d 12 Des 2012.

No.	Bulan	Perpanjangan Erp/ Merp	Permohonan Erp	Koreksi Index
1	Januari	45	7	3
2	Pebruari	46	6	0
3	Maret	46	3	0
4	April	28	1	8
5	Mei	31	1	6
6	Juni	33	1	4
7	Juli	45	0	3
8	Agustus	47	1	3
9	September	52	0	7
10	Oktober	29	7	6
11	Nopember	45	2	4
12	Desember	20	1	1
JUMLAH		467	30	45

b. Seksi Izin Bertolak

Pemberian izin keimigrasian pada Seksi Izin Masuk periode Januari s.d 12 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Bulan	Tanda Bertolak Pada Pp	Epo	Penundaaan Keberangkatan
1	Januari	42	2	2
2	Pebruari	50	1	8
3	Maret	35	5	3
4	April	20	0	4
5	Mei	37	0	3
6	Juni	38	1	4
7	Juli	42	2	2
8	Agustus	48	0	3
9	September	51	0	4
10	Oktober	55	0	6

No.	Bulan	Tanda Bertolak Pada Pp	Epo	Penundaan Keberangkatan
11	Nopember	48	0	2
12	Desember	8	9	1
Jumlah		474	20	42

c. Seksi TPI dan PLB

Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas (PLB) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengendalian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012, Seksi TPI dan PLB telah melakukan Monitoring dan Evaluasi di 5 TPI sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan Evaluasi rencana pembukaan TPI Laut Siak pada tanggal 10 s.d 12 Mei 2012;
- 2) Monitoring dan Evaluasi rencana pembukaan TPI Udara Kuala Namu pada tanggal 17 s.d 20 Juli 2012;
- 3) Monitoring dan Evaluasi rencana pembukaan TPI Udara Fatmawati Soekarno pada tanggal 17 s.d 19 September 2012;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Autogate di Bandar Soekarno-Hatta pada tanggal 15 s.d 16 Oktober 2012; dan
- 5) Monitoring dan Evaluasi rencana pembukaan TPI Udara Raja Ampat pada tanggal 30 Oktober s.d 5 Nopember 2012.

Dalam pelaksanaan melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan bimbingan teknis dalam rangka persetujuan pemberian izin masuk, izin bertolak serta pelaksanaan kebijakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang bersifat mengatur (*regelling*) maupun mengarahkan. Berbagai peraturan, kebijakan maupun rumusan kebijakan teknis di bidang pemberian izin keimigrasian yang telah dihasilkan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

a. Peraturan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tanggal 15 Juni 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

b. Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bidang izin masuk, bertolak dan TPI serta PLB.

3. Subdirektorat Surat Perjalanan

Subdirektorat Surat Perjalanan (Subdit. Surjal) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian/penerbitan dan pengesahan, serta pengendalian surat perjalanan/paspor biasa.

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 telah dicetak 2.879.930 paspor yang terdiri dari 1.356.000 format lama dan 1.523.930 format baru dengan rincian sebagai berikut:

Data Pencetakan Paspor RI

No	Jenis Paspor	Format Paspor		Jumlah
		Format Lama	Format Baru	
1	Papsor Biasa 48 Hal	1,250,000	1,323,930	2,573,930
2	Paspor Biasa 24 Hal	106,000	200,000	306,000
JUMLAH		1,356,000	1,523,930	2,879,930

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-718.PR.09.10 Tahun 2012 tentang Tim Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia Tahun 2012, dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012, Subdit. Surjal melaksanakan Bimbingan Teknis tersebut pada:

- a. Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 23 s.d 25 Mei 2012;
- b. Hotel Aryaduta Makassar pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2012;
- c. Hotel Aryaduta Medan pada tanggal 3 s.d 5 September 2012; dan
- d. Hotel Aryaduta Makassar pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2012.

Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap Seksi pada Subdit. Surjal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Seksi Pelayanan Paspor Biasa

Seksi Pelayanan Paspor Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian/penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas serta pengesahan surat perjalanan yang dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 telah merumuskan 3 Peraturan di bidang Pemberian/penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas serta pengesahan surat perjalanan.

b. Seksi Analisa Pemberian Paspor Biasa

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengendalian pemberian/ penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas serta penelaahan dalam rangka persetujuan pemberian/penerbitan paspor biasa dan pas lintas batas. Jumlah pencetakan Paspor 48 Halaman dalam kurun waktu 1 Januari s.d 21 Desember 2012 sebanyak 1.650.373 blanko dan Paspor 24 Halaman sebanyak 312.840 blanko. Sedangkan untuk penerbitan Paspor bagi Jamaah Haji sebanyak 177.524 Paspor.

Dalam hal yang bersifat mengatur (*regelling*) maupun mengarahkan. Berbagai peraturan, kebijakan maupun rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2012 telah dihasilkan:

a. Peraturan

- 1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:12 Tahun 2012 tanggal 1 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Paspor;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 07 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Paspor;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 Tanggal 04 Januari 2012 tentang Perubahan ke enam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 (Perubahan Pasal 4) tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.2.GR.01.01-3.125 tanggal 07 Februari 2012 tentang Penerbitan Paspor Calon TKI pada kanim setempat berdasarkan rekomendasi Instansi setempat.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 Tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

b. Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bidang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.

4. Subdirektorat Surat Perjalanan TKI

Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia (Subdit. Surjal TKI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian/penerbitan dan pengesahan serta pengendalian surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia Timur Tengah.

Pelaksanaan tugas perbantuan pelayanan paspor RI kepada TKI Bermasalah beserta keluarga di luar negeri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-794.PR.09.06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Perbantuan Tenaga Dalam Rangka Pemutihan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Bermasalah di Kuala Lumpur Malaysia. Pada tanggal 12 s.d 21 April 2012 dikirimkan Tim I dengan beranggotakan 6 (enam) orang Pejabat Imigrasi untuk diperbantukan di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Tim tersebut telah menyelesaikan permohonan sebanyak 2.439 Paspor bagi TKI Bermasalah yang berada di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur. Hingga akhir tahun 2012 tidak dilakukan pengiriman tim dikarenakan tidak adanya permintaan dari Perwakilan RI yang ada di luar negeri Subdit Surjal TKI telah melakukan Sosialisasi Tata Cara Penerbitan dan Pengamanan SPRI untuk Calon TKI pada 9 lokasi yaitu:

- a. Kanim Kelas I Makassar pada tanggal 18 s.d 19 September;
- b. Kanim Kelas II Pare-Pare pada tanggal 19 s.d 21 September 2012;
- c. Kanim Kelas I Padang pada tanggal 22 s.d 23 Oktober 2012;
- d. Kanim Kelas II Bukit Tinggi pada tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012;
- e. Kanim Kelas I Jambi pada tanggal 30 s.d 31 Oktober 2012;
- f. Kelas II Kuala Tungkal pada tanggal 31 Oktober s.d 2 Nopember 2012;
- g. Kanim Kelas II Pemalang pada tanggal 7 s.d 9 Nopember 2012;
- h. Kanim Kelas II Tarakan pada tanggal 11 s.d 13 Nopember 2012; dan
- i. Kanim Kelas I Bandar Lampung pada tanggal 21 s.d 23 Nopember 2012.

Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap Seksi pada Subdit. Surjal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Seksi Pelayanan Paspor Tenaga Kerja Indonesia

Seksi Pelayanan Paspor Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberian paspor khusus tenaga kerja Indonesia Timur Tengah. Pada periode Januari s.d 27 Desember 2012, Seksi Pelayanan Paspor Tenaga Kerja Indonesia telah memberikan *endorsement* Paspor TKI sebanyak:

NO.	BULAN	ENDORSEMENT
1	Januari	Nihil
2	Februari	Nihil
3	Maret	Nihil
4	April	Nihil
5	Mei	33
6	Juni	53
7	Juli	45
8	Agustus	19
9	September	19
10	Oktober	1.902
11	Nopember	264
12	Desember	492
Jumlah		2.827

b. Seksi Analisa Pemberian Paspor Tenaga Kerja Indonesia

Seksi Analisa Pemberian Paspor Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dalam rangka pengendalian pemberian surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia Timur Tengah, serta analisa dan pemeriksaan paspor hilang, rusak dan penggandaan. Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2012, telah menghasilkan 2 peraturan.

Dalam hal yang bersifat mengatur (*regelling*) maupun mengarahkan. Berbagai peraturan, kebijakan maupun rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan TKI pada kurun waktu Tahun Anggaran 2012 telah dihasilkan:

1) Peraturan

- a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012 Tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- b) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.2.GR.01.01-3.125 tanggal 07 Februari 2012 tentang Penerbitan Paspor Calon TKI pada kanim setempat berdasarkan rekomendasi Instansi setempat.

2) Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bidang dokumen perjalanan khusus TKI.

5. Subdirektorat Fasilitas Keimigrasian

Subdirektorat Fasilitas Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan dan bimbingan teknis serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian fasilitas keimigrasian untuk ibadah keagamaan dan pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut.

Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap Seksi pada Subdit. Faskim dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Seksi Layanan Keagamaan

Kegiatan Seksi Layanan Keagamaan dalam Tahun Anggaran 2012 yaitu Sosialisasi Pelayanan Ibadah Haji pada Embarkasi dan Monitoring Pelayanan Ibadah Haji pada Embarkasi.

1) Sosialisasi Pelayanan Ibadah Haji pada Embarkasi

Kegiatan sosialisasi ini didasari atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1818.PR.09.06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pelayanan Ibadah Haji pada Embarkasi Tahun 2012, kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada:

- a) Batam, Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 September 2012;
- b) Banda Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 September 2012;
- c) Palembang, Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 04 Oktober 2012;
- d) Pondok Gede, Jakarta dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2012;
- e) Makassar, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 04 Oktober 2012;
- f) Medan, Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 10 Oktober 2012;
- g) Balikpapan, Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 10 Oktober 2012;
- h) Bekasi, Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2012;
- i) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 10 Oktober 2012;
- j) Padang, Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 11 Oktober 2012;
- k) Surabaya, Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Oktober 2012.

2) Monitoring Kedatangan Dan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Embarkasi Sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-1178.PR.09.10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Rangka Embarkasi/Debarkasi Calon Jemaah Haji Tahun 1433H/2012 serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-593.PR.09.06 Tahun 2012 tentang Tim Perbantuan Penyelesaian Keimigrasian Bagi Jemaah Haji Tahun Anggaran 2012, seharusnya dilakukan kegiatan penyelesaian keimigrasian di atas alat angkut bagi para calon jemaah haji (Immigration On Board). Namun sehubungan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dikarenakan tidak disetujui oleh Kementerian Agama, maka dilakukan revisi anggaran dimana kegiatan tersebut dirubah menjadi monitoring keberangkatan dan kedatangan calon/jemaah haji pada embarkasi. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:

- a) Monitoring Keberangkatan Calon Jemaah Haji, telah dilaksanakan di 12 lokasi.
- b) Monitoring Kedatangan Jemaah Haji yang telah dilaksanakan di 12 lokasi.

b. Seksi Layanan Pendaratan Di Atas Alat Angkut

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 Seksi Layanan Pendaratan di Atas Alat Angkut telah melaksanakan Sosialisasi Layanan Elektronik Keimigrasian (ABTC/Smart Card/Saphire) pada:

- 1) Manado pada tanggal 4 s.d 6 Juli 2012;
- 2) Denpasar pada tanggal 11 s.d 13 Juli 2012;
- 3) Semarang pada tanggal 29 s.d 31 Oktober 2012;
- 4) Mataram pada tanggal 7 s.d 9 Nopember 2012;
- 5) Pontianak pada tanggal 19 s.d 21 Nopember 2012;
- 6) Pekanbaru pada tanggal 26 s.d 28 Nopember 2012;
- 7) Pangkal Pinang pada tanggal 3 s.d 5 Desember 2012.

Dalam kurun waktu tahun anggaran ini telah melaksanakan Tugas dan Fungsi Pemeriksaan Keimigrasian kedatangan Kapal Pesiar (*on shipping*) bagi penumpang wisatawan Asing pemegang Visa On Arrival di TPI VOA bekerja sama dengan PT. Pelni dan Bank Persepsi yang ditunjuk (BRI) sebagai bukti penyetoran tentang biaya VOA. Adapun data pelaksanaan *on shipping* Tahun Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Kegiatan Pelayanan Pendaratan Di Atas Alat Angkut Laut
Periode Bulan Januari s.d Desember 2012

No.	Nama Kapal / Bendera	Agen Pelayaran	Penumpang / Crew	Dari / Etd	Tujuan / Eta
1	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	81 Orang / 73 Orang	Malaysia (Kuching) 4-Jan-12	Kalteng (Kumai) 6-Jan-12
2	"Mv. Seven Seas Voyager" Bahamas	PT. Pelni	601 Orang / 452 Orang	Singapura 6-Jan-12	Semarang 8-Jan-12
3	"Mv. Athena" Portuguese	PT. Pelni	530 Orang / 240 Orang	Australia (Fremantle) 9-Jan-12	Bali (Benoa) 13-Jan-12
4	"Mv. Legend Of The Seas" Bahamas	PT. Andhika Gac	2.000 Orang / 900 Orang	Singapura 13-Jan-12	Bali (Benoa) 16-Jan-12
5	"Mv. Seabourn Legend" Bahamas	PT. Pelni	212 Orang / 180 Orang	Singapura 15-Jan-12	Semarang 18-Jan-12
6	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	81 Orang / 73 Orang	Malaysia (Kuching) 15-Jan-12	Kep. Riau (Natuna) 19-Jan-12
7	"Mv. Discovery" Bermuda	PT. Pelni	650 Orang / 318 Orang	Malaysia (Sandakan) 25-Jan-12	Sulawesi Utara (BITUNG) 27-Jan-12
8	"Mv. Spirit Adventure" Bahamas	PT. Andhika Gac	213 Orang / 197 Orang	Png (Port Moresby) 27-Jan-12	Maluku (Bandanaira) 31-Jan-12
9	"Mv. Pacific Venus" Japan	PT. Tirta Samudera Caraka	345 Orang / 217 Orang	Australia (Fremantle) 29-Jan-12	Semarang 3-Feb-12
10	"Mv. Seabourn Legend" Bahamas	PT. Pelni	212 Orang / 180 Orang	Singapura 6-Feb-12	Semarang 9-Feb-12
11	"Mv. Columbus" Bahamas	PT. Andhika Gac	328 Orang / 172 Orang	Australia (Darwin) 7-Feb-12	Ntt (Larantuka) 9-Feb-12
12	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	91 Orang / 73 Orang	Malaysia (Tawau) 7-Feb-12	Kaltim (Tj. Redeb) 8-Feb-12
13	"Mv. Oriana" Bermuda	PT. Pelni	1.950 Orang / 830 Orang	Brunei D. (Bandar Seri B.)	Bali (Benoa)

No.	Nama Kapal / Bendera	Agen Pelayaran	Penumpang / Crew	Dari / Etd	Tujuan / Eta
				9-Feb-12	12-Feb-12
14	"Mv. Crystal Serenity" Bahama	PT. Andhika Gac	750 Orang / 650 Orang	Australia (Fremantle) 17-Feb-12	Bali (Benoa) 21-Feb-12
15	"Mv. Athena" Portuguese	PT. Pelni	530 Orang / 240 Orang	Australia (Fremantle) 20-Feb-12	Bali (Benoa) 24-Feb-12
16	"Mv. Celebrity Century" Bahama	PT. Andhika Gac	1.775 Orang / 847 Orang	Australia (Broome) 21-Feb-12	Bali (Benoa) 23-Feb-12
17	"Mv. Amadea" Bahamas	PT. Pelni	620 Orang / 260 Orang	Png 19-Feb-12	Maluku (Ambon) 23-Feb-12
18	"Mv. Seabourn Pride" Bahamian	PT. Pelni	218 Orang / 174 Orang	Thailand (Phuket) 19-Feb-12	Aceh (Sabang) 23-Feb-12
19	"Mv. Queen Mary 2" British	PT. Pelni	3.108 Orang / 1.275 Orang	Australia (Darwin) 22-Feb-12	Bali (Tn. Ampo) 24-Feb-12
20	"Mv. Discovery" Bermuda	PT. Pelni	600 Orang / 314 ORANG	Australia (DARWIN) 22-Feb-12	Bali (BENOA) 26-Feb-12
21	"Mv. Orion li" Malta	PT. Pelni	91 Orang / 73 Orang	Malaysia (Kuching) 24-Feb-12	Kep. Riau (Natuna) 25-Feb-12
22	"Mv. Aurora" Bermuda	PT. Pelni	2.050 Orang / 815 Orang	Australia (Darwin) 24-Feb-12	Bali (Tn. Ampo) 27-Feb-12
23	"Mv. Rhapsody Of D Seas" Nassau	PT. Andhika Gac	1.838 Orang / 765 Orang	Australia (Darwin) 24-Feb-12	Bali (Benoa) 27-Feb-12
24	"Mv. Radiance Of D Seas" Nassau	PT. Andhika Gac	2.126 Orang / 918 Orang	Australia (Darwin)	Bali (Benoa)

No.	Nama Kapal / Bendera	Agen Pelayaran	Penumpang / Crew	Dari / Etd	Tujuan / Eta
				27-Feb-12	1-Mar-12
25	"Mv. Albatros" Bermuda	PT. Pelni	800 Orang / 500 Orang	Australia (Fremantle) 28-Feb-12	Bali (Benoa) 4-Mar-12
26	"Mv. Saga Ruby" British	PT. Andhika Gac	489 Orang / 393 Orang	Australia (Cairns) 29-Feb-12	Sulut (Bitung) 5-Mar-12
27	"Mv. Amsterdam" Nederlands	PT. Pelni	1.400 Orang / 650 Orang	Australia (Cairns) 1-Mar-12	Lombok (Ampanan) 6-Mar-12
28	"Mv. Seven Seas Voyager" Bahamas	PT. Pelni	650 Orang / 447 Orang	Australia (Darwin) 4-Mar-12	Bali (Tn. Ampo) 7-Mar-12
29	"Mv. Athena" Portuguese	PT. Pelni	530 Orang / 240 Orang	Australia (Fremantle) 7-Mar-12	Sulsel (Pare-Pare) 13-Mar-12
30	"Mv. Sea Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.767 Orang / 854 Orang	Australia (Darwin) 11-Mar-12	Bali (Benoa) 14-Mar-12
31	"Mv. Arcadia" Bermuda	PT. Pelni	2.016 Orang / 860 Orang	Australia (Fremantle) 16-Mar-12	Bali (Benoa) 20-Mar-12
32	"Mv. Albatros" Bahamas	PT. Pelni	650 Orang / 349 Orang	Malaysia (Penang) 17-Mar-12	Aceh (Sabang) 18-Mar-12
33	"Mv. Ocean Princess" Bermuda	PT. Pelni	750 Orang / 373 Orang	Australia (Darwin) 25-Mar-12	Bali (Benoa) 28-Mar-12
34	"Mv. Dawn Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.902 Orang / 854 Orang	Australia (Darwin) 25-Mar-12	Bali (Benoa) 28-Mar-12
35	"Mv. Seabourn Pride" Bahamas	PT. Pelni	210 Orang / 173 Orang	Singapura 28-Mar-12	Sum-Ut Belawan 30-Mar-12
36	"Mv. Rhapsody Of The Seas"	PT. Andhika Gac	1.838 Orang /	Singapura	Bali

No.	Nama Kapal / Bendera	Agen Pelayaran	Penumpang / Crew	Dari / Etd	Tujuan / Eta
	Nassau		765 Orang	29-Mar-12	(Benoa) 1-Apr-12
37	"Mv. Silver Shadow" Bahamas	PT. Pelni	382 Orang / 302 Orang	Penang (Malaysia) 31-Mar-12	Belawan (Sumut) 1-Apr-12
38	"M.V Orion" Malta	PT. Pelni	75 Orang / 74 Orang	Thursday Island (Australia) 5-Apr-12	Timika (Jayapura) 8-Apr-12
39	"Mv. Sun Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.950 Orang / 854 ORANG	Darwin (Australia) 21-Apr-12	Lombok (NTB) 25-Apr-12
40	"Mv. Sun Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.950 Orang / 854 ORANG	Fremantle (Australia) 29-Apr-12	Lombok (NTB) 3-May-12
41	"Mv. Dawn Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.980 Orang / 855 ORANG	Broome (Australia) 8-Jun-12	Lombok (NTB) 10-Jun-12
42	"Mv. Dawn Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.985 Orang / 855 Orang	Fremantle (Australia) 14-Jun-12	Benoa (Bali) 18-Jun-12
43	"Mv. Dawn Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.990 Orang / 850 ORANG	Koh Samui (Thailand) 2-Jul-12	Lombok (NTB) 6-Jul-12
44	"Mv. Dawn Princess" Bermuda	PT. Pelni	1.990orang / 840 ORANG	Fremantle (Australia) 10-Jul-12	Lombok (NTB) 14-Jul-12
45	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	85orang / 73 ORANG	Kuching (Malaysia) 9-Aug-12	Kep. Natuna (Riau) 12-Aug-12
46	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	85orang / 73 ORANG	Singapura 14-Aug-12	Kep. Natuna (Riau) 16-Aug-12
47	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	73 Orang / 85 ORANG	Kuching 18-Aug-12	Pk. Bun 20-Aug-12
48	"Mv. Orion Ii"	PT. Pelni	73 Orang /	Kuching	Natuna



No.	Nama Kapal / Bendera	Agen Pelayaran	Penumpang / Crew	Dari / Etd	Tujuan / Eta
	Malta		85 ORANG	30-Aug-12	1-Sep-12
49	"Mv. Orion Ii" Malta	PT. Pelni	73 Orang / 85 ORANG	Singapura 3-Sep-12	Kep. Natuna (RIAU) 5-Sep-12
50	Mv. Orion Ii Malta	PT. Pelni	73 Orang / 85 Orang	Kuching 30 Aug 2012	Kep. Natuna 01 Sept 2012
51	Mv. Orion Ii Malta	PT. Pelni	70 Orang / 75 Orang	Kuching 08 Okt 2012	Kep. Natuna 10 Okt 2012
52	Mv. Orion Ii Malta	PT. Pelni	70 Orang / 75 Orang	Singapura 12 Okt 2012	Kep. Natuna 14 Okt 2012
53	Mv. Orion Ii Malta	PT. Pelni	73 Orang /75 Orang	Kuching 08 Okt 2012	Pk. Bun (Kumai) 10 Okt 2012
54	Mv. Radiance Nasau	PT.Andhika Gac	2.100 Orang/ 864 Orang	Darwin (Australia) 20 Okt 2012	Bali 23 Okt 2012
55	Ms. Amsterdam	PT. Andhika Gac	1021 Orang/ 637 Orang	Singapura 26 Okt 2012	Semarang 29 Okt 2012
56	Mv. Dawn Princess Bermuda	PT. Pelni	1990 Orang/ 850 Orang	Darwin 26 Okt 2012	Lombok 29 Okt 2012
57	Ms. Volendam Netherland	PT. Andhika Gac	1300 Orang/ 620 Orang	Darwin 31 Okt 2012	Komodo 3 Nov 2012
58	Mv. Neo Romantica Italia	PT. Andhika Gac	1500 Orang/ 650 Orang	Singapura 22 Nov 2012	Semarang 24 Nov 2012
59	Mv. Ocean Princess Bermuda	PT. Pelni	725 Orang/ 370 Orang	Ho Chi Minh 18 Nov 2012	Lombok 22 Nov 2012
60	Costa Celebrity Malta	PT. Andhika	2707 Orang/ 1218 Orang	Singapura 24 Nov 2012	Benoa 27 Nov 2012
61	Celebrity	PT. Andhika	2090 Orang/	Darwin	Benoa

No.	Nama Kapal / Bendera	Agen Pelayaran	Penumpang / Crew	Dari / Etd	Tujuan / Eta
	Millennium		950 Orang	02 Des 2012	05 Des 2012
62	Volendam Netherland	PT. Andhika	1300 Orang/ 603 Orang	Darwin 03 Des 2012	Komodo 05 Des 2012
63	Mv. Seven Seas Voyager	PT. Pelni	600 Orang/ 400 Orang	Singapura 15 Des 2012	Semarang 17 Des 2012
64	Mv. Silver Shadow Bahamas	PT. Pelni	382 Orang/ 302 Orang	Singapura 20 Des 2012	Benoa 23 Des 2012
65	Seabourn Odyssey Bahamas	PT. Andhika	450 Orang/ 339 Orang	Singapura 12 Des 2012	Semarang 15 Des 2012
66	Seabourn Pride Nahamas	PT. Andhika	192 Orang 171 Orang	Penang 20 Des 2012	Belawan 21 Des 2012
67	Mv. Ocean Dream Panama	PT. Pelni	1100 Orang/ 500 Orang	Singapura 25 Des 2012	Tj. Priok 27 Des 2012

Dalam hal yang bersifat mengatur (*regelling*) maupun mengarahkan. berbagai peraturan, kebijakan maupun rumusan kebijakan teknis di bidang pemberian fasilitas keimigrasian pada kurun waktu Tahun Anggaran 2012 telah dihasilkan rancangan MOU antara Ditjen. Imigrasi dengan PT. Pelni mengenai pemberian fasilitas di atas alat angkut.

C. Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian selama tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Subdirektorat Izin Tinggal

Dalam hal tugas dan fungsi, Sub Direktorat Izin Tinggal pada periode Januari sampai desember 2012 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan persetujuan pelaksanaan perpanjangan izin tinggal kunjungan ke V bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia lebih dari 6 (enam) bulan;
- 2) Memberikan persetujuan pelaksanaan pemberian Izin Tinggal Terbatas dan perpanjangannya bagi orang asing yang menetap di Indonesia;

- 3) Memberikan persetujuan pelaksanaan pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi anak orang asing yang menetap di Indonesia dari orang tua asing pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) ;
- 4) Memberikan persetujuan pelaksanaan pemberian Izin Tinggal Tetap serta perpanjangannya bagi orang asing yang menetap di Indonesia;
- 5) Memberikan persetujuan pelaksanaan perubahan jabatan dan atau sponsor bagi orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan
- 6) Memberikan persetujuan pelaksanaan pemberian Izin Tnggal Terbatas bagi Nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Rekapitulasi Pelayanan Pada Subdit Izin Tinggal
Periode 2012

NO.	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	Izin Tinggal Kunjungan : Visa Kunjungan Sosial Budaya	89	81	28	95	29	39	38	46	33	21	21	29	549
	Visa Kunjungan Usaha	14	29	21	32	21	27	38	37	29	29	24	50	351
	Visa Kunjungan Wisata													0
	VKUBP													0
	JUMLAH	103	110	49	127	50	66	76	83	62	50	45	79	97
2	Izin Tinggal Terbatas : Perpanjangan Itas	1240	1353	1558	1840	2046	1775	1605	1064	1152	1699	1772	2008	19112
	Alih Sponsor Kitas	29	25	10	50	68	57	36	32	21	42	19	17	406
	Alih Jabatan Itas	120	84	105	90	48	19	52	40	39	52	57	75	781
	Alih Sponsor & Jabatan Rangkap	50	60	55	19	12	5	2	5	3	4	10	9	234
	Jabatan Pemb. & Perp. I T	27	30	20	25	16	14	5	7	11	10	5	10	180
	Khusus/Teto	27		4		2	13	18	12				32	108
	JUMLAH	1493	1552	1752	2024	2192	1883	1718	1160	1226	1807	1895	2119	20821
3	Izin Tinggal Tetap : Perpanjangan Kitap	89	87	103	104	67	92	66	22	38	42	65	25	800
	Perpanjangan Kitap Ex Ig	0			2			10	7					19
	JUMLAH	89	87	103	106	67	92	76	29	38	42	65	25	819

NO.	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML
	Perpanjangan KITAS Ex Ig							2	1	4				7
	Alih Sponsor	8	10	14			10	12	1	6	11	5	6	83
	Alih Jabatan	0	3	2	3	1	1	2				2	3	17
	Alih Sponsor & Jabatan	0	2		10	3	2		1		3		1	22
	Rangkap Jabatan	0						1				1	1	3
	Pemberian Kitap Baru Ex Ig	0					3	6	10	6				25
	Pemberian Kitap Baru Ex Ig	0												0
	Penggantian Skk/Stp Ke Kitap													0
	JUMLAH	97	102	119	119	71	108	99	42	54	56	73	36	976
4	Dahsuskim :													
	Baru	420	1539	2084	1380	1026	930	1201	997	1224	1615	693	1272	14381
	Perpanjangan	1202	1525	1204	681	1923	1193	1680	1302	2331	1658	1466	1172	17337
	Penambahan	661	892	925	857	963	676	798	703	761	1013	844	713	9806
	Penggantian	40	39	55	63	48	94	75	41	43	31	60	56	645
	Penangguhan													
	Perpanjangan	23	12	5	19	15	5	49	30	26	8	16	5	213
	JUMLAH	2346	4007	4273	3000	3975	2898	3803	3073	4385	4325	3079	3218	42382

b. Sub Direktorat Alih status

Dalam hal tugas dan fungsi, Sub Direktorat Alih status pada periode Januari-Desember 2012 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan persetujuan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing dalam rangka tinggal sementara di Indonesia;
- 2) Memberikan persetujuan pelaksanaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi orang asing dalam rangka menetap di Indonesia;
- 3) Menolak permohonan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
- 4) Memberikan persetujuan alih status dari Izin Tinggal Dinas menjadi ITAS.

Rekapitulasi Pelayanan Pada Subdit Alih Status Keimigrasian Tahun 2012

No	Jenis Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	JML
1	Izin Tinggal Kunjungan Menjadi ITAS : Tenaga Kerja Asing	56	156	148	122	158	177	220	78	75	151	182	106	1629
	Rohaniawan Asing	0						0	0	0				0

	Mahasiswa/Pelajar Asing	208	278	315	297	105	139	139	178	181	299	355	471	2965
	Penyatuan Keluarga	66	62	83	85	67	77	73	64	58	83	82	91	891
	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI	0						0	0	0				0
	Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara	2	4		2	1	1	1	0	1	2	1	0	15
	Pertimbangan Kemanusiaan	2	23	4	5	12	9	5	8	2	11	7	7	95
	JUMLAH	334	523	550	511	343	403	438	328	317	546	627	675	5595
2	ITAS Menjadi ITAP :													
	Tenaga Kerja Asing	1						0	19	7	9	10	18	64
	Penanam Modal	17	25	28	6	26	14	20	26	13	15	26	25	241
	Tenaga Kerja Asing Langka	0						0	0	0	0	0	0	0
	Top Manager	0	7		18	18	16	9	0	0	0	0	0	68
	Rohaniawan													
	Asing	0	2	1	4	7	1	0	6	3	2	0	3	29
	Penyatuan Keluarga	58	51	52	94	79	74	76	93	77	79	105	53	891
	Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara	3	8	13	17	14	6	9	21	14	10	15	12	142
	Pertimbangan Kemanusiaan	0	1	1		2	0	2	0	0	2	1	0	9
	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI	0						0	0	0		0	0	0
	JUMLAH	79	94	95	139	146	111	116	165	114	117	157	111	1444
3	Izin Tinggal Dinas Menjadi ITAS :													
	Setneg	35	54	30	21	37	27	27	40	37	451	185	65	1009
	Deplu/Diplomatik	1	2	3	7	2	3	2	3	6	7	16	3	55
	JUMLAH	36	56	33	28	39	30	29	43	43	458	201	68	1064

c. Sub Direktorat Penelaahan Statuskim dan Kewarganegaraan

Dalam hal tugas dan fungsi, Sub Direktorat Penelaahan Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan pada periode Januari-Desember 2012 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan tentang status orang asing yang tinggal dan atau menetap di wilayah Indonesia dalam rangka pewarganegaraan;

- b. Menerbitkan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing yang menetap di wilayah Indonesia dalam rangka pewarganegaraan;
- c. Menolak memberikan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Rekapitulasi Pelayanan
Pada Subdit Penelaahan Status Keimigrasian
Periode 2012

No.	Jenis Pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	S K I M	17	26	23	31	25	15	19	14	18	35	18	9	250
2	Mutasi - Mutandis													0
3	Persetujuan Skim Ig	2												2
4	Pemeriksaan Status Kewarganegaraan													0
5	Penolakan Skim		1	1		1				1	2		1	7
	Jumlah	19	27	24	31	26	15	19	14	19	37	18	10	259

D. Direktorat Intelijen Keimigrasian

Rencana serta program kerja Direktorat Intelijen keimigrasian akan diukur pencapaian kinerjanya dengan menggunakan instrumen anggaran yang difasilitasi melalui 5 (lima) program kegiatan dengan jumlah Rencana Kerja Anggaran/RKA sebesar Rp.12.075.211.000,-, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengamanan Intelijen Keimigrasian

Indikator kinerja kegiatan dari Kegiatan Pengamanan Intelijen Keimigrasian adalah: persentase (%) pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur.

a. Jenis kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Pengamanan Perizinan Keimigrasian;
- 2) Pengamanan Personil, Material dan Dokumen;
- 3) Pengamanan Kantor dan Instalasi Vital;
- 4) Evaluasi dan Laporan Pengamanan Intelijen Keimigrasian

b. Alasan kegiatan dilaksanakan

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pejabat Imigrasi diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi intelijen keimigrasian.

Pengertian intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui

analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi (pasal 1 angka 30 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011); Fungsi dan peranan pengamanan intelijen Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-914.PW.01.10 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Intelijen Keimigrasian, adalah:

- 1) sebagai upaya pencegahan dini, pendeteksian dini, dan pemberian peringatan dini (*early warning*) guna bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- 2) sebagai pelaksanaan dan pengamanan kebijakan pemerintah dan pimpinan di bidang Keimigrasian;
- 3) sebagai pencipta kondisi untuk mendukung pelaksanaan tugas imigrasi, serta tugas-tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan di dalam negeri;
- 4) sebagai pengarah dan dinamisator kegiatan pembinaan operasional Ditjenim;
- 5) sebagai penyelenggara pelayanan keimigrasian di bidang Intelijen Pengamanan Keimigrasian

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kegiatan Pengamanan Perizinan Keimigrasian; Pengamanan Personil, Material dan Dokumen; Pengamanan Kantor dan Instalasi Vital; Evaluasi dan laporan Pengamanan Intelijen Keimigrasian dilaksanakan.

1) Penerima manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Pengamanan Intelijen Keimigrasian adalah;

- a) Masyarakat
- b) Pemerintah

2) Strategi pencapaian keluaran

Metode pelaksanaan berupa swakelola.

3) Waktu pencapaian keluaran

Waktu pencapaian persentase pengamanan terhadap Kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur adalah selama 1 (satu) tahun anggaran 2012.

4) Biaya yang diperlukan

Biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 dengan Rincian Rencana Kerja Anggaran sebesar : Rp. 1.062.880.000,-.

2. Kerjasama Intelijen Keimigrasian

Indikator kinerja kegiatan dari Kerjasama Intelijen Keimigrasian adalah persentase kerjasama lembaga intelijen dan bimbingan jaringan non lembaga yang implementatif.

a. Kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Kegiatan Kerjasama intelijen;
- 2) Kegiatan Bimbingan Jaringan Non Lembaga;
- 3) Evaluasi dan laporan kerjasama intelijen.

b. Alasan kegiatan dilaksanakan

Semakin meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, pencucian uang dan banyaknya pelarian pelaku tindak pidana korupsi ke Luar Negeri, telah disikapi dengan diratifikasinya *United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime 2000* melalui UU Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya, yang menjadikan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting antara lain dengan diberikannya kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan fungsi intelijen keimigrasian (Pasal 74 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Adapun yang dimaksud dengan intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi;

Untuk dapat menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi diperlukan suatu bahan keterangan dari laporan Kegiatan Kerjasama Intelijen dan Kegiatan Bimbingan Jaringan Non Lembaga.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Kerjasama Intelijen Keimigrasian adalah:

- 1) Masyarakat
- 2) Pemerintah

d. Strategi pencapaian keluaran

Metode pelaksanaan berupa swakelola.

e. Waktu pencapaian keluaran

Waktu pencapaian persentase kerjasama lembaga intelijen dan bimbingan jaringan non lembaga yang implementatif adalah selama 1 (satu) tahun anggaran 2012.

f. Biaya yang diperlukan

Biaya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 dengan Rincian Rencana Kerja Anggaran sebesar Rp.1,362,189,000,-.

3. Pengawasan Orang Asing

Indikator kinerja kegiatan dari Kegiatan Pengawasan Orang Asing adalah jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur.

a. Kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Melaksanakan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Tingkat Pusat;
- 2) Operasi Intelijen Keimigrasian;
- 3) Operasi Kewilayahan dengan Kendali Pusat;
- 4) Bimbingan Teknis Pengawasan Keimigrasian
- 5) Evaluasi dan laporan keluaran orang asing illegal.

b. Alasan kegiatan dilaksanakan

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tugas pokok fungsi instansi Keimigrasian di bidang pengawasan Keimigrasian saat ini semakin luas yaitu disamping melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia juga memiliki wewenang pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Bahkan dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan apabila dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian ditemukan keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kegiatan Pengawasan Orang Asing, Operasi Intelijen Keimigrasian, Operasi Kewilayahan dengan Kendali Pusat serta Evaluasi dan laporan keluaran orang asing illegal dilaksanakan, sehingga dapat disusun Laporan Pengawasan Orang Asing.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pengawasan Orang Asing adalah:

- 1) Masyarakat
- 2) Pemerintah

d. Strategi pencapaian keluaran

Metode pelaksanaan berupa swakelola.

e. Waktu pencapaian keluaran

Waktu pencapaian jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur adalah selama 1 (satu) tahun anggaran 2012.

f. Biaya yang diperlukan

Biaya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012 dengan Rincian Rencana Kerja Anggaran sebesar Rp. 3,187,472,000,-

4. Produk Intelijen Keimigrasian

Indikator kinerja kegiatan dari Produk Intelijen Keimigrasian adalah jumlah produk laporan informasi intelijen keimigrasian yang di distribusikan.

a. Kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Penyajian Laporan Produksi Intelijen;
- 2) Bimbingan Teknis Dokumen Palsu (*Fraud*);
- 3) Bimbingan Teknis Dasar Intelijen Keimigrasian;
- 4) Perawatan Peralatan Laboratorium Forensik;
- 5) Pengembangan Laboratorium Forensik Imigrasi;
- 6) Evaluasi Pelaksanaan Penyajian Laporan Produksi Intelijen.

b. Alasan kegiatan dilaksanakan

Produk Intelijen Keimigrasian adalah merupakan hasil dari suatu kegiatan Operasional Intelijen Keimigrasian dibuat setelah melalui suatu proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian dan penafsiran, yang hanya dapat diperoleh berdasarkan Laporan Harian, Laporan Harian Khusus atau Aktual, Laporan informasi, Laporan Informasi Khusus, Laporan Atensi, Telaahan Intelijen Keimigrasian, Laporan Khusus Intelijen Keimigrasian, Nota Intelijen Keimigrasian, dan Perkiraan Intelijen keimigrasian.

Dengan demikian maka Laporan Produk Intelijen Keimigrasian agar dapat disajikan maka diperlukan adanya komponen input berupa Penyajian Laporan Produksi Intelijen, Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Dokumen Palsu (*Fraud*) Keimigrasian, Bimbingan Teknis Dasar Intelijen Keimigrasian serta kegiatan evaluasi pelaksanaan penyajian laporan produksi intelijen.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari Produk Intelijen Keimigrasian adalah :

- 1) Masyarakat
- 2) Pemerintah

d. Strategi pencapaian keluaran

- 1) Metode pelaksanaan berupa swakelola.
- 2) Pengembangan Peralatan Laboratorium Forensik melalui Penyedia

e. Waktu pencapaian keluaran

Waktu pencapaian jumlah produksi laporan informasi intelijen keimigrasian yang didistribusikan adalah selama 1 (satu) tahun anggaran 2012.

f. Biaya yang diperlukan

Biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi tahun anggaran 2012 dengan Rincian Rencana Kerja Anggaran sebesar Rp. 6.082.320.000,-.

5. Peraturan di bidang Intelijen Keimigrasian

Indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Peraturan di Bidang Intelijen Keimigrasian adalah jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang responsive implementatif dan akuntabel.

a. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Perumusan Kebijakan di Bidang Intelijen Keimigrasian dan
- 2) Kegiatan Rapat Bidang Intelijen Keimigrasian

b. Alasan kegiatan dilaksanakan

Untuk terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah, diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Mengingat vitalnya peranan peraturan perundang-undangan keimigrasian khususnya di bidang Intelijen Keimigrasian sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi imigrasi di lapangan, maka perlu upaya perumusan, penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan keimigrasian dari waktu ke waktu dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

Untuk kepentingan tersebut Dit. Intelkim perlu senantiasa melakukan pengkajian, penelaahan dan pengevaluasian serta monitoring/supervisi implementasi terhadap berbagai peraturan keimigrasian di bidang Intelijen Keimigrasian.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Intelijen Keimigrasian

- 1) Masyarakat
- 2) Pemerintah

d. Strategi pencapaian keluaran

Metode Pelaksanaan dilakukan secara swakelola

e. Waktu pencapaian keluaran

Waktu pencapaian keluaran jumlah rumusan kebijakan teknis bidang intelijen keimigrasian adalah selama 1 (satu) tahun anggaran 2012.

f. Biaya yang diperlukan

Biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi tahun Anggaran 2012 dengan Rincian Rencana Kerja Anggaran sebesar Rp. 380.350.000,-.

6. Program Pengamanan Intelijen Keimigrasian

a. Pengamanan terhadap Kantor dan Instalasi Vital

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
30-31 Januari	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Unit Khusus TKI Tangerang, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0279 tgl 30 Jan. 2012	Saat ini aset-aset yang ada di Unit Khusus TKI masih dalam proses relokasi namun belum tuntas dan nampak berjalan lamban, dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan.
01-03 Feb	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Tarakan Kalimantan Timur Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0269 tgl 25 Jan. 2012	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan kantor lebih rendah dari jalan raya rawan banjir Ruangan arsip terlalu banyak menggunakan kaca tanpa ada besi pengaman rentan pencurian Pemasangan CCTV didepan customer service sehingga kurang efektif.
27-29 Feb	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Kediri Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0477 tgl 14 Feb 2012	Meski gedung kantor telah ada namun belum dapat beroperasi karena belum ada/ belum dilengkapi dengan peralatan e-paspor dan e-office
29 Feb sd 2 Maret	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Rudenim Semarang Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0537 tgl 17 Feb. 2012	<ol style="list-style-type: none"> Hanya tersedia 1 (satu) kamar untuk deteni; Tidak dilakukan penataan ruangan secara baik, sehingga banyak terdapat ruangan kosong Kurangnya kesadaran petugas Rudenim untuk menjaga lingkungan Kantor
5 s.d 7 Maret	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Bukit Tinggi Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0590 tgl 22 Feb. 2012	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan baru Kanim Bukit Tinggi saat ini berada di Kabupaten Agam namun SK Pembentukan Kanim masih Kanim Bukit Tinggi dari sisi aspek hukum rawan; Kondisi bangunan semi permanen, berada di tengah persawahan sehingga rawan terjadi pencurian. Terdapat sengketa bangunan (mushola) yang berdiri diatas tanah Kanim krn i masyarakat menghendaki dihibahkan.
20 s.d.22 Mar	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan	Lokasi ruang server sangat rawan, karena

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
	Kantor di Kanim Cilegon Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0786 tgl 9 Maret 2012	berada di jalur lalu lintas orang keluar masuk dan ditambah ruangan tersebut terbuka saat jam kerja
2 sd 5 April	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Sambas Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.00994a tgl 22 Mar. 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 3 Pos Lintas Batas yang tidak berfungsi lagi yaitu Pos Sajingan Besar, Paloh, dan Temajuk; 2. Belum terpasang BCM pada Pos Lintas Batas Aruk
10 s.d.12 April	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Pangkal Pinang Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1095 tgl 3 April 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanim Pangkal pinang telah mengambil langkah preventif atas kemungkinan terjadinya gangguan keamanan baik karena ulah manusia maupun alam, al: adanya pembagian tugas keamanan dan pemasangan penangkal petir; 2. Ruang penyimpanan blanko paspor belum dipasang teralis
25 s.d 27 Mei	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Pare-Pare Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0980a tgl 22 Mar 2012	
10 s.d 12 Okt	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Mataram	
22 s.d 24 Okt	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di DRC Singaraja Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi bangunan Kantor DRC tidak terawatt (terdapat kerusakan pada beberapa bagian) - Sistem pengamanan cukup baik - Belum ada pola penjagaan
05 s.d 07 Nop.	Kegiatan Pulbaket Kondisi Pengamanan Kantor di Kanim Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Kantor terletak di daerah rawan gempa; - Bangunan masih hak pinjam pakai dari Pemkot dan berada bersebelahan dengan terminal bus AKAP <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu SOP Pengamanan Gedung Kantor - Perlu standarisasi pembangunan gedung tahan gempa

b. Pengamanan Personil, Material , dan Dokumen

Tanggal/Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
15-17 Maret	Pulbaket Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Petugas Terhadap Deteni Di Rudenim Pontianak Kalimantan Barat	<p>1. Bahwa Benar Deteni <i>Taqi Nikoyee</i> Wn. Afghanistan Telah Meninggal Dunia Akibat Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Petugas Secara Spontan Karena Rasa Emosi Dan Kesal, Dan Dilakukan Agar Ybs Jera Dan Tidak Mengulangi Perbuatan Melarikan Diri;</p> <p>2. Telah Ditetapkan 10 Orang Petugas Rudenim Sebagai Tersangka Oleh Polresta Pontianak; Dan Sampai Saat Ini Belum Mendapat Bantuan Hukum.</p> <p>Saran: Perlu Ada Sop Penanganan Deteni Terutama Bagi Deteni Yang Dikategorikan <i>Asylum Seeker/Refugee</i></p>
3 April	Melakukan Pulbaket Kasus Pengaduan Pelayanan Spri Pada Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat. Sprint No. Imi4-Pw.01.10-5.1096 Tanggal 3 April 2012	<p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pengaduan Masy. Melalui Surat Tgl 5 Maret 2012 Kepada Kpk Menginfo. Pungli Yang Dilakukan Pegawai; - Hal Tsb Disebabkan Sdr. Sjafrudin Husain Sbg Dirut Bito Jasa Rizki Kurnia Abadi Berselisih Paham Dengan Petugas Kasir Iden Paspor Ri <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar Kanim Melaksanakan Peraturan Dirjen No. Imi1-Um.01.10-3201 Tgl 4 Agustus 2011 Ttg Tindak Lanjut Inpres No. 9/2011 - Tidak Memungut Biaya Diluar Ketentuan - Melakukan Waskat Thd Pegawai - Mengevaluasi Kinerja Biro Jasa Keimigrasian
7 S.D 9 Mei	Pulbaket Kasus Pengaduan Pelayanan Keimigrasian Di Kanim Bogor, Sprint No. Imi4-Gr.02.01-4.1456 Tanggal 7 Mei 2012	<p>Permasalahan</p> <p>Ada Pengaduan Masy. Yang Ditujukan Pd Wamenkum Dan Ham, Melalui Surat No. 0126/Tipikor/Iii/12 Tanggal 7 Maret 2012, Perihal Diskriminasi Pelayanan Dan Pungli Di Kanim Bogor</p> <p>Saran Agar Kakanim Bogor Untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Juklak Dirjenim No. Imi-Um.01.10-3201 Tentang Tindak Lanjut Inpres No. 9/2011 Tentang

Tanggal/Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
		<p>Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>2. Tidak Melakukan Pungutan Biaya Diluar Ketentuan Yang Berlaku.</p> <p>3. Melakukan Pembinaan Dan Waskat</p> <p>4. Melakukan Evaluasi Kinerja</p>
10 S.D. 12 Mei	Pulbaket Pengamanan Personil Di Rudenim Menado Atas Kasus Kaburnya 51 Orang <i>Illegal Migrant</i> Dari Rudenim Menado Sulawesi Utara, Sprint No. Imi4-Gr. 02.01 - 4.1478 Tanggal 8 Mei 2012	
6 S.D. 8 Juni	Pulbaket. Pengawasan Orang Asing Di Bandung , Sprint No. Imi4 - Gr. 02. 01- 4.1776, Tanggal 31 Mei 2012	
17 S.D 9 Juni	Pulbaket Pengamanan Personil Pada Rudenim Pekanbaru Kasus Dugaan Terjadinya Pembiaran Larinya Deteni <i>Illegal Migrant</i> Yang Dikategorikan Pengungsi /Pencari Suaka, Sprint No.	
12 S.D 14 Juli	Pulbaket Proses Pengamanan Personil, Materila Dan Dokumen Di Kanim Belawan	Permasalahan Pelaksanaan Tugas: Kurangnya Sdm,Kurangnya Sarana Dan Prasarana, Penataan Ruang Pelayanan Yang Kurang Maksimal
27 S.D 29 Juli	Kasus Larinya 23 Imigran Illegal Bogor	Kasus Larinya Deteni Dari Hotel Raja Inn Bogor Dengan Cara Memanfaatkan Kelalaian 2 Petugas Jaga (Personil Imigrasi Dan Kepolisian)
23 S.D 25 Agustus	Pengamanan Dokumen Di Kanim Tj Pandan	Pemberian Paspor Telah Terlaksana Sesuai Sop.
26 S.D 28 Agustus	Kasus 400 Blanko Spri Yang Dibawa Ke Malaysia Surabaya	
6 S.D 8 Sept	Pengamanan Personil Kanim Kalianda	Kondisi Pada Kanim Kalianda Tidak Terdapat Ruang Detensi Padahal Dalam Pelaksanaan Tugas Sering Menerima Dan Menangkap Orang Asing Illegal Sehingga Pelaksanaan Tugas Pengamanan Tidak Terlaksana Secara Maksimal
12 S.D 14 Nop.	Pengawasan Orang Asing Di Pltu Cirebon (Pt. Doosan Heavy Industri)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pt. Doosan Heavy Industri Ind. Tidak Memiliki Arsip Perizinan Keimigrasian Tka Yang Bekerja Pada Perusahaan Tsb; - Pengawasan Keimigrasian Kanim Cirebon Kurang Maksimal

c. Pengamanan Perijinan Keimigrasian

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
Dalam Kota 05 Januari	Pengecekan Lapangan terhadap keberadaan, kegiatan, kebenaran surat dan bonafiditas penjamin yang akan mendatangkan Orang Asing pada PT. Bintani Megah Indah, PT. Maxmoda Indo Global , PT. Asia Duta Intemasional, PT. Benua Asia Vision, PT. Mulia Perima Permai, Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0049/2012 tgl 05 Jan 2012	
20 Januari	Pulbaket terhadap keberadaan dan kegiatan seseorang an. Imelda Manampiring /Imelda Rose Manampiring yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jabodetabek, Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0164/2012 tgl 20 Jan 2012	
27 Januari	Melakukan Pulbaket terhadap kebenaran dan keabsahan KTP DKI Jakarta an. Harcharan Singh, Perthipal, Hardip Kaur, Nermal Singh, Manwar JS, Lidia Lianty, Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0270/2012 tgl 27 Jan 2012	Belum didapat bukti-bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa pemilik ke 6 KTP tersebut adalah WNA; Adanya kesulitan dalam berkoordinasi dengan Suku Dinas Jakut.
30 Januari	Melakukan Pulbaket serta pengamanan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang patut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian an. Moon Myung Ha (WN Korea Selatan) di Karawaci, Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0278/2012 tgl 30 Jan 2012	
08 Februari	Melakukan pengecekan lapangan terhadap keberadaan, kegiatan serta keabsahan dokumen penjamin yang akan mendatangkan Orang Asing pada PT. Pacific Interlink Sdn Bhd, PT.Pacific Indomas di Jakarta, Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0417/2012 tgl 08 Feb 2012	
10 Februari	Melakukan pengecekan lapangan terhadap keberadaan, kegiatan serta keabsahan dokumen penjamin yang akan mendatangkan Orang Asing pada PT. Hikmat Fashion dan PT. Maxmoda Indo Global di Jakarta, Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0446/2012 tgl 10 Feb 2012	Permohonan Calling Visa bagi TKA dari Negara Rawan yang diajukan Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk disetujui.
22 Februari	Melakukan pengecekan lapangan terhadap keberadaan, kegiatan serta keabsahan dokumen penjamin yang akan mendatangkan Orang Asing pada PT. Pacific Royal	

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
	Airways di Jakarta, Sprint No. IMI4-GR.02.01 - 4.0417/2012 tgl 08 Feb 2012	
16 Maret	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA an. Rosmina Silaban, Sprint No. IMI4-GR.02.01 - 4.0885/2012 tgl 16 Maret 2012	Benar sdr. Rosmina Silaban telah menikah dengan Augustine Ifeanyichukwu WN Nigeria, namun alamat yang digunakan untuk mengajukan permohonan Visa tidak sesuai agar permohonan Visa ybs ditangguhkan.
19 Maret	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. BASF Indonesia, Islamic Relief di Jakarta Selatan, Sprint No. IMI4-GR.02.01 - 4.0911/2012 tgl 19 Maret 2012	
19 Maret	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. Indo Afghan Trading and Logistic dan PT. Aventis Pharma, Sprint No. IMI4-GR.02.01 - 4.0091/2012 tgl 19 Maret 2012	
28 Maret	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. CL Jakarta Container di Jl. Lombok Blok A 29-30 Jakarta Sprint No. IMI4-GR.02.01 - 4.1025/2012 tgl 28 Maret 2012	
02 April	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. Indo Asia Multi Trading, PT. Katano International Indonesia, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1067/2012 tgl 02 April 2012	
13 April	Melakukan Pulbaket terkait permohonan KITAS an. Fazeli Sayed Ahman (WN Iran) di Kanim Jakarta Selatan, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1179a tanggal 13 April 2012	Diduga ybs telah melanggar Pasal 123 huruf a UU No. 6/2011 Permohonan KITAS ybs telah ditolak oleh Kanim Jaksel.
16 April	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. Lauser Baterindo Utama di Pejabat Jak-sel, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1185, tanggal 16 April 2012	
16 April	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. AMALIA JULIAN CEMERLANG di Komplek Griya Asri Depok, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1205, tanggal 16 April 2012	Permohonan Calling Visa bagi TKA dari Negara Rawan yang diajukan Perusahaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk disetujui

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
04 Mei	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. Kewalram Indonesia Jakarta Pusat, Sprint No.IMI4-GR.02.01-4.1455, tanggal 04 Mei 2012	Permohonan Calling Visa bagi TKA dari Negara Rawan yang diajukan Perusahaan tersebut dapat dipertimbangkan untuk disetujui.
23 Juli	Melakukan Pulbaket terhadap keberadaan, kegiatan dan keabsahan dokumen penjamin WNA pada PT. Surya Toto Ind dan PT Atrinco Mulia Sejati, Sprint No.IMI4-GR.02.01-4.2281, tanggal 20 JULI 2012	Agar Permohonan mendatang WNA PT. ATRINCO MULIA Ditolak karena Perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak awal Juli 2012 Permohonan PT. Surya Toto disarankan untuk disetujui.
LUAR KOTA 8-10 Feb	Pengecekan Lapangan terhadap penjamin yang akan mendatangkan Orang Asing pada PT. Cheil Jedang Indonesia dan PT. Volma di Surabaya Jawa Timur Sprint No. IMI4-GR.02. 01 - 4.0283a/2012 tgl 31 Jan 2012	Secara yuridis formal kedua perusahaan memenuhi persyaratan sebagai penjamin untuk mendatangkan TKA.
15-17 Feb	Pengecekan Lapangan terhadap keabsahan: - dokumen WN Taiwan an. Wan Yen Ling - Surat Nikah Mahbob Khan (WN Pakistan) dengan Yanti Mulyanti - Surat Nikah Rashid Ahmad dengan Yulia - Sprint No. IMI4-GR.02.01. 4.0416, 8 Feb 2012 di wilayah Sukabumi Jawa Barat	1. Permohonan mendatangkan WN.Asing an. Rashid Ahmad yang diajukan Sdr. Yulia dapat dipertimbangkan untuk disetujui; 2. Surat Nikah Mahbob Khan dan Yanti Mulyanti tidak terdaftar di KUA kec Sukabumi, disarankan agar permohonannya ditunda
9-11 Maret	Pengecekan Lapangan keberadaan illegal migrant yang tertangkap di Ciamis, Jawa Barat Sprint No. IMI4-GR.02. 01- 4.0762, tanggal 9 Maret 2012	1. <i>Illegal migrant</i> yang ditangkap di Kab. Ciamis sebagian besar WN. Iran dan Afghanistan serta memiliki Certificate UNHCR, 2. Maksud dan tujuan mereka di wilayah tersebut adalah untuk menyeberang ke Australia melalui Pantai di wilayah Ciamis.
20-22 Maret	Pengamanan Perizinan di Kanim Cilegon, Sprint No. IMI4-GR.02. 01-4.0788, 12 Maret 2012	
24-26 Maret	Pengecekan Lapangan terhadap penjamin yang akan mendatangkan Orang Asing pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia dan PT. Panasonic Electronic Devices, di wilayah BATam Kep. Riau. Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.0783 tanggal 9 Maret 2012	Kedua perusahaan secara yuridis formal telah memenuhi syarat untuk menjadi penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing yang didatangkannya
7-11 April	Kegiatan Pemantauan Pengamanan keberadaan Orang Asing saat penyelenggaraan Pemiluakda Prop. Aceh, di Banda Aceh. Permohonan SPPD No. IMI4-	Perlu adanya sinergitas komunitas intelijen dalam pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui deteksi dan cegah dini pasca pilkada, guna

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
	UM.07.01-5.1082, 2 April 2012	menciptakan keamanan negara.
22-24 April	Pengecekan Lapangan terhadap penjamin yang akan mendatangkan orang asing (PT. Citra Abadi Sejati) di wilayah Bogor Jawa Barat, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1269 tanggal 20 April 2012	Kegiatan Usaha PT.Citra Abadi Sejati bergerak di industri pakaian jadi dan bertujuan mendatangkan 2 TKA asing WN Srilanka dan disarankan untuk disetujui.
23 April	Pengecekan Keabsahan Surat Nikahan.Ezebuuro Madua Kolam Nobleu (WN. Nigeria) suami dari Sri Hariyanti di KUA Kec Tarumajaya Bekasi. Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1236 tgl 18 April 2012	Keabsahan akta Nikah yang bersangkutan patut diduga palsu, agar permohonan VITAS ybs dibatalkan.
25-27 April	Pengecekan lapangan terhadap penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing (PT. Baicun, PT. ST. Nikel, PT. bola dunia mandiri, & PT. Bahtera Sultra Mining) di Kendari Sulawesi Tenggara, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1201 tanggal 17 April 2012	1. PT. Baicun dan PT. St Nikel secara yuridis formal telah memenuhi syarat untuk menjadi penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing yang didatangkannya; 2. PT. Bola Dunia Mandiri, & PT. Bahtera Sultra Mining untuk sementara waktu sedang tidak beroperasi.
14-16 Mei	Pengecekan lapangan terhadap penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing (PT. Sepatu Bata) Purwakarta, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1534 tgl 9 Mei 2012	PT. Sepatu Bata secara yuridis formal telah memenuhi syarat untuk menjadi penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing yang didatangkannya.
16-18 Mei	Pengecekan lapangan terhadap penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing (PT. Trisco Tailored) Bandung, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1537 tanggal 9 Mei 2012	secara yuridis formal Perusahaan telah memenuhi syarat untuk menjadi penjamin TKA yang akan didatangkannya.
23-25 Mei	Pengecekan lapangan terhadap penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing (PT. Java Pacific dan PT. New Hope)	
30-31 Mei	Pengecekan Lapangan/klarifikasi atas penanganan Kasus Simon Donalson di Surabaya, Sprint No.IMI4-DL.05.02-4.1788 tanggal 29 Mei 2012	Terjadi sengketa pengasuhan anak antara: Marisa Latinia (ibu/WNI) dengan Donaldson David Willian (Ayah/WNA) akibatnya Anak Simon Donalson/WNA yang menderita Leucodistropy dan Epilepsy, Overstay selama 4 tahun, dan sang ibu menghendaki anaknya tidak di deportasi, sedangkan ayahnya menghendaki anaknya di deportasi/dipulangkan dengan meminta bantuan pemerintahnya. Saran agar dipulangkan tanpa di tangkal.
28 Mei s.d. 01 Juni	Mengikuti Kunjungan Kerja Tim CH Kemlu ke Makassar Permohonan SPPD IMI4-GR.01.10-4.1638	Agenda rapat Kunjungan ke Div. Keimigrasian, PEMDA dan Perusahaan penjamin TKA untuk; - Membahas masalah illegal migrant, - pengawasan orang asing, dan - menjelaskan prosedur untuk

Tanggal/ Bulan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
		mendapatkan Visa dari negara-negara yang memerlukan Clling Visa
27-29 Juni	Pengamanan Perizinan ke Kanim Surakarta, Sprint No. IMI4-GR.02.01-4.1847 tanggal 8 Juni 2012	
5 sd 7 Juli	Cek Lap PT ARGO MANUNGGAL TEXTILE Salatiga/4 OK	
5 sd 7 Juli	Cek Lap PT. Binatex Industries Semarang /4 ok	
12 sd 14 Juli	Cek Lap PT SUPA SURYA NIAGA Surabaya / 4 OK	
10 sd 12 Juli	Penanganan Lanjutan kasus Simon Donalson Surabaya / 1 Ok	
6 sd 8 Agust	Cek Lap Keabsahan Surat Nikah an. Tini Bt. Apid Ucim di KUA Cipongkor Bandung / 3 Ok	
9 sd 11 Agst	Cek Lap Keabsahan Surat Nikah An Khasta Muhammad (Wn Pakistan) di KUA Jatisari Karawang / 3 Ok	
6 sd 7	Evaluasi Kasus Simon Donalson Surabaya / 1 Ok	
19 sd 21	Pengecekan Keabsahan Surat Nikah an Suparmi di KUA Kec. Sragen Jateng / 3 OK	
19 sd 21	Pengamanan Perizinan Keimigrasian Kasus Pemalsuan Paspor di Kanim Belakang Padang/ 4 Ok	
27 sd 29	Pengamanan Perizinan Keimigrasian Kasus Hilangnya Sticker VOA di Kanim Batam /3 Ok	
3 sd 5	Pengecekan Keabsahan Surat Nikah an. Uzoma OBI Labuhan Batu Sumatera Utara / 3 OK	
10 sd 12	Pengmanan Pelayanan perizininab di Kanim Wonosobo/ 3 OK	
17 sd 19	Cek Lap PT Elang Samudra Jaya Abadi di Semarang/3 orang	
21 sd 23	Pengecekan Keabsahan Surat Nikah an. Raheel Akbar/Purwakarta (3 Ok)	
8 sd 10	Pam Zin Kanim PATI (3 OK)	
12 sd 14	Pam Zin Pekanbaru (3 OK)	

7. Tugas-Tugas Lain

a. Pengiriman Berita SIAR (Paspor Hilang, Rusak dan Duplikasi)

No	Alasan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Hilang	334	291	235	357	136	110	63	204	48	172	101	60	2111
2	Rusak	184	831	440	332	322	43	50	54	0	41	19	20	2336
3	Ditolak Sistem	640	362	107	706	114	125	423	402	11	595	89	132	3706
4	Duplikasi	11	1	18	0	0	0	11	0	0	27	0	0	68
5	Batal/Cabut	219	158	104	292	37	11	216	79	0	150	4	1	1271
6	Palsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dicekal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Habis Berlaku/Hal Penuh	0	0	0	0	0	14	0	0	0	5	0	0	19
9	Ditolak Ajudikator	22	199	23	26	19	33	3	135	1	28	13	4	506
10	Ditolak Wawancara	102	95	68	22	28	104	4	21	0	28	7	5	484
	Jumlah	1512	1937	995	1735	656	440	770	895	60	1046	233	222	10501

b. Pengiriman Berita Siar (Pengawasan Izin Belajar, Izin Penelitian, dan sebagai Dubes LBPP, dan Daftar Pencarian Orang/DPO)

Bulan	Pengawasan/Siar			
	Izin Belajar	Izin Penelitian	Dubes Lbpp	Dpo
Jan	75	4	13	0
Feb	24	5	0	0
Mar	168	12	2	0
April	20	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	3	4	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	4	0	0	0
September	4	0	0	0
Oktober	3	0	0	0
November	2	0	0	0
Desember	5	0	0	0

c. Menyelenggarakan Rapat Tim Penilai Permohonan Visa bagi Warga Negara dari Negara yang memerlukan Calling Visa di Direktorat Jenderal Imigrasi secara rutin setiap minggu 1 (satu) kali, bekerjasama dengan Direktorat Doklanvisfaskim.

- d. Mengikuti Rapat-Rapat Interkem di dalam negeri, antara lain :
- 1) Rapat Tim Clearing House Kementerian Luar Negeri RI;
 - 2) Rapat Tim Clearing House Kemenbudpar RI
 - 3) Rapat Tim Clearing House Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - 4) Rakorsus di Kemenkopolkukan membahas Penanganan Kasus Simon Donaldson Warga Negara New Zealand
- e. Melakukan pembahasan mengenai dikeluarkannya Negara Bangladesh dan Srilanka dari Negara yang masuk kategori sebagai negara yang memerlukan *calling visa*, sampai dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012.
- Menjadi anggota Tim Teknis/Tim Lapangan Tugas Terpadu Tipikor Tahun 2012 dimana Wakil Jaksa Agung duduk sebagai Ketua Tim.

E. Direktorat Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian

Sebagai akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah berhasil menjalankan program dan/ kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyidikan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi

Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Penyidikan Melalui Proses Peradilan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rekap Pelanggaran Keimigrasian Wna	16	6	5	13	10	12	13	22	16	10	--	16	139
Rekap Penyidikan Paspur Hilang Wna	55	47	38	24	46	39	57	65	52	56	49	30	558
Jumlah	71	53	42	37	56	51	70	87	68	66	49	46	697

2. Kegiatan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi

Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Clearance Visa	110	98	87	58	65	74	70	45	48	35	48	56	794
Kedatangan Artishiburan Asing	326	190	265	424	394	191	106	125	410	581	446	321	3779
Pelanggaran Keimigrasian Pada Subdit	22	37	32	43	47	42	55	31	54	35	15	73	486
Jumlah	456	325	384	625	406	307	231	201	612	651	509	450	5.059

3. Kegiatan pencegahan dan penangkalan

a. Tindakan Pencegahan Baru

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menteri Hukum dan HAM RI	-	1	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Menteri Keuangan	6	-	10	12	12	2	1	1	1	2	25	6	78
Kejaksaan Agung	10	16	29	29	22	16	12	12	18	40	13	17	234
Kapolri	23	11	23	21	40	230	10	10	9	16	9	6	408
KPK	1	1	9	13	8	17	11	9	-	1	9	7	86
BNN	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Jumlah	40	30	76	86	82	265	34	32	28	59	72	37	825

b. Dikenakan Tindakan Perpanjangan Pencegahan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menteri Hukum dan HAM RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menteri Keuangan	1	6	17	13	4	5	1	1	1	2	-	-	52
Kejaksaan Agung	-	-	4	1	2	-	-	-	2	1	-	-	10
Kapolri	1	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9
KPK	-	2	2	5	8	8	-	5	-	1	-	10	41
Jumlah	2	11	26	19	15	14	1	6	3	4	-	-	112

c. Dikenakan Tindakan Pencabutan Pencegahan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menteri Hukum dan HAM RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menteri Keuangan	1	1	3	3	4	3	-	-	1	5	5	5	31
Kejaksaan Agung	6	3	5	2	4	2	4	15	4	5	5	2	57
Kapolri	6	2	1	-	1	1	2	2	2	2	2	4	25
KPK	1	-	5	-	1	-	-	1	-	2	4	1	15
BNN	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah	14	6	14	7	10	6	6	18	7	14	16	-	130

d. Dikenakan Tindakan Penangkalan Baru

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menteri Hukum dan HAM RI	8	2	102	41	87	42	88	8	44	92	46	67	627
Kejaksaan Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panglima TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8	2	102	41	87	42	88	8	44	92	46	67	627

e. Dikenakan Tindakan Perpanjangan Penangkalan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menteri Hukum dan HAM RI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kejaksaan Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panglima TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2

f. Dikenakan Tindakan Pencabutan Penangkalan

Unit Kerja	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Menteri Hukum dan HAM RI	11	16	11	5	20	8	10	8	2	9	12	7	119
Kejaksaan Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panglima TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	11	16	11	5	20	8	10	8	2	9	-	-	119

g. Operasi Penindakan Keimigrasian

No.	Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	Keterangan
01.	Laporan Pelaksanaan Operasi Lapangan No.Imi.Gr.01.10-2.035 , Tgl.12 Januari 2012 Ke Tanah Abang Di Dapati 1 Orang Wn Mesir An.Aladdin Abdullah Abdulgani Mohamed Telah Melakukan Pelanggaran Keimigrasian	Deportasi Pada Tanggal, 19 Januari 2012.
02.	Laporan Hasil Operasi Penegakan Hukum (Operasi Bersama Dengan Dit Inteljen) No.Imi.5.Gr..01.10-2.179 Tgl.18 Januari 2012 Operasi Wilayah Ke Wilayah Jabodetabeka , Hasil Ditemukan 13 Orang Perempuan Wn Rrc Pekerja Asing Di Duga Sebagai Penghibur Di Beberapa Tempat Hiburan Malam (3 Org Di Klub Malam King Cross, 3 Org Di Malioboro Spa, 2 Org Di Hotel Alexis, 3org Di Klub Malam Sun City, 2 Org Di V2)	Menahan 73 Dokumen Perjalanan Perempuan Pekerja Asing Wn Rrc Di Karaoke Sand Untuk Dilakukan Pemeriksaan Karena Menggunakan Visa Kunjungan.
03..	Laporan Hasil Operasi Pelaksanaan Pengawasan No.Imi.5.Gr.01.10-2.055 Tgl.19 Januari 2012 Operasi Ke Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak	14 Paspor Untuk Diteliti Lebih Lanjut Oleh Laboratorium Forensik Direktorat Inteljen Keimigrasian
04.	Laporan Pelaksanaan Operasi Lapangan No.Imi.5.Gr.01.10-2.112 Tgl.25 Januari 2012 Operasi Ke Lippo Karawaci	Didapati 1 Wn Philipina An.Christian Joseph Bautista Telah Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Pada Tanggal, 27 Januari 2012 .
05	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.25-26 Januari 2012 Lokasi Rumah Susun Tanah Abang	Di Dapati 1 Orang Wn Pakistan An.Muhammad Atif Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 2 Pebruari 2012.
06.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.27 Januari 2012 Lokasi Jl.Mangga Besar Raya No.8 Jakbar	Di Dapati 1 Orang Wn Nepal An.Tak Bahadur Roka Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 3 Pebruari 2012.

No.	Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	Keterangan
07.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.31 Januari 2012 Lokasi Kampung Jambu Karya Rajeg Tangerang	Di Dapati 1 Orang Wn Malaysia An.Abdul Rahman Ahmad Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 6 Pebruari 2012.
08.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.2 Pebruari 2012 Lokasi Jl.Blora Jakarta Pusat	<i>Di Dapati 2 Orang Wn Iran An.Robabech Tavancheh G.Dan Shahriar Pm Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 7 Pebruari 2012.</i>
09.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.3 Pebruari 2012 Lokasi Jl.Laguna Pluit Jakarta Utara	<i>Di Dapati 3 Orang Wn Iran An.Ghanbari Iran Doust Gholamrerza Cs. Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 14 Pebruari 2012.</i>
10.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.3 Pebruari 2012 Lokasi Hotel Kafila – Pasar Baru Jakarta Pusat	<i>Di Dapati 2 Orang Wn India An.Sanjev Kumar Kumar Cs. Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 9 Pebruari 2012.</i>
11.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.6 Pebruari 2012 Lokasi Hotel Cumi Jakarta Barat	<i>Di Dapati 1 Orang Wn Malaysia An. Mohd.Riza Idzraq Bin Samat Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 10 Pebruari 2012.</i>
12.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.9 Pebruari 2012 Lokasi Lipo Karawaci Tangerang	<i>Di Dapati 1 Orang Wn Malaysia An. Rohayu Binti Jonet Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 13 Pebruari 2012.</i>
13.	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.9 Pebruari 2012 Lokasi Jl.Rawa Bahagia Jakarta Barat	<i>Di Dapati 1 Orang Wn Mesir An. Ahmed Mahdy Abdel Hamid Rohamed E A Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 15 Pebruari 2012.</i>
14	Pelaksanaan Operasi Lapangan Tgl.14 Pebruari 2012 Lokasi Pulo Mas Jakarta	<i>Di Dapati 1 Orang Wn Rrc An. Huang Chang Xun Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 16 Pebruari 2012.</i>
15.	Pelaksanaan Operasi Gabungan (Dit.Dikdakim, Dit Intelejen , Kanim Bogor N Rudenim Jakrta , Badan Intelejen Strategis) Tgl.13 Pebruari 2012 Lokasi Di Puncak Bogor	Di Dapati 148 Orang Wna Dari Beberapa Negara Al.Afganistan, Iran, Sudan, Pakistan, Somalia, Dan Yaman , Setelah Di Verifikasi Diperoleh Informasi ; <ul style="list-style-type: none"> - 4 Orang Berstatus Pengungsi; - 82 Orang Berstatus Pencari Suaka - 58 Orang Tidak Memiliki Dokumen - 1 Orang Afganistan Pemegang Paspor Macao Yang Di Duga Palsu - 1 Orang Pemegang Paspor Iran Yang Telah Over Stay - 2 Orang Warga Negara Iran Pemegang Itk (Voa)
16.	Laporan Operasi Lapangan Tgl.28 Pebruari 2012 Lokasi Amaries Hotel – Mangga Besar Jakarta	<i>Di Dapati 3 Orang Wn Pakistan An. Khan Riaz Cs.Mjennifer Andreas Badija Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi</i>

No.	Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	Keterangan
		<i>Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 3 Maret 2012.</i>
17.	Laporan Operasi Lapangan Tgl.28 Pebruari 2012 Lokasi Versailles Resident Blok I.6.No,Bsd Tangerang	<i>Di Dapati 1 Orang Wn Philipina An. Jennifer Andreas Badija Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 3 Maret 2012.</i>
18.	Laporan Operasi Lapangan Tgl.12 Maret 2012 Lokasi Jl.Dr.Susilo Grogol li E No.107 Jakarta Barat	<i>Di Dapati 1 Orang Wn Philipina An.Rochelle Marie Bansig Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 14 Maret 2012</i>
19.	Laporan Pemeriksaan Tgl.16 Maret 2012 Wn Iran An. Majid Moghadasi	Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 23 Maret 2012.
20.	Laporan Pemeriksaan Tgl.21 Maret 2012 Wn Iran An. Davood Ansdari	<i>Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi Dengan Penangkalan Pada Tanggal, 27 Maret 2012.</i>
21.	Laporan Pemeriksaan Tgl.20 April 2012 Lokasi Ke Cinere Mall Dan Rumah Tinggal, Jl.Jarean Rt.03/001 Cinere	Di Dapati 3 Orang Wn Pakistan An.Muhammad Akram Dkk. Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi
22.	Laporan Pemeriksaan Tgl.27 April 2012 Lokasi Ke Cisarua Pasar Arab Bogor	Di Dapati 1 Orang Wn Iran Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi
23.	Laporan Pemeriksaan Tgl.1 Mei 2012 Lokasi Ke J.Co Pasar Festival Kuningan	Di Dapati 1 Orang Wn Korea Selatan An.Mtae Sung Yoon. Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi
24.	Laporan Pemeriksaan Tgl.9 Mei 2012 Lokasi Ke Ambasador Mall Jakarta Sealatan	Di Dapati 1 Orang Wn Arab Saudi An.Habhab Rami Adnan Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi
25.	Laporan Pemeriksaan Tgl.13 Mei 2012 Lokasi Ke Apartemen Rasuna Tower Di Dapati 3 Orang Wn Arab Saudi An.Anazi Mohammed Halis F.	Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi
26.	Laporan Pemeriksaan Tgl.14 Mei 2012 Lokasi Ke Budi Mulia Rt03/07 Jakrta Utara Di Dapati 1 Orang Wn Arab Saudi An.Alshammary,Khalid Atallah	Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Dan Telah Di Deportasi
27.	Laporan Pemeriksaan Tgl.3 Juli 2012 Lokasi Ke Pltu Lampoko – Kab.Barru – Maksassar	Di Dapati 14 Orang Tka Yang Menggunakan Ijin Kunjungan

h. Kegiatan Detensi Imigrasi dan Deportasi

1) Jumlah imigran ilegal yang ditempatkan di Ruang Detensi ditjenim dan Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia per Nopember 2012 sebanyak 1363 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Rudenim	Jumlah
1	Medan	238
2	Pekanbaru	151
3	Tanjung Pinang	320
4	Kalideres/Jakarta	73
5	Ruang Ditjenim	65

No	Rudenim	Jumlah
6	Suarabaya	69
7	Pontianak	23
8	Semarang	11
9	Bali	78
10	Kupang	149
11	Makassar	92
12	Manado	94
Jumlah		1363

- 2) Jumlah imigran ilegal yang berada di Indonesia yang ditangani oleh International Organization of Migration (IOM) per Nopember 2012 adalah sebanyak 2.881 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Afganistan	1205
2	Sudan	21
3	Mauritius	1
4	Syria	22
5	Iaraq	173
6	Iran	294
7	Srilanka	454
8	Pakistan	93
9	Somalia	26
10	Maroko	1
11	Vietnam	9
12	Myanmar	439
13	Palestina	92
14	Kuwait	3
15	Ethipia	2
16	Nigeria	1
17	Bangladesh	42
18	Ruwanda	1
19	Eritria	1
20	Dll	1
Jumlah		2.881

- 3) Jumlah Assisted Voluntary Return (AVR) yang berada di Indonesia per Nopember 2012 adalah sebanyak 542 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Negara	Jumlah
1	Afganistan	160
2	Bangladesh	7
3	Cambodia	36
4	India	11
5	Iran	63

No	Negara	Jumlah
6	Iraq	53
7	Nepal	4
8	Pakistan	45
9	Srilanka	73
10	Vietnam	46
11	Myanmar	26
12	Usbekistan	13
13	Colombia	4
14	Congo	1
Jumlah		542

- 4) Jumlah pencari suaka yang berada di Indonesia per Nopember 2012 adalah sebanyak 1.396 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Afganistan	577
2	Srilanka	158
3	Iraq	61
4	Iran	194
5	Myanmar	194
6	Somalia	19
7	Pakistan	60
8	Palestina	89
9	Ethiopia	2
10	Maroko	1
11	Kuwait	1
12	Sudan	21
13	Ruwanda	1
14	Ayria	16
15	Aljazair	1
16	Eritria	1
Jumlah		1.396

- 5) Jumlah refugee yang berada di Indonesia per Nopember 2012 adalah sebanyak 929 Orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Afganistan	451
2	Srilanka	167
3	Iraq	73
4	Iran	53
5	Myanmar	163
6	Somalia	3
7	Pakistan	3
8	Palestina	3
9	Kuwait	2
10	Syria	5
Jumlah		929

6) Jumlah Deteni pada Rumah Detensi di seluruh Indonesia dan pada Ruang Subdit Detensi dan Deportasi Ditjenim serta yang berada di luar rumah Detensi pada bulan Januari s/d Desember 2012 :

UPT	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
DITJENIM	17	62	30	44	38	25	48	46	37	79	65	132
Medan	125	131	123	110	101	84	123	180	143	185	141	
Pekanbaru	137	134	131	117	133	99	69	142	180	194	151	
Jakarta	45	64	90	72	71	57	82	56	22	42	105	
Semarang	1	1	1	3	1	-	26	25	25	14	-	
Surabaya	50	44	36	60	21	10	64	37	45	79	69	
Denpasar	15	49	89	80	78	81	82	84	71	84	86	
Kupang	26	124	127	131	120	145	169	100	167	158	143	
Pontianak	63	50	45	45	47	40	77	63	40	64	48	
Balikpapan	18	10	10	5	5	17	4	14	2	-	7	
Manado	96	94	94	92	68	63	63	83	85	105	100	
Makassar	138	177	61	121	131	37	105	126	264	94	89	
Jaya Pura	2	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	
Tg. Pinang	340	325	340	370	390	367	339	296	292	336	328	
Jumlah	1172	1264	1176	1247	1203	1025	1251	1254	1374	1435	1332	
Luar Rudenim	982	1127	1146	1032	1074	1171	1373	1346	1313	1643	1548	
Jumlah Total	2154	2391	2322	2279	2277	2196	2624	2600	2687	3078	2880	132

F. Direktorat Lintas Batas Dan Kerjasama Luar Negeri

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian selama tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Konsolidasi Kegiatan Per Program

Kode Dan Nama Kegiatan	Anggaran (Rp. 11.745.498.000)			Penyerapan		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)			
	PNP	RM	TOTAL	Sasaran (75%)	Realisasi	Narasi	Satuan (Unit)	Sasaran	Realisasi
Kesepakatan Kerjasama Lintas Batas	2,084,410,000	940,310,000	3,024,720,000	2,268,540,000	2,036,296,523		Dokumen	5	
Monitoring Kerjasama Perbatasan	600,260,000	940,310,000	1,540,570,000	1,155,427,500	857,897,305		Kegiatan	28	17
Bimtek Kerjasama Lintas Batas	555,440,000	-	555,440,000	416,580,000	505,844,800		Kegiatan	2	2
Pelatihan	928,710,000	-	928,710,000	696,532,500	672,554,418		Kegiatan	2	2

Kode Dan Nama Kegiatan	Anggaran (Rp. 11.745.498.000)			Penyerapan		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)			
	PNP	RM	TOTAL	Sasaran (75%)	Realisasi	Narasi	Satuan (Unit)	Sasaran	Realisasi
Passenger Clearance									
Kesepakatan Kerjasama Keimigrasian	2,847,030,000	1,244,225,000	4,091,255,000	3,068,441,250	3,274,712,431		Dokumen	5	
Kompilasi Kesepakatan Kerjasama Keimigrasian Dengan Indonesia	12,750,000	98,400,000	111,150,000	83,362,500	6,775,000		Kegiatan	12	0
Kerjasama Keimigrasian International	1,362,880,000	1,145,825,000	2,508,705,000	1,881,528,750	2,316,373,931		Kegiatan	5	5
Bimtek Manajemen Konferensi International	1,471,400,000	-	1,471,400,000	1,103,550,000	951,563,500		Kegiatan	4	3
Kerjasama Dengan Perwakilan Asing	346,894,000	-	346,894,000	260,170,500	136,359,000		Dokumen	12	
Rapat Bidang Kerjasama Perwakilan Asing	98,730,000	-	98,730,000	74,047,500	3,289,200		Kegiatan	15	3
Monitoring Standar Pelayanan Di Perwakilan RI	167,904,000	-	167,904,000	125,928,000	133,069,800		Kegiatan	3	3
Pembekalan Teknis Keimigrasian Bagi Pejabat Imigrasi Yang Akan Ditempatkan Di Perwakilan RI	80,260,000	-	80,260,000	60,195,000	0		Kegiatan	6	0
Kerjasama Dengan Organisasi International	2,893,341,000	239,616,000	3,132,957,000	2,349,717,750	2,361,993,817		Peraturan	2	
Pertemuan Dengan Organisasi International	-	74,970,000	74,970,000	56,227,500	3,289,200		Kegiatan	3	2
Diseminasi (Public Awareness Workshop)	2,893,341,000	-	2,893,341,000	2,170,005,750	133,069,800		Kegiatan	6	6
Monitoring Kerjasama	-	164,646,000	164,646,000	123,484,500	0		Kegiatan	1	1

Kode Dan Nama Kegiatan	Anggaran (Rp. 11.745.498.000)			Penyerapan		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)			
	PNP	RM	TOTAL	Sasaran (75%)	Realisasi	Narasi	Satuan (Unit)	Sasaran	Realisasi
Dengan Organisasi International Yang Diimplementasikan									
Peraturan Di Bidang Lintas Batas Dan Kerjasama Luar Negeri	1,136,550,000	-	1,136,550,000	852,412,500	515,447,933		Peraturan	8	
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Lintas Batas Dan KLN	207,730,000	-	207,730,000	155,797,500	0		Kegiatan	3	0
Rapat Bidang Lintas Batas Dan Kerjasama LN Keimigrasian	928,820,000	-	928,820,000	696,615,000	515,447,933		Kegiatan	240	146

2. Tugas Dan Fungsi Dit. LB dan KLN

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
JANUARI			
1	5 Jan 2012	Ruang Rapat BKPM, Gedung Suhartoyo, BKPM, Jakarta	Rapat Koordinasi Persiapan Posisi Indonesia Pada 55 th <i>Coordinating Meeting Of Committee On Investment (CCI)</i>
2	10 Jan 2012	Ruang Rapat Dit. LBKLN, Gedung Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Rapat Pembahasan Agenda Kerjasama Ditjen. Imigrasi Dan UNHCR Tahun 2012
3	10 Jan 2012	Ruang Kerja Menkumham, Kemenkumham, Jakarta	<i>Courtesy Call Meeting</i> Antara Menkumham Dan Ditjen. Imigrasi Dengan Dubes Mesir Untuk RI Dan Dubes RI Untuk Mesir
4	10-13 Jan 2012	Hotel Sunan, Solo	<i>Coordinating Committee On Services (CCS) Ke-67</i>
5	11-13 Jan 2012	ASEAN Secretariat, Jakarta	<i>55th Meeting Of The ASEAN Coordinating Committee On Investment (CCI)</i>
6	18 Jan 2012	Ruang Rapat Samudra, Gedung Karya, Kemhub, Jakarta	Rapat Pembahasan <i>Draft Annex On Maritime Transport And Related Services Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
7	18 Jan 2012	Ruang Rapat Gedung B, Kantor BNPP, Jakarta	Rapat Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Darat Di Kawasan Perbatasan
8	20 Jan 2012	Ruang Rapat Dahlia, Gedung I, Kemdag, Jakarta	Rapat Interkem Persiapan Perundingan Ke-4 IE-CEPA
9	21 Jan 2012	Hotel Borobudur, Jakarta	Rapat Konsultasi Seknas Dan Working Group KESR

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
10	25 Jan 2012	Ruang Rapat Amuteng, Kemlu, Jakarta	Rapat Interkem Lanjutan Persiapan Sidang Komisi Bersama Indonesia – Turki Ke-8 (SKBIT Ke-VIII)
11	25 Jan 2012	Ruang Rapat Dit. LBKLN, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Rapat Pembahasan Pemukim Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina
12	25 Jan 2012	Ruang Rapat Utama Ditjen. PUM, Kemdagri, Jakarta	Rapat <i>Review And Adjustment Border Crossing Agreement RI-Malaysia 2006</i>
13	25-26 Jan 2012	Hotel Salak The Heritage, Bogor	Pertemuan Teknis Persiapan <i>ASEAN Services Week</i>
14	31 Jan – 3 Feb 2012	Hotel Grand Royal Panghegar, Bogor	<i>The Services Caucus Meeting</i>
FEBRUARI			
1	3-5 Feb 2012	Hotel Butik Sahira, Bogor	Seminar Peningkatan Hubungan Bilateral RI-Aljazair Dalam Rangka Persiapan Pertemuan Reguler Tingkat Ahli (<i>Expert</i>) Dan Pejabat Senior Di Berbagai Bidang RI-Aljazair, 27-28 Februari 2012 Di Alger, Aljazair
2	7 Feb 2012	Kemdag, Jakarta	Rapat Persiapan Perundingan Perdagangan Jasa ASEAN-Korea Selatan
3	7 Feb 2012	Novotel Hotel, Mangga Dua, Jakarta	<i>Brainstorming</i> Dan Diskusi Persiapan Substansi Penyelenggaraan Pertemuan Ke-2 <i>SOM Scorecard JMC RI – RDTL</i>
4	7 Feb 2012	Ruang Rapat Bima, Kemenkopolkukam, Jakarta	Rapat Koordinasi Khusus Eselon I
5	7 Feb 2012	Ruang Tripartit, Kemenakertrans, Jakarta	Peluncuran Publikasi Proyek <i>ETE Global</i>
6	10 Feb 2012	Ruang Rapat Dit. LBKLN, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Rapat Persiapan Kunjungan <i>Mr. Martin Bowles (Acting Secretary DIAC)</i> Ke Ditjen. Imigrasi, 15 Februari 2012
7	13-17 Feb 2012	Rokan Hilir, Riau	Monitoring Perbatasan RI-Malaysia Di Pos Lintas Batas Panipahan Dan Sinaboi
8	15 Feb 2012	Ruang Adhiwinata, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	<i>Briefing On Immigration And Consular Matters With European Union Delegation And Schengen Member States Missions In Jakarta</i>
9	20 Feb 2012	Ruang Rapat Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta	Rapat Tindak Lanjut <i>ASEAN Connectivity</i> Bidang Hubungan Antar Masyarakat (<i>People To People Connectivity</i>)
10	21 Feb 2012	Ruang SS1-2, Bappenas, Jakarta	Pertemuan Tentang Pemaparan Rencana Program Kerja UNODC Indonesia 2012-2015
11	24 Feb – 04 Mar 2012	KJRI Jeddah, Saudi Arabia	Monitoring Pelayanan Keimigrasian
12	28 Feb 2012	Hotel Acacia, Jakarta	Rapat Pembahasan Draf Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tentang Standarisasi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara
13	29 Feb 2012	Ruang Komisi Utama, BPPT, Jakarta	<i>Focus Group Discussion: “Membangun Daya Saing Beranda Utara Nusantara (Kabupaten Kapuas Hulu)”</i>

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
MARET			
1	1 Mar 2012	Ruang Rapat Ditjen. HPI, Gedung Utama Kemlu, Jakarta	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pertemuan <i>Senior Legal Officers Consultative Group (SLOGG)</i> Di Canberra, Australia
2	1 Mar 2012	Gedung Basarnas, Jakarta	Pertemuan Persiapan <i>INSARAG Earthquake Response Exercise</i>
3	1 – 2 Mar 2012	Kuala Lumpur, Malaysia	Monitoring Kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia Dengan Organisasi Internasional Dalam Proses Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi
4	2 Mar 2012	Ruang SG-5, Bappenas, Jakarta	Pertemuan <i>Steering Committee Peace Corps</i>
5	6 Mar 2012	Hotel Salak, Bogor	Pertemuan Teknis Dalam Rangka Persiapan Sidang Ke-4 <i>IMT-GT ITITD</i> , Sidang Ke-3 <i>CIQ-TF</i> , Dan Sidang Ke-6 <i>WGTT</i> , Pada Tanggal 19-21 Maret 2012 Di Bukittinggi, Sumatera Barat
6	6 Mar 2012	Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta	Rapat Pembahasan Proyek Prioritas <i>ASEAN Connectivity</i> Bidang Hubungan Antar Masyarakat
7	7-8 Maret 2012	Bandar Lampung, Lampung	<i>Capacity Building Workshop</i> Bagi Pejabat Pemerintah Mengenai Hukum Pengungsi Internasional & Peran UNHCR Di Indonesia
8	9 – 10 Mar 2012	Hotel Mirah, Bogor	Rapat Persiapan Pertemuan <i>ASEAN Coordinating Committee On Services Ke-68</i>
9	12 Mar 2012	Ruang Rapat Gedung B, BNPP, Jakarta	Rapat Lanjutan Persiapan <i>Workshop</i> Ketahanan Sosial Ekonomi Perbatasan Negara
10	12 Mar 2012	Ruang Rapat BKPM, Gedung Suhartoyo BKPM, Jakarta	Rapat Pembahasan Implikasi <i>Isu Subrogation And Denial Of Benefits</i> Dalam Perjanjian Investasi Internasional Terhadap Ketentuan Domestik
11	12 Mar 2012	Ruang Rapat Ali Said, Gedung Ditjen. AHU, Kemenkumham, Jakarta	Pertemuan Dengan Delegasi Belarus
12	12 Mar 2012	Ruang Ambon Ceram, Hotel Borobudur, Jakarta	Seminar Sosialisasi Pemanfaatan Proyek-Proyek Dan Program Kerjasama Pembangunan ASEAN Dalam Rangka Pencapaian Komunitas ASEAN 2015
13	12 – 13 Mar 2012	Hotel Pangrango, Bogor	Pertemuan Teknis Persiapan <i>Review Border Trade Agreement (BTA) 1970</i> Antara Indonesia Dan Malaysia
14	12 – 13 Mar 2012	Hotel Bintang Griyawisata, Jakarta Pusat	Rapat Konsultasi Dalam Rangka Menyusun Bahan Masukan Rencana Aksi Tahun 2012 – Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara
15	13 Mar 2012	Ruang Rapat Direktorat Timur Tengah, Gedung Utama Kemlu, Jakarta	Rapat Pembahasan Draf Memorandum Kesepahaman (Mou) Kerjasama RI – Irak Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas
16	13 Mar 2012	Hotel Kempinski, Jakarta	Seminar Internasional “Hak Untuk Tahu, Berjuang Untuk Tahu”

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
17	13-16 Mar 2012	Siem Riep, Kamboja	<i>ASEAN The Coordinating Committee On Services (CCS) Ke-65</i>
18	14-15 Mar 2012	Hotel Salak, Bogor	Pertemuan Teknis Persiapan Perundingan Ke-4 <i>Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)</i>
19	15 Mar 2012	Ruang Rapat Direktorat KSI Aspasaf, Gedung Utama Kemlu, Jakarta	Rapat Interkementerian Pembahasan <i>Travel (Rapid Deployment) Facilitation For Disaster Relief Personnel And Equipment</i>
20	15 Mar 2012	Ruang Rapat Direktorat Lintas Batas Dan Kermalugri, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	<i>Liaison Meeting</i> Dengan Perwakilan <i>DIAC Australia</i> Di Jakarta
21	16 Mar 2012	Ruang Rapat Direktorat Lintas Batas Dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Rapat Lanjutan Pembahasan Pemukim Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Filipina
22	19-21 Mar 2012	Hotel The Hills, Bukittinggi, Sumatera Barat	Sidang <i>The 4th IMT-Gttask Force Trade Investment And Tourism Data Base (4th ITTD)</i> , <i>3rd IMG-GT Customs Immigration And Quarantine (3rd CIQ)</i> , Dan Sidang <i>6th IMT-GT Working Group Meeting On Trade And Investment</i>
23	28-30 Mar 2012	Quest Hotel, Bali	<i>Workshop</i> Bagi Petugas Imigrasi Dan Pejabat Pemerintah Terkait Pencari Suaka, Pengungsi, Dan <i>Statelessness</i> Di Indonesia
24	28 – 29 Mar 2012	Orchardz Hotel, Jakarta	Rapat Koordinasi II Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013
25	26 – 30 Mar 2012	Perbatasan RI – PNG	Monitoring Pos Lintas Batas Skouw Dan Jayapura, Papua
26	29 Mar 2012	Hotel Acacia Jakarta	Rapat Persiapan Sekber Ke-8 JKK/KK Sosek Malindo Tahun 2012
27	30 Mar 2012	Ruang Sunda Kelapa Gedung Utama Lt. 3, Kemlu, Jakarta	Pertemuan Koordinasi Tingkat Teknis
28	30 Mar – 1 Apr 2012	Hotel Sahira Bogor	Seminar Dan <i>Workshop “Strengthening Indonesia-Saudi Arabia Bilateral Cooperation”</i>
APRIL			
1	2 – 6 Apr 2012	Kuala Lumpur, Malaysia	Persidangan Sekretariat Bersama (Sekber) JKK/KK Sosek Malindo Ke-8 RI - Malaysia
2	3 – 4 Apr 2012	Hotel Mercure, Batam	Workshop Antar Instansi Pemerintah Mengenai Hukum Pengungsi Internasional Dan Peran UNHCR
3	4 Apr 2012	Ruang Rapat Lantai 9, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rapat Pembahasan <i>Draft Mou</i> Pariwisata RI – RDTL
4	9 Apr 2012	Ruang Rapat Gedung A Lt. VI, Kemenko Polhukam, Jakarta	Rapat Koordinasi Lanjutan Tentang Keanggotaan Indonesia Pada <i>International Organization For Migration (IOM)</i>
5	10 Apr 2012	Ruang Rapat New York, Gedung Ditjen. Protokol Dan Konsuler, Kemlu, Jakarta	Rapat Koordinasi Inter-Kementerian Membahas Persiapan <i>2nd RI – Australia Bilateral Consular Consultations</i> Di Bali, 26-27 April 2012

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
6	11 Apr 2012	Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Utama Kemlu, Jakarta	Rapat Inter-Kementerian Membahas Permintaan Irak Untuk Menghapus Nama Negara Itu Dari "Red List" Indonesia Dan Perjanjian Bebas Visa Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas Indonesia-Kuwait, Indonesia-Libya, Dan Indonesia-Maroko
7	11 Apr 2012	Hotel Akmani, Jakarta	Rapat Konsinyering Pembahasan Posisi Pemerintah RI Pada Sidang Kelompok Kerja <i>Regional Support Office (RSO) Bali Process</i>
8	11 Apr 2012	Ruang Rapat Gedung B, BNPP, Jakarta	Rapat Tentang Sistem Registrasi Penduduk Pulau-Pulau Kecil Di Perbatasan Indonesia – Filipina
9	12 Apr 2012	Gedung Kantor PPATK, Jakarta	Sosialisasi Penguatan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
10	12 Apr 2012	Ruang Rapat Nusantara V, Gedung E, Lantai 7, Badan Karantina Pertanian, Kemtan, Jakarta	Rapat Persiapan 7 th <i>CIQS TF BIMP-EAGA</i>
11	12 Apr 2012	Hotel Puri Denpasar, Jakarta	Rapat Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Selaku Kepala BNPP Ke P. Sebatik Dan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan
12	12 Apr 2012	Ruang Sunda Kelapa, Gedung Utama Lantai 3, Kemlu, Jakarta	Rapat Inter-Kementerian Dan Permintaan Delegasi RI Dalam Rangka Persiapan Akhir Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-9 Indonesia-Kerajaan Arab Saudi
13	16 Apr 2012	Ruang Rapat BKPM, Gedung Suhartoyo, BKPM Jakarta	Rapat Koordinasi Untuk Mempersiapkan Posisi Delegasi Indonesia Pada Pertemuan <i>Coordinating Committee On Investment (CCI) Ke-56</i> Di Filipina Tanggal 25-27 April 2012
14	16 Apr 2012	Ruang Rapat Direktorat LBKLN, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Pertemuan Dengan Perwakilan <i>US Embassy In Jakarta</i>
15	16 – 20 Apr 2012	Atambua, NTT0	Monitoring Perbatasan RI – Timor Leste, Atambua, NTT
16	18 Apr 2012	<i>IOM Office, Rajanakarn Building</i> , Bangkok, Thailand	Rapat Pertemuan Kelompok Kerja <i>Bali Process</i> Tentang <i>Regional Support Office</i>
17	18 Apr 2012	Ruang Rapat Direktorat KSI Aspasaf, Lantai 5, Gedung Utama Kemlu, Jakarta	Rapat Inter-Kementerian Pembahasan <i>Travel (Rapid Deployment) Facilitation For Disaster Relief Personnel And Equipment</i>
18	18 Apr 2012	Ruang Rapat Dewan Kelautan Indonesia, Gedung Mina Bahari II Lantai 7, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Jakarta	Rapat Tindak Lanjut Tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia
19	18 Apr 2012	Ruang Flamboyan, Gedung 1 Lantai 1, Kemdag, Jakarta	Rapat Pembahasan Posisi Deliri Pada <i>CCS Ke-69/Sectoral Working Group CCS Ke-69</i>
20	19 Apr 2012	Ruang Serba Guna 3, Bappenas, Jakarta	Pertemuan Tim Teknis <i>Peace Corps</i>
21	19 Apr 2012	Ruang Sumba C, Lantai 3, Hotel Borobudur, Jakarta	Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Presiden RI Ke Timor Leste Tanggal 19-20

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
			Mei 2012
22	23 – 27 Apr 2012	Dumai Dan Bengkalis, Riau	Monitoring Pos Lintas Batas Di Dumai Dan Bengkalis, Riau
23	24 Apr 2012	Hotel Puri Denpasar, Jakarta	Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Mendagri Selaku Kepala BNPP Ke Kawasan Perbatasan Negara Di Propinsi Kalimantan Timur
24	24 Apr 2012	Ruang Rapat Gedung B, Lantai 4, DKPT, Kemenko Polhumam, Jakarta	Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Ke Timor Leste Pada Tanggal 1-4 Mei 2012
25	24 Apr 2012	Ruang Rapat BPPK, Kemlu, Jakarta	Rapat Persiapan Komisi Bersama RI – India
26	24 – 28 Apr 2012	Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau – Lubok Antu	Kunjungan Kerja RI – Malaysia Ke Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau Dan Lubok Antu
27	25-27 Apr 2012	Puerto Princessa City, Palawan, Filipina	Pertemuan Ke-56 <i>ASEAN Coordinating Committee On Investment (CCI)</i>
28	26 Apr 2012	Ruang Dahlia, Gedung I Lantai 2, Kemdag, Jakarta	Rapat Pembahasan <i>Update</i> Posisi Delri Pada <i>CCS Leaders' Caucus</i> Dan <i>Sectoral Working Group CCS Ke-69</i>
29	26 Apr 2012	Ruang Rapat Direktorat LBKLN, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Pertemuan Dengan <i>UNODC</i> Dalam Rangka Proposal Program Kerja <i>UNODC</i> Tahun 2012
30	26 – 27 Apr 2012	Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali	Sidang Komisi Bersama (SKB) Republik Indonesia – Arab Saudi Ke-9
31	26 – 27 Apr 2012	Patra Bali Resort And Villas, Kuta, Bali	<i>2nd Australia – Indonesia Bilateral Consular Consultation</i>
32	27 – 28 Apr 2012	Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung	Pertemuan Teknis Persiapan Pertemuan <i>APEC CTI-3/2012</i> Di Kazan, Rusia
33	30 Apr 2012	Hotel Royal Bogor	Rapat <i>Host Country Agreement (HCA) CAPSA</i>
34	30 Apr 2012	Ruang Rapat Flamboyan, Gedung I Lantai 1, Kemdag, Jakarta	Rapat Interkem Persiapan Pertemuan Pertama <i>Committee On Services - AANZFTA</i>
MEI			
1	1 – 4 Mei 2012	Dili, Timor Leste	Kunjungan Kerja Persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden RI Ke Timor Leste Tanggal 19-20 Mei 2012
2	2 – 5 Mei 2012	Da Nang, Vietnam	Pertemuan <i>ASEAN Coordinating Committee On Services (CCS) Ke-69</i>
3	3 Mei 2012	Ruang Rapat Dit. LBKLN, Gedung Ditjen. Imigrasi Lt. IV, Jakarta	Rapat Lanjutan Pembahasan Pengaturan Kerjasama Teknis Antara Ditjen. Imigrasi Dan <i>IOM</i> Tentang Proyek Pengelolaan Dan Perawatan Imigran Non-Reguler Tahap II Yang Berada Di Wilayah RI
4	4 Mei 2012	Ruang Rapat Menko Bidang Perekonomian, Gedung AA Maramis II Lantai 4, Jakarta	Sosialisasi Hasil <i>IMT-GT Dan BIMP-EAGA Summit</i>
5	8 Mei 2012	Ruang Rapat Kasetpres, Jl. Veteran No. 16, Jakarta	Rapat Koordinasi Kunjungan Tamu Negara Korea Utara Dan Portugal Serta Kunjungan Presiden RI Ke Dili, Bangkok, Dan Singapura
6	8 Mei 2012	Ruang Rapat Ditjen. Hukum Dan Perjanjian Internasional, Kemlu, Jakarta	Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Urgensi Untuk Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
			Persetujuan RI-Kazakhstan Dan RI-Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspur Diplomatik Dan Dinas.
7	9 Mei 2012	Ruang Rapat Sunda Kelapa, Gedung Utama Lt. 3, Kemlu, Jakarta	Rapat Interkementerian Persiapan <i>SOM2 APEC 2012</i> , Kazan, Rusia, 20 Mei – 3 Juni 2012
8	9 – 10 Mei 2012	Hotel Aston, Balikpapan	<i>Workshop</i> Antar-Instansi Pemerintah Mengenai Hukum Pengungsi Internasional Dan Peran <i>UNHCR</i> Di Indonesia
9	10 – 11 Mei 2012	Le Grandeur Hotel, Balikpapan	<i>The 7th Customs, Immigration, Quarantine, And Security (CIQS) Task Force Meeting</i>
10	10 Mei 2012	Ruang Rapat SG-5, Bappenas	Rapat Tentang Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan TKI
11	11 Mei 2012	Ruang Serbaguna 1-2, Kantor Bappenas, Jakarta	Penandatanganan <i>UNODC Country Programme 2012-2015</i>
12	14 Mei 2012	Ruang Rapat Oemar Seno Adji, Gedung Ditjen. AHU Lantai 8, Jakarta	Rapat Koordinasi Pembahasan Materi Agenda Sidang Tahunan <i>AALCO</i> Ke-51
13	14 Mei 2012	Ruang Rapat Ditjen. Multilateral, Gedung Ex-BP7, Kemlu, Jakarta	Rapat Persiapan Penyelenggaraan <i>Bali Process Technical Experts' Meeting On Trafficking In Persons</i> Dan <i>Ad Hoc Group Senior Officials' Meeting</i>
14	14 Mei 2012	Ruang Rapat Auditorium 3, Gedung Utama Lantai 1, Kemdag, Jakarta	Rapat Persiapan Pertemuan <i>AITNC-WGS</i> Ke-13
15	14 – 16 Mei 2012	Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta	Rapat Persiapan Akhir Kunjungan Kerja Kepala BNPP Ke Pulau Sebatik Dan Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Kalimantan Timur
16	14 – 15 Mei 2012	Ruang Aula Multikultural, Universitas Kanjuruhan Malang, Jawa Timur	Seminar Nasional Sosialisasi Perkembangan Kerjasama <i>ASEAN</i> Dengan Mitra Wicara <i>ASEAN</i>
17	16 Mei 2012	Ruang Rapat, Gedung Utama Lt. 4, Kemlu, Jakarta	Rapat Inter-Kementerian Membahas Mengenai Kerangka Acuan (<i>Terms Of Reference/Tor</i>) Bagi Penugasan Tim Teknis Untuk Percepatan Penyelesaian Masalah Dan Pemulangan TKI Bermasalah Di <i>Shelter KBRI Amman, Yordania</i>
JUNI			
1	1 – 3 Jun 2012	Hotel Salak Bogor	Seminar Kebijakan Globalisasi Lintas Sektor Yang Berpengaruh Kepada Bidang Kesehatan
2	5 Jun 2012	Ruang Rapat Direktorat Perjanjian Polkamwil, Gedung Utama Kemlu, Lantai 11, Jakarta	Rapat Pembahasan Inisiatif Pertemuan Dari <i>ICITAP</i>
3	5 Jun 2012	Ruang Rapat Serayu Lt. 3, Kemenko Perekonomian, Jakarta	Rapat Persiapan Perumusan <i>Draft Mou RI – Timor Leste</i>
4	5 – 7 Jun 2012	Arion Swiss-Bel Hotel, Bandung	Pelatihan Mengenai “Prosedur Penentuan Status Pengungsi” Bagi Pejabat Pemerintah RI
5	7 Jun 2012	Kirana Room, Hotel Kartika Chandra, Jakarta	<i>Focused Group Discussion (FGD)</i> Tahun 2012 Tentang <i>Legal Assistance For The Poor</i>
6	8 Jun 2012	Ruang Auditorium 3, Gedung Utama Kemdag, Jakarta	Rapat Penyelesaian <i>Draft ASEAN MNP Agreement</i>

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
7	10-12 Jun 2012	Hotel Holiday Inn, Tuban, Bali	Pertemuan Teknis Pembahasan <i>Mou</i> Pembentukan <i>Task Force DRIEA Indonesia-Timor Leste</i>
8	11-13 Jun 2012	Quest Hotel, Bali	Bimbingan Teknis Manajemen Konferensi Internasional
9	11-15 Jun 2012	Quest Hotel, Bali	<i>Train The Trainer (Tot) Course On Document Forensic</i>
10	12 Jun 2012	Ruang Rapat "TRI SULA" Gedung Karya Lt. 12, Kemhub, Jakarta	Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Permasalahan Untuk Pertemuan Ke-4 <i>BIMP-EAGA Head Of Security</i>
11	13-15 Jun 2012	<i>Amari Watergate Hotel</i> , Bangkok	<i>Workshop On Cross-Border Management: A Key To Efficient ASEAN Connectivity</i>
12	14 Jun 2012	Ruang Tamu Dirjen. Imigrasi, Gedung Ditjen. Imigrasi, Jakarta	<i>Courtesy Call</i> Duta Besar Bangladesh
13	15 Jun 2012	Ruang Mezzanine, Lantai II, Hotel Aryaduta, Jakarta	Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Anggaran Dalam Rangka Keketuaan Dan Ketuanrumahan Indonesia Pada <i>APEC 2013</i>
14	16-21 Jun 2012	KJRI Los Angeles, Amerika Serikat	Monitoring Pelayanan Keimigrasian
15	18 Jun 2012	Ruang Rapat Gedung B BNPP, Jakarta	Rapat Koordinasi Pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	18-22 Jun 2012	Pos Imigrasi Nanga Badau Dan Marakai Panjang, Sanggau	Monitoring Pos Imigrasi Perbatasan
17	19-22 Jun 2012	Hotel Salak Heritage, Bogor	Pertemuan Teknis Persiapan Perundingan Perdagangan Jasa Di Fora <i>ASEAN Dan ASEAN+Mitra</i>
18	22-23 Jun 2012	Hotel Salak Heritage, Bogor	Pertemuan Teknis Ratifikasi Komitmen Spesifik Paket 2 <i>ACFTA</i>
19	27 Jun 2012	Ruang Rapat Direktorat Eropa Barat, Lt. 7, Gedung Utama Kemlu, Jakarta	Rapat Pembahasan <i>Pending Issues</i> Dan <i>Pending</i> Persetujuan RI – San Marino
20	28 Jun 2012	Ruang Rapat Biro Protokol, Gedung Bina Graha, Lantai II, Jl. Veteran No. 16, Jakarta	Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Presiden RI Ke Darwin-Australia, Kunjungan Kenegaraan Presiden Ceko Dan Kunjungan Resmi Kanselir Jerman
JULI			
1	3 Jul 2012	Hotel Bidakara, Jakarta	Rapat Koordinasi Draf Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
2	4 – 5 Jul 2012	The Vira Bali Hotel, Bali	Workshop Bagi Petugas Imigrasi Mengenai Hukum Pengungsi Internasional & Peran UNHCR Di Indonesia
3	6 Jul 2012	Ruang Rapat Nakula, Lantai 6 Gedung A Kemenko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat	Rapat Koordinasi Pokja Tindak Lanjut Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP RI – RDTL
4	11 – 12 Jul 2012	Hotel Gran Senyur, Jl. A.R.S. Mohammad No. 07, Balikpapan	"Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan"

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
5	12 Jul 2012	Hotel The Acacia, Jl. Kramat Raya No. 81, Jakarta Pusat	<i>Review Special Arrangement On Traditional And Customary Border Crossings RI – PNG Tahun 1993</i>
6	15 – 19 Jul 2012	Melaka Dan Johor Bahru, Malaysia	Monitoring Kerjasama Perbatasan Di Malaysia
7	16 Jul 2012	Gedung Rektorat (Ruang Sidang II) – UNS, Solo	Seminar Nasional Sosialisasi Perkembangan Kerjasama ASEAN Dengan Mitra Wicara
8	17 Jul 2012	Ruang Sunda Kelapa, Gedung Utama, Lt. 3, Kemlu, Jakarta	Rapat Interkementerian Persiapan Substansi (Penyusunan Prioritas Dan <i>Deliverables</i>) <i>APEC 2013</i>
9	17 Jul 2012	Ruang Rapat BNN Lantai 1, Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur	Rapat Pembahasan Draf Mou Antara Indonesia Dan Venezuela, Belanda, Spanyol, Bulgaria, Peru, Maroko, Dan Portugal
10	18 Jul 2012	Hotel Ambhara, Jakarta	Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi Pelabuhan Liem Hie Djung Di Kab. Nunukan, Kaltim
11	19 Jul 2012	Ruang Rapat Dit. KFA, Kemlu, Jakarta	Rapat Internal Finalisasi <i>Host Country Agreementy AHA Centre</i>
12	19 Jul 2012	Ruang Rapat Direktorat Asia Timur Dan Pasifik, Kemlu, Jakarta	Rapat Finalisasi Dalam Rangka Persiapan Pertemuan <i>Joint Commission For Bilateral Cooperation (JCBC) RI – Vietnam</i>
13	20 Jul 2012	Hotel Crowne Plaza, Jakarta	Rapat Pemaparan Rencana Kerja Komnas Implementasi IHR 2005 Tahun 2012-2014
14	23 Jul 2012	Ruang Dahlia, Gedung Tengah Lt. 1, Kemdag, Jakarta	Rapat Pembahasan <i>Schedule ASEAN MNP Agreement</i>
15	23 – 27 Jul 2012	Pos Imigrasi Wembi, Waris, Dan Senggi	Monitoring Pos Imigrasi Perbatasan RI – PNG Di Papua
16	24 – 25 Jul 2012	<i>Government Guest House Vietnam, Nguk Yen Street, Hanoi, Vietnam</i>	<i>Joint Commission For Bilateral Cooperation (JCBC) RI – Vietnam, Hanoi</i>
17	24 – 25 Jul 2012	New Delhi, India	Pertemuan Ke-4 Komisi Bersama RI – India
18	31 Jul 2012	Ruang Rapat SG. 5, Bappenas, Jakarta	Rapat Pilar Rencana Aksi Sistem Informasi (Tenaga Kerja Indonesia)
AGUSTUS			
1	1 Aug 2012	Ruang Rapat Sunda Kelapa, Kemlu, Jakarta	Rapat Koordinasi Teknis Persiapan <i>Senior Officials Meeting (SOM) 1, SOM 2, SOM 3, And Related Meetings APEC 2013</i>
2	1 Aug 2012	Ruang Rapat Auditorium Lt. 3, Gd. Utama Kemdag, Jakarta	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Mengenai Hasil <i>RCEP-WGS</i>
3	2 Aug 2012	Ruang Sunda Kelapa, Gedung Utama, Kemlu, Lt. 3, Jakarta	Rapat Interkementerian Tingkat Eselon I Persiapan Substansi (Penyusunan Prioritas Dan <i>Deliverables</i>) <i>APEC 2013</i>
4	6 – 10 Aug 2012	Nunukan, Kalimantan Timur	Monitoring Perbatasan RI - Malaysia
5	7 – 9 Aug 2012	Hotel Jayakarta, Jakarta	Rapat Penyusunan Rancangan Kebijakan/Peraturan Pengelolaan Potensi Dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
6	8 Aug 2012	Ruang Rapat Ditjen. Binapenta, Lt. 4 Gd. A, Kemenakertrans, Jakarta	Rapat Pembahasan <i>Draft Mou</i> Bidang Ketenagakerjaan RI – Kerajaan Arab Saudi (KAS)
7	9 Aug 2012	Ruang Rapat Sops TNI Gedung B2 Lt-6, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta	Rapat Pendahuluan Pertemuan Ke-17 JSCSM
8	9 Aug 2012	Ruang Rapat Dit. LBKLN, Gedung Ditjen. Imigrasi, Lt. 4, Jakarta	Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kerjasama Antara <i>UNODC</i> Dan Ditjen. Imigrasi Terkait Pembentukan <i>Port Intelligence Unit (PIU)</i>
9	13 Aug 2012	Mezzanine Ballroom, Mezzanine Floor, Hotel Aryaduta Jakarta	Konsultasi Nasional Ke-2 Mengenai <i>ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)</i>
10	13 Aug 2012	Ruang Sunda Kelapa, Gedung Utama Lt. 3, Kemlu, Jakarta	Pertemuan Teknis K/L Dalam Rangka Sosialisasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik Dan <i>Good Governance</i> TA 2012 Di Ankara, Turki Bulan September 2012
11	15 Aug 2012	Hotel Jayakarta, Jakarta	Rapat <i>Review Special Arrangements 1993</i> Dan <i>Basic Agreements 2003 Indonesia – Papua New Guinea</i>
12	16 Aug 2012	Ruang Rapat New York, Setditjen. Protokol Dan Konsuler, Kemlu, Jakarta	Rapat Pertemuan Teknis Persiapan Sosialisasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik Dan <i>Good Governance</i>
13	20 – 21 Aug 2012	Hotel Gren Melia, Shanghai, China	<i>International Conference On Immigration Inspection And Service</i>
14	29 Aug 2012	Ruang Rapat Direktorat Amerika Utara Dan Tengah, Gedung Tower Lt. 6, Kemlu, Jakarta	Rapat Inter-Kementerian Pembahasan Rancangan Persetujuan Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas RI – Republik Oriental Uruguay
15	31 Aug 2012	Bappenas, Jakarta	Rapat <i>Progress</i> Dan <i>Update</i> Kegiatan <i>ASEAN Connectivity</i>
16	31 Aug 2012	Hotel Allson Residence Mitra Oasis, Jakarta	Rapat Pembahasan Draf Perumusan Kebijakan Umum Pariwisata Bahari Dalam Rangka <i>ASEAN Economic Community 2015</i>
SEPTEMBER			
1	3 Sept 2012	Ruang Rapat Direktorat Lintas Batas Dan Kermalugrikim, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Pertemuan Dengan <i>Canada Border Services Agency</i>
2	3 – 7 Sept 2012	Hilton Phuket Arcadia Resort And Spa, Phuket, Thailand	<i>8th AIIF (ASEAN Immigration Intelligence Forum)</i>
3	4 – 7 Sept 2012	Hotel Singgasana, Makassar	Workshop Bagi Petugas Imigrasi Tentang Penyelundupan Manusia Dan <i>Statelessness</i> Di Indonesia
4	4 – 7 Sept 2012	Inna Sindhu Hotel Beach, Sanur, Bali	<i>Asian Productivity Organization (APO) “Study Meeting On Performance For Public Sector”</i>
5	5 Sept 2012	Ruang Serba Guna 4, Bappenas, Jakarta	Rapat Tim Teknis <i>Peace Corps</i> Tentang Usulan Perubahan <i>Implementing Arrangement</i>
6	7 Sept 2012	Ruang Raffles Lt. 1, Hotel Orchardz, Jakarta	Rapat Lanjutan Persiapan Persidangan JBC RI – PNG Ke-289 Di Port Moresby
7	10 Sept 2012	Kemdag, Jakarta	Rapat <i>The 31st ASEAN-India Trade Negotiating Committee – Working Group On Services (AITNC-WGS) And Related Meetings</i>

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
8	10 – 13 Sept 2012	Belakang Padang, Riau	Monitoring Pos Imigrasi Perbatasan Di Kec. Belakang Padang, Riau
9	10 – 14 Sept 2012	Posko Komunitas Intelijen Pusat, Jakarta	Komunitas Intelijen Pusat
10	11 – 15 Sept 2012	Best Western Premier Hotel, Solo	<i>Passenger Clearance Module Training</i>
11	17 Sept 2012	Ruang Rapat Ditjen. Kerjasama Perdagangan Internasional, Gedung Utama, Lt. 8, Kemdag, Jakarta	Rapat Pembahasan Hubungan Kerjasama Perdagangan Lintas Batas Indonesia – Timor Leste
12	17 – 21 Sept 2012	Singawang, Kalbar	Monitoring Pos Imigrasi Perbatasan Di Singawang
13	17 – 21 Sept 2012	Kupang Dan Atambua, NTT	Kunjungan Kerja Dit. Keamanan Diplomatik, Kemlu Ke Provinsi NTT
14	25 Sept 2012	Hotel The Acacia, Jakarta	Rapat Persiapan Persidangan Ke-30 KK/JKK Sosek Malindo Tahun 2012
15	25 – 28 Sept 2012	The Pinnacle Hotel, Davao City, Philippine	Phil – Ind Border Committee's 31 st Vice-Chairmen's Conference
16	28 Sept 2012	Hotel Palais De Chine, Taipei, Taiwan	<i>Signing Ceremony Of Mou Between Taipei Economic And Trade Office (TETO) And Indonesia Economic And Trade Office (IETO) On Cooperation In Immigration Affairs, Human Trafficking, And People Smuggling Prevention</i>
17	29 Sept – 1 Okt 2012	KJRI Davao, Filipina	Monitoring Pelayanan Keimigrasian Di KJRI Davao
OKTOBER			
1	2 – 5 Okt 2012	Hotel Aston, Pontianak	Workshop Bagi Petugas Imigrasi Tentang Penyelundupan Manusia Dan <i>Statelessness</i> Di Indonesia
2	3 – 5 Okt 2012	Hotel Ibis, Yogyakarta	Bimtek Pengelolaan Potensi Dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat Dalam Rangka Membangun Ketahanan Perbatasan Negara
3	4 Okt 2012	Swiss Belhotel Maleosan, Manado	Rapat Koordinasi Kerjasama Perdagangan Perbatasan Indonesia - Filipina
4	7 – 13 Okt 2012	Port Moresby, PNG	<i>17th JSCSM (Joint Sub Committee On Security Matters) RI - PNG</i>
5	10 – 11 Okt 2012	Hotel Aston, Manado	<i>Workshop</i> Bagi Pejabat Imigrasi Mengenai Hukum Pengungsi Internasional Dan Peran UNHCR Di Indonesia
6	15 – 19 Okt 2012	KJRI Hongkong	Monitoring Pelayanan Keimigrasian Di KJRI Hongkong
7	16 Okt 2012	Ruang Rapat Dirjen. Imigrasi, Ditjen. Imigrasi, Jakarta	Pertemuan Dengan Perwakilan <i>UNODC</i>
8	24 Okt 2012	Universitas Paramadina, Jakarta	Seminar Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
9	24 – 26 Okt	Lapangan Simpang Lima, Kabupaten Belu-Atambua,	Festival Perbatasan Timoresia

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan
	2012	NTT & KBRI Dili, Timor-Leste	
10	29 Okt – 2 Nov 2012	Kec. Atambua, Kab. Belu, NTT	Monitoring Pos Imigrasi Perbatasan RI – RDTL
NOVEMBER			
1	2 Nov 2012	Ruang Rapat Dewi Sartika, Lt. 3, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Jakarta	Rapat Pleno Penyelenggaraan <i>The Fourth Ministerial Conference On The Role Of Women In Development Of The OIC Member States</i>
2	5 – 7 Nov 2012	Kab. Keerom, Papua	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Bersama Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (KKB Gerbangdutas) Di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
3	6 – 9 Nov 2012	<i>President Hotel Seoul</i> , Korea Selatan	<i>High Level Talks Bilateral Meeting Between Korea Immigration Service (KIS) And Ditjen. Imigrasi</i>
4	9 Nov 2012	Ruang Rapat Sembodo, Gd. B, Lt. VI, Kemenko Polhukam, Jakarta	Rapat Persiapan Pertemuan Menko Polhukam Dengan Para Kepri Di Wilayah Amerika

G. Direktorat Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian

Tolak ukur keberhasilan pada Pencapaian Sasaran ini adalah penyelenggaraan kegiatan dan pada umumnya dapat mencapai target kinerja sesuai dengan dengan rencana/ perjanjian kinerja yang ditentukan dengan memperhatikan sarana penunjang pelaksanaannya dapat disampaikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan Aplikasi Yang On Line 24 Jam Dan Terintegrasi Di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Detensi Imigrasi Dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yang Terukur	Jumlah Pengembangan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal, Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian	1 Pkt	1 Pkt	100%
	Jumlah Pengembangan Sistem Penerbitan Spri	1 Pkt	1 Pkt	100%
	Jumlah Pengadaan Sistem Business Intelijen	1 Pkt	1 Pkt	100%
	Jumlah Pengelolaan Layanan Bantuan (Helpdesk) Kesisteman	12 Keg	12 Keg	100%
	Jumlah Pengelolaan Pusat Data Keimigrasian	12 Keg	12 Keg	100%
	Jumlah Pengelolaan Drc Keimigrasian	4 Keg	3 Keg	25 %
	Jumlah Pengendalian Sistem Dan Teknologi Informasi Keimigrasian	115 Lokasi	77 Lokasi	67%
	Jumlah Pemeliharaan Sistem E-Office	1 Th	1 Th	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Jumlah Pemeliharaan Sistem Border Control Management (Bcm), Cekal, Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian	1 Th	1 Th	100%
	Jumlah Pemeliharaan Sistem Penerbitan Spri	1 Th	1 Th	100%
	Jumlah Pemeliharaan Gedung Drc Keimigrasian	1 Th	1 Th	100%
	Jumlah Sewa Co-Location Drc Keimigrasian	1 Th	1 Th	100%
	Jumlah Re-Lokasi Drc Keimigrasian	1 Pkt	1 Pkt	100%
	Jumlah Peremajaan Webmail Dan Website Ditjen Imigrasi	1 Pkt	1 Pkt	100%
	Jumlah Peremajaan Fasilitatif Keimigrasian	1 Pkt	1 Pkt	100%
	Jumlah Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian	1 Th	1 Th	100%
	Jumlah Pemantauan Penggunaan Dokumen Keimigrasian Dan Kartu Elektronik	30 Keg	28 Keg	99,3%
	Jumlah Pencetakan/Penerbitan Dokumen Keimigrasian	1 Th	1 Th	56,5%
	Jumlah Pengemasan/ Pengiriman/ Pengangkutan Dokumen Keimigrasian	1 Th	1 Th	56,5%

Sebagai akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian telah berhasil menjalankan program dan/ kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal, Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

Sistem BCM, Cekal dan Nyiddakim telah dibangun sejak tahun 2009 yang hingga sampai dengan saat ini masih dilakukan pengembangan kelanjutannya. Adapun sistem ini ditujukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian khususnya bagi perlintasan keimigrasian baik masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Kegiatan pengembangan yang telah dilakukan didalamnya mencakup pengadaan perangkat pelayanan keimigrasian bagi perlintasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan penyempurnaan aplikasi. Hingga sampai dengan saat

ini telah terimplementasi system dimaksud di 44 (empat puluh empat) lokasi TPI di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.000.702.000 dan pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan pembiayaan sebesar Rp. 15.968.744.000 sehingga terdapat prosentase penyerapan sebesar 37 %.

2. Pengembangan Sistem Penerbitan SPRI

Sistem Penerbitan SPRI telah dibangun sejak tahun 2008 yang hingga sampai dengan saat ini masih dilakukan pengembangan kelanjutannya. Adapun sistem ini ditujukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan keimigrasian bagi warganegara Indonesia.

Kegiatan pengembangan Sistem Penerbitan SPRI mencakup pengadaan perangkat pelayanan keimigrasian dan penyempurnaan aplikasi. Hingga sampai dengan saat ini sistem tersebut telah diimplementasikan di 114 (seratus empat belas) lokasi Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dan 3 (tiga) Atase Imigrasi di Perwakilan RI serta 1 (satu) Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 49.500.000.000 dan pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan pembiayaan sebesar Rp. 29.620.549.669 sehingga terdapat prosentase penyerapan sebesar 60 %.

3. Pengadaan Sistem Business Intelijen

Pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membangun sebuah Sistem Data Warehouse Keimigrasian yang menjadi media pengumpulan data keimigrasian untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian data keimigrasian secara mudah dan akurat.

Sebagai tahap selanjutnya setelah pembangunan sistem Sistem Data Warehouse maka diperlukan sebuah sistem yang dapat melakukan analisa terhadap data-data yang terkumpul dalam datawarehouse. Sistem bussiness intelijen keimigrasian akan melakukan analisa dan menemukan pola-pola tertentu yang dapat membantu pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Sistem bussiness intelijen keimigrasian juga akan dapat memberikan informasi yang spesifik dan rinci sebagai bahan analisa lanjutan untuk mengetahui sebuah rangkaian kejadian dan rangkain kegiatan dalam rangka proses penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.309.579.000 dan pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan pembiayaan sebesar Rp. 7.568.000.000 sehingga terdapat prosentase penyerapan sebesar 81%.

4. Pengelolaan Layanan Bantuan (Helpdesk) Kesisteman

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara rutin dilakukan. Kegiatan ini ditujukan untuk pengelolaan penanganan permasalahan kesisteman baik aplikasi, perangkat maupun jaringan. Kegiatan ini menjadi suatu mediasi / penjemabatan / media komunikasi terhadap penanganan permasalahan / kerusakan yang terjadi di masing-masing Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian baik di daerah maupun Perwakilan RI agar dapat diketahui dan ditangani segera permasalahannya.

Sumber/pusat untuk pengaduan kendala/permasalahan telah disediakan dalam media Portal Imigrasi dengan menu Helpdesk maupun melalui media CRM serta VoIP. Menu Helpdesk digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pusat dan daerah, dalam menu tersebut juga ditampilkan informasi penting seperti line telpon Subbagian Humas, Setditjenim, dan VoIP, serta Seksi Cekal, Nyiddakim.

Dalam media CRM, setiap pelapor, laporan permasalahan, penanggungjawab / penerima laporan, solusi / tanggapan atas permasalahan tersebut, serta waktu laporan dapat diketahui dan termonitor setiap saat. Untuk fasilitas VoIP, telah tersedia layanan telepon sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan kode VoIP 9900 s/d 9929.

Untuk alokasi kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 164.040.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 162.455.700 dengan prosentase penyerapan 99 %.

5. Pengelolaan Pusat Data Keimigrasian

Pusdakim sebagai pusat bagi seluruh sistem-sistem keimigrasian yang telah tergelar serta sebagai pusat penyimpanan database keimigrasian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi keimigrasian yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai peranan sangat penting dalam menunjang pelayanan keimigrasian dan operasional bisnis Direktorat Jenderal Imigrasi. Diperlukan adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi masing-masing perangkat, sistem maupun jaringan agar dapat tetap berjalan secara optimal dan mendukung layanan keimigrasian selama 24 jam/hari dan 7 hari/minggu. Untuk itu kegiatan pemantauan dan pengawasan tersebut harus dilakukan dan dikelola dengan baik oleh petugas yang bertugas selama 24 jam/hari dan 7 hari/minggu.

Di samping kegiatan pengelolaan yang secara rutin dilakukan langsung oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian melalui Tim Pengelola Pusdakim yang terdiri dari unsur Pejabat dan Anggota Tim TIK, agar Pusdakim dapat dimanfaatkan secara optimal, kegiatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan pelaksana pengembang / pembangun / pemelihara kesisteman

dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dalam mengelola Pusdakim dan menangani permasalahan kesisteman untuk selanjutnya dapat menjadi bahan untuk pengembangan kesisteman lebih lanjut.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 362.184.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 358.499.000 dengan prosentase penyerapan 99 %.

6. Pengelolaan DRC Keimigrasian

Jaminan atas ketersediaan layanan dan data untuk mendukung operasional pelayanan keimigrasian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya ketersediaan dan keberlangsungan pelayanan keimigrasian pun tidak dapat diganggu apabila Pusdakim mengalami kegagalan fungsi baik oleh karena hambatan teknis maupun bencana alam. Untuk itu DRC Keimigrasian memegang peranan yang sama pentingnya dalam memback-up layanan kesisteman yang dilakukan oleh Pusdakim sehingga diharapkan operasional pelayanan Keimigrasian masih tetap dapat berlangsung dan berjalan lancar. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam DRC Keimigrasian juga merupakan fungsi-fungsi yang ada dalam Pusdakim sehingga perlu untuk dilakukan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan layanan yang optimal dalam ketersediaan layanan dan data keimigrasian.

Pengelolaan DRC Keimigrasian dilaksanakan dengan melakukan kegiatan switch over/fail over dengan proses back up kesisteman Pusdakim ke DRC Keimigrasian yang berlokasi sementara di Bandung secara berkala melalui proses *remote control* dari Pusdakim dan kegiatan kunjungan/peninjauan langsung. Di samping itu kegiatan pengawasan tetap dilakukan melalui *remote control* secara rutin. Namun demikian penyelenggaraan kegiatan ini belum dapat sepenuhnya terlaksana, hal ini disebabkan oleh karena baru akhir tahun ini DRC Keimigrasian akan direlokasikan ke lokasi permanen yang dimiliki Ditjen Imigrasi di Bali dengan fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersedia dan difungsikan secara penuh.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.635.900.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 166.288.452 dengan prosentase penyerapan 10 %.

7. Pengendalian Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Bahwa penggelaran dan pembangunan SIMKIM atas teknologi informasi dan komunikasi yang telah diimplementasikan, dikembangkan dan dipelihara baik di Kantor Pusat, Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi maupun TPI, dan Rudenim serta Atase Imigrasi di Perwakilan RI, tentunya perlu untuk dilakukan suatu kegiatan evaluasi ataupun pemantauan untuk mengetahui progress maupun pelaksanaan kegiatannya. Hal ini ditujukan agar dapat mengetahui keadaan riil

mengenai situasi dan kondisi pelaksanaan aplikasi yang diimplementasikan, kondisi perangkat maupun jaringan serta hambatan dalam penerapannya.

Di samping itu dilakukan pula peninjauan terhadap infrastruktur, sarana dan prasarana yang menyangkut kelistrikan, penempatan perangkat, maupun perangkat pendukung lainnya serta ketersediaan sumber daya manusia.

Dalam kegiatan kunjungan tersebut pula dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan dapat menambah pengetahuan terhadap berbagai hal yang baru terkait kesisteman dan penggunaannya. Media diskusi terhadap para pimpinan/pejabat maupun pegawai/petugas yang terlibat langsung dalam pelayanan keimigrasian menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah dari hasil kegiatan kunjungan dimaksud baik mengenai perkembangan di lapangan, kendala/permasalahan yang timbul, dan masukan/usulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi tolak ukur atas pencapaian kegiatan yang dilakukan dan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengembangan ke depan.

Hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan pengendalian ke sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) lokasi termasuk Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi dan TPI. Dalam setiap kunjungannya, Tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Tim Teknologi Informasi Keimigrasian.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.159.627.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 1.248.488.004 dengan prosentase penyerapan 40 %.

8. Pemeliharaan Sistem E-Office

Sistem E-Office telah dibangun sejak tahun 2007 melalui kegiatan pembangunan teknologi dan mikroelektronika keimigrasian yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya dilakukan pengembangan Sistem E-Office secara berkelanjutan. Penggelarannya diimplementasikan di lokasi Kantor Pusat Ditjen Imigrasi, Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi hingga Atase Imigrasi di Perwakilan RI.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan operasionalisasi dari perangkat dan aplikasi kesisteman dalam rangka mendukung kelancaran proses pemberian pelayanan keimigrasian, maka pada tiap tahun dilakukan pemeliharaan Sistem E-Office. Pemeliharaan Sistem E-Office ini mencakup pemeliharaan terhadap perangkat pelayanan keimigrasian dan aplikasi Sistem E-Office terkait pelayanan keimigrasian bagi warganegara asing seperti Izin Tinggal dan Visa, Penyidikan, dan Rudenim serta Aplikasi Fasilitatif Keimigrasian seperti Manajemen Dokim, Kepegawaian dan Persuratan.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 13.616.350.550 dengan prosentase penyerapan 91%.

9. Pemeliharaan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal, Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;

Kegiatan pengawasan dan pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berlangsung selama 24 jam sehari dalam 1 minggu. Untuk membantu dan kemudahan kegiatan dimaksud, sejak tahun 2009 dibangun Sistem Border Control Management (BCM), Cekal, Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Sistem tersebut membantu petugas dalam hal proses pencatatan data perlintasan keimigrasian baik keluar dan masuk wilayah Indonesia. Ketersediaan jaminan layanan operasionalisasi perangkat dan fungsi Sistem BCM, Cekal dan Nyidakim selama 24 jam sehari harus dapat selalu tersedia. Untuk itu kegiatan pemeliharaan terhadap perangkat dan sistem yang berjalan sangat diperlukan guna keberlangsungan fungsi dan operasionalisasinya dalam mendukung pelayanan keimigrasian di TPI.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.617.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 15.399.098.000 dengan prosentase penyerapan 87%.

10. Pemeliharaan Sistem Penerbitan SPRI

Sistem Penerbitan SPRI telah berlangsung sejak tahun 2008 dalam mendukung pelayanan keimigrasian bagi warganegara Indonesia. Untuk itu keberlangsungan fungsi perangkat pelayanan dan operasionalisasi aplikasi yang menjadi hal vital untuk terjamin ketersediaannya. Dalam kegiatan pemeliharaan Sistem Penerbitan SPRI.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.000.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 25.083.333.029 dengan prosentase penyerapan 93%.

11. Pemeliharaan Gedung DRC Keimigrasian;

Gedung DRC Keimigrasian yang dimiliki Ditjen Imigrasi telah dibangun sejak tahun 2010 lalu, dan selanjutnya pada tahun berikutnya dilakukan penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya agar fasilitas DRC Keimigrasian nantinya dapat mendukung proses penyediaan jaminan layanan kesisteman sebagai backup Pusdakim yang berada di Kantor Pusat. Untuk menjaga agar gedung beserta sarana prasarana serta perangkat didalamnya nantinya dapat mendukung proses pemberian layanan kesisteman yang berada di dalamnya ketika DRC Keimigrasian difungsikan secara penuh maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaannya.

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 600.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 554.264.000 dengan prosentase penyerapan 92%.

12. Sewa Co-Location DRC Keimigrasian;

Untuk menjaga keberlangsungan layanan kesisteman dalam mendukung pelayanan keimigrasian, sejak tahun 2010, Ditjen Imigrasi telah membangun gedung DRC beserta pengadaan infrastrukturnya. Hal ini dilakukan guna sebagai backup Puskim yang berfungsi sebagai sentral penyimpanan dan pengolahan kesisteman. Selama menunggu kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung DRC Keimigrasian terpenuhi dan dalam rangka tetap memberikan penyelenggaraan dan jaminan atas ketersediaan layanan maupun data keimigrasian, maka Ditjen Imigrasi perlu melakukan kegiatan sewa co location ini agar operasionalisasi perangkat infrastruktur DRC Keimigrasian yang telah ada dapat tetap dilaksanakan. Hingga sampai dengan tahun ini, pelaksanaan kegiatan tersebut masih berlangsung. Pada tahun 2012 ini, kegiatan sewa co location dimaksud masih dilaksanakan untuk menunggu kesiapan DRC Keimigrasian yang dimiliki Ditjen Imigrasi berlokasi di Bali. Untuk tahun 2012, kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.360.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 2.422.860.000 dengan prosentase penyerapan 72%.

13. Re-Lokasi DRC Keimigrasian

Dengan telah tersedianya sarana dan prasarana pendukung DRC Keimigrasian yang sudah cukup memadai, maka pada tahun 2012 dilakukan re-lokasi DRC Keimigrasian yang pelaksanaannya dilakukan pada medio akhir tahun ini. Kegiatan relokasi mencakup pemindahan perangkat kesisteman beserta pendukungnya dari DRC Keimigrasian yang berlokasi sementara di Bandung ke DRC Keimigrasian yang dimiliki Ditjen Imigrasi di Bali.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 1.202.597.000 dengan prosentase penyerapan 80%.

14. Peremajaan Webmail dan Website Ditjen Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2007 telah membangun *website* yang diperuntukkan sebagai salah satu sarana dalam penyebarluasan informasi keimigrasian kepada masyarakat.

Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membangun *webmail*, sebagai sarana komunikasi melalui media surat elektronik yang diharapkan mampu mempercepat komunikasi antar pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi dan dari masyarakat kepada pihak yang berkepentingan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu diadakan layanan pengaduan masyarakat dalam *website* Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai sarana pengaduan permasalahan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Selain itu tuntutan perkembangan teknologi informasi, menuntut perlu dilakukannya pengembangan dan peremajaan *website* dan *webmail* Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan keamanan dari tindakan pihak-pihak yang tidak diinginkan.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 595.248.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 429.000.000 dengan prosentase penyerapan 72%.

15. Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian;

Dalam rangka perwujudan grand design SIMKIM, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan Pengembangan Teknologi dan Mikroelektronika Ditjen Imigrasi pada tahun 2007, melalui pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan pembangunan kesisteman. Sistem pelayanan keimigrasian mulai diterapkan dengan berbasis *online system* yang terhubung antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan Akademi Imigrasi. Pada tahun-tahun berikutnya jaringan komunikasi makin berkembang luas penggunaannya sampai ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Rudenim dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI.

Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian menjadi media sarana prasarana komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ketersediaan layanan komunikasi data untuk pelayanan keimigrasian selama 24 jam sehari dalam 1 minggu dengan resiko ketidakterediaan layanan seminimal mungkin dan ketersediaan jaringan komunikasi data hingga ke titik lokasi Kantor Imigrasi dimana pun berada serta keamanan media pengiriman informasi dan data keimigrasian di dalamnya menjadi hal yang sangat penting.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka penyediaan jaringan komunikasi dilakukan oleh pihak penyedia jaringan komunikasi yang dilakukan melalui metode pengadaan barang/jasa.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.314.000.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 28.210.582.224 dengan prosentase penyerapan 99,6%.

16. Pemantauan Penggunaan Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik

Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan penggunaan kartu elektronik

dalam penerbitan kartu izin tinggal bagi warga negara asing. Proses penerbitan Dokumen keimigrasian dan kartu elektronik dilakukan melalui metode desentralisasi; Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas dan jaminan keamanan dalam hal distribusi dan penggunaan dokumen keimigrasian dan kartu elektronik, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan ke masing-masing unit pelaksana teknis. Kegiatan Pemantauan Penggunaan Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi distribusi dan penggunaan dokumen keimigrasian dan kartu elektronik. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan pengamanan terhadap blanko dokumen keimigrasian sebagai dokumen negara dan tolak ukur kebutuhan ketersediaan dokumen keimigrasian di masa yang akan datang.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 804.255.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 699.030.000 dengan prosentase penyerapan 87%.

17. Pengadaan Tinta Printer Sistem Penerbitan SPRI.

Program Pembangunan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah menghasilkan suatu Sistem Penerbitan SPRI yang meliputi Kantor Pusat dan Kantor Imigrasi (Kanim) di seluruh Wilayah Indonesia serta Atase Imigrasi di Perwakilan RI. Program Pembangunan Sistem Penerbitan SPRI yang digelar oleh Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi pengembangan aplikasi sistem penerbitan SPRI, Aplikasi identifikasi sidik jari dan wajah serta penggelaran perangkat sistem penerbitan SPRI.

Program Pembangunan Sistem Penerbitan SPRI ditujukan dalam rangka pembangunan sistem dan aplikasi pelayanan keimigrasian WNI dalam rangka implementasi paspor elektronik (e-Passport). Dengan terbangunnya infrastruktur Teknologi informasi baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan aplikasi-aplikasi untuk pelayanan keimigrasian maupun pendukung operasional Direktorat Jenderal Imigrasi, maka jaminan operasional terhadap perangkat dan aplikasi yang menghasilkan layanan maupun data untuk mendukung operasional keimigrasian merupakan kebutuhan yang sangat penting.

Salah satu unsur yang diperlukan untuk mengoperasionalkan perangkat yang ada adalah tinta/pita yang termasuk dalam golongan barang habis pakai. Diperlukan adanya jaminan ketersediaan tinta/pita yang dibutuhkan oleh Unit Pelaksana Teknis apabila persediaan tinta printer yang ada di lokasi kegiatan sudah habis terpakai.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.667.975.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 18.429.543.000 dengan prosentase penyerapan 85%.

18. Pencetakan/Penerbitan Dokumen Keimigrasian

Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dokumen Keimigrasian merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok keimigrasian dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;

Beberapa dokumen yang termasuk dalam kategori dokumen keimigrasian adalah A/D Card WNI, A/D Card WNA, Formulir Perdim, Buku Pas Lintas Batas, Buku Pengawasan Orang Asing dan Register Dokumen Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi secara kontinu setiap tahun anggaran melakukan pemenuhan kebutuhan dokumen keimigrasian.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.921.250.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 3.910.500.000 dengan prosentase penyerapan 56%.

19. Pengemasan/Pengiriman/Pengangkutan Dokumen Keimigrasian

Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dokumen Keimigrasian merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok keimigrasian dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Beberapa dokumen yang termasuk dalam kategori dokumen keimigrasian adalah A/D Card WNI, A/D Card WNA, Formulir Perdim, Buku Pas Lintas Batas, Buku Pengawasan Orang Asing dan Register Dokumen Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi secara kontinu setiap tahun anggaran melakukan pemenuhan kebutuhan dokumen keimigrasian. Kebutuhan pemenuhan dokumen keimigrasian termasuk didalamnya adalah pengiriman ke lokasi-lokasi pelaksana fungsi keimigrasian yang membutuhkan.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.384.250.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 1.384.250.000 dengan prosentase penyerapan 100%.

20. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sisinfokim

Direktorat Jenderal Imigrasi telah dan akan terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian berbasis Teknologi Informasi sebagai sarana dalam memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

Bahwa perlu dirumuskan dan disusun landasan hukum yang akan menjadi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi pegawai imigrasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan keimigrasian menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian.

Melalui perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang sistem informasi manajemen keimigrasian diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan petugas dalam menggunakan sistem informasi keimigrasian.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 244.990.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 59.526.000 dengan prosentase penyerapan 24%.

21. Rapat Bidang Sistem Informasi Keimigrasian

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai salah satu upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian merupakan Direktorat yang salah satu tugas dan perannya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang telah, sedang dan atau direncanakan akan dibangun diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi yang diperlukan bagi pengambilan kebijaksanaan pimpinan, baik itu di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, maupun instansi/lembaga pemerintah lainnya. Untuk pencapaian tujuannya, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian melakukan rangkain kegiatan koordinasi, konsultasi, komunikasi serta kolaborasi serta kerjasama secara eksternal dan internal dalam media pertemuan, rapat koordinasi maupun diskusi.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan pengadaan/pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan kesisteman yang dilaksanakan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian selaku pelaksana teknis kegiatan dapat berjalan dengan baik dan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian akan selalu terupdate informasi tentang perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 135.360.000 dan sampai dengan saat ini telah dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 126.054.700 dengan prosentase penyerapan 93%.

22. Laporan Penerbitan Paspor Republik Indonesia

Bulan	Paspor			Jumlah
	24 Hal	48 Hal	E - Passport	
Januari	30.850	203.527	194	234.571
Februari	31.415	202.770	227	234.412
Maret	24.725	190.347	217	215.289
April	27.670	186.767	237	214.674
Mei	25.073	199.887	274	225.234
Juni	22.276	256.731	329	279.336
Juli	22.635	218.390	320	241.345
Agustus	15.200	127.053	241	142.494
September	29.351	177.494	288	207.133
Oktober	35.048	183.146	372	218.566
November	27.623	185.937	286	213.846
Desember				
Total	291.866	2.132.049	2985	2.426.900

23. Laporan Permohonan Apec Bussiness Travel Card Tahun 2012

Bulan	Jumlah
Januari	28
Februari	40
Maret	54
April	83
Mei	114
Juni	153
Juli	109
Agustus	74
September	61
Oktober	91
November	68
Desember	41
Jumlah	916

Bidang Hak Kekayaan Intelektual

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Adapun jumlah penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh DJHKI selama kurun waktu 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun	Rincian	Jumlah
1	Pendapatan Hak dan Perijinan	2007		138,771,978,125
2	Pendapatan Hak dan Perijinan	2008		147,980,926,500
3	Pendapatan Hak dan Perijinan	2009		170,581,306,336
4	Pendapatan Hak dan Perijinan	2010		214,086,293,000
	- Desain Industri		2,852,000,000	
	- Hak Cipta		1,360,975,000	
	- Hak Paten		130,676,909,750	
	- Hak Merek		77,899,450,000	
	- Pendaftaran Konsultan		1,245,000,000	
5	Pendapatan Hak dan Perijinan	2012		224,690,302,750
	- Desain Industri		2,988,350,000	
	- Hak Cipta		1,456,175,000	
	- Hak Paten		131,954,277,750	
	- Hak Merek		87,951,500,000	
	- Pendaftaran Konsultan		340,000,000	
6	Pendapatan Hak dan Perijinan	2012		249.210.787.750
	- Desain Industri		3.486.550.000	
	- Rahasia Dagang		250.000	
	- Hak Cipta		1.963.825.000	
	- Hak Paten		136.352.366.250	
	- Paten BDH		97.940.000	
	- PPAPS		114.682.500	
	- Hak Merek		106.830.174.000	
	- Pendaftaran Konsultan		365.000.000	

* Dalam Rupiah

Dari tahun-tahun penerimaan PNBPD DJHKI terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan perkembangan HKI di Indonesia. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI dalam melindungi hasil kreatifitasnya dibidang HKI. Adapun target Rp.207.050.000.000,- sehingga pencapaian DJHKI dibidang penerimaan PNBPD adalah sebesar 120,36%. Pada tahun ini juga dihitung penerimaan negara bukan pajak yang merupakan piutang negara yakni Paten Batal Demi Hukum sebesar Rp.97.940.000,- dan Penarikan Paten Atas Permintaan Sendiri sebesar Rp.114.682.500,-. Adapun komponen lainnya dari penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari permohonan HKI antara lain meliputi : biaya permohonan, biaya pemeriksaan formalitas, biaya pemeriksaan substantif, biaya sanggahan, biaya sertifikat dan biaya perijinan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

B. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Program/ Kegiatan	Pagu (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	Sisa (Dalam Rp)	%
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	750.000.000	610.606.386	139.393.614	81.41
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI	8.000.000.000	6.875.245.222	1.124.754.778	85.94
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	2.300.000.000	1.497.860.050	802.139.950	65.12
Penyelenggaraan Sistem Paten	1.100.000.000	774.593.865	325.406.135	70.42
Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI	750.000.000	564.314.206	185.685.794	75.24
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	18.000.000.000	14.669.923.314	3.330.076.686	81.50
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	58.279.263.000	52.414.846.810	5.864.416.190	89.94
Total	89.179.263.000	77.407.389.853	11.771.873.147	86.80

Dari total anggaran DJHKI pada tahun 2012 sebesar Rp.89.179.263.000,- penggunaan anggaran DJHKI adalah sebesar Rp.77.407.389.853,- atau 86.80%. Adapun alasan mengenai belum maksimalnya penyerapan anggaran DJHKI adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Dalam Rp.)
1.	Efisiensi Pengadaan Inventaris Kantor	760.769.025
2.	Dua kali Lelang gagal pengadaan Obat-obatan di akhir bulan November	623.847.700
3.	Efisiensi Perawatan Gedung Kantor	183.762.100
4.	Efisiensi Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	233.127.150
5.	Efisiensi Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	80.740.942
6.	Efisiensi Pencetakan Sertifikat HKI, Map HKI, Form Permohonan dan Percetakan lainnya	320.491.300
7.	Belum terealisasinya perpindahan kantor Ditjen HKI ke Jakarta	977.827.000
8.	Efisiensi beberapa kegiatan terkait Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	966.591.250

Capaian Kinerja DJHKI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (output)	Target 2012	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
								H/D x100%	Persentase per Output (Subdit)
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
1	Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional	Persentase perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	10 Dokumen dan 10 Rekomendasi	Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI thn berjalan/jumlah pengaduan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang masuk) X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan	22 Dokumen dan 38 Rekomendasi		220% Dokumen dan 380% Rekomendasi
		Persentase permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	4000 Sertifikat Desain Industri/tahun, 5000 Sertifikat Hak Cipta/tahun, 53600 Sertifikat Merek/tahun, dan 2.700 Sertifikat Paten /tahun	Jumlah penerbitan surat pendaftaran Hak Cipta, sertifikat Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis tahun berjalan/Target penerbitan sertifikat Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis th berjalan) x 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	6991 Sertifikat Desain Industri/tahun, 7302 Sertifikat Hak Cipta/tahun, 37.482 Sertifikat merek/tahun, 2.252 Sertifikat Paten/tahun		174.77% (Desain Industri), 146.04% (HakCipta), 55.9% (Merek), dan 83,41% (Paten)
		Jumlah layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	250000 Pengunjung	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara Online	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi tahun berjalan	334524 Pengunjung		133,80%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (output)	Target		Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%		
			2012						I	J	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	
									H/D x100 %	Persentase per Output (Subdit)	
1	Direktorat HC, DI, DTLST dan RD										
	Persentase permohonan hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum	Persentase administrasi kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar	5000	Permohonan Hak Cipta	(Jumlah Permohonan Hak Cipta 2012/Target Permohonan Hak Cipta) X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	6382	127,64 %		
			4000	Permohonan Desain Industri	Jumlah Permohonan Desain Industri 2012 / Target Permohonan Desain Industri X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	4612	115,3 %		
			4800	Dokumen Pemeriksaan Hak Cipta	Jumlah Berkas Pemeriksaan Formalitas Hak Cipta 2012 / Target pemeriksaan Formalitas Hak Cipta X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	6382	145,05 %		
			4800	Dokumen Pemeriksaan Desain Industri	Jumlah Berkas Pemeriksaan Formalitas Desain Industri 2012 / Target pemeriksaan Formalitas Desain Industri X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	4612	96,08 %		
		Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri, yang sesuai standar	10008	Berkas Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan Substantif 2012/ Target Pemeriksaan Substantif X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	3312	33,09 %		
		Persentase pendaftaran hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang	600	Dokumen Penolakan Hak Cipta	Jumlah Penolakan Hak Cipta 2012 / Target Penolakan Hak Cipta X 100%	Non Kumulatif (Target Penolakan Disesuaikan Dengan Jumlah Berkas Masuk)	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	750	125,00 %		
			38	Dokumen Pengalihan Hak Cipta	Jumlah Pengalihan Hak Cipta 2012 / Target Pengalihan Hak Cipta X	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	93	231,6 %		

					100%				
			50	Dokumen Penolakan Desain Industri	Jumlah Penolakan Desain Industri 2012 / Target Penolakan Desain Industri X 100%	Non Kumulatif (Target Penolakan Disesuaikan Dengan Jumlah Berkas Masuk)	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	990	1980 %
			26	Dokumen Pengalihan Desain Industri	Jumlah Pengalihan Desain Industri 2012 / Target Pengalihan Desain Industri X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	44	169.2 %
		Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat perpanjangan desain industri yang sesuai standar	5000	Surat Pendaftaran Ciptaan	Jumlah Sertifikat Hak Cipta 2012 / Target Pencetakan Sertifikat Hak Cipta X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	7302	146.04 %
			4000	Sertifikat Desain Industri	Jumlah Sertifikat Desain Industri 2012 / Target Pencetakan Sertifikat Desain Industri X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	6991	174.78 %
			4800	Dokumen Publikasi	Jumlah Dokumen Publikasi 2012 / Target Dokumen Publikasi X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	4800	100%
		Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar	71	Surat Pendapat Hukum Hak Cipta	Jumlah Surat Pendapat Hukum Hak Cipta 2012 / Target Surat Pendapat Hukum Hak Cipta X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	22	31%
			32	Surat Pendapat Hukum Desain Industri	Jumlah Surat Pendapat Hukum Desain Industri 2012 / Target Surat Pendapat Hukum Desain Industri X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	19	59.4 %
			142	Pemberian Keterangan Saksi Ahli	Jumlah Pemberian Keterangan Saksi Ahli 2012 / Target pemberian Keterangan Saksi Ahli X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun 2012	74	47.06 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%	
		(output)	2012						H/Dx 100%	Persentase per Output (Subdit)
A	B	C	D		E	F	G	H		
2	Direktorat Paten									
	Persentase Permohonan Paten yang Mendapat Perlindungan Hukum	Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek, mutasi dan lisensi paten sesuai standar	5000	Permohonan Paten	Jumlah permohonan paten 2012 / Target permohonan merek X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	7032	127.85%	
		Persentase pengklasifikasian dan penelusuran permohonan paten sesuai standar internasional	1700	Berkas Pemeriksaan	Jumlah pengklasifikasian dan penelusuran 2012 / target penyelesaian pengklasifikasian dan penelusuran X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	2119	124.65%	
		Persentase administrasi pemeriksaan substantif paten sesuai standar	6720	Berkas Pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan substantive tahap awal 2012/Target pemeriksaan substantive tahap awal X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	5360	79.76%	
			4200	Berkas Pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan substantive tahap akhir 2012/Target pemeriksaan substantif tahap akhir X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	2817	67.07%	
		Persentase administrasi penerbitan sertifikat paten dan pemeliharaan sesuai standar	2700	Sertifikat	Jumlah penerbitan sertifikat paten 2012/Target penerbitan sertifikat paten X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	2252	83.41%	
			1800	Pemeliharaan Paten	Jumlah pemeliharaan paten 2012/Target pemeliharaan paten X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	17621	97.89%	
		Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar	175	Surat Penerimaan Hukum	Jumlah pemberian pendapat hukum 2012 / Target pemberian pendapat hukum X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten 2012	162	92.57%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (output)	Target		Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%	
			2012						I	J
A	B	C	D		E	F	G	H		
									H/D x100 %	Persentase per Output (Subdit)
3	Direktorat Merek									
	Persentase permohonan merek yang mendapatkan perlindungan hukum	Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar	53600	Permohonan Merek	Jumlah permohonan merek 2012 / Target permohonan merek X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	62455	116,52%	
			6	Permohonan Indikasi Geografis	Jumlah permohonan indikasi geografis 2012/Target permohonan X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	9	150%	
			13400	Perpanjangan Merek	Jumlah perpanjangan merek 2012 / Target perpanjangan merek X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	17820	132,98%	
			6700	Dokumen	Jumlah mutasi dan lisensi 2012 / target mutasi dan lisensi X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	3465	51,71%	
	Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografis	Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografis	53600	Permohonan Merek	Jumlah permohonan pendaftaran hak merek 2012 / target permohonan pendaftaran hak merek X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	62455	107,53%	95,43%
			6	Permohonan Indikasi Geografis	Jumlah Permohonan pendaftaran indikasi geografis 2012 / target permohonan pendaftaran indikasi geografis X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	9	150%	
	Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek	Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek	65660	Berkas Pemeriksaan	Jumlah permohonan yang dilakukan pemeriksaan 2012/Target pemeriksaan X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	34575	52,65%	
			21440	Berkas Pemeriksaan	Jumlah tanggapan dan keberatan 2012/Target pemberian tanggapan dan keberatan X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat at Merek 2012	4858	22,65%	

		Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar	6	Berkas Pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan substantif indikasi geografis 2012 / Jumlah permohonan pendaftaran indikasi geografis X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek 2012	8	133,33%	
		Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar	67000	Sertifikat	Jumlah Penerbitan Sertifikat 2012/ Target Penerbitan Sertifikat X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek 2012	37482	55,94%	
		Persentase pelayanan hukum di bidang merek	380	Permohonan	Jumlah permohonan banding 2012/Target permohonan banding X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek 2012	361	95%	
	380		Permohonan	Jumlah pemeriksaan administrasi permohonan banding 2012/Target pemeriksaan permohonan banding X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek 2012	358	94,21%		
	192		Surat Pendapat Hukum	Jumlah pemberian pendapat hukum 2012/Target pemberian pendapat hukum X 100%	Non Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek 2012	99	51,56%		



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%	
			2012						H/Dx100%	Persentase per Output (Subdit)
A	B	C	D		E	F	G	H		
4										
Direktorat Kerja Sama dan Promosi										
	Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi serta Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kegiatan Promosi dan Sosialisasi HKI	57	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi HKI	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi HKI 2012 / Target Kegiatan Promosi dan Sosialisasi HKI X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Kerja Sama dan Promosi 2012	102	102/57 x 100%	178,94%
	Rangka Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem HKI	Persentase Aktifitas Kerja Sama Luar Negeri di Bidang HKI	237	Aktifitas Kerja Sama	Jumlah Aktifitas Kerja Sama Luar Negeri di bidang HKI 2012 / Target Aktifitas Kerja Sama Luar Negeri di bidang HKI X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Kerja Sama dan Promosi 2012	212	212/237 * 100%	89,45%
		Persentase Aktifitas Kerja Sama Dalam Negeri di bidang HKI	33	Aktifitas Kerja Sama	Jumlah Aktifitas Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang HKI 2012 / Target Aktifitas Kerja Sama Dalam Negeri di bidang HKI X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Kerja Sama dan Promosi 2012	40	40/33*100%	121,2%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%		
		(<i>output</i>)	2012						I	J	
A	B	C	D		E	F	G	H			I
									H/Dx100%	Perse ntase per Output (Sub dit)	
5	Direktorat Teknologi Informasi										
	Jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	Persentase Unit Kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya	28	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja Terintegrasi 2012 / Target Unit Kerja Terintegrasi X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi 2012	28	100%		
		Persentase Unit Kerja HKI dan Kantor Wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kementerian	61	Unit Kerja Eksternal	Jumlah Unit Kerja Eksternal Terintegrasi 2012 / Target Unit Kerja Eksternal Terintegrasi X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi 2012	61	100%		
		Persentase Informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara online 24 jam dengan data yang up to date	500	Informasi	Jumlah Informasi HKI Online 24 Jam dengan data Up To Date 2012 X Target Informasi HKI Online 24 Jam dengan data Up To Date 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi 2012	285	57%		
		Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital	21473	Dokumen	Jumlah Kelengkapan Dokumen HKI Secara Manual dan Digital 2012 / Target Kelengkapan Dokumen HKI Secara Manual dan Digital X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi 2012	21.473	6.1%		



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	%	
		(output)	2012						I	J
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J
									H/Dx100%	Perentase per Output (Subdit)
6	Direktorat Penyidikan									
	Perentase pengaduan pelanggaran bidang hak kekayaan intelektual yang dilakukan penyidikan	Persentase penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI	10	Dokumen	Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI 2012 / Target penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan 2012	22	220.00%	220.00%
		Persentase kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar	10	Rekomendasi	Jumlah kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar 2012 / Target kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar X 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan 2012	38	380.00%	380.00%

Bidang Hak Asasi Manusia

1. Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Rekapitulasi Penanganan Komunikasi Masyarakat

- a. Subdit Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah I menerima sebanyak 115 surat pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) File sebanyak 55 surat pengaduan
 - 2) Proses sebanyak 22 surat pengaduan
 - 3) Telaah file sebanyak - surat pengaduan
 - 4) Telaah koordinasi / rekomendasi sebanyak 38 surat pengaduan
- b. Subdit Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah II menerima sebanyak 136 surat pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) File sebanyak 79 surat pengaduan
 - 2) Proses sebanyak 2 surat pengaduan
 - 3) Telaah file sebanyak - surat pengaduan
 - 4) Telaah koordinasi / rekomendasi sebanyak 55 surat pengaduan
- c. Subdit Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah III menerima sebanyak 92 surat pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) File sebanyak 29 surat pengaduan
 - 2) Proses sebanyak 42 surat pengaduan
 - 3) Telaah file sebanyak 7 surat pengaduan
 - 4) Telaah koordinasi / rekomendasi sebanyak 14 surat pengaduan
 - 5) Surat koordinasi/rekomendasi yang mendapat tanggapan dari instansi terkait sebanyak 2
- d. Subdit Pelayanan Komunikasi Khusus menangani komunikasi dari luar negeri dan LSM organisasi internasional serta dugaan pelanggaran HAM yang tidak/belum dikomunikasikan sebanyak 23 kasus yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) File sebanyak 1 surat pengaduan
 - 2) Proses sebanyak 5 surat pengaduan
 - 3) Telaah file sebanyak 8 surat pengaduan
 - 4) Telaah koordinasi / rekomendasi sebanyak 9 surat pengaduan

Penanganan Pengaduan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Bulan Januari-Nopember 2012

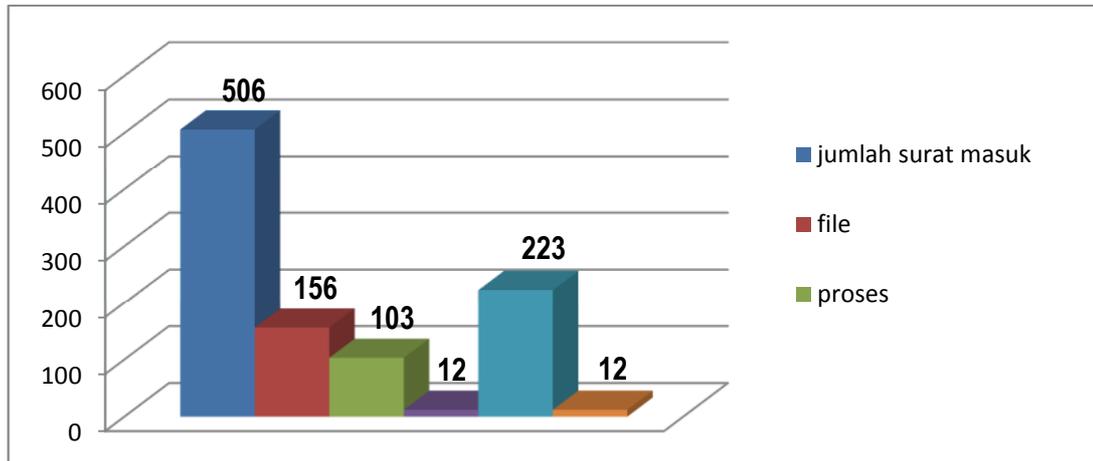
No	Asal Surat	Jumlah Surat Masuk	File	Tindak Lanjut			Tanggapan Instansi	Ket
				Proses	Telaah File	Telaah, Koordinasi / Rekomendasi		
1	Aceh	5	1	1	-	3	-	-
2	Sumatera Utara	47	14	2	-	29	2	-
3	Riau	15	2	3	-	10	-	-
4	Sumatera Barat	15	10	2	-	3	-	-
5	Bangka Belitung	6	1	2	-	3	-	-
6	Sumatera Selatan	29	11	2	-	14	2	-
7	Lampung	18	4	4	-	10	-	-
8	Bengkulu	4	1	2	-	1	-	-
9	Kepulauan Riau	3	1	-	-	2	-	-
10	Banten	4	2	-	-	2	-	-
11	Jambi	13	6	3	-	4	-	-
Wil I Sub total		159	53	21	0	81	4	
12	DKI Jakarta	35	19	3	-	12	1	-
13	Jawa Barat	42	15	3	-	24	-	-
14	Jawa Tengah	26	4	2	-	17	3	-
15	DI Yogyakarta	3	1	2	-	-	-	-
16	Jawa Timur	58	27	2	-	27	2	-
17	Bali	4	1	-	-	3	-	-
18	NTB	5	1	-	-	4	-	-
19	NTT	4	1	1	-	2	-	-
20	Maluku	6	4	-	-	2	-	-
21	Papua	3	2	-	-	1	-	-
22	Papua Barat	0	-	-	-	-	-	-
Wil II Sub total		186	75	13	0	92	6	
23	Kalimantan Barat	18	1	6	-	11	-	-
24	Kalimantan Timur	24	7	14	-	3	-	-
25	Kalimantan Tengah	24	3	12	1	8	-	-
26	Kalimantan Selatan	15	3	4	1	7	-	-
27	Sulawesi Selatan	46	8	18	3	16	1	-
28	Sulawesi Tengah	2	1	1	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	7	1	5	-	1	-	-
30	Sulawesi Barat	0	-	-	-	-	-	-
31	Sulawesi Utara	12	1	7	1	3	-	-
32	Gorontalo	1	-	1	-	-	-	-
33	Maluku Utara	5	1	1	2	1	-	-
Wil III Sub total		154	26	69	8	50	1	
34	LSM Dalam/Luar	59	2	10	4	42	1	-
JUMLAH TOTAL		558	156	113	12	265	12	

Rekapitulasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Berdasarkan Kategori 10 Hak Dasar
Bulan Januari – November 2012

No	Jumlah Pengaduan Berdasarkan 10 Hak Dasar		File	Tindak Lanjut			Tanggapan Instansi	Ket
	Hak	Jumlah Surat Masuk		Proses	Telaah / File	Telaah, Koordinasi / Rekomendasi		
1	Hak untuk hidup	50	8	6	-	33	1	-
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1	-	-	-	1	-	-
3	Hak mengembangkan diri	12	4	-	-	8	-	-
4	Hak memperoleh keadilan	235	89	70	9	57	10	-
5	Hak atas kebebasan pribadi	34	3	4	2	24	1	-
6	Hak atas rasa aman	68	14	10	2	42	-	-
7	Hak atas kesejahteraan	78	7	9	2	60	-	-

8	Hak turut serta dalam pemerintahan	7	3	4	-	-	-	-
9	Hak perempuan	1	1	-	-	-	-	-
10	Hak anak	9	-	4	-	5	-	-
11	Lain-lain	88	33	9	-	46	-	-
TOTAL		583	162	116	15	276	12	-

Matrik Rekapitulasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Januari – April 2012 Berdasarkan Asal Surat Pengaduan.



2. Direktorat Kerja Sama HAM

NAMA KEGIATAN		VOL	REALISASI KEG
SUBDIT KERJASAMA HAM			
A	Rapat Koordinasi Implementasi Ham Sesi Pertama Di Jakarta	1	1
B	Rapat Koordinasi Implementasi Ham Sesi Kedua Di Makassar	1	1
C	Rapat Koordinasi Pokja Ranham	7	7
D	Rapat Pokja Kemenkumham	2	2
	Konsinyering SETPANRANHAMNAS Dalam Rangka Rakor Panranhamnas	1	1
SUBDIT LEGISLASI DAN HARMONISASI HAM			
A	Rakor Harmonisasi RUU Yang Harmonis Dengan HAM	15	15
B	Kompilasi Harmonisasi RUU Berperspektif HAM	2	2
SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI			
A	Pengembangan Kerjasama HAM Antar Negara	6	6
B	Kerjasama Dengan Organisasi Internasional NON PBB	7	7
C	Pengembangan Kerjasama Dengan Badan-Badan Khusus PBB	6	6
INSTRUMEN HAM			
A	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Pusat	1	1
B	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Medan	1	1
C	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Banda Aceh	1	1
D	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Pangkalpinang	1	1
E	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Banjarmasin	1	1
F	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Kendari	1	1
G	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Denpasar	1	1
H	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Ternate	1	1
I	Rakor Dalam Rangka Pelaksanaan Instrumen HAM Internasional Di Manokwari	1	1
J	Lokakarya Penyusunan Instrumen HAM Internasional	1	1

3. Direktorat Informasi HAM

NAMA KEGIATAN		VOL	REALISASI KEG
INFORMASI HAM			
A	Pengumpulan Dan Dan Informasi Implementasi HAM	15	15
B	Kompilasi Laporan Pengumpulan Data Informasi Implementasi HAM	1	1
EVALUASI PELAKSANAAN HAM			
A	Rapat Koordinasi Evaluasi Dan Pelaporan Implementasi HAM	14	14
B	Penyusunan Laporan Evaluasi Implementasi HAM	2	2
C	Peningkatan Kapasitas Personil Evaluasi Dan Pelaporan Implementasi HAM	1	1
PENGEMBANGAN SISTEM DAN JEJARING			
A	Pengembangan Aplikasi Database	1	1
B	Kegiatan Bimtek Database Implementasi HAM dan RANHAM daerah	8	8
C	Pemeliharaan Jaringan dan Uploading, Updating Informasi dan Laporan HAM	12	12
D	Kegiatan Bimtek Database Implementasi HAM DAN RANHAM PUSAT	2	2
PELAYANAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			
A	Publisitas Melalui Media Elektronik	1	1
B	Penerbitan Majalah Mediasi	4	4
C	Penerbitan Jurnal HAM	2	2
D	Publikasi Dan Dokumentasi Informasi HAM dan RANHAM	1	1
E	Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Ditjen HAM	12	12

4. Direktorat Diseminasi HAM

NAMA KEGIATAN		VOL	REALISASI KEG
DISEMINASI HAM			
A	Diseminasi HAM	34	34
PENYULUH HAM			
A	Bimtek Penyiapan Penyuluh HAM	3	3
PENGEMBANGAN DISEMINASI HAM			
A	Bahan Diseminasi HAM	4	4
B	Workshop Bahan Diseminasi HAM	1	1
C	Uji Bahan Metodologi Dan Bahan Diseminasi HAM	2	2
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DISEMINASI HAM			
A	Workshop Evaluasi Diseminasi, Penyuluh Dan Bahan Diseminasi HAM	3	3

5. Direktorat Penguatan HAM

NAMA KEGIATAN		VOL	REALISASI KEG
PENYUSUNAN BAHAN AJAR HAM			
A	Penyusunan Bahan Ajar HAM (Pelanggaran Dan Mekanisme Penanganannya)	1	1
B	Penyusunan Modul Pelatihan HAM Bagi Guru	1	1
C	Penyusunan Modul Pelatihan HAM Bagi Tenaga Kesehatan	1	1
D	Penyusunan Panduan Bagi Satpol PP	1	1
E	Peningkatan Kemampuan Fasilitator	1	1
F	Pengolahan Data Alumni Pelatihan HAM di Bandung	1	1
PENGUATAN HAM WILAYAH I			
A	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Sultera	1	1
B	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Kalteng	1	1
C	Rapat Evaluasi Pasca Pelatihan HAM Se Banten	1	1
PENGUATAN HAM WILAYAH II			
A	Penguatan HAM bagi PANRANHAM NAD	1	1
B	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Sumsel	1	1
C	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Kepri	1	1
D	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Maluku	1	1
E	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Kaltim	1	1
F	Pelatihan HAM bagi siswa SMU di Jakarta	1	1
PENGUATAN HAM WILAYAH III			
A	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Sulbar	1	1
B	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Babel	1	1
C	Penguatan HAM bagi PANRANHAM Malut	1	1
		1	1

6. Sekretariat Direktorat Jenderal HAM

NAMA KEGIATAN		VOL	REALISASI KEG
LAPORAN PEMBINAAN			
KEPEGAWAIAN			
A	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	1
B	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	1
C	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian	9	9
	- Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Dan Updating Data Base Pegawai (2)		
	- Kegiatan Pelantikan/Pelantikan Sumpah Jabatan (3)		
	- Kegiatan Pengendalian Sistem Absensi Elektronik Dan Penyusunan Penghitungan Tunker Pegawai (4)		
D	Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1	1
E	Peningkatan Kemampuan Aparatur Ditjen HAM	7	7
F	Forum Group Discussion Spip	2	2
PROGRAM DAN PELAPORAN			
A	Pembinaan Penyusunan Rencana Dan Anggaran	8	8
B	Rakor Penyusunan Rkaki Ditjen Ham	2	2
C	Pengumpulan Dan Pengolahan Data Kegiatan Ditjen Ham	6	6
D	Penyusunan Bahan dan Koordinasi Rapat DPR Dan Lintas Terkait	10	10
E	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Ditjen HAM	4	4
F	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Bidang Ham Kanwil Kemenkumham	1	1
G	Penyusunan Lakip	1	1
H	Kesekretariatan Ranham dan Pokja Ranham Pusat	8	8
KEUANGAN			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	13	13
B	Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi	12	12
C	Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran	12	12
D	Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan	1	1
E	Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	12	12
F	Verifikasi Pelaksanaan Anggaran	12	12
G	Penyusunan Standar Verifikasi Pelaksana Anggaran	1	1
H	Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	2	2
I	Penmbelian Peralatan dan Mesin	1	1
J	Bintek Aplikasi Sistem Informasi Keuangan	1	1
HUMAS			
A	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Pimpinan	12	12
B	Terlaksananya Jasa Pos/ Giro	12	12
C	Kliping Koran	12	12
D	Penerbitan News Letter Warta Kita	12	12
E	Pemahaman HAM Melalui Pameran	4	4
F	Talk Show	1	1
G	Pelayanan Keprotokolan	12	12
H	Bimtek Kehumasan dan Protokol	1	1
UMUM			
A	Keperluan Perkantoran Sehari-Hari	12	12
B	Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai	12	12
C	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	1	1
D	Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Dokter/Satpam	1	1

E	Pemeliharaan Alat dan Mesin	12	12
F	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12	12
G	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12	12
H	Pengadaan Peralatan dan Mesin	1	1
I	Langganan Daya Dan Jasa	12	12
J	Terjemahan Buku Literatur	1	1
K	Pengurusan Visa/Paspor	12	12
L	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan	12	12
M	Pembinaan Administrasi Simak BMN	12	12
N	Pembinaan Dan Konsultasi Pelaksanaan HAM Di Dalam Dan Luar Negeri	40	17
O	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	1
P	Sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012	1	1

Bidang Pengawasan

Di dalam Program Kerja pengawasan Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja di lingkungan satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan audit kinerja ini terbagi dalam Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V dan Wilayah VI. Hasil audit kinerja tertuang dalam Laporan Hasil Audit yang didalamnya memberikan beberapa informasi terkait Auditi/unit yang dilakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi atas beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dilihat dari aspek Pengendalian Intern dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Target yang telah ditetapkan di awal tahun 2012 terhadap satuan kerja Wilayah I - Wilayah VI yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja pada umumnya telah mencapai target bahkan beberapa Wilayah berhasil melampaui target dari yang telah direncanakan. Hal ini dilaksanakan melalui audit kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM setiap bulannya. Namun demikian langkah-langkah perbaikan dalam bentuk rekomendasi terhadap pengendalian intern dan ketaatan peraturan perundang-undangan, belum seluruhnya disampaikan kepada satuan kerja yang dilakukan audit, hal ini dikarenakan terdapat laporan hasil pengawasan yang masih dalam proses analisa sebelum dikirimkan ke unit satuan kerja yang dilakukan audit.

Tindak lanjut hasil audit kinerja dari satuan kerja disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dan selanjutnya akan dianalisa dan dijadikan laporan ke Menteri Hukum dan HAM setiap tahunnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Penjabaran sasaran Audit Kinerja Inspektorat Jenderal yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja Tahun 2012, yaitu :

1. Inspektorat Wilayah I

Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 71 unit kerja dari 126 unit kerja Inspektorat Wilayah I, yaitu :

Sasaran Audit					
1	Rutan Tj. Pinang	24	Kanim Serang	48	Lapas Makassar
2	Rutan Batam	25	Rutan Pandeglang	49	Lapas Takalar
3	Lapas Tj. Pinang	26	Lapas Serang	50	Lapas Wanita Sungguminasa
4	Kanim Batam	27	Bapas Serang	51	Kanim Pare-pare
5	Kanwil Kep. Riau	28	Lapas Anak Pria Tangerang	52	Lapas Pare-pare
6	Kanim Aceh	29	Rubasan Serang	53	Lapas Narkotika Sungguminasa
7	Rupbasan Aceh	30	Bapas Sintang	54	Kanim Tangerang
8	Kanim Sabang	31	Lapas Sintang	55	Rutan Tangerang
9	Rutan Sabang	32	Rutan Pontianak	56	Lapas Pria Tangerang
10	Rutan Sigli	33	Kanim Pontianak	57	Rutan Rangkas Bitung
11	Bapas Aceh	34	Kanwil Kalimantan Barat	58	Lapas P. Tangerang
12	Lapas Pontianak	35	Bapas Pontianak	59	Kanim Cilegon

13	Rupbasan Singkawang	36	Kanwil Sulawesi Selatan	60	Kanim Tarempa
14	Rutan Sambas	37	Bapas Makassar	61	Bapas Tj. Pinang
15	Lapas Singkawang	38	Rutan Makale	62	Lapas Batam
16	Rutan Sanggau	39	Rutan Enrekang	63	Rupbasan Tj. Pinang
17	Kanim Sanggau	40	Lapas Bulukumba	64	Kanim Tj. Uban
18	Lapas Palopo	41	Rutan Selayar	65	Rudenim Tj. Pinang
19	Bapas Palopo	42	Cabrutan Jantho di Lhoknga	66	Kanim Entikong
20	Lapas Watampone	43	Kanim Langsa	67	Lapas Anak Entikong
21	Bapas Watampone	44	Cabrutan Lhokseumawe di Lhoksukon	68	Rutan Putusibau
22	Rutan Makassar	45	Lapas Kuala Simpang	69	Rupbasan Pontianak
23	Kanim Makassar	46	Lapas Lhokseumawe	70	Rupbasan Sanggau
		47	Lapas Langsa	71	Rudenim Pontianak

2. Inspektorat Wilayah II

Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 67 unit kerja dari 124 unit kerja Inspektorat Wilayah II, yaitu :

Sasaran Audit					
1	Kanwil Jawa Barat	24	Kanwil Sulawesi Tenggara	48	Lapas Wanita Bandung
2	Lapas Purwakarta	25	Rutan Unaha	49	Lapas Ciamis
3	Lapas Karawang	26	Lapas Kendari	50	Rutan Bandung
4	Lapas Bekasi	27	Rutan Kolaka	51	Lapas Sukabumi
5	Lapas Tasikmalaya	28	Bapas Kendari	52	Lapas Sukamiskin
6	Kanim Tasikmalaya	29	Rutan Raha	53	Lapas Cianjur
7	Kanwil Kalimantan Tengah	30	Kanwil NTB	54	Rutan Buntok
8	Lapas Pangkalan Bun	31	Lapas Terbuka Mataram	55	Rutan Palangkaraya
9	Bapas Pangkalan Bun	32	Lapas Mataram	56	Lapas Sampit
10	Lapas Muara Taweh	33	Rupbasan Sumbawa Besar	57	Kanim Sampit
11	Bapas Muara Taweh	34	Lapas Sumbawa Besar	58	Lapas Palangkaraya
12	Kanim Siak Indrapura	35	Kanim Sumbawa Besar	59	Bapas Palangkaraya
13	Cabrutan Bengkalis di Bagan Siapi-api	36	Kanim Bekasi	60	Rupbasan Rengat
14	Kanim Selat Panjang	37	Lapas Garut	61	Lapas Anak Pekanbaru
15	Cabrutan Bengkalis di Selat Panjang	38	Lapas Bogor	62	Lapas Bengkalis
16	Lapas Tembilahan	39	Kanim Sukabumi	63	Kanim Bengkalis
17	Kanim Tembilahan	40	Lapas Narkotika Bandung	64	Cabrutan Rengat
18	Lapas Narkotika Cirebon	41	Kanim Bandung	65	Lapas Pekanbaru
19	Rupbasan Cirebon	42	Kanwil Riau	66	Balitbangham
20	Lapas Sumedang	43	Rupbasan Bangkinang	67	Pusjianbang
21	Lapas Majalengka	44	Kanim Pekanbaru		
22	Lapas Indramayu	45	Lapas Pasir Pangarayan		
23	Rupbasan Indramayu	46	Kanim Dumai		
		47	Rutan Dumai		

3. Inspektorat Wilayah III

Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 70 unit kerja dari 124 unit kerja Inspektorat Wilayah III, yaitu :

Sasaran Audit					
1	Lapas Tanjung Pati	24	Rutan Sungai Penuh	48	Lapas Bukit Tinggi
2	Rutan Batu Sangkar	25	Lapas Muaro Bulian	49	Bapas Bukit Tinggi
3	Rutan Lubuk Sikaping	26	Lapas Muaro Bungo	50	Rutan Padang Panjang
4	Cabrutan Lubuk Sikaping	27	Bapas Muaro Bungo	51	Cabrutan Bukit Tinggi di Maninjau
5	Kanwil Sumatera Barat	28	Lapas Bangko	52	Lapas Payah Kumbuh
6	Lapas Tondano	29	Kanim Jambi	53	Kanim Bukit Tinggi
7	Lapas Bitung	30	Lapas Terbuka Pasaman	54	Kanim Jakarta Barat
8	Bapas Manado	31	Rupbasan Padang	55	Lapas Terbuka Jakarta
9	Lapas Manado	32	Lapas Padang	56	Kanim Jakarta Utara
10	Rupbasan Manado	33	Bapas Padang	57	Lapas Salemba
11	Kanim Manado	34	Rutan Sawah Lunto	58	Kanim Tj. Priuk
12	Kanim Banjarmasin	35	Kanim Padang	59	Rutan Salemba
13	Lapas Anak Martapura	36	Kanim Biak	60	Rutan Manado
14	Lapas Marabahan	37	Lapas Wamena	61	Lapas Tahuna
15	Rutan Kandangan	38	Kanim Merauke	62	Kanim Bitung
16	Rutan Rantau	39	Lapas Merauke	63	Cabrutan Enemawira
17	Kanim Kota Baru	40	Kanim Jayapura	64	Lapas Anak Tomohon
18	Kanim Jakarta Pusat	41	Rudenim Jayapura	65	Kanim Tahuna
19	Bapas Jakarta Timur	42	Lapas Jambi	66	Kanwil Kalimantan Selatan
20	Kanim Soekarno Hatta	43	Rupbasan Jambi	67	Lapas Banjarmasin
21	Rutan Jakarta Timur	44	Lapas Muara Tebo	68	Rutan Tanjung
22	Kanim Jakarta Timur	45	Bapas Jambi	69	Lapas Narkotika Karang Intan
23	Rupbasan Jaktim	46	Lapas Kuala Tungkal	70	Rupbasan Banjarmasin
		47	Kanim Kuala Tungkal		

4. Inspektorat Wilayah IV

Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 63 unit kerja dari 122 unit kerja Inspektorat Wilayah IV, yaitu :

Sasaran Audit					
1	Rutan Blora	24	Kanwil Bangka Belitung	45	Rutan Purbalingga
2	Rupbasan Semarang	25	Lapas Tanjung Pandan	46	Rupbasan Purbalingga
3	Lapas Klaten	26	Kanim Tj. Pandan	47	Rupbasan Pekalongan
4	Rutan Boyolali	27	Kanim Pangkal Pinang	48	Rutan Batang
5	Kanwil Jawa Tengah	28	Bapas Pangkal Pinang	49	Rutan Purworejo
6	Kanim Cilacap	29	Kanwil Jawa tengah	50	Lapas Anak Kutoarjo
7	Lapas Terbuka Nusakambangan	30	Lapas Semarang	51	Rutan Kebumen
8	Lapas Cilacap	31	BHP Semarang	52	Bapas Purwokerto
9	Rupbasan Purwokerto	32	Rutan Surakarta	53	Rutan Wonosobo
10	Lapas Purwokerto	33	Kanim Semarang	54	Rutan Banjarnegara
11	Rupbasan Cilacap	34	Rutan Jepara	55	Rudenim Semarang
12	Lapas Singaraja	35	Rutan Rembang	56	Rutan Banyumas
13	Rudenim Denpasar	36	Lapas Pekalongan	57	Bapas Magelang
14	Rutan Negara	37	Bapas Pekalongan	58	Lapas Kendal
15	Kanim Ngurah Rai	38	Bapas Semarang	59	Lapas Ambarawa
16	Lapas Tabanan	39	Rutan Demak	60	Bapas Surakarta

17	Bapas Tabanan	40	Kanwil Sulawesi Barat	61	Rutan Wonogiri
18	Lapas Nunukan	41	Rutan Mamuju	62	Rupbasan Wonogiri
19	Kanim Tarakan	42	Kanim Mamuju	63	BPHN
20	Bapas Balikpapan	43	Rutan Majene		
21	Rutan Tanah Grogot	44	Bapas Polewali		
22	Kanim Balikpapan				
23	Rutan Tanjung Redeb				

5. Inspektorat Wilayah V

Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 66 unit kerja dari 123 unit kerja Inspektorat Wilayah V, yaitu :

Sasaran Audit					
1	Rutan Balige	24	Kanim Medan	48	Lapas Lahat
2	Cabrutan Lubuk Pakam di Pancur Batu	25	Cabrutan Rantau Prapat di Labuhan Bilik	49	Rutan Prabumulih
3	Kanim Belawan	26	Kanim Polonia	50	Lapas Tanjung Raja
4	Rutan Pangkalan Brandan	27	Cabrutan Rantau Prapat di Kota Pinang	51	Lapas Wanita Palembang
5	Kanwil Sumatera Utara	28	Kanim Sibolga	52	Rutan Baturaja
6	Lapas Narkotika Lubuk Linggau	29	Bapas Sibolga	53	Cabang Rutan Martapura
7	Cabrutan Sorolangun Rawas	30	Rutan Palembang	54	Lapas Medan
8	Kanim Palembang	31	Lapas Sekayu	55	Lapas Panyambungan
9	Cabrutan Lahat di Tebing Tinggi	32	Lapas Palembang	56	Rutan Sidikalang
10	Rupbasan Baturaja	33	Lapas Anak Palembang	57	Rutan Medan
11	Cabrutan Muara Dua	34	Lapas Lubuk Linggau	58	Cabrutan Padang Sidempuan di Gunung Tua
12	Bapas Yogyakarta	35	Bapas Lahat	59	Bapas Medan
13	Rupbasan Wonosari	36	Kanwil Sumatera Utara	60	Lapas Wanita Medan
14	Rupbasan Wates	37	Rupbasan Medan	61	Cabrutan Padang Sidempuan di Kota Nopan
15	Bapas Wonosari	38	Lapas Pematang Siantar	62	Lapas Lubuk Pakam
16	Rupbasan Yogyakarta	39	BHP Medan	63	Cabrutan Padang Sidempuan di Siporok
17	Rupbasan Bantul	40	Lapas Anak Medan	64	Lapas Labuhan Ruku
18	Lapas Kupang	41	Kanim Pematang Siantar	65	Cabrutan Baru di Sibolga
19	Bapas Kupang	42	Kanwil D.I Yogyakarta	66	Ditjen HKI
20	Rutan Maumere	43	Rutan Yogyakarta		
21	Kanim Maumere	44	Lapas Yogyakarta		
22	Rupbasan Kupang	45	Rutan Wonosari		
23	Lapas Ende	46	Kanim Yogyakarta		
		47	Rutan Wates		

6. Inspektorat Wilayah VI

Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 62 unit kerja dari 123 unit kerja Inspektorat Wilayah VI, yaitu :

Sasaran Audit					
1	Lapas Malang	21	Kanim Sorong	42	Lapas Kota Agung
2	Lapas Wanita Malang	22	Lapas Fak-fak	43	Rutan Krui
3	Kanim Malang	23	Lapas Sorong	44	Lapas Bandar Lampung
4	Lapas Blitar	24	Rupbasan Surabaya	45	Lapas Way Kanan
5	Kanwil Jawa Timur	25	Rutan Trenggalek	46	Lapas Metro
6	Kanim Panjang	26	Kanim Blitar	47	Kanim Lampung
7	Rutan Menggala	27	Lapas Tulungagung	48	Lapas Pasuruan
8	Rutan Lampung	28	Lapas Anak Blitar	49	Rupbasan Mojokerto
9	Lapas Anak Kotabumi	29	Rupbasan Blitar	50	Rutan Gresik
10	Rupbasan Lampung	30	Lapas Palu	51	Bapas Bojonegoro
11	Lapas Kalianda	31	Lapas Toli-toli	52	Rutan Nganjuk
12	Bapas Surabaya	32	Cabang Rutan Toli-toli di Leok	53	Rutan Pacitan
13	Lapas Ngawi	33	Lapas Ampana	54	Rutan Manna
14	Lapas Madiun	34	Rutan Poso	55	Rupbasan Bengkulu
15	Kanim Madiun	35	Cabang Rutan Poso di Kolondale	56	Lapas Bengkulu
16	Lapas Kediri	36	Kanwil Jawa Timur	57	Lapas Curup
17	Bapas Kediri	37	Bapas Malang	58	Rupbasan Agra Makmur
18	Kanwil Papua Barat	38	Kanim Surabaya	59	Lapas Agra Makmur
19	Bapas Sorong	39	Lapas Banyuwangi	60	AKIP
20	Lapas Manokwari	40	Lapas Porong	61	AIM
		41	Lapas Bondowoso	62	BPSDM

Selain melakukan audit kinerja, kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat tujuan tertentu diantaranya :

a. Pengawasan Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam membantu menciptakan transparansi dalam kegiatan pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 dilakukan dengan mengadakan pengawasan internal baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah yaitu melalui :

- 1) Pengawasan Tahap pengecekan berkas lamaran CPNS
- 2) Pengawasan Tahap Pemberian Kartu Peserta Ujian
- 3) Pengawasan Tahap seleksi Kesehatan dan Kesamaptaaan
- 4) Pengawasan Tahap seleksi ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD)

Pengawasan Eksternal Pengadaan CPNS dilakukan oleh ICW, Ombudsman RI, LSM di daerah dan BEM Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Laporan hasil pengawasan pengadaan CPNS tahun 2012 disampaikan secara komulatif dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM serta Kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM.

b. Pengawasan Serah Terima Jabatan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012

Kegiatan Serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilakukan setelah ada Surat Keputusan dan Pelantikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada pejabat yang baru atau pejabat yang mengalami mutasi. Selama tahun 2012, kegiatan pengawasan serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep.Riau
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT
- 4) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
- 5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
- 6) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
- 7) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
- 8) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Laporan hasil pengawasan serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

c. Pemantauan Penetapan Unit Kerja Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2012

Upaya penindakan kasus korupsi selama ini, khususnya di era reformasi telah berjalan secara intensif. Namun upaya pencegahan masih kurang memadai, sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melalui pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2012. Wujud pelaksanaan pencegahan korupsi secara umum dilakukan kepada seluruh pimpinan Instansi untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-norma.

Kegiatan Pemantauan ini didahului dengan diadakan sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kantor Wilayah Sulawesi Utara.

Pemantauan WBK dan WBBM dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.0T.02.01 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Penetapan 43 (empat puluh tiga) unit kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2012 , telah dilakukan pemantauan pada unit eselon I dan satuan kerja sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Jenderal
- 2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- 3) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- 4) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
- 5) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- 6) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
- 7) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- 8) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
- 9) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
- 10) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- 11) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
- 12) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
- 13) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
- 14) Lapas Narkotika DKI Jakarta
- 15) Lapas Malang
- 16) Lapas Wanita Malang
- 17) Lapas Terbuka Mataram
- 18) Lapas Banyuwangi
- 19) Lapas Bondowoso
- 20) Lapas Ambon
- 21) Lapas Surabaya
- 22) Lapas Padang
- 23) Lapas Narkotika Pakem D.I. Yogyakarta
- 24) Lapas Wanita Semarang
- 25) Lapas Semarang
- 26) Lapas Palu
- 27) Lapas Denpasar
- 28) Lapas Jambi

- 29) Bapas Malang
- 30) Kantor Imigrasi Bandung
- 31) Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
- 32) Kantor Imigrasi Denpasar
- 33) Kantor Imigrasi Pontianak
- 34) Kantor Imigrasi D.I. Yogyakarta
- 35) Kantor Imigrasi Jayapura
- 36) Kantor Imigrasi Bandar Lampung
- 37) Kantor Imigrasi Tanjung Uban
- 38) Kantor Imigrasi Jambi
- 39) Kantor Imigrasi Madiun
- 40) Kantor Imigrasi Batam

Laporan hasil Pemantauan Penetapan Unit Kerja Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2012 telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disertai usulan satuan kerja yang diusulkan menjadi satuan kerja sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- d. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 dan Tahun 2011 berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) “. Hal ini mendorong Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mempertahankan opini dari BPK tersebut melalui kegiatan pengawasan, tentunya bersama seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan negara sesuai standar yaitu :

- e. Reviu Laporan Keuangan

Pasal 33 Ayat 3 PP No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada pihak-pihak terkait.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dalam hal sistem pengendalian intern, reviu hanya mengumpulkan keterangan yang dapat

menjadi bahan untuk penyusunan *Statement of Responsibility* (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Reviu pada bulan Januari 2012 terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011 serta terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada bulan Juli 2012. Kegiatan reviu ini dilakukan dengan menelusuri angka-angka yang disajikan pada Laporan Keuangan tingkat Kantor Wilayah dan tingkat eselon I ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk menyakini bahwa angka-angka tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, serta dilakukan permintaan keterangan kepada petugas / operator.

Target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2012 terhadap unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK yang WTP telah mencapai target, yaitu dilakukan reviu terhadap Laporan Keuangan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta 11 unit eselon I yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I - Inspektorat Wilayah VI.

Selain melakukan reviu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Terkait temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, telah dilakukan Pemantauan dalam rangka tindak lanjut / perbaikan temuan BPK-RI.

- f. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara mandiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri.

Peran Inspektorat Jenderal berdasarkan Pedoman PMPRB tersebut sebagai berikut :

- 1) Men-setup data unit kerja
- 2) Men-setup data akun *asesor*
- 3) Men-setup penugasan *asesor*
- 4) Memberikan informasi akun kepada *asesor*

- 5) Membuat akun pimpinan
- 6) Melakukan survey internal
- 7) Melaporkan hasil penilaian ke pimpinan
- 8) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan
- 9) Menyampaikan hasil penilaian ke Menpan dan RB

Target pada awal tahun 2012 belum tercapai karena pada bulan Desember tahun 2012, baru dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi pendamping assessor unit eselon I terkait PMPRB. Penilaian mandiri untuk Eselon I dilakukan pada bulan Januari 2013, dikarenakan masih menunggu surat keputusan penunjukan assesor dari Menteri Hukum dan HAM. Untuk penilaian mandiri tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM baru akan dilakukan penilaian mandiri pada tahun 2013, saat ini masih dalam proses draft surat pemberitahuan ke seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- g. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B' Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 mengeluarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Tahun 2011. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mendapat nilai "B".

Dalam rangka melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012, telah dilakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas tahun 2011 pada bulan November 2012. Kegiatan Evaluasi ini dilakukan dengan cara sampling pada 5 unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 2 unit eselon I dan 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Target pada tahun 2012 terhadap unit kerja yang akuntabilitas kerjanya mendapat nilai "B", belum tercapai, karena dari target 15 unit kerja, hanya 5 unit kerja yang dilakukan sampling penilaian sistem akuntabilitas kinerja. Hal ini dianggap sudah mewakili dari akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya. Hasil evaluasi tersebut telah dikirimkan kepada Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan Evaluasi Akintabilitas Kinerja adalah :

- 1) Menilai penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta mencegah KKN
- 2) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja

- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
- 5) Memberikan informasi kinerja organisasi

Metode Evaluasi Akintabilitas Kinerja dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a) Perencanaan Strategis
 - b) Perencanaan Kinerja Tahunan
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a) Pemenuhan Pengukuran
 - b) Kualitas Pengukuran
 - c) Implementasi Pengukuran
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a) Pemenuhan Pelaporan
 - b) Penyajian Informasi Kinerja
 - c) Pemanfaatan Informasi Kinerja
- 4) Evaluasi Kinerja dan
 - a) Pemenuhan Evaluasi
 - b) Kualitas Evaluasi
 - c) Pemanfaatan Evaluasi
- 5) Capaian Kinerja
 - a) Kinerja Yang Dilaporkan (*Output*)
 - b) Kinerja Yang Dilaporkan (*Outcome*)

- h. Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

Berdasarkan laporan surat masuk sub bagian tata usaha yang berkaitan dengan pengaduan, diketahui jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 38 laporan telah dilakukan telaahan dan tindak lanjut. Target di awal tahun 2012 terkait dengan pengaduan masyarakat dan kasus yang ditangani secara tepat waktu telah tercapai, yaitu apabila ada surat pengaduan masyarakat yang masuk langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing Inspektorat Wilayah. Selama tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan audit dengan tujuan tertentu (pemeriksaan khusus). Sumber data pemeriksaan khusus berasal dari pengaduan masyarakat, perintah langsung Inspektur Jenderal atau Menteri Hukum dan HAM (SIDAK), maupun dari isu aktual di media massa. Permasalahan yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaporkan sebagai berikut :

Data pemeriksaan khusus tahun 2012

No.	Substansi Pengaduan	Jumlah	%
1.	Dugaan Penyimpangan, Penggelapan, Pemerasan dan Suap	38	29,69
2.	Penyalahgunaan Wewenang	22	17,19
3.	Pelanggaran Tata Tertib Kepegawaian	6	4,88
4.	Perbuatan Pribadi yang Tercela, Lalai dan Pemalsuan	4	3,13
5.	Narkotika	3	2,34
6.	Sidak	18	14,06
7.	Pengawasan Pengadaan CPNS	33	25,76
8.	Lain-Lain	4	3,13
Jumlah		128	100,00

i. Analisis Atas Kualitas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkait Urusan Administrasi Dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Ham Dijabarkan Sebagai Berikut :

1) Persentase pencapaian standard pelayanan prima dalam pelayanan tugas pimpinan dan kerumah tanggaan dengan adminstrasi yang akuntabel

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dalam melaksanakan tugas membantu Menteri Hukum dan HAM dalam bidang pengawasan. Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Jenderal selaras dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, serta berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

Selama tahun 2012 dari target yang ditetapkan telah tercapai yaitu terpenuhinya 22 laporan yang berkaitan dengan layanan perkantoran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan telah ditetapkan anggaran dalam DIPA Inspektorat Jenderal tahun 2012 sebesar Rp.28.777.871.000. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2012, dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.76.680.712, dan Realisasi Belanja sebesar Rp.28.060.456.352 atau mencapai 97,51 % dari pagu anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PNBP	18.000.000	76.680.712
Belanja Rupiah Murni	28.777.871.000	28.060.456.352

Laporan Barang Milik Negara pada Neraca Tahun 2012

Uraian	Jumlah (Rp)
Barang Konsumsi	25.476.300
Peralatan dan Mesin	8.662.550.509
Gedung dan Bangunan	2.274.392.127
Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	26.057.824
Software	893.937.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	168.348.000
Jumlah	12.050.761.760

- 2) Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel

Kegiatan perencanaan dilakukan untuk merencanakan kegiatan di Inspektorat Jenderal selama satu tahun anggaran yang meliputi kegiatan penganggaran DIPA, rencana umum pengadaan, rencana audit, rencana program kerja pengawasan, rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan, dll.

Selama tahun 2012 dari target yang ditetapkan telah tercapai yaitu terpenuhinya 7 laporan yang berkaitan dengan laporan dokumen perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaporan program.

Dalam tahun anggaran 2012, terjadi 5 (lima) kali revisi atas dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal, yaitu :

- a) Tanggal 16 Februari 2012, tentang revisi halaman III DIPA No. 0007/013-02.1.01/00/2012 rencana penarikan pengeluaran/perkiraan penerimaan.
- b) Tanggal 2 Maret 2012, tentang revisi halaman III DIPA No. 0007/013-02.1.01/00/2012 rencana penerimaan (PNBP) Inspektorat Jenderal
- c) Tanggal 9 Maret 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiatan (MAK)
- d) Tanggal 13 April 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiatan (MAK)
- e) Tanggal Desember 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiatan (MAK)

- 3) Kegiatan pelaporan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengawasan intern dan pengawasan eksternal sebagai berikut :

- a) Laporan Pemantauan BPK-RI

Dalam tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Terhadap Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah dibuatkan surat tindak lanjut dan dilakukan pemantauan kepada satuan kerja yang diperiksa untuk menindak lanjuti dan dikirimkan ke Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sampai dengan semester II tahun 2012 mencakup obyek temuan dan rekomendasi dari tahun 2005 s.d tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :

Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

No	Tahun	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
			Sesuai	Dalam Proses	Belum ditindak lanjuti	Tidak dapat ditindak lanjuti
1.	2005	89	89	0	0	0
2.	2006	112	112	0	0	0
3.	2007	69	69	0	0	0
4.	2008	184	180	3	0	1
5.	2009	166	166	0	0	0
6.	2010	136	128	8	0	0
7.	2011	65	63	2	0	0
8.	2012	207	149	29	29	0
Jumlah		1.028	956	42	29	1

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut, diketahui bahwa dari 529 temuan dengan 1.028 rekomendasi senilai Rp.140.936.365.104,22. Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 956 rekomendasi senilai Rp.27.052.427.750,25. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi (dalam proses) sebanyak 42 rekomendasi senilai Rp.2.316.815.051,54. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi senilai Rp.164.474.238,43 dan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjut sebanyak satu rekomendasi senilai Rp.111.402.648.064,00.

b) Laporan Pemantauan BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirimkan laporan hasil pengawasan setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan Inspektorat Jenderal. Terhadap Laporan hasil pengawasan tersebut telah dibuatkan surat tindak lanjut dan dilakukan pemantauan kepada satuan kerja yang diperiksa untuk menindak lanjuti serta tindak lanjutnya dikirimkan ke Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan terkait.

Laporan hasil pengawasan yang diterbitkan dalam triwulan III tahun 2012 berjumlah 58 laporan, diantaranya laporan tentang kegiatan evaluasi penyerapan

anggaran, pendampingan penyusunan laporan keuangan, dan reviu rencana pembangunan gedung. Tidak terdapat temuan hasil pengawasan dalam triwulan III tahun 2012.

Saldo temuan yang belum ditindak lanjuti sampai dengan trwulan III Tahun 2012 sebanyak 61 temuan senilai Rp. 704.847.508,65, nilai temuan yang berkaitan dengan pengembalian ke kas negara diantaranya disebabkan karena kelalaian bendahara, sehingga jenis tindak lanjutnya berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan diselesaikan dengan mencicil. Selain itu juga disebabkan karena rekomendasi yang mewajibkan pihak ketiga diluar Kementerian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab dan sampai saat ini keberadaannya sudah tidak diketahui. Rincian saldo temuan per tahun pelaporan hasil pengawasan BPKP sebagai berikut :

Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPKP

Tahun Pelaporan	Saldo	
	Temuan	Nilai (Rp)
s.d 2007	23	367.188.883,65
2008	1	15.588.625,00
2009	1	0,00
2011	24	54.575.000,00
2012	12	567.495.000,00
Jumlah	61	704.847.508,65

c) Laporan Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pegawai

Tugas pengawasan lainnya dari Inspektorat Jenderal adalah memberikan saran terhadap usul penjatuhan hukuman disiplin pegawai. Usul penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan analisa (telaahan staf) tentang kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan rekapitulasi hukuman disiplin tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah
1.	Tingkat Ringan	225 pegawai
2.	Tingkat Sedang	178 pegawai
3.	Tingkat Berat	89 pegawai
Jumlah		492 pegawai

Berdasarkan klasifikasi penyimpangan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyimpangan, penggelapan, pemerasan, suap	27 pegawai
2.	Penyalahgunaan wewenang	33 pegawai
3.	Pelanggaran tata tertib kepegawaian	129 pegawai
4.	Lalai dalam melaksanakan tugas, pelarian narapidana	270 pegawai
5.	Narkotik	32 pegawai
6.	Terorisme	1 pegawai
Jumlah		492 pegawai

- j. Persentase hasil pengawasan pada Bagian LHP I yang ditindak lanjuti secara tepat waktu

Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap substansi temuan dan rekomendasi sebelum dikirimkan ke satuan kerja untuk di tindak lanjuti. Materi analisa substansi temuan dan rekomendasi memuat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, *Standar Operating Prosedur (SOP)*, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis.

Jumlah Temuan Audit Kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Bagian LHP I tahun 2012 sebanyak 1.188 rekomendasi. Jumlah temuan yang selesai di tindak lanjuti sebanyak 368 rekomendasi.

Rekap Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah	Nilai (Rp)	%
I.	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	0		0,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	0		0,00
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	58		18,18
4	Administrasi	261		81,82
5	Indikasi tindak pidana	0		0,00
Sub Total		319		
II.	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	227		28,66
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	251		31,69
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	314		39,65
Sub Total		792		
III.	Temuan 3 E			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	12		15,58

2	Ketidakefisienan	32		41,56
3	Ketidakefektifan	33		42,86
Sub Total		77		
Jumlah Total		1.188		

- k. Persentase hasil pengawasan pada Bagian LHP II yang ditindak lanjuti secara tepat waktu

Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap substansi temuan dan rekomendasi sebelum dikirimkan ke satuan kerja untuk di tindak lanjuti. Materi analisa substansi temuan dan rekomendasi memuat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, *Standar Operating Prosedur (SOP)*, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis.

Jumlah Temuan Audit Kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Bagian LHP II tahun 2012 sebanyak 1.057 rekomendasi. Jumlah temuan yang selesai di tindak lanjuti sebanyak 373 rekomendasi.

Rekap Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah	Nilai (Rp)	%
I. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan				
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	22		9,57
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	9		3,91
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	56		24,35
4	Administrasi	143		62,17
5	Indikasi tindak pidana	0		0,00
Sub Total		230		
II. Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	290		37,61
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	138		17,90
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	343		44,49
Sub Total				
III. Temuan 3 E				
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	21		37,50
2	Ketidakefisienan	25		44,64
3	Ketidakefektifan	10		17,86
Sub Total		56		
Jumlah Total		1.057		

- I. Persentase aparatur ITJEN yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis bidang pengawasan serta persentasi kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel

Laporan bezzeting pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 185 pegawai, terdiri dari laki-laki 120 pegawai dan wanita 65 pegawai.

Bezzeting keadaan berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV/d	2
2	IV/c	3
3	IV/b	11
4	IV/a	12
5	III/d	25
6	III/c	24
7	III/b	48
8	III/a	39
9	II/d	1
10	II/c	15
11	II/b	3
12	II/a	2

Bezzeting keadaan sumber daya pengawasan Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Struktural</i>		
	a. Eselon I	0	1 Pelaksana Tugas
	b. Eselon II	4	3 jabatan yang kosong
	c. Eselon III	5	
	d. Eselon IV	24	
2.	<i>Jabatan Fungsional Auditor</i>		
	a. Auditor Madya	16	
	b. Auditor Muda	19	
	c. Auditor Pertama	48	
	d. Auditor Terampil	17	
3.	<i>Jabatan Fungsional Umum</i>		
		52	
	Jumlah	185	

Dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan kegiatan orkan sebagai berikut :

- 1) Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) meliputi :

No.	Materi	Jumlah Peserta
1.	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	30
2.	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi Internal Kementerian	30
3.	Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam mewujudkan Akuntabilitas Pengendalian Internal Pemerintah dalam Desain Penyelenggaraan SPIP	30
4.	Sistem Pengendalian Gratifikasi	30

2) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) meliputi :

No.	Diklat	Jumlah Peserta
A.	Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor	
	1. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil	3
	2. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli	2
	3. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Pengendali Teknis	3
B.	Kepemimpinan	
	1. Diklat Kepemimpinan Tk.IV	2
	2. Diklat Kepemimpinan Tk.III	2
C.	Bendaharawan	2
D.	Penunjang Pengawasan	
	1. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	2
	2. Audit Berbasis Resiko	32
	3. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	10
	4. Penyusunan Kertas Kerja Audit	3
	5. Penjenjangan Auditor Peran Ketua Tim Dengan Pola PNBK	15
	6. Pelayanan Publik	1
	7. Sertifikasi QIA	2
	8. Arsiparis tingkat ahli	1
	9. Intelejen	1
	10. Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum	1
	11. e-Procurement	3
	12. Teknis Rudenim	2

- 3) Mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Rakernis, Narasumber yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme pengawasan meliputi :

Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Rakernis, Narasumber	Jumlah Peserta
1. Rakernis Kehumasan	1
2. Rakernis Bidang Kepegawaian	1
3. Rakor Instrumen Penelitian dan Jadwal Penelitian Tim Rintisan Gelar	1
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2013	2
5. Lokakarya pengembangan mekanisme audit internal	1
6. Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012	1
7. FGD <i>Legal Assistance for the Poor</i>	1
8. FGD Kajian Analisis Dampak dan Penilaian Kebutuhan Program Pendidikan	1
9. FGD Penyesuaian Uraian Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum	2
10. FGD Penyusunan Kajian Pengawasan Internal Pemasarakatan	1
11. Sosialisai Perpres 70 Tahun 2012	3
12. Sosialisasi Pengelolaan BMN	2
13. Kegiatan ESQ	100

- 4) Kegiatan Bimbingan Teknis meliputi :

<i>Bimbingan Teknis</i>	Jumlah Peserta
1. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	10
2. Pelatihan Aplikasi e-Procurement	1
3. Bimtek SPIP	2
4. Bimtek LAKIP	1
5. Peningkatan Wawasan dan Pembinaan Administrasi Pengelola BMN	2

m. Akuntabilitas Keuangan

Laporan pertanggung jawaban keuangan Inspektorat Jenderal berdasarkan DIPA Nomor : 0007/013-02.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dilaporkan sebagai berikut :

Laporan Realisasi anggaran dan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 :

- 1). Pagu Tahun 2012 adalah sebesar Rp.28.777.871.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
 - a) Belanja pegawai Rp. 10.169.362.000,-
 - b) Belanja barang Rp. 18.597.709.000,-
 - c) Belanja modal Rp. 10.800.000,-
- 2). Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.28.060.456.352 (dua puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,51 % dari pagu anggaran, dengan rincian :
 - a) Belanja pegawai Rp. 10.133.371.988 (99,65 %)
 - b) Belanja barang/jasa Rp.17.916.297.764 (96,34 %)
 - c) Belanja modal Rp.10.786.600 (99,88 %)

Bidang Pembinaan Hukum Nasional

1. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, bagian program dan pelaporan telah melaksanakan :

a. Subbagian Data dan Informasi melaksanakan kegiatan :

- 1) Menginventarisasi kegiatan BPHN dari Tahun 1974 s/d 2012
- 2) Mengolah data menjadi bahan informasi yang digunakan sebagai bahan aktual dari BPHN (Penataan Hasil-Hasil Kegiatan BPHN)
- 3) Mengolah data/bahan menjadi bentuk Aplikasi (Filling System)
- 4) Menata hasil kegiatan dalam bentuk perpustakaan khusus Program dan Pelaporan
- 5) Menyajikan informasi hasil-hasil kegiatan BPHN kepada berbagai pihak yang memerlukan, sebagaimana diharapkan informasi yang diberikan / disampaikan baik, tepat dan akurat.
- 6) Menjawab surat baik dari internal maupun instansi terkait yang terkait dengan tugas Subbag. Data dan Informasi.

b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran melaksanakan kegiatan :

- 1) Membuat rencana kegiatan Bagian Program dan Pelaporan sesuai dengan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyusun rincian RKA-KL tahun 2013 dan melakukan pembahasan konsep RKA-KL dengan Biro Perencanaan, Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan dan BAPPENAS.
- 3) Merumuskan rencana kegiatan dan anggaran, hasil evaluasi dan laporan kegiatan, data dan informasi serta optimalisasi kegiatan dengan tepat, cepat dan akurat.
- 4) Merevisi Program dan Kegiatan Tahun berjalan.
- 5) Membuat Surat Keputusan (SK) kegiatan.
- 6) Menjawab surat baik dari internal maupun instansi terkait yang terkait dengan tugas Subbag. Perencanaan dan Anggaran

c. Subbag. Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas :

- 1) Menginventarisasi kegiatan BPHN tahun berjalan.
- 2) Membuat matrik perkembangan dan capaian kegiatan dari masing-masing Pusat dan Sekretariat
- 3) Menyusun Laporan Triwulan Pertama, Tengah Tahunan, Triwulan Ketiga dan Tahunan BPHN
- 4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) BPHN

- 5) Memantau / memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan sampai dengan akhir Maret (triwulan pertama) 2012 yang telah dilaksanakan dalam rangka inventarisasi masalah aktual.
- 6) Menyusun TAPKN dan bahan RAKER untuk pimpinan serta menjawab surat baik dari internal maupun instansi terkait yang terkait dengan subbag. Evaluasi dan Pelaporan.

2. Kepegawaian

Data Kepegawaian

Jumlah pegawai seluruhnya secara rinci :

Sekretariat	=	104	Orang
Puslitbangsiskumnas	=	50	Orang
Pusrenbangkumnas	=	28	Orang
Pusjardokinfokumnas	=	54	Orang
Pusluhkum	=	29	Orang

Jumlah= 265 Orang

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian

- 1) Melakukan pengelolaan dan pembaharuan Keadaan Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional. Berdasarkan aplikasi database pegawai, mulai Bulan Januari s.d Desember 2012, dapat dirinci sebagai berikut :

a) Pemegang Jabatan Struktural

No	Pemegang Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Eselon I	1 orang
2.	Eselon II	5 orang
3.	Eselon III Sekretariat	5 orang
4.	Eselon III Puslitbangsiskumnas	4 orang
5.	Eselon III Pusrenbangkumnas	3 orang
6.	Eselon III Pusjardokinfokumnas	3 orang
7.	Eselon III Pusluhkum	3 orang
8.	Eselon IV Sekretariat	15 orang
9.	Eselon IV Puslitbangsiskumnas	8 orang
10.	Eselon IV Pusrenbangkumnas	7 orang
11.	Eselon IV Pusjardokinfokumnas	8 orang
12.	Eselon IV Pusluhkum	9 orang
Total		71 orang

b) Pemegang Jabatan Fungsional Tertentu

No	Unit Kerja di BPHN	Jumlah
1.	Peneliti Utama	5 orang
2.	Peneliti Madya	17 orang
3.	Peneliti Pertama	1 orang
4.	Ahli Pranata Komputer	-
5.	Pustakawan Madya	6 orang
6.	Pustakawan Penyelia	12 orang

7.	Pustakawan Muda/lanjutan	-
8.	Dokter Gigi Utama	1 orang
9.	Dokter Gigi Madya	1 orang
10.	Dokter Madya	1 orang
11.	Perawat Pelaksana	2 orang
Total		71 orang

c) Pemegang Jabatan Fungsional Umum

No	Unit Kerja di BPHN	Jumlah
1.	Sekretariat	81 orang
2.	Puslitbangsiskumnas	17 orang
3.	Pusrenbangkumnas	15 orang
4.	Pusjardokinfokumnas	28 orang
5.	Pusluhkum	16 orang
Total		157 orang

- 2) Melaksanakan pelantikan, pengangkatan Sumpah Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengambilan Sumpah Jabatan PNS di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 4 kali : tanggal 4 Januari 2012; 20 April 2012; 24 Oktober 2012; dan 28 November 2012.
- 3) Melaksanakan pembuatan lembaran Uraian Tugas Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 280 Lembar untuk 280 orang pegawai.
- 4) Melaksanakan pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tahun 2012, dengan rincian :

No	Diklatpim	Jumlah
1.	Diklatpim Tk. I	2 orang
2.	Diklatpim Tk. II	10 orang
3.	Diklatpim Tk. III	12 orang
4.	Diklatpim Tk. IV	9 orang
Total		33 orang

- 5) Melaksanakan pengusulan peserta diklat teknis tahun 2012 lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Diklat	Jumlah
1.	Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	4 orang
2.	Kegiatan Leadership Camp	5 orang
3.	Diklat Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH)	3 orang
4.	Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Suncang) Tingkat Pertama	27 orang
5.	Diklat TOT HAM	1 orang
6.	Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli	7 orang
7.	Diklat Peneliti	22 orang
8.	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	9 orang
9.	Diklat Jabatan Fungsional Bendaharawan	4 orang

10.	Diklat Audit Berbasis Resiko	2 orang
11.	Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)	1 orang
12.	Pelatihan e-Procurement	3 orang
13.	Diklat Pelayanan Publik	1 orang
14.	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	5 orang
Total		104 orang

- 6) Melakukan pengusulan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2012, dengan Perincian Sebagai berikut :

No	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah
1.	Tingkat Sarjana (S1)	8 orang
2.	Tingkat Magister (S2)	1 orang
Total		9 orang

- 7) Mengirimkan pegawai dan melaksanakan pembuatan Surat Perintah Tugas Pegawai BPHN untuk mengikuti Diklat maupun kegiatan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Surat Perintah Tugas Diklat

No	Kegiatan Diklat	Jumlah
1.	Diklatpim Tingkat III : 1. Giyanto, SH, MH 2. Rr. Yuliawiranti, SH., CN., MH 3. Sumarno, SH, MH	3 surat
2.	Diklatpim Tingkat IV : 1. Lili Wuryanti, S.Sos. 2. Chairiah, S.Sos.M.Si 3. Fawahid Haidar, SH	3 surat
3.	Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 1. Johny Naldi, SH., MM	1 surat
4.	Diklat Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) 1. Iswiyati Kunti, S.Kom 2. Aditya Pandu Pradana, S.Hum	2 surat
5.	Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Suncang) Tingkat Pertama 1. Deny Rahmansyah, SH. 2. Febriany Triwijayanti, SH	2 surat
6.	Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli 1. Andi Maruto, SE 2. Fuzi Narindrani, SH 3. Tri Sadewo, ST	3 surat
7.	Diklat Peneliti 1. Fabian Adiasta NB, SH 2. Adharinalti, SH., MH. 3. Tyas Dian Anggraeni, SH., MH. 4. Nunuk Febrianingsih, SH., MH. 5. Teguh Imansyah, S.IP 6. Benedictus Sahat Partogi, SH 7. Eko Noer Kristianto, SH	11 surat

	8. Neyey Farida, SH 9. Ema Elviyani, SH 10. Vonni Dwi, SH 11. Tilawarman Sudrajat, SH	
8.	Diklat Jabatan Fungsional Bendaharawan 1. Lianawati Rahayu, A.Md 2. Andi Maruto, SE	2 surat
9.	Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) 1. Edi Suprpto, SH, MH	1 surat
10.	Pelatihan e-Procurement 1. Arief Rudianto, S.Ag.,M.Si 2. Drs. Muchlas 3. Heru Triawan, SH	3 surat
11.	Diklat Pelayanan Publik 1. Indah Rolengkap Sinambela, S.Sos	1 surat
12.	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1. Ratiyo Bin Gimin, SH 2. Edi, SH 3. Tri Sadewo, ST 4. Sri Handayani, SE 5. Johnny Naldi, S.H., M.M.	5 surat
Total		37 surat

Surat Perintah Tugas Kegiatan lainnya

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (S1) dan Magister (S2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 9 orang, yaitu : 1. Teguh Imansyah, SIP 2. Lilik Yunianta, A.Md 3. Teguh Irawan 4. Krisna Pramudia 5. I Nyoman Dudy Dharmawan 6. Nurmansyah 7. Edi 8. Asiyah Budiarti 9. Ardhi Yudha	9 surat
2.	Bimbingan Teknis SPSE bertempat di Biro Perencanaan Sekretriad Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.RI pada tanggal 25 Januari 2012 sebanyak 10 orang yaitu Arief Rudianto, S.Ag. M.Si, Supriyatno, SH.,MH, Drs. Muchlas, Komari, S.Sos, Apri Listianto, SH, Tri Sadewo Yuli Cahyanto, ST, Deni Kurniawan, SE, Heru Triawan, Uci Bayu Kurniawan, Joni Marten.	10 surat
3.	Bimbingan Teknis Penyusunan Usul Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Kementerian Hukum dan HAM RI selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 s.d 25 Februari 2012, bertempat di Hotel Permata Bogor sebanyak 2 orang yaitu Sukesti Iriani, SH, MH dan Nandi Widyani, SH, MH.	2 surat
4.	Sosialisasi Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu Kementerian Hukum dan HAM RI yang akan diselenggarakan mulai tanggal 22 s.d 23 Februari 2012 selama 2 (dua) hari, bertempat	5 surat

	di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 5 orang yaitu Sukesti Iriani, SH, MH dan Nandi Widyani, SH, MH, Ratiyo Bin Gimin, SH, Giyanto, SH, MH dan Tati Kusnowati, S.Sos.	
5.	Mengirimkan dan mengusulkan pejabat mengikuti Fit and Proper Test Gelombang I yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 dan 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2012 di Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 7 orang yaitu Mosgan Situmorang, SH.,MH, Edi Suprpto, SH.,MH, Purwanto, SH.,MH, Ninik Hariwanti, SH.,LL.M, Drs. Sularto, SH, Johny Naldi, SH.,M.M, Nandi Widyani, SH.,MH.	7 surat
6.	Mengirimkan dan mengusulkan pejabat mengikuti Fit and Proper Test Gelombang II, yaitu : Drs. Abdullah Empi, SH, Omon, SH.,MH. Nuni Suryani, SH.,MH, Eko Suparmiyati, SH.,MH, Liestiarini Wulandari, SH.,MH	5 surat
7.	Pelaksanaan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data Tingkat Kementerian Hukum dan HAM Semester II Tahun 2012 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 7 Februari s/d 10 Februari 2012 di Hotel Isola Resort Bandung, Jawa Barat sebanyak 1 orang yaitu Nurmansyah	1 surat
8.	Melaksanakan pengawasan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) Tahun 2012 di Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap I (tanggal 5 s/d 7 Maret 2012) di Kanwil Jambi sebanyak 1 orang yaitu Giyanto, SH, MH 2. Tahap II (tanggal 12 s/d 14 Maret 2012) <ol style="list-style-type: none"> a) Kanwil Sulawesi Tenggara (Kendari) sebanyak 1 orang yaitu Sukesti Iriani, SH, MH. b) Kanwil Sulawesi Selatan (Makasar) sebanyak 1 orang yaitu Ratiyo, SH 	3 surat
9.	Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi <i>e-Procurement</i> Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 7 Maret s/d 10 Maret 2012 di Hotel Grand Jaya Raya, Cipayung Bogor sebanyak 1 orang pegawai yaitu Heru Triawan.	1 surat
10.	Pelaksanaan Kegiatan Konsinyasi Pengolahan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 12 Maret s/d 14 Maret 2012 di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang sebanyak 1 orang yaitu Dwinanto Pratikno, A.Md.	1 surat
11.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Semester II 2011 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 7 Februari s/d 10 Februari 2012 di Hotel Isola Resort Bandung, Jawa Barat	2 surat

	sebanyak 2 orang yaitu Ira Yustisia Smarayosi, S.Kom.,M.Si dan Abdul Rozak, SE.	
12.	Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 19 Nopember s/d 21 Nopember 2012, bertempat di Park Hotel. Jl. D.I. Panjaitan Kav 5 Jakarta Timur sebanyak 2 orang yaitu Sukesti Iriani, SH.,MH; Giyanto, S.H., M.H.	2 surat
13.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2012 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. pada tanggal 17 September sampai dengan 19 September 2012 di Hotel Mitra, Bandung sebanyak 1 orang yaitu Dwinanto Pratikno, A.Md.	1 surat
14.	Kegiatan penyusunan Manajemen Sistem Penanganan Gangguan Keamanan oleh Biro Umum pada 20 s/d 23 November 2012 di Hotel Mitra, Bandung yaitu Nurdin Rudiono, SH	1 surat
Total		50 surat

- 8) Membuat Surat Permohonan Izin Mengikuti Pendidikan/Perkuliahan Program Sarjana (S1) dan (S2) sebanyak 7 surat, yaitu :
 - a) Lianawati Rahayu, A.Md.
 - b) Bosar Immanuel, SE
 - c) Bangun Asanurjaya, A.md
 - d) Bernita Sinurat, A.Md
 - e) Teguh Imansyah, S,Ip.,M.Si
 - f) Eko Noer Kristiyanto, SH
 - g) Ria Istianti, A.Md
- 9) Melakukan konsinyasi penyusunan aplikasi database bidang kepegawaian tahun 2012.
- 10) Penyampaian laporan hasil konsinyasi penyusunan aplikasi database bidang kepegawaian ke Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Hukum dan HAM.RI.
- 11) Melakukan kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Program Pelaporan pada kegiatan System based performance management (SKP kepegawaian BPHN) bulan April 2012
- 12) Melaksanakan pengabsensian kehadiran pegawai dalam upacara Bendera kesadaran nasional setiap tanggal 17, tahun 2012.
- 13) Mengirimkan 1 (satu) orang pegawai dalam kegiatan analisis dampak dan penilaian kebutuhan program pendidikan rintisan gelas dan bantuan mandiri.
- 14) Mengirimkan daftar pegawai peserta Workshop Kewirausahaan dan Pembekalan Mental bagi PNS yang memasuki usia Pensiun tahun 2012, sebanyak 15 orang.

- 15) Mengirimkan dan mengusulkan 1 (satu) orang pejabat sebagai Widyaiswara ke BPSDM. A.n. Yuliawiranti, SH.CN.MH tahun 2012.
- 16) Mengirimkan dan mengusulkan 1 (satu) orang pegawai untuk menjadi fungsional penerjemah tahun 2012 A.n. Shinta, SS
- 17) Melakukan penyelesaian SK PNS pegawai BPHN 2012, sebanyak 6 (enam) orang.
- 18) Melakukan Penyelesaian Sertifikat Penyesuaian Ijasah S1 dan S2 tahun 2012 sebanyak 7 Orang.
- 19) Membuat absensi upacara dan merekapitulasi hasil kehadiran para pegawai BPHN pada Upacara Bendera Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 11 kali kegiatan upacara.
- 20) Melaksanakan pemrosesan surat permohonan Magang/ Riset /PKL dan mengalokasikan Peserta Magang/ Riset /PKL yang terdiri dari Siswa/siswi SMK dan Mahasiswa/mahasiswi Universitas untuk melakukan Magang/ Riset /PKL di BPHN Bulan Januari s/d Desember 2012, yaitu :

No	Asal Sekolah / Universitas	Jurusan	Jumlah Peserta PKL	Penempatan
Januari				
1.	Universitas Negeri Jakarta	D3 Humas	2 orang	Bagian Umum
	SMK Yadika 6	Adm. Perkantoran	4 orang	Bagian Kepegawaian
2.	SMK Yadika 6	Akuntansi	3 orang	Bagian Program dan Pelaporan
3.	SMK Sandikta	Akuntansi	2 orang	Bagian Keuangan
4.	SMK Sandikta	Adm. Perkantoran	4 orang	Bagian Umum
5.	SMK Semesta	Akuntansi	4 orang	Bagian Keuangan
6.	SMK Mahadhika I	Adm. Perkantoran	5 orang	Bagian P. BMN
7.	SMK PGRI 28 Jakarta	Akuntansi	4 orang	Pusluhkum
8.	SMK Budhi Murni I	Teknik Komputer dan Jaringan	4 orang	Pusdokjarinfokumnas
Februari				
1.	Institut Pertanian Bogor	S1 Manj. Informatika	3 orang	Pusdokjarinfokumnas
2.	Universitas Negeri Jakarta	D3 Humas	2 orang	Bagian Umum
3.	Akademi Sekretari dan Manajemen BSI	D3 Manajemen Administrasi	2 orang	Bagian Kepegawaian
4.	BSI		2 orang	Bagian Keuangan
5.	SMK Mahadhika I	Adm. Perkantoran	4 orang	Bagian Kepegawaian
6.	SMK PB	Akuntansi	5 orang	Bagian Keuangan

	Soedirman 2			
7.	SMK Budi Murni	Adm. Perkantoran	2 orang	Bagian Keuangan
8.	SMK Sandikta	Adm. Perkantoran	4 orang	Bagian Umum
9.	SMK Pertiwi	Akuntansi	4 orang	Bagian P. BMN
10.	SMK Trampil	Adm. Perkantoran	4 orang	Pusluhkum
11.	SMKN 4 Bekasi	Teknik Komputer dan Jaringan	3 orang	Pusdokjarinfokumnas
12.	SMKN 25 Jakarta	Akuntansi	4 orang	Pusdokjarinfokumnas
Maret				
1.	SMK Mardhika	Adm. Perkantoran	2 orang	Bagian Program dan Pelaporan
2.	SMK Sandikta	Akuntansi	4 orang	Bagian Keuangan
3.	SMK Sandikta	Adm. Perkantoran	4 orang	Bagian Umum
4.	UNJ	D3 Humas	2 orang	Bagian Umum
5.	SMK Islam PB Soedirman 2	Akuntansi	5 orang	Bagian Pengelolaan BMN
6.	SMK Walisongo	Adm. Perkantoran	5 Orang	Bagian Kepegawaian
7.	Institut Pertanian Bogor	S1 Manj. Informatika	3 orang	Pusdokjarinfokumnas
8.	SMK Sandikta	Adm. Perkantoran	4 orang	Pusdokjarinfokumnas
9.	Politeknik Negeri Jakarta	Komputer dan Jaringan	1 orang	Pusdokjarinfokumnas
April				
1	SMK PGRI 28	Adm Perkantoran	4 orang	Bagian Umum
2	BSI	Kehumasan	3 orang	Bagian Umum/Humas
3	SMK Budi Murni I	Teknik Komputer	3 orang	Pusdok
4	SMKN 22	Akuntansi	6 orang	Keuangan
5	SMK Budhi Warman	AP	3 orang	Kepegawaian
6	SMK Merah Putih	TK jaringan	3 orang	Pusdok
Mei				
1	SMK PGRI I	AP	3 orang	Kepegawaian
2	SMK karya Wijaya Kusuma	Akuntansi	5 orang	Keuangan
3	SMK Mahadhika I	Akuntansi	5 orang	Pusluh
4	SMK Merah Putih	TKJ	3 orang	Pusdok
Juni				
				Bulan Ujian
Juli				
1	SMK 51 Jakarta	Adm Perkantoran	3 orang	Sekretariat
2	UNJ	Akuntansi	3 orang	Sekretariat
3	ASM BSI	Sekretaris	3 orang	Sekretariat
Agustus				
1	SMK 51 Jakarta	Adm Perkantoran	3 orang	Sekretariat
2	UNJ	Akuntansi	3 orang	Sekretariat
3	ASM BSI	Sekretaris	3 orang	Sekretariat
September				

1	SMK Malahayati	Adm Perkantoran dan Akuntansi	13 orang	Sekretariat
Oktober				
1	SMK Islam Malahayati	Adm Perkantoran dan Akuntansi	10 orang	Sekretariat
2	SMK Mardhika	Adm Perkantoran	3 orang	Sekretariat
3	SMK Yadika 6	Akuntansi	3 orang	
4	SMK PGRI 16	Adm Perkantoran dan Akuntansi	15 orang	Sekretariat dan Pusluh
November				
1	SMKN 22 Jakarta	Adm Perkantoran dan Teknik Komputer dan Jaringan	10 orang	Sekretariat, Pusluhkum dan Pusedokjarinfokumnas
2	SMK Muhammadiyah 6	Akuntansi	4 orang	Bagian Keuangan
3	SMK Jakarta Timur I	Akuntansi	4 orang	Bagian BMN
4	SMK Taruna BAKTI	Teknik Komputer dan Jaringan	4 orang	Pusedokjarinfokumnas
5	Univ. Sultan Ageng Tirtayasa	Ilmu Komunikasi	1 orang	Bagian umum
Desember				
1	SMK Uswatun Hasanah	Adm Perkantoran dan Akuntansi	14 orang	Sekretariat
2	SMK Bakti 3	Akuntansi	5 orang	Pusluh
3	SMK Merah Putih	Teknik Komputer dan Jaringan	5 orang	Pusedokjarinfokumnas
4	SMK Negeri I Tarumajaya	Teknik Komputer dan Jaringan	2 orang	Pusedokjarinfokumnas

b. Sub Bagian Mutasi dan Administrasi Jabatan Fungsional

1) Menyelesaikan Gaji Berkala :

No	Bulan	Jumlah
1	Bulan Januari	-
2	Bulan Februari	7
3	Bulan Maret	47
4	Bulan April	8
5	Bulan Mei	-
6	Bulan Juni	-
7	Bulan Juli	-
8	Bulan Agustus	-
9	Bulan September	-
10	Bulan Oktober	3
11	Bulan November	3
12	Bulan Desember	39

2) Mengusulkan alih tugas dan promosi jabatan eselon III dan IV di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

3) Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Struktural :

- a) Eselon III = 4 orang
- b) Eselon IV = 8 orang

- 4) Membuat Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Struktural :
- a) Eselon III = 4 orang
 - b) Eselon IV = 8 orang
- 5) Memproses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil :
- a) Golongan III/a = 20 orang
 - b) Golongan II/c = 7 orang
 - c) Golongan II/a = 2 orang
- 6) Membuat Surat Keputusan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil :
- a) Golongan III/d = - orang
 - b) Golongan III/c = 2 orang
 - c) Golongan III/b = 3 orang
 - d) Golongan III/a = 8 orang
 - e) Golongan II/d = 1 orang
 - f) Golongan II/c = - orang
 - g) Golongan II/b = 1 orang
 - h) Golongan II/a = 2 orang
- 7) Memproses Kenaikan Pangkat Pegawai BPHN Periode 01 April 2012 :
- a) Kenaikan pangkat dari IV/d ke IV/e = - orang
 - b) Kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d = - orang
 - c) Kenaikan pangkat dari IV/b ke IV/c = 1 orang
 - d) Kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b = 1 orang
 - e) Kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a = 1 orang
 - f) Kenaikan pangkat dari III/c ke III/d = 3 orang
 - g) Kenaikan pangkat dari III/b ke III/c = 4 orang
 - h) Kenaikan pangkat dari III/a ke III/b = - orang
 - i) Kenaikan pangkat dari II/d ke III/a = 2 orang
 - j) Kenaikan pangkat dari II/c ke III/a = - orang
 - k) Kenaikan pangkat dari II/b ke III/a = - orang
 - l) Kenaikan pangkat dari II/c ke III/a = - orang
 - m) Kenaikan pangkat dari II/a ke II/b = - orang
 - n) Kenaikan pangkat dari II/b ke II/c = - orang
 - o) Kenaikan pangkat dari II/c ke II/d = - orang
- 8) Membuat Kenaikan Pangkat Pegawai periode 1 Oktober 2012 :
- a) Kenaikan pangkat dari IV/d ke IV/e = - orang
 - b) Kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d = - orang
 - c) Kenaikan pangkat dari IV/b ke IV/c = - orang
 - d) Kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b = 1 orang

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| e) Kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a | = | 1 | orang |
| f) Kenaikan pangkat dari III/c ke III/d | = | 4 | orang |
| g) Kenaikan pangkat dari III/b ke III/c | = | 1 | orang |
| h) Kenaikan pangkat dari III/a ke III/b | = | 2 | orang |
| i) Kenaikan pangkat dari II/d ke III/a | = | - | orang |
| j) Kenaikan pangkat dari II/c ke III/a | = | 1 | orang |
| k) Kenaikan pangkat dari II/b ke III/a | = | 5 | orang |
| l) Kenaikan pangkat dari II/d ke II/c | = | - | orang |
| m) Kenaikan pangkat dari II/a ke II/b | = | - | orang |
- 9) Memproses Mutasi pegawai :
- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------|
| a) Dari BPHN ke Kanwil Jabar | = | 1 | orang |
| b) Dari BPHN ke Kantor Ombudsman | = | 1 | orang |
| c) Dari BPHN ke Dirjen HAKI | = | 1 | orang |
| d) Dari Kanwil Babel ke BPHN | = | 1 | orang |
| e) Dari Kanwil HAKI ke BPHN | = | 1 | orang |
| f) Dari Kanwil Sulawesi Barat ke BPHN | = | 1 | orang |
- 10) Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Hukum ke LIPI hasil rapat Tim Penilai Peneliti Instansi :
- a) Unit BPHN
- | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------|
| - Peneliti Utama (Maintenance) | = | 4 | orang |
| - Peneliti Utama | = | - | orang |
| - Peneliti Madya | = | - | orang |
| - Peneliti Muda | = | - | orang |
| - Peneliti Pertama | = | - | orang |
- b) Unit BALITBANG HAM
- | | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| - Peneliti Utama | = | - | orang |
| - Peneliti Madya | = | - | orang |
| - Peneliti Muda | = | - | orang |
| - Peneliti Pertama | = | 2 | orang |
- c) Unit PUSJIANBANG
- | | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| - Peneliti Utama | = | - | orang |
| - Peneliti Madya | = | - | orang |
| - Peneliti Muda | = | 1 | orang |
| - Peneliti Pertama | = | - | orang |
- 11) Memproses Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Hukum setelah mendapat Nota Penetapan Angka Kredit dari Ketua LIPI :
- Unit BPHN

- Peneliti Utama = - orang
- Peneliti Madya = - orang
- Peneliti Muda = - orang
- Peneliti Pertama = 1 orang

12) Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Fungsional Peneliti Hukum

- Peneliti Utama = 1 orang
- Peneliti Madya = - orang
- Peneliti Muda = - orang
- Peneliti Pertama = 1 orang

13) Mengusulkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Hukum

- Peneliti Utama = - orang
- Peneliti Madya = - orang
- Peneliti Muda = - orang
- Peneliti Pertama = 1 orang

14) Mengusulkan Pejabat Fungsional Dokter untuk mendapat Nota Penetapan Angka Kredit dari Menteri Kesehatan RI :

- Dokter Utama (Gol.IV/d, IV/e) = - orang
- Dokter Gigi Utama (Gol. IV/d, IV/e) = - orang
- Dokter Madya (Gol. IV/c) = 1 orang
- Dokter Gigi Madya (Gol. IV/c) = 1 orang

15) Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Fungsional Dokter dan Perawat

- Dokter Gigi Utama = 1 orang
- Perawat Pelaksana = 1 orang
- Perawat Pelaksana Lanjutan = 2 orang

16) Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan :

- Pustakawan Utama (Gol.IV/d, e) = - orang
- Pustakawan Madya (Gol.IV/a,b,c) = - orang
- Pustakawan Muda (Gol. III/c,d) = - orang
- Pustakawan Pertama (Gol.III/a,b) = - orang
- Pustakawan Penyelia (Gol.III/c,d) = - orang

17) Memproses Usul kenaikan tingkat Jabatan Fungsional Pustakawan :

- Pustakawan Utama (Gol.IV/d, e) = - orang
- Pustakawan Madya (Gol.IV/a,b,c) = - orang
- Pustakawan Muda (Gol. III/c,d) = - orang
- Pustakawan Pertama (Gol.III/a,b) = 1 orang

- Pustakawan Penyelia (Gol.III/c,d) = - orang

18) Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Fungsional

Pustakawan

- Pustakawan Utama (Gol.IV/d, e) = - orang
- Pustakawan Madya (Gol.IV/a,b,c) = - orang
- Pustakawan Muda (Gol. III/c,d) = - orang
- Pustakawan Pertama (Gol.III/a,b) = - orang
- Pustakawan Penyelia (Gol.III/c,d) = - orang

19) Memproses Maintenance Jabatan Fungsional Pustakawan Masa Penilaian 1 Januari s/d Desember 2010 Pustakawan Penyelia (Gol.III/d) 11 orang

c. Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun

- 1) Menyelesaikan SK Pensiun pegawai yang pensiun batas usia (masa purna bhakti) untuk tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, 18 (delapan belas) orang golongan IV/a ke bawah, SK pensiun diterbitkan oleh kantor BKN, atas nama :

NO	NAMA	TGL LAHIR	UNIT KERJA	T.M.T	PENSIUN
1	Sutrisna NIP.19551231 197903 1 005	1 -12-1955	Pusdokjarinfokumnas	1 Januari 2012	56 Tahun
2	Karwani,S.Sos NIP.19551212 198003 2 001	12 -12- 1955	Sekretariat	1 Januari 2012	56 Tahun
3.	Dadang Iskandar, S.Sos NIP. 19551220 198003 1 003	20 Desember 1955	Pusrenbangkumnas	1 Januari 2012	56 Tahun
4	Mohammad Djasir, S.Pd NIP.19560115 198103 1 001	15 Januari 1956	Sekretariat	1 Februari 2012	56 Tahun
5	Zaini Gaffar NIP.19560125 197703 1 001	25 Januari 1956	Sekretariat	1 Februari 2012	56 Tahun
6	Marida Taruli S, S.Sos NIP. 19560126 198003 2 001	26 Januari 1956	Sekretariat	1 Februari 2012	56 Tahun
7	Siti Ruchayah NIP. 19560220 198003 2 001	20 Februari 1956	Pusdokjarinfokumnas	1 Maret 2012	56 Tahun
8	M.Syarif Baharudin, S.Sos NIP.19560229 198012 1 002	29 Februari 1956	Sekretariat	1 Maret 2012	56 Tahun
9.	Tukini NIP.19560308 197902 2 001	8 Maret 1956	Sekretariat	1 April 2012	56 Tahun
10.	Imran Gunawan, SH., MH NIP.19560406 199103 1 001	6 April 1956	Pusdokjarinfokumnas	1 Mei 2012	56 Tahun
11.	Sri Mulyono NIP.19560424 197711 1 001	24 April 1956	Sekretariat	1 Mei 2012	56 Tahun
12.	Yulinarti, S.Sos NIP.19560701 197903 2	1 Juli 1956	Sekretariat	1 Agustus 2012	56 Tahun

	001				
13.	Imam Sumadi NIP.19560915 198103 1 001	15-Sep-1956	Sekretariat	1 Oktober 2012	56 Tahun
14.	Purwono NIP.19561007 197902 1 001	7 Oktober 1956	Puslitbangsiskumnas	1 Nopember 2012	56 Tahun
15	Erna Tuti NIP.19561010 197903 2 001	10 Oktober 1956	Puslitbangsiskumnas	1 Nopember 2012	56 Tahun
16	Sunardi NIP.195211015197703 1 001	15 Oktober 1952	Pusdokjarinfokumnas	1 Nopember 2012	60 Tahun
17	Srie Hudyati,S.H NIP.19561024 197903 2 001	24 Oktober 1956	Puslitbangsiskumnas	1 Nopember 2012	56 Tahun
18	Suhanda NIP. 19561018 198503 1 001	18 Oktober 1956	Sekretariat	1 Nopember 2012	

- 2) BPHN Gol. IV/b ke atas yang menerbitkan adalah Setneg sebanyak 4 (empat) orang :
- a) 1 (satu) orang sudah menerima SK Pensiun atas nama :
 - Drs. Sularto, SH., M.Si : Selesai (TMT Pensiun 1 April 2012)
 - b) 3 (tiga) orang sedang dalam proses, atas nama :
 - Wakidi, SH : Proses di Setneg RI (TMT Pensiun 1 Oktober 2012)
 - Prof. Jeane Neltje Sally, SH., MH : Proses di BKN (TMT Pensiun Desember 2012)
 - Noor Muhammad Aziz, SH., MH., MM : Proses di BKN (TMT Pensiun 1 Desember 2012)
- 3) Menyelesaikan surat pemberian MPP (Masa Persiapan Pensiun) kepada pegawai/ pejabat BPHN yang mengambil MPP sebanyak 1 (satu) orang, atas nama : Imran Gunawan, SH., MH : Pusdokjarinfokumnas
- 4) Menyelesaikan surat Pemberitahuan Pemberhentian kepada pegawai/ pejabat BPHN karena telah mencapai Batas Usia Pensiun sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- 5) Pegawai/ Pejabat BPHN untuk Gol. IV/a ke bawah yang akan pensiun sedang dalam proses di BKN dan sudah aplikasi SAPK sebanyak 11 (sebelas) orang.
- 6) Pegawai/ Pejabat BPHN untuk Gol. IV/b ke atas yang akan pensiun sedang dalam proses di Sekjen dan sudah aplikasi SAPK sebanyak 5 (lima) orang.
- 7) Pegawai BPHN yang sudah menerima SK Pensiun Masa Purna Bhakti Tahun 2013 diterbitkan oleh BKN sebanyak 7 (tujuh) orang, atas nama :
- 8) Menerima dan memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya yang telah mengabdikan dan bekerja terus-menerus selama 10, 20 dan 30 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang untuk tahun 2012 dari Presiden RI, atas nama :

No	Nama	Pangkat / Golongan	Masa Kerja
1	Ajarotun Nasution, SH., MH NIP. 19531005 197903 1 002	Pembina Utama Madya – IV/d	30 tahun
2	Wakidi, SH NIP. 19520912 197902 1 001	Pembina Tk.I – IV/b	30 tahun
3	Saud Halomoan, SH., MH NIP. 19601126 198211 1 001	Pembina – IV/a	30 tahun
4	Fawahid Haider, SH NIP. 19621221 198203 1 001	Penata – III/c	30 tahun
5	Jawardi, SH., MH NIP. 19620707 199103 1 001	Pembina – IV/a	20 tahun
6	Heny Andayani, SH., M.Si NIP. 19740424 199903 2 001	Penata – III/c	10 tahun
7	Heny Indrawati, A.Md NIP. 19720113 199903 2 001	Penata Muda – III/a	10 tahun

- 9) nama pegawai/pejabat BPHN untuk tahun 2013 ke Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya yang telah mengabdikan dan bekerja terus-menerus selama 10, 20 dan 30 tahun sebanyak 6 (enam) orang, atas nama :

No	Nama	Pangkat / Golongan	Masa Kerja
1	Sadikin, SH., MH NIP. 19550713 198102 1 001	Pembina Utama Madya – IV/d	30 tahun
2	Drs. Abdullah, SH NIP. 19590406 198012 1 002	Pembina Tk.I – IV/b	30 tahun
3	Boy Mervin Tobing NIP. 19620414 198012 1 001	Penata Muda Tk.I – III/b	30 tahun
4	Hajerati, SH., MH NIP. 19630309 199203 2 001	Pembina Tk.I – IV/b	20 tahun
5	Rachmat Trijono, SH., MH NIP. 19641116 199103 1 001	Pembina Tk.I – IV/b	20 tahun
6	Arief Rudianto, S.Ag., M.Si NIP. 19680207 199903 1 001	Penata Tk.I – III/d	10 tahun

- 10) Menerima dan memberikan Piagam Penghargaan Purna Pengayoman kepada pegawai/pejabat BPHN tahun 2012 sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 11) Yang belum mendapatkan Piagam Penghargaan Purna Pengayoman sebanyak 8 (delapan) orang.
- 12) Menerima surat panggilan peserta Kegiatan Workshop Kewirausahaan dan Pembekalan Mental dari Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM RI bagi pegawai BPHN yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- 13) Memproses Pertambahan Keluarga pegawai BPHN untuk mendapatkan tunjangan sebanyak 11 (sebelas) orang

- 14) Mengadakan kerjasama pembuatan Kartu Peserta Askes dengan PT. Askes (Persero) Cabang Rawamangun di kantor BPHN pada tanggal 28 s.d 30 Maret 2012.
- 15) Mengusulkan daftar isian peserta program Jamkesmasmen/ Askes.
- 16) Memproses penggantian Kartu TASPEN yang hilang dan kesalahan nama/NIP pegawai BPHN sebanyak 3 (tiga) orang.
- 17) Memproses penggantian SK Konversi karena kesalahan nama dan NIP baru ke kantor BKN.
- 18) Memproses penggantian Kartu Pegawai BPHN yang hilang sebanyak 4 (empat) orang.
- 19) Memproses pembuatan Karis / Karsu pegawai/ pejabat BPHN ke Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
- 20) Mengerjakan surat keluar pada sub pemberhentian dan pensiun sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat dan menerima surat masuk sebanyak 65 (enam puluh lima) surat.
- 21) Menerima dan mendistribusikan Kartu Peserta TASPEN pegawai BPHN dari PT. Taspen (Persero) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- 22) Memproses usulan pegawai/pejabat BPHN ke kantor Taspen untuk mendapatkan uang duka karena keluarganya meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang.
- 23) Memproses Hukuman Disiplin Pegawai BPHN sebanyak 2 (dua) orang.
- 24) Membuat Surat Izin Cuti

3. Bagian Keuangan

Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2012, Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BPHN

Selama bulan Januari sampai dengan pertengahan Desember 2012 telah dilakukan pembayaran gaji, uang makan dan uang lembur pegawai, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Gaji Pegawai untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Jumlah Pegawai
1.	Januari	290
2.	Februari	284
3.	Maret	282
4.	April	280
5.	Mei	277
6.	Juni	278

7.	Juli	277
8.	Agustus	274
9.	September	274
10.	Oktober	272
11.	November	266
13.	Gaji ke-13	277

2) Pembayaran Uang Makan Pegawai untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Jumlah Pegawai
1.	Januari	280
2.	Februari	277
3.	Maret	277
4.	April	271
5.	Mei	270
6.	Juni	266
7.	Juli	269
8.	Agustus	267
9.	September	270
10.	Oktober	267
11.	November	259
12.	Desember	260

3) Pembayaran Uang Lembur Pegawai untuk lembur hari kerja dan lembur hari libur periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

N0.	Periode Lembur	Jumlah Pegawai Lembur	
		Hari Kerja	Hari Libur
1.	Januari	22	14
2.	Februari	25	25
3.	Maret	25	25
4.	April	38	38
5.	Mei	40	40
6.	Juni	36	36
7.	Juli	38	38
8.	Agustus	50	50
9.	September	48	48
10.	Oktober	43	43

11.	November	45	45
12.	Desember	37	37

b. Penatausahaan keuangan BPHN

Selama periode Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2012 Bagian Keuangan telah melakukan penatausahaan Keuangan BPHN yang meliputi :

- 1) Pencairan dana seluruh kegiatan BPHN yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2012
- 2) Perencanaan kas periode Januari sampai dengan Desember 2012.
- 3) Penatausahaan SPP, SPM, dan SP2D masing-masing sebanyak 489 buah
- 4) Penatausahaan 268 SSP
- 5) Penatausahaan 47 SSBP dan 32 SSPB
- 6) Penatausahaan Monitoring Realisasi Anggaran kegiatan Pusat-Pusat dan Sekretariat di BPHN selama periode Januari sampai dengan Desember 2012.
- 7) Penatausahaan kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban kegiatan Pusat-Pusat dan Sekretariat di BPHN selama periode Januari sampai dengan Desember 2012.

c. Rekonsiliasi Data Keuangan BPHN

Selama Tahun Anggaran 2012 BPHN telah melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan dengan KPPN Jakarta V untuk periode Januari s/d Desember, yaitu dengan melakukan proses pencocokan data antara data SAI (BPHN) dengan data SAU (KPPN Jakarta V) untuk periode Januari s/d Desember 2012.

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Januari 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik untuk DIPA, dan Neraca sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih terdapat perbedaan antara data SAI dengan SAU dikarenakan adanya perubahan sistem aplikasi yang terdapat pada KPPN Jakarta V. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Januari 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 1.083.416.467,- atau 2,32% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Februari 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 29 Februari 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 2.321.100.492,- atau 4,97% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Maret 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik

untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Maret 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 4.812.619.055,- atau 10,31% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode April 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 30 April 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 8.607.584.542,- atau 18,45% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Mei 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Mei 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 10.625.015.031,- atau 22,77% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Juni 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 30 Juni 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 17.612.346.345,- atau 37,74% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Juli 2012 adalah Terdapat perbedaan nihil antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp. 0,- baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Juli 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 19.681.374.100,- atau 42,18% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Agustus 2012 adalah Nilai antara data SAU dengan data SAI telah SAMA baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Agustus 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 23.387.417.158,- atau 50,12% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode September 2012 adalah Nilai antara data SAU dengan data SAI telah SAMA baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan,

sampai dengan 30 September 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 25.421.305.259,- atau 54,48% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Oktober 2012 adalah Nilai antara data SAU dengan data SAI telah SAMA baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Oktober 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 29.513.396.261,- atau 63,25% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode November 2012 adalah Nilai antara data SAU dengan data SAI telah SAMA baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 30 November 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 33.688.405.567,- atau 72,19% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-

Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan untuk periode Desember 2012 adalah Nilai antara data SAU dengan data SAI telah SAMA baik untuk DIPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Neraca. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data keuangan, sampai dengan 31 Desember 2012 Anggaran Belanja BPHN telah terealisasi sebesar Rp. 40.435.528.642,- atau 86,65% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 46.664.761.000,-.

d. Penyusunan Laporan PNBPN BPHN

Sampai dengan periode akhir bulan Desember 2012, PNBPN yang dihasilkan BPHN terdiri dari :

PNBPN Bulan Januari :

MAP	Jenis PNBPN	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.030.372
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	48.221.000
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	5.000.000
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		55.451.372

PNBPN Bulan Februari :

MAP	Jenis PNBPN	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	557.870
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	555.175
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	10.803.000

423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		12.116.045

PNBP Bulan Maret :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.600.000
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	542.768
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		21.342.768

PNBP Bulan April :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	542.768
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	5.703.000
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		6.716.744

PNBP Bulan Mei :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	542.768
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		1.013.744

PNBP Bulan Juni :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	542.768
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	4.521.445
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		5.535.189

PNBP Bulan Juli :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	588.074
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang	200.000

	Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	
Total		1.059.050

PNBP Bulan Agustus :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	557.870
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	4.472.445
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		5.501.291

PNBP Bulan September :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	536.894
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		1.007.870

PNBP Bulan Oktober :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.536.894
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	270.976
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	4.619.445
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	200.000
Total		7.627.315

PNBP Bulan Nopember

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	500.816
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	348.921
Total		849.737

PNBP Bulan Desember :

MAP	Jenis PNBP	Jumlah
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	500.816
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	348.921
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	4.570.445
Total		5.420.182

Realisasi Anggaran
Tanggal 1 Januari S/D 31 Desember 2012
Badan Pembinaan Hukum Nasional

No.	Uraian	DIPA	DIPA REVISI	REALISASI BELANJA		SISA DANA
				Rp.	%	
1.	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	25.113.380.000,-	25.113.380.000,-	24.449.020.941,-	97,35	664.359.059,-
	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	1.296.554.000,-	1.296.554.000,-	1.283.601.100,-	99,00	12.952.900,-
	Dokumen Perencanaan, Pengelolaan Anggaran dan Laporan LAKIP	1.568.852.000,-	1.568.852.000,-	1.549.403.210,-	98,76	19.448.790,-
	Layanan Perkantoran	17.071.551.000,-	17.071.551.000,-	16.456.250.182,-	96,40	615.300.818,-
	Layanan Perkantoran	4.800.939.000,-	4.800.939.000,-	4.796.204.149,-	99,90	4.734.851,-
	Layanan BMN dan Layanan Perkantoran	375.484.000,-	375.484.000,-	363.562.300,-	96,62	11.921.700,-
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Anggota JDIIH	2.284.660.000,-	2.284.660.000,-	1.915.139.215,-	83,83	369.520.785,-
	Database Hukum Nasional	1.672.287.000,-	1.672.287.000,-	1.323.388.815,-	79,14	348.898.185,-
		288.231.000,-	288.231.000,-	278.829.850,-	96,74	9.401.150,-
No.	Uraian	DIPA	DIPA REVISI	REALISASI BELANJA		SISA DANA
				Rp.	%	
	Pengelola dan Pengelolaan Bahan Pustaka	324.142.000,-	324.142.000,-	312.920.550,-	96,54	11.221.450,-
3.	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional	5.500.000.000,-	5.500.000.000,-	3.403.531.773,-	61,88	2.096.468.227,-
	Rekomendasi Penelitian Dibidang Substansi Hukum Nasional	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	1.155.441.275,-	57,77	844.558.725,-
	Rekomendasi Penelitian dibidang Kelembagaan Hukum Nasional	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	868.955.874,-	57,93	631.044.126,-
	Rekomendasi Penelitian dibidang Budaya Hukum Nasional	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	909.765.070,-	60,65	590.234.940,-
	Pengujian Kompetensi Tenaga Peneliti Hukum	500.000.000,-	500.000.000,-	469.369.554,-	93,87	30.630.446,-
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional	7.266.721.000,-	7.266.721.000,-	6.212.888.254,-	85,50	1.053.832.746,-
	Pemetaan Kelompok KADARKUM dan Desa Sadar Hukum	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	1.724.185.162,-	86,21	275.814.838,-
	Jumlah Penyuluhan Hukum	750.000.000,-	750.000.000,-	658.207.650,-	87,76	91.792.350,-
5.	Pembentukan dan Pemberdayaan Unit Pelayanan Hukum	4.516.721.000,-	4.516.721.000,-	3.830.495.442,-	84,81	686.225.558,-
	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan serta Kerjasama Bidang Hukum Dalam Rangka Pembinaan	6.500.000.000,-	6.500.000.000,-	4.454.948.459,-	68,54	2.045.051.541,-
	Dokumen PPHN dan Prolegnas	2.500.000.000,-	2.500.000.000,-	1.739.139.364,-	69,57	760.860.636,-
	Dokumen Prolegnas Naskah Akademik RUU/Rekomendasi Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	1.383.155.915,-	69,16	616.844.085,-
		2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	1.332.653.180,-	66,63	667.346.820,-
Jumlah		46.664.761.000,-	46.664.761.000,-	40.435.528.642,-	86,65	6.229.232.358,-

4. Bagian Umum

Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2012, Bagian umum telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan

1) Surat Masuk

Dari bulan Januari s.d Desember 2012 (sampai disusunnya laporan ini) surat masuk sebanyak 3.660 surat, baik surat yang bersifat Fasilitatif maupun Substantif.

Surat dari Kanwil	=	933 surat
Surat dari Kementerian Hukum dan HAM	=	801 surat
Surat dari Kementerian lainnya	=	759 surat
Pribadi	=	952 surat
Buku / Majalah	=	215 exp

Terkait dengan hal ini surat telah digandakan dan di scan sebagai back up, surat asli dan lampirannya telah didistribusikan dengan cepat dan akurat kepada alamat yang dituju di lingkungan BPHN.

2) Surat Keluar

Pemberian nomor surat pada surat keluar selama 12 bulan, sampai dengan bulan Desember 2012 berjumlah 3.959 surat dengan perincian :

1) Kepala BPHN (PHN) :	648	nomor
PHN - DL	=	68 surat
PHN - HM	=	9 surat
PHN - IN	=	2 surat
PHN - KP	=	72 surat
PHN - KU	=	12 surat
PHN - OT	=	61 surat
PHN - PL	=	6 surat
PHN - PR	=	14 surat
PHN - PW	=	1 surat
PHN - UM	=	65 surat
PHN - HN	=	316 surat
PHN - LT	=	22 surat
2) Sekretariat (PHN.1) :	2.246	nomor
PHN.1 - DL	=	179 surat
PHN.1 - HM	=	13 surat
PHN.1 - IN	=	9 surat
PHN.1 - KP	=	1007 surat
PHN.1 - KU	=	46 surat
PHN.1 - OT	=	15 surat
PHN.1 - PL	=	680 surat
PHN.1 - PR	=	58 surat
PHN.1 - PW	=	5 surat

PHN.1 - UM	=	226	surat
PHN.1 - HN	=	8	surat
PHN.1 - LT	=	0	surat
3) Puslitbangkum (PHN.2) :		205	nomor
PHN.2 - DL	=	31	surat
PHN.2 - HM	=	1	surat
PHN.2 - IN	=	0	surat
PHN.2 - KP	=	13	surat
PHN.2 - KU	=	1	surat
PHN.2 - OT	=	1	surat
PHN.2 - PL	=	0	surat
PHN.2 - PR	=	8	surat
PHN.2 - PW	=	0	surat
PHN.2 - UM	=	107	surat
PHN.2 - HN	=	3	surat
PHN.2 - LT	=	40	surat
4) Pusrenkumnas (PHN.3) :		287	nomor
PHN.3 - DL	=	21	surat
PHN.3 - HM	=	3	surat
PHN.3 - IN	=	0	surat
PHN.3 - KP	=	30	surat
PHN.3 - KU	=	4	surat
PHN.3 - OT	=	0	surat
PHN.3 - PL	=	3	surat
PHN.3 - PR	=	13	surat
PHN.3 - PW	=	0	surat
PHN.3 - UM	=	162	surat
PHN.3 - HN	=	51	surat
PHN.3 - LT	=	0	surat
5) Pusedokkumnas (PHN.4) :		285	nomor
PHN.4 - DL	=	20	surat
PHN.4 - HM	=	3	surat
PHN.4 - IN	=	14	surat
PHN.4 - KP	=	71	surat
PHN.4 - KU	=	4	surat
PHN.4 - OT	=	2	surat
PHN.4 - PL	=	1	surat

PHN.4 - PR	=	10	surat
PHN.4 - PW	=	2	surat
PHN.4 - UM	=	107	surat
PHN.4 - HN	=	51	surat
PHN.4 - LT	=	0	surat
6) Pusluhkum (PHN.5) :		288	nomor
PHN.5 - DL	=	7	surat
PHN.5 - HM	=	1	surat
PHN.5 - IN	=	2	surat
PHN.5 - KP	=	113	surat
PHN.5 - KU	=	9	surat
PHN.5 - OT	=	1	surat
PHN.5 - PL	=	2	surat
PHN.5 - PR	=	17	surat
PHN.5 - PW	=	1	surat
PHN.5 - UM	=	100	surat
PHN.5 - HN	=	35	surat
PHN.5 - LT	=	0	surat

3) Pengiriman surat keluar untuk instansi diluar BPHN :

Pengiriman surat keluar untuk instansi diluar BPHN yang melalui sub bagian tata usaha telah dilaksanakan sesuai dengan sifat surat dan alamat yang dituju, dengan rincian sebagai berikut :

- Langsung	=	218	surat
- Melalui Pos	=	133	surat

Jumlah = 351 surat

4) Pengelolaan Arsip

Arsip Fasilitatif

a) Arsip Surat Masuk

- Scan surat masuk dari bulan Januari 2012 s.d Desember 2012
- Menata hasil fotocopy surat masuk tahun 2012
- Pengetikan daftar pertelaan surat masuk dari bulan Januari 2012 s.d Desember 2012

b) Arsip Surat Keluar

- Menyusun dan menata arsip surat keluar dari bulan Januari s.d Desember 2012 kedalam filling kabinet arsip dalam bentuk klasifikasi menurut kode klasifikasi arsip yang berlaku

- Pengetikan Pertelaan Arsip surat keluar tahun 2012

Arsip Substantif

- Inventarisasi daftar kegiatan dari tahun 2011
- Pengumpulan Arsip substantif hardcopy dan softcopy kegiatan tahun 2011
- Penyimpanan arsip substantif BPHN tahun 2011 kedalam box arsip
- Pengetikan Daftar Pertelaan arsip Substantif tahun 2011

5) Penggandaan

Dari bulan Januari s.d Desember 2012 telah melaksanakan penggandaan untuk kepentingan sekretariat maupun dukungan kegiatan pada pusat - pusat di BPHN sebanyak 43.515 lembar.

b. Sub Bagian Rumah Tangga

No	Kegiatan
1	Mengadakan perawatan sarana dan prasarana
2	Memberikan pelayanan kesehatan
3	Perawatan Kendaraan Dinas

c. Sub Bagian Humas

No	Kegiatan
1	Menginformasikan berupa pengumuman
2	Meliput kegiatan BPHN
3	Pengurusan exit permit Ka BPHN dan pegawai BPHN Hukum
4	Mempublikasikan Kegiatan BPHN dan menerbitkan Buletin BPHN
5	Mengumpulkan data kegiatan BPHN berupa Informasi Kepegawaian Tahun 2012, Laporan Tahunan BPHN, Laporan Keuangan, Laporan BMN dan LAKIP Tahun 2011

d. Pada Bagian Umum terdapat 2 (dua) kegiatan penunjang kinerja Bagian Umum, yaitu :

1) Tim Kerja Penerbitan Warta Kehumasan

Warta kehumasan terbit setiap tiga bulan sekali, untuk tahun 2012 warta kehumasan telah terbit empat kali, sedangkan isi dari warta kehumasan adalah liputan dari kegiatan BPHN selama tahun 2012.

2) Tim Pengelola Informasi Publik

Kegiatan tim pengelola informasi public berdasarkan Keputusan Kepala BPHN Nomor : PHN- 2-HN.04,02 Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012, yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana serta informasi yang diperlukan oleh publik.

Kegiatan tim ini telah menyiapkan sarana dan prasarana serta telah menyiapkan informasi tentang BPHN berupa laporan kegiatan tahun 2011, laporan tahunan BPHN, laporan keuangan BPHN tahun 2011, Laporan BMN dan Informasi kepegawaian BPHN serta telah mengelompokkan jenis informasi baik informasi setiap saat dan informasi berkala.

Tim kerja pengelola informasi publik telah mengadakan konsolidasi dari seluruh anggota dan selama semester pertama Tim kerja telah memberikan informasi kepada publik yang meminta informasi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama menanyakan informasi kegiatan BPHN yang berkaitan dengan Paten dan telah dicarikan informasi tersebut dan yang kedua menanyakan masalah Hukum (Pidana Militer dan koneksitasnya) dan telah diarahkan kepada Bapak Suharyo yang menjelaskan masalah tersebut dalam bentuk wawancara dan yang ketiga menanyakan masalah teknis pembuatan Naskah Akademis untuk Perda (Bengkulu).

5. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan bagian pengelolaan Barang Negara dilakukan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional
 - 1) Mengadakan rapat 4 kali di tahun 2012
 - 2) Menerima dan menandatangani berita acara serah terima kegiatan/pekerjaan:
 - 3) Tentang pengadaan jasa sewa koneksi internet (29 Februari 2012)
 - 4) Tentang pemeliharaan/service dan perawatan AC sentral *cooling tower* dan pompa *cooling tower* (29 Februari 2012)
 - 5) Tentang pengadaan ATK rutin untuk kegiatan BPHN (22 Maret 2012)
 - 6) Melakukan penyaluran Barang Milik Negara kesetiap bagian dalam sekretariat dan pusat.
 - 7) Menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang ATK.
 - 8) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan perbaikan dan pengadaan.
 - 9) Berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan
- b. Panitia Penjualan Lelang/penghapusan Barang Milik Negara
 - 1) Telah melakukan rapat tim 5 kali pada tahun 2012
 - 2) Telah terlaksananya penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda 2 dengan jumlah 10 unit dan kendaraan bermotor roda 4 dengan jumlah 2 unit. Lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2012.
 - 3) Telah melakukan penataan Barang Milik Negara yang tidak layak pakai sehingga di kemudian hari rencana penghapusan Barang Milik Negara dapat dilakukan.
- c. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara
 - 1) Telah melakukan registrasi dan penomoran Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional baik yang lama dan baru;
 - 2) Barang Milik Negara yang telah diberikan nomor sudah dimasukkan (*input*) kedalam aplikasi SIMAK BMN;

- 3) Barang Milik Negara yang berasal dari panitia pengadaan Sekretariat Jenderal telah dimasukkan (*input*) kedalam aplikasi SIMAK BMN;
- 4) Mempersiapkan data untuk rekonsiliasi dengan bagian Keuangan.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian Dan Penelitian Serta Pertemuan Ilmiah

Pada tahun 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional telah tercapai kegiatan sebagai berikut :

a. Pengkajian Hukum

Berdasarkan pola pikir dan kerangka pembangunan hukum yang disusun oleh BPHN kegiatan pengkajian adalah kegiatan penginventarisasian berbagai permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat, oleh karena itu tinjauannya bersifat inter dan multi disipliner.

Dalam pengkajian harus dapat diidentifikasi berbagai dimensi masalah yang meliputi aspek teknologi, sosial, manajerial politik, ekonomi, agama, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Dari pengkajian tersebut dapat tersimpulkan cara bagaimana kita sebaiknya mengatasi masalah hukum yang kita hadapi, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana dan prasarana yang diperlukan.

Karenanya sebagian besar dari pengkajian hukum justru dimaksudkan untuk mengkaji :

- 1) Masalah-masalah hukum apa yang terjadi di dalam masyarakat, dan bagaimana mengatasinya;
- 2) Bagaimana kita dapat dan harus mewujudkan dan menyempurnakan Sistem Hukum Nasional kita, yang mencakup Substansi Hukum, Materi Hukum, Lembaga dan Aparatur serta Sarana dan Prasarana Hukum;
- 3) Bagaimana kita dapat mempercepat proses pembangunan hukum;
- 4) bagaimana kita harus merencanakan pembangunan hukum Nasional kita dan menyusun Rencana Pembangunan hukum Nasional jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

Dalam kaitannya dengan pembentukan materi hukum jika hasil pengkajian menyimpulkan, bahwa diperlukan peraturan atau pranata atau hukum yang baru, maka dilakukan penelitian yang lebih menekankan pada penelitian normatif, yang digabung dengan pendekatan sosio-legal dan perbandingan hukum.

Kegiatan Pengkajian Hukum yang dilaksanakan pada tahun 2012 ada 9 (sembilan), terpilah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) Struktur Hukum
- 2) Budaya Hukum Dan Kemasyarakatan
- 3) Substansi Hukum

b. Penelitian Hukum

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan data atau informasi, dan / atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa, sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala alam atau sosial. Bertolak dari pengertian penelitian tersebut, maka penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses gejala sosial tentang aspek-aspek hukum dari materi yang diteliti.

Data dan informasi itu dapat berupa aspek-aspek hukum dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap suatu materi yang telah diatur, atau dapat pula berupa aspek-aspek hukum kebutuhan hukum baru masyarakat terhadap materi yang belum pernah diatur.

Peranan penelitian hukum sangat penting dalam proses pembangunan hukum mengingat untuk mewujudkan *Good Governance*, salah satu parameternya adalah adanya partisipasi dan sikap yang responsif yang bisa dicapai dengan baik bila menempatkan penelitian sebagai sebuah keniscayaan dalam proses awal legislasi. *Good governance* menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Dengan penelitian bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, dan karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat. Puslitbang BPHN adalah Jembatan untuk mewujudkan hal ini.

Kegiatan Penelitian Hukum dapat dipilah sebagai berikut :

- a) Struktur Hukum
- b) Budaya Hukum Dan Kemasyarakatan
- c) Substansi Hukum

8. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis, perencanaan pembangunan hukum, analisa dan evaluasi dan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan serta kerjasama bidang hukum

a. Capaian kinerja pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional secara terintegrasi untuk jangka panjang, menengah dan tahunan :

Target penyusunan PPHN pada Tapkin tahun 2012 adalah 1 (satu) dokumen lanjutan perencanaan pembangunan hukum nasional (PPHN) sebagai bahan *background study* RPJMN III (2015-2019) Bidang Hukum. Penyusunan dokumen lanjutan PPHN ini dilakukan melalui tiga kegiatan program yang masing-masing kegiatan program terdiri dari beberapa tahap kegiatan pendukung.

1) Penyusunan PPHN yang berdimensi nasional (bobot: 50%)

Capaian yang telah dilaksanakan sampai Desember 2012 :

Penyusunan PPHN yang berdimensi nasional sampai Desember 2012 telah mencapai 100% dari bobot 50%, dengan uraian:

- a) Telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali FGD PPHN (capaian: 100% dari bobot 50%);
- b) Telah dilaksanakan dua kali Konsinyasi PPHN (capaian: 100% dari bobot 25%).
- c) Telah dilaksanakan Dialog Nasional PPHN di Bali (capaian: 100% dari bobot 25%).

2) Penyusunan PPHN yang berdimensi kedaerahan (bobot: 25%)

Capaian yang telah dilaksanakan sampai Desember 2012:

Penyusunan PPHN yang berdimensi kedaerahan sampai Desember 2012 telah mencapai 92,83% dari bobot 25%, dengan uraian:

- a) Telah terinventarisir data peta permasalahan hukum di 27 Provinsi (capaian: 82% dari bobot 70%);
- b) Pelaksanaan monitoring/pemantauan peta permasalahan hukum telah dilaksanakan ke 7 (tujuh) Provinsi (capaian: 87,5% dari bobot 15%);
- c) Telah dibuat aplikasi tampilan peta permasalahan hukum yang akan dimuat dalam website BPHN (capaian: 100% dari bobot 10%);
- d) Penyebarluasan hasil peta permasalahan hukum baru dapat dilaksanakan setelah tersusunnya laporan akhir pada akhir tahun 2012 (capaian: masih 0%);
- e) Bintek pedoman penyusunan peta permasalahan hukum dialihkan menjadi Bintek penyusunan Naskah Akademik, dengan pertimbangan bintek penyusunan NA dianggap lebih urgent.

3) Penyusunan PPHN yang berdimensi Internasional (bobot: 25%)

Capaian yang telah dilaksanakan sampai Desember 2012:

Penyusunan PPHN yang berdimensi Internasional sampai Desember 2012 telah mencapai 100% dari bobot 25%, dengan uraian:

- Telah melaksanakan tiga kali forum harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional (capaian: 100% dari bobot 75%);

Secara keseluruhan, penyusunan dokumen lanjutan PPHN sampai November 2012 telah mencapai 98,2% (uraian: PPHN berdimensi nasional: 50% + PPHN berdimensi kedaerahan 23,2% + PPHN berdimensi Internasional 25%).

9. Capaian kinerja penyusunan kebutuhan legislasi di tingkat pusat dan daerah yang terintegrasi dengan Prolegnas untuk jangka menengah dan tahunan:

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan dengan beberapa kegiatan pendukung, yaitu :

- a. Tim Pengarah dan Antarkementerian Prolegnas;

- b. Tim Forum Komunikasi Prolegnas dengan masyarakat;
- c. Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas;
- d. Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas dengan BALEG DPR;
- e. Tim Monitoring dan Evaluasi Prolegnas.

Capaian yang telah dilaksanakan sampai Desember 2012:

Penyusunan daftar Prolegnas tahun 2013 usulan Pemerintah telah mencapai 100%, dengan uraian:

- 1) Tim Pengarah dan antarkementerian telah melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 (capaian: 100% dari bobot 50% = 25%).
- 2) Tim Forum Komunikasi telah melakukan diskusi melalui rapat-rapat dan FGD mengenai rencana legislasi bidang ketenagakerjaan dan agraria (capaian: 100% dari bobot 20% = 20%).
- 3) Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Usulan Pemerintah dilaksanakan (capaian: 100% dari bobot 30% = 30%).
- 4) Telah dilaksanakan Forum Koordinasi Pemerintah dan Baleg DPR yang menghasilkan Prolegnas 2013 (capaian: 100%).
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas Prioritas 2012 hingga akhir tahun 2012 telah mencapai 100%, Fasilitasi Prolegda dilakukan dengan kegiatan 4 (empat) sub kegiatan yang menunjang kegiatan penyusunan Prolegda di BPHN, yaitu :
 - a) Inventarisasi Prolegda di 33 provinsi
 - b) Forum Komunikasi Regulasi Daerah (FKRD) untuk Indonesia wilayah Barat
 - c) Forum Komunikasi Regulasi Daerah (FKRD) untuk Indonesia wilayah Tengah dan Timur
 - d) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Prolegda di 7 (tujuh) daerah
 - e) Bintek Penyusunan Prolegda
 - f) Target pelaksanaan kegiatan :
- 6) diperoleh data Prolegda dari 33 Provinsi (bobot: 40%)
- 7) terselenggaranya FKRD wilayah Barat (bobot: 20%)
- 8) terselenggaranya FKRD wilayah Tengah dan Timur (bobot:20%)
- 9) terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan Prolegda di 7 daerah, yaitu: Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Jambi, Bengkulu dan Pontianak. Kegiatan ini dilakukan dengan inventarisasi prolegda di 7 daerah tersebut, monitoring langsung ke 7 daerah, monitoring langsung ke tujuh daerah, dan evaluasi hasil monitoring di tujuh daerah tersebut (bobot:100%)

- 10) Terselanggaranya Bintek penyusunan Prolegda bagi stakeholder di daerah (bobot:10%)
- 11) Capaian yang telah dilaksanakan sampai November 2012 untuk dokumen prolegda adalah sebanyak **95%** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Telah diperoleh data Prolegda dari 29 provinsi (capaian 87,87% dari bobot 40% = 35%).
 - b) Telah dilaksanakan FKRD untuk wilayah Barat di Padang bulan Mei 2012 (capaian: 100% dari bobot 20% = 20%).
 - c) Telah dilaksanakan FKRD untuk wilayah Tengah dan Timur di Palangkaraya bulan April 2012 (capaian: 100% dari bobot 20% = 20%).
 - d) Telah dilaksanakan monitoring Prolegda di 7 (tujuh) propinsi dari 7 Propinsi (capaian: 100% dari bobot 10% = 10%).
 - e) Telah terlaksana Bintek penyusunan Prolegda pada bulan Februari 2012 (capaian: 100% dari bobot 10% = 10%).
10. Capaian kinerja penyusunan naskah akademik RUU sebagai bahan pendukung penyusunan RUU dalam Prolegnas di lingkungan Pemerintah:

Target pelaksanaan kegiatan: tersusunnya naskah yang terdiri dari 10 pokja NA pada tahun 2012, untuk mencapai 60% (76 naskah).

Setiap Pokja penyusunan NA melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu :

 - a. tiga kali diskusi publik, yang dilaksanakan setelah draf NA sudah tersusun minimal 65%. Diskusi publik dimaksudkan untuk menampung masukan dari para stakeholder RUU terkait.
 - b. satu kali konsinyasi, yang dilaksanakan setelah dua kali diskusi publik (yaitu sekitar 90%) untuk finalisasi laporan.

Capaian yang telah dilaksanakan sampai Desember 2012 telah mencapai 96,3%, dengan uraian sebagai berikut :

 - 1) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Landas Kontinen, sudah melaksanakan diskusi publik dua kali dan konsinyasi (capaian: 99%).
 - 2) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Paten, sudah melaksanakan dua kali diskusi publik (capaian: 99%).
 - 3) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Kontrak, sudah melaksanakan diskusi publik I (capaian: 99%).
 - 4) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Pemasyarakatan, sudah melakukan identifikasi masalah, pengelompokan konsepsi substansi yang diatur dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada (capaian: 70%).
 - 5) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Perdata (*Small-Claim Court*), sudah melaksanakan diskusi publik II (capaian: 99%).

- 6) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, sudah melaksanakan dua kali diskusi publik (capaian: 100%).
 - 7) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Di Bidang Pidana telah melaksanakan diskusi publik I (capaian:99%);
 - 8) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Merek, sudah melaksanakan tiga kali diskusi publik (capaian: 100%).
 - 9) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sudah melaksanakan dua kali diskusi publik (capaian: 99%).
 - 10) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset sudah melaksanakan diskusi publik I(capaian: 99%);
 - 11) Sudah dilaksanakan Bintek Penyusunan NA (sebagai pengganti program bintek pedoman penyusunan peta permasalahan huku), 16-18 Juli 2012. (capaian: 100%)
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Bidang Otomasi dan Dokumentasi Hukum

a. Capaian Kinerja

1) Subbidang Database dan Dokumentasi Hukum

No	Jenis Kegiatan	Target	Hasil Capaian	Prosentasi	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Prov. Bengkulu	64 peraturan	59 peraturan	92,19%	Selesai Pengolahan
2.	Peraturan Daerah Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	200 peraturan	225 peraturan	100 %	Selesai pengolahan
3.	Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat	250 peraturan	283 peraturan	113,2 %	Selesai pengolahan
4.	Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah	250 peraturan	177 peraturan	70,8 %	Selesai Pengolahan
5.	Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum	130 peraturan	105 peraturan	80,76 %	Selesai Pengolahan
6.	Peraturan Kementerian ESDM	154 peraturan	136 peraturan	88,31%	Selesai Pengolahan
7.	Peraturan Pusat 2011 dan 2012	175 peraturan	217 peraturan	124 %	Selesai pengolahan
Jumlah capaian Kinerja Januari s.d Desember 2012		1.223 peraturan	1.232 peraturan	100,74 %	Selesai pengolahan

2) Subbidang Sistem dan Jaringan Elektronik

No.	Kegiatan Tim Layanan TIK melalui situs web	Target Tahun 2012 (peraturan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
1.	Pengembangan Database Naskah Lengkap dan Status Peraturan	200	200	100	Selesai



	Pusat				
2.	Pengembangan Layanan Informasi Hukum Database Naskah Lengkap Peraturan Kementerian Pertanian	100	100	100	Selesai
3.	Pengembangan Database Peraturan Kemdikbud	100	100	100	Selesai
4.	Pengelolaan web Peraturan Kemdag	100	100	100	Selesai
5.	Pengembangan Database Peraturan Daerah	200	200	100	Selesai
6.	Pengelolaan Manajemen Internet	1 dokumen	1 dok	1 dokumen	Selesai
7.	Pengelolaan Website	1 dokumen	1 dok	100	Selesai
Jumlah		700 2 laporan	700	100	

3) Jaringan Informasi Hukum

a) Subbidang Pemberdayaan Jaringan Informasi telah melaksanakan kegiatan:

- Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bagi Anggota Jaringan di Sulawesi Barat.
- Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bagi Anggota Jaringan di Jawa Barat.
- Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bagi Anggota Jaringan di Sumatera Barat.
- Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bagi Anggota Jaringan di Kalimantan Barat.
- Menyelenggarakan Konsinyasi Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada tanggal 5 - 7 Juni 2012 di Hotel Lorin , Circuit Sentul, Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor : PHN-128-HN.02.01 Tahun 2012 tertanggal 21 Mei 2012;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Kantor Wilayah Kemenkumham Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 26-28 September 2012.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 22-24 Oktober 2012.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Kantor Wilayah Kemenkumham NTB dan Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 22-24 Oktober 2012.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Kantor Wilayah Kemenkumham Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6-8 November 2012

- Memenuhi permintaan Anggota JDHN sebagai narasumber pada acara bimbingan teknis JDIH.

4) Subbidang Fasilitasi dan Penguatan Jaringan

Telah melaksanakan tata persuratan yang berkaitan dengan semua kegiatan yang ada di Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, seperti mengenai penyelenggaraan Pertemuan Berkala JDIH, Sosialisasi JDIH, Monitoring dan Evaluasi JDIH, pengiriman nama narasumber dalam acara bimbingan teknis ke instansi yang memerlukan, pendistribusian alat tulis kantor, sarana dan prasarana lainnya untuk bidang-bidang di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

5) Subbidang Penerbitan dan Publikasi Hukum

Hasil-hasil kegiatan BPHN, Majalah Hukum Nasional, Jurnal Penelitian hukum dan Jurnal Hukum Berbahasa Inggris telah selesai dicetak dan dalam proses pendistribusian kepada anggota jaringan.

b. Bidang Perpustakaan Hukum

1) Subbidang Pengumpulan Koleksi

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Target Kegiatan	Output	Outcome	Capaian Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Ket
1.	Pengadaan Koleksi Program	Pengumpulan Bahan Dokumentasi Hukum	1200 Bahan Dokumentasi Hukum	Koleksi Bahan Dokumentasi Hukum	Tersedianya Bahan Dokumentasi Hukum Untuk Pelayanan Informasi Hukum	132,08%	1585 bahan dokumentasi hukum	Tercapai
2.	Pengolahan	Pengolahan peraturan	300 bahan peraturan	Informasi hukum	Tersedianya informasi hukum peraturan perundang-undangan	104 %	312 peraturan perundang-undangan	Tercapai

b) Sub Bidang Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan

Triwulan	Pemeliharaan Bahan Dokumentasi Hukum	Penyimpanan Bahan Dokumentasi Hukum	Ket
I	323 Bahan Dokumentasi	556 Bahan Dokumentasi	
II	329 Bahan Dokumentasi	632 Bahan Dokumentasi	
III	329 Bahan Dokumentasi	674 Bahan Dokumentasi	
IV	331 Bahan Dokumentasi	648 Bahan Dokumentasi	
Total	1312 Bahan Dokumentasi	2510 Bahan Dokumentasi	

c. Bidang Desa Sadar Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bidang Desa Sadar Hukum dibantu oleh 3 (tiga) Subbidang sebagai berikut :

1) Subbidang Pemetaan Desa Sadar Hukum

Subbidang Pemetaan Desa Sadar hukum sampai akhir bulan Desember 2012 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan :

- a) Meng-update/Rekapitulasi data desa/kelurahan sadar hukum seluruh Indonesia, yang sampai saat ini jumlah desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 1601 desa/kelurahan sadar hukum
- b) Memonitoring kelompok kadarkum seluruh Indonesia;
- c) Membuat grafik desa/kelurahan sadar hukum wilayah barat dan timur;
- d) Membuat ranking (prosentase) DSH per Provinsi di seluruh Indonesia;
- e) Membantu penyusunan draft rancangan peraturan menteri tentang verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum.

2) Subbidang Evaluasi Desa Sadar Hukum

Subbidang Evaluasi Desa Sadar Hukum sampai akhir Desember telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Evaluasi Desa Sadar Hukum

Kegiatan evaluasi desa sadar hukum sampai sekarang masih dalam tahap pembuatan instrument evaluasi desa sadar hukum yang bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). Tahap pembuatan instrument tersebut sudah sampai pada pemilihan desa pada 5 (lima) provinsi. Lima provinsi sebagai sampel pembuatan instrument yaitu :

- Provinsi Bali;
- Sumatera Barat;
- Kalimantan Tengah;
- Sulawesi Tengah; dan
- Banten.

b) Temu Sadar Hukum (TSH)

Kegiatan Temu Sadar Hukum pada tahun 2012 diprogramkan sebanyak 3(tiga) kali. Sampai bulan November 2012 telah dilaksanakan sebanyak 2(dua) kegiatan Temu Sadar Hukum di SMA Negeri 40 Jakarta pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 11 Desember 2012, di Dewan Dakwah Aisyiyah Tebet.

c) Lomba Kadarkum Tingkat Nasional

Lomba Kadarkum Tingkat Nasional tahun 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei s/d 10 Mei 2012 di Hotel Putri Duyung Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara. Lomba Kadarkum Tingkat Nasional diikuti oleh 33 regu perwakilan provinsi dan 1 regu perwakilan Pusat dengan 170 peserta.

3) Subbidang Fasilitasi Desa Sadar Hukum

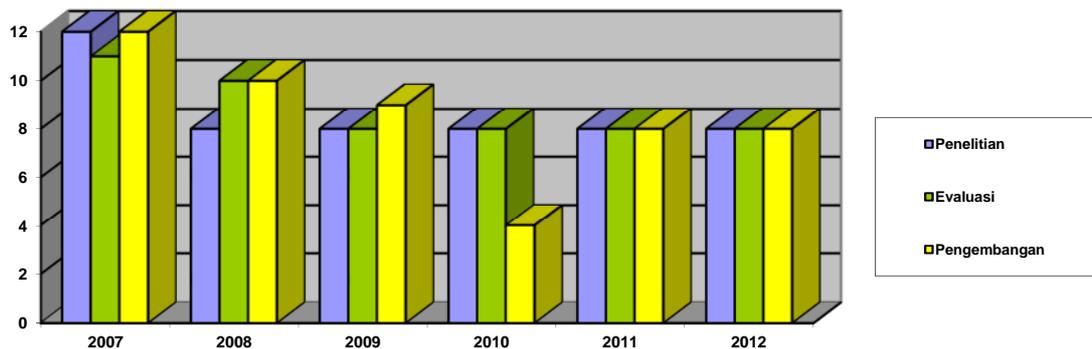
Subbidang fasilitasi desa sadar hukum sampai akhir Desember 2012 telah memfasilitasi beberapa kegiatan peresmian desa sadar hukum. Peresmian desa/kelurahan sadar hukum tersebut pada tahun 2012 diprogramkan sebanyak

11 provinsi. Sampai akhir November 2012 telah dilaksanakan peresmian desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 7 provinsi dengan jumlah 213 DSH. (lampiran II). Kementerian Hukum dan HAM R.I telah menginventarisasi 1601 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

1. Kegiatan/Hasil Yang Dicapai

Pada tahun anggaran 2012 kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai berikut penelitian sebanyak 8 judul, pengembangan sebanyak 8 judul, dan evaluasi sebanyak 8 judul. Perbandingan jumlah judul penelitian, evaluasi dan pengembangan sejak tahun 2007 dapat dilihat sebagai berikut :



Kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan tahun 2012 sebanyak 24 judul telah selesai dilaksanakan, dan hasilnya telah dituangkan kedalam laporan akhir dari masing-masing kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan. rekomendasi yang dilaporkan di laporan akhir ini dijadikan salah satu bahan dalam perumusan kebijakan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Implementasi Reformasi Birokrasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010. Pada tahun 2011 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor : PHM-58.OT.01.03 Tahun 2011 dan Tim Penyusun Dokumen Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia tahun 2011 sesuai Keputusan Kepala Badan Nomor PHM-109.OT.01.03 Tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011. Tim ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Badan Nomor PHM-24.OT.01.03 Tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2010 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan berupa :

- a. Usul penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

- b. Penyempurnaan uraian tugas sesuai dengan organisasi dan tatalaksana terbaru,
- c. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP),
- d. Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
- e. Evaluasi Jabatan,
- f. Analisa Jabatan dan lain-lain.

Dan untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam tahun 2012, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia memprioritaskan agenda program melalui 8 area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 dengan agenda sebagai berikut :

- a. Penataan Organisasi dengan melakukan :

Dalam rangka mewujudkan penataan organisasi yang tepat fungsi, sesuai dengan usulan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan restrukturisasi dengan penggabungan fungsi penelitian ke dalam suatu wadah, di mana Sekretariat Jenderal mengusulkan penyatuan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN dan Pusjianbang menjadi satu. Dalam perkembangan pembahasan, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dan BPHN mengusulkan penggabungan hanya pada unit Balitbang HAM dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, sedangkan struktur Pusjianbang tetap di bawah Sekretariat Jenderal. Nomenklatur yang diusulkan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan draft struktur terdiri dari 1 (satu) unit kerja Eselon II Sekretariat dan 4 (empat) unit kerja Eselon II Pusat.

- b. Penataan Tata Laksana dengan melakukan :

Penyempurnaan dan implementasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. Standar Operasional Prosedur dimaksud adalah : Pusat Litbang Hak-hak Sipil sebanyak 30 SOP, Pusat Litbang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebanyak 18 SOP, Pusat Litbang Transformasi Konflik sebanyak 34 SOP, Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Khusus sebanyak 35 SOP, dan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia terdiri dari Bagian Program dan Pelaporan sebanyak 113 SOP, Bagian Kepegawaian sebanyak 80 SOP, Bagian Umum sebanyak 34 SOP, Bagian Humas dan Informasi sebanyak 19 SOP, dan Bagian Keuangan sebanyak 8 SOP.

- c. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan melakukan Penyusunan Regulasi Baru dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dalam rangka Reformasi Birokrasi seperti halnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.08.01 tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di

bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan penelitian dan evaluasi dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Dan melakukan implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam setiap tahapan kegiatan penelitian, evaluasi dan pengembangan oleh setiap Pusat-pusat Litbang di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

Untuk memperkuat Sumber Daya Manusia setiap tahun dilakukan usulan rekrutmen pegawai, dan dalam rangka perwujudan peningkatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas netral, kompeten, capabel dan profesional serta pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan peningkatan Pola pikir birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi maka dilakukan kegiatan-kegiatan seperti : *Capacity Building* yang bermuatan peningkatan disiplin, kegiatan peningkatan kemampuan fungsional peneliti dan fungsional umum dengan Bimbingan teknis metodologi penelitian, bimbingan teknis penulisan karya ilmiah, bimbingan teknis penanganan Hak Asasi Manusia dan Bimbingan teknis lainnya; selain itu Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia juga mengirim pegawai-pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan baik di lingkup Kementerian maupun di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh *Capacity Building* Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2012 di Hotel Seruni Gunung Salak, Jl. Pirus Kp. Baru Tegal Cibeureum, Cisarua Bogor yang diikuti oleh seluruhnya pejabat dan staf yaitu 128 pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; Seiring dengan adanya tunjangan kinerja melalui sistem remunerasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia telah menyelenggarakan absensi dengan menggunakan finger print dan sejak itu pula kehadiran pegawai meningkat hingga mencapai 96 %.

d. Penguatan Pengawasan dilakukan melalui :

- 1) Penataan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh sebuah Tim sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia No:PHM.07-KU.03.01 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
- 2) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- 3) Peningkatan pengawasan melekat (waskat) atasan langsung.
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilakukan melalui :
- 1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peneliti dan staf pendukung program penelitian dan pengembangan dengan peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
 - 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia yang memuat tentang capaian kinerja yang dapat terukur.
 - 3) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi terutama dalam melakukan pengukuran capaian kinerja melalui penyebaran kuisisioner untuk memperoleh tanggapan, data dan masukan dari masyarakat dan stakeholders tentang hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia selama periode 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan dan peningkatan akuntabilitas kinerja peneliti, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia telah menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait yaitu antara lain dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan beberapa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penelitian atau suatu kajian terhadap isu aktual yang sedang berkembang dan masalah pemenuhan Hak Asasi Manusia yang terjadi di daerah. Hasil penelitian dari kerjasama tersebut telah dipublikasikan dan disampaikan kepada stakeholders terkait yang sudah barang tentu secara tidak langsung berdampak pada implementasi reformasi birokrasi.

- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- melalui penerapan standar pelayanan antara lain melalui kegiatan penelitian, evaluasi, pengkajian dalam penanganan kasus/isu aktual yang sedang terjadi di masyarakat, kegiatan pengembangan dengan penyelenggaraan Seminar/Lokakarya, *workshop*, *website*, pameran, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2012 Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia melaksanakan 8 (delapan) penelitian, 8 (delapan) evaluasi, 3 (tiga) seminar, 1 (satu) *workshop*, 4 (empat) buku pedoman/modul dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sampai dengan akhir bulan Desember 2012 pelaksanaan kegiatan tersebut sudah mencapai 100 %.

Dalam meningkatkan kemudahan aksesibilitas terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia,

dilakukan Pembangunan Aplikasi *Library of Research on Human Right System* dengan pengadaan perangkat lunak legal dan *open source software* dan pengembangan sistem informasi pemetaan Hak Asasi Manusia.

Sebagai upaya merealisasikan aksesibilitas tersebut dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia sedunia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu: Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Lomba menulis artikel populer Hak Asasi Manusia bagi Pelajar SLTA atau sederajat se wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

g. Perubahan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) aparatur

Dengan penegakan disiplin kerja, penyelesaian tugas pekerjaan tepat waktu, pembudayaan bekerja dengan kreasi dan secara improvisasi tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Secara khusus mengenai Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu

1) Perumusan Rencana

Tahap perumusan dimulai dengan pemetaan terhadap pemangku kepentingan, mengidentifikasi resistensi atau penolakan, mengenali besaran perubahan yang diinginkan, melakukan asesmen kesiapan organisasi untuk berubah, mengembangkan strategi perubahan, mengembangkan strategi komunikasi, merumuskan dan mengidentifikasi struktur yang baru.

2) Tahap Pelaksanaan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Tahap pelaksanaan pola pikir dan budaya kerja yaitu dengan mengintegrasikan program kerja, mengelola resistensi/penolakan

3) Penguatan Hasil Perubahan.

Tahap penguatan hasil perubahan adalah penguatan hasil perubahan dengan jalan mengukur tingkat keberhasilan, mengumpulkan dan menganalisa umpan balik, mendiagnosa kesenjangan, mengimplementasikan tindakan perbaikan, serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang berhasil. Sasarannya adalah seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, pemangku kepentingan pendukung, pemangku kepentingan kunci, dengan komunikator Pimpinan unit eselon II Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Tim Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan materi antara lain melalui rapat pimpinan, sosialisasi, Bimbingan Teknis, capacity building, rapat kerja tahunan, website dan Rapat Bulanan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan maka realiasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM per 31 Desember 2012 sebesar Rp.75.761.058.771,- atau telah mencapai 94,85% dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.79.873.347.000,-. Berikut perinciannya:

Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 6.615.517.740,-	94,51
2	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen	Rp. 8.155.037.000,-	Rp. 7.573.522.902,-	92,87
3	Pusat Pengembangan Teknis	Rp. 7.400.000.000,-	Rp. 6.937.482.440,-	93,75
4	Dukungan Manajemen	Rp. 31.004.394.000,-	Rp. 30.341.279.195,-	97,86
5	AKIP	Rp. 13.312.703.000,-	Rp. 13.061.684.239,-	98,11
6	AIM	Rp. 13.001.213.000,-	Rp. 11.322.572.255,-	84,86
Total		Rp.79.873.347.000,-	Rp.75.852.058.771,-	94,96

Sumber : Laporan SAI BPSDM Hukum dan HAM, Tanggal 14 Januari 2012

Berikut penjelasannya .

- a. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM melakukan penyerapan sebanyak 94,51% atau Rp. 6.615.517.740,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.7.000.000.000,-.
- b. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen melakukan penyerapan sebanyak 92,87% atau Rp. 7.573.522.902,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.8.155.037.000,-.
- c. Pusat Pengembangan Teknis melakukan penyerapan sebanyak 93,75% atau Rp. 6.937.482.440,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 7.400.000.000,-.
- d. Dukungan Manajemen melakukan penyerapan sebanyak 97,86% atau Rp. 30.341.279.195,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 31.004.394.000,-.
- e. Akademi Ilmu Pemasarakatan melakukan penyerapan sebanyak 98,11% atau Rp. 13.061.684.239,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.312.703.000,-.
- f. Akademi Imigrasi melakukan penyerapan sebanyak 87,09% atau Rp.11.322.572.255,- dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.001.213.000,-.

2. Pencapaian Output DIKLAT DIPA BPSDM Hukum dan HAM.

a. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.

Capaian kegiatan pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2012 melakukan 4 (empat) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Rencana dan Program Diklat Kepemimpinan dan Manajemen	RKA/KL Diklat Fungsional dan HAM Tahun Anggaran 2013
2	Assesment Tahap Pertama	40 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Assesment bagi calon Esselon III dan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 16-17 April 2012
3	Assesment Tahap Kedua	38 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Assesment bagi calon Esselon III dan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 18-19 April 2012
4	Assesment Tahap Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - 67 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Assesment bagi calon Esselon III dan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 23-24 April 2012 - 3 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Assesment bagi calon Direktur Akademi Imigrasi; - 26 orang pegawai Inspektorat Jenderal (Auditor) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Assesment dalam rangka penyusunan profile kompetensi; - 67 orang Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Nusa Tenggara Barat mengikuti Assesment.

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat

Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2012 menyelenggarakan 11 (sebelas) Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah lulusan sebanyak 427 orang, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Lulusan	DIPA / Anggaran
1.	Kepemimpinan Tingkat II	20 Orang	BPSDM Hukum dan HAM
2	Kepemimpinan Tingkat III (3 Angkatan)	120 Orang	

3	Kepemimpinan Tingkat IV (4 Angkatan)	160 Orang
4	E-Procurement bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	39 Orang
5	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang
6	Leadership Camp	48 Orang
Total		427 Orang

3) Bidang Evaluasi dan Laporan

4) Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan

Manajemen pada Tahun 2012 melakukan 2 (dua) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen	90% peserta alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen meningkat kinerjanya dilihat dari: - Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas; - Peningkatan pengetahuan dan wawasan; - Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat, maupun staf dibawahnya.
2	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen (11 Laporan)	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Evaluasi terhadap 11 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

a) Dari ketiga Bidang yang ada pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen, yaitu Bidang Program, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2012 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.573.522.902,- atau 92,87% dari anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 8.155.037.000,- Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen;

b) Permasalahan yang terjadi pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah :

- masih adanya penggantian peserta pada saat diklat telah berlangsung;
- jadwal kegiatan diklat yang berubah akibat adanya revisi kegiatan pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen;

- tidak adanya laporan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang dilaksanakan oleh pihak LAN Jakarta dan Lain lain.

b. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM.

Capaian kegiatan pada Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2012 melakukan 6 (enam) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Dokumen usulan Diklat Fungsional dan HAM	RKA/KL Diklat Fungsional dan HAM Tahun Anggaran 2013
2	Penyusunan Modul Diklat Suncang Tingkat Pertama	Tersusunnya 8 Judul Modul Diklat Suncang Tingkat Pertama
3	Penyusunan Modul Diklat Pemeriksa Merek Tingkat Muda	Tersusunnya 10 Judul Modul Diklat Pemeriksa Merek Tingkat Muda
4	Penyusunan Modul Diklat Pemeriksa Paten Tingkat Muda	Tersusunnya 10 Judul Modul Diklat Pemeriksa Paten Tingkat Muda
5	Peningkatan Kapasitas Teknis Suncang Perda bagi Pegawai PEMDA Kep.Riau, Sulsel dan Sulut	90 Orang Pegawai PEMDA di Kep. Riau, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara meningkat kapasitasnya dalam bidang Penyusunan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan
6	Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas LAPAS di Kanwil NAD dan Sumater Utara	60 Orang Pegawai Pemasarkatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara meningkat kapasitasnya dalam bidang HAM

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat

Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2012 menyelenggarakan 12 (dua belas) Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah lulusan sebanyak 658 orang, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Lulusan
1	Suncang (3 Angkatan)	110 Orang
2	TOT HAM	40 Orang
3	Jabfung Pemeriksa HKI	30 Orang
4	Arsiparis Tingkat Ahli	40 Orang
5	Peneliti Tingkat Ahli	30 Orang
6	Audit Berbasis Resiko	32 Orang
7	Pemeriksa HKI Tingkat Pertama	30 Orang
8	Bendaharawan (2 Angkatan)	60 Orang
9	Auditor Peran Ketua TIM	15 Orang
10	Aparatur Penegak Hukum	69 Orang
11	Peningkatan Kapasitas Teknis Suncang Perda bagi Pegawai PEMDA Kepri, Sulsel dan Sulut	90 Orang
12	Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas LAPAS di Kanwil NAD dan Sumater Utara	60 Orang
Total		576 Orang

3) Bidang Evaluasi dan Laporan

Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2012 melakukan 3 (tiga) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Fungsional dan HAM	95,97% peserta alumni Diklat Fungsional dan HAM meningkat kinerjanya dilihat dari : - Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas; - Peningkatan pengetahuan dan wawasan; - Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat, maupun staf dibawahnya.
2	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Fungsional dan HAM (11 Laporan)	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Evaluasi terhadap 11 Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3	Penyusunan Metode Evaluasi Diklat Penyelenggaraan Diklat	Tersusunnya Dokumen Metode Evaluasi terhadap kegiatan Diklat Fungsional dan HAM

Dari ketiga Bidang yang ada pada Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM, yaitu Bidang Program, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2012 Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.615.517.740,- atau 94,51% dari anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 7.000.000.000,- Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM;

c. Pusat Pengembangan Teknis

Capaian kegiatan pada Pusat Pengembangan Teknis Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2012 melakukan 7 (tujuh) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum 10 Diklat Teknis	Penyempurnaan Kurikulum 10 Diklat Teknis
2	Penyusunan Rencana dan Program Diklat Teknis	RKA/KL Diklat Teknis Tahun Anggaran 2013
3	Penyusunan Modul Diklat Dasar HKI	Tersusunnya 5 Judul Modul Diklat Dasar HKI
4	Penyusunan Modul Diklat Balai Harta Peninggalan	Tersusunnya 5 Judul Modul Diklat Balai Harta Peninggalan
5	Penyusunan Modul Diklat Kesamaptaan	Tersusunnya 5 Judul Modul Diklat Kesamaptaan
6	Penyusunan Modul Diklat Teknis	Tersusunnya 5 Judul Modul Diklat Teknis

	Pengelola Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum	Pengelola Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
7	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan 8 Diklat Teknis	Tersusunnya 8 (delapan) buku Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat

Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2012 menyelenggarakan 19 (sembilan belas) Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah lulusan sebanyak 1.453 orang, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Lulusan	DIPA / Anggaran
1	Daktiloskopi (2 Angkatan)	80 Orang	BPSDM Hukum dan HAM
2	PK BAPAS (2 Angkatan)	79 Orang	
3	Kurator dan Kepailitan	38 Orang	
4	PK BAPAS Lanjutan (3 Angkatan)	115 Orang	
5	SJDIH	40 Orang	
6	Administrasi Pemasarakatan	40 Orang	
7	Penyuluh Hukum bagi Pegawai Kantor Wilayah	78 Orang	
8	SIMKIM	66 Orang	
9	RUDENIM	68 Orang	
10	Jasa Hukum	40 Orang	
11	Dasar HKI (2 Angkatan)	77 Orang	
12	Disiplin bagi Petugas Pemasarakatan	225 Orang	
13	Keterampilan bagi Petugas Pemasarakatan	56 Orang	
Total		1.002 Orang	

3) Bidang Evaluasi dan Laporan

Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2012 melakukan 3 (tiga) kegiatan, berikut perinciannya:

No	Kegiatan	Output
1	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis	90% peserta alumni Diklat Teknis meningkat kinerjanya dilihat dari : - Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas; - Peningkatan pengetahuan dan wawasan; - Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat, maupun staf dibawahnya.
2	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis (11 Laporan)	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Evaluasi terhadap 11 penyelenggaraan Diklat Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3	Penyusunan Metode Evaluasi Diklat Penyelenggaraan Diklat Teknis	Tersusunnya Dokumen Metode Evaluasi terhadap kegiatan Diklat Teknis

Dari ketiga Bidang yang ada pada Pusat Pengembangan Teknis, yaitu Bidang Program, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Bidang Evaluasi dan Laporan pada Tahun 2012 Pusat Pengembangan Teknis melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.6.937.482.440,- atau 93,75% dari anggaran yang terdapat dalam pagu anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.7.400.000.000,-. Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Teknis;

d. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Capaian kegiatan pada Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari capaian yang terdapat pada:

1) Bagian Umum

Bagian Umum pada Tahun 2012 melakukan 13 (tiga belas) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Bagian Umum pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	
A	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, 4 dan 6	<ul style="list-style-type: none"> - 14 unit Kendaraan Roda 2 Operasional BPSDM Hukum dan HAM telah dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesinnya; - 24 unit Kendaraan Roda 4 Operasional BPSDM Hukum dan HAM dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin; - 2 unit Kendaraan Roda 6 Operasional BPSDM Hukum dan HAM dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin;
B	Layanan Daya dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Terbayarnya Listrik, Telepon, dan Koneksi Internet, Akses dan Backup di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.
C	Perawatan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya renovasi Asrama Latihan (AL) 5 dan Asrama Pendidikan (AP) 1; - Terpeliharanya Server BPSDM Hukum dan HAM; - Terawatnya Mesin Air dan Tower; - Pengisian 75 Buah Tabung Pemadam Kebakaran ; - Terawatnya Sound System dan Public Adress berupa pembelian Stabilizere dan Speaker di ruang Kelas; - Pembuatan sumur baru di asrama pendidikan untuk Taruna - Pembelian generating Set dan Oli Travo yang baru dikarenakan Generating Set dan Oli Travo yang lama meledak pada awal tahun - Pemeliharaan Aplikasi SIMKA dan CBHRIS - Penggantian Cubicle 20 Kv
D	Perawatan Peralatan Poliklinik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan penggantian pada alat-

		alat kesehatan
E	Penunjang Sarana dan Prasarana Kegiatan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja keperluan sehari-hari pegawai BPSDM Hukum dan HAM; - Pembayaran gaji bagi 60 orang petugas cleaning service; - Pembayaran gaji bagi 20 orang petugas kebersihan Taman; - Pembayaran gaji bagi 12 orang petugas keamanan; - Pembayaran gaji bagi 4 orang supir.
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan dan Tata Usaha serta Kehumasan dan Protokol BPSDM Hukum dan HAM	
A	Kehumasan, Protokol dan Pemberitaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Peliputan setiap Kegiatan Diklat (11 Diklat) - Pembuatan 3 macam brosur dan leaflet BPSDM Hukum dan HAM sebanyak 1.500 buah; - Pembuatan Banner sebanyak 10 buah yang dipasang di 4 titik yaitu, didepan gerbang BPSDM Hukum dan HAM, Jalan di Depan Asrama AL 3 (Gedung Kapus), Belakang Gd. Adminstrasi, dan di Depan Asrama Pendidikan II; - Pembuatan 4 macam stiker BPSDM Hukum dan HAM sebanyak 2.000 buah; - Pengadaan 1.000 buah Ballpoint BPSDM Hukum dan HAM; - Pengadaan 1.000 buah Notes BPSDM Hukum dan HAM; - Pembuatan 200 kalender dinding dan 200 kalender meja Tahun 2013; - Pengadaan 500 buah Gody Bag BPSDM Hukum dan HAM; - Pengadaan 250 buku agenda BPSDM Hukum dan HAM; - Pencetakan 350 Ekslembar majalah buletin BPSDM Hukum dan HAM selama 3x terbit; - Pembayaran honor kegiatan Tim Pengelola majalah/buletin, Tim pengelola Website, Tim pengelola dan penginput data CBHRIS dan SIM Kampus, dan Tim pengelola Protokol;
B	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan kebersihan gedung; - peralatan kebersihan Halaman; - Bahan untuk Laundry.
C	Pengelolaan Adminstrasi Perlengkapan dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - ATK, dan Perlengkapan Rumah Tangga; - Pembayaran Honor kegiatan Pengelola Program SABMN kepada 6 orang.
D	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran jasa pengiriman Pos, Giro, Pengepakandan Pengangkutan; - Pengadaan ATK; - Pencetakan Amplop, Map, Buku Kendali, dan Lembar Disposisi.
E	Pengadaan Pakaian Seragam SATPAM	<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) stel pakaian seragam dan perlengkapan Satpam bagi 12 orang anggota Keamanan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.
F	Pengadaan Pakaian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - 2 stel pakaian dinas pegawai bagi 266 orang pegawai di lingkungan BPSDM



		Hukum dan HAM.
3	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	BPSDM Hukum dan HAM
A	Pengadaan Perangkat Data dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya 3 unit Printer Dot Matriks untuk Bagian Keuangan; - Tersedianya 4 unit Mesin Faksimili; - Pengadaan Sound System; - Pengadaan Finger Print dan Aplikasi; - Tersedianya 3 unit Laptop untuk Aplikasi Keuangan; - Tersedianya 1 unit Printer untuk Aplikasi Keuangan; - Tersedianya PC dan SIMKA 2012 dan 2013; - Tersedianya PC dan Aplikasi Database Program Rintisan Gelar dan Bantuan Mandiri.
B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPSDM Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Meubelair Ruang Assessment; - Tersedianya 2 unit Display Buku untuk di Lt. Dasar Gd. Administrasi; - Tersedianya 2 unit Rak Display Majalah untuk di Lt. Dasar Gd. Administrasi; - Tersedianya 5 buah Cylinder Water Boiller/Dispenser yang diletakkan di Bagian Program dan Kerjasama 1 Buah, Bagian Keuangan 1 Buah, Bagian Umum 1 Buah dan 2 di gedung Kapus ; - Tersedianya 3 buah Brankas untuk diletakkan pada masing-masing Ruang Kepala Pusat; - Tersedianya 14 buah alat-alat kesehatan baru untuk di Poliklinik; - Tersedianya 1 unit scaller tanpa water tank untuk di poliklinik; - Tersedianya 1 unit alat pengelolaan sampah dari sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos; - Telah dilakukannya rekondisi pada 2 unit Bis Jemputan Pegawai BPSDM

2) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan pada Tahun 2012 melakukan 2 (dua) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Bagian Keuangan pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM	
A	Administrasi Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbayarnya honor bagi Tim Pengelola Keuangan; - Terbayarnya honor bagi Tim Pengelola Program SAI (SAAK); - Pengadaan ATK, Perlengkapan, Keperluan Administrasi Keuangan; - Terbayarnya honor Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang dan Jasa; - Rapat Koordinasi dengan para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebanyak 10 kali dalam 1 Tahun dalam rangka

		percepatan penyerapan anggaran di masing-masing Pusat Pengembangan.
B	Bimbingan Teknis Keuangan	- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Keuangan bagi 20 orang pegawai BPSDM Hukum dan HAM yang menangani Keuangan.
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	- Terbayarnya gaji dan tunjangan kepada 218 pegawai BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2012.

3) Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian pada Tahun 2012 melakukan 5 (lima) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Bagian Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian, Administrasi Diklat, dan Perpustakaan BPSDM Hukum dan HAM	
A	Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pemanggilan Peserta Diklat	- Pengadaan ATK Kepegawaian untuk pemanggilan 3.124 orang peserta Diklat pada Tahun 2012; - Tercetaknya 1.000 buah Map Sertifikat bagi peserta Diklat; - Pencetakan kalender Diklat BPSDM Hukum dan HAM; - Terbayarnya honor Instruktur Olah raga; - Terbayarnya honor Tim Seleksi Diklat; - Terbayarnya honor Tim Penghitungan Angka Kredit.
B	Poliklinik	- Pembelian obat-obatan untuk penambah daya tahan tubuh
C	Penerbitan Jurnal BPSDM Hukum dan HAM	- Tercetaknya 200 Ekslembar Jurnal BPSDM Hukum dan HAM sebanyak 4 Edisi; - Terbayarnya honor kegiatan Penerbitan Jurnal BPSDM Hukum dan HAM.
D	Administrasi Pengelola Perpustakaan	- Pengadaan ATK Perpustakaan dan Fumigasi Ruang Perpustakaan.

4) Bagian Program dan Kerjasama

Bagian Program dan Kerjasama pada Tahun 2012 melakukan 2 (dua) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Bagian Program dan Kerjasama pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Penyusunan Program dan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM	
A	Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA/KL) Tahun Anggaran 2013	- Pengadaan ATK, Perlengkapan, Penyusunan Program dan Anggaran; - Rapat Koordinasi dengan para Penyusun Anggaran baik yang ada di Sekretariat, maupun yang ada di masing-masing Pusat Pengembangan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran di masing-masing



		Pusat Pengembangan.
B	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/KL Tahun Anggaran 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/KL Tahun Anggaran 2013 bagi 20 orang pegawai BPSDM Hukum dan HAM yang menangani perencanaan kegiatan.
C	Penyelenggaraan Program Kerjasama Rintisan Gelar di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Program S1 Hukum UNPAD Angkatan II/2010 Semester IV bagi 30 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; - Terselenggaranya Program S2 Hukum USU Angkatan IV/2010 Semester IV dan V bagi 30 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; - Terselenggaranya Program S2 Hukum UNDIP Angkatan I/2010 Semester IV bagi 30 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - Terselenggaranya Program S2 Manajemen Perencanaan Pembangunan Hukum UNHAS Angkatan I/2010 Semester IV bagi 30 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; - Terselenggaranya Program S2 Pengkajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan Strategi dan Kebijakan UI Angkatan V/2010 Semester V bagi 34 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; - Terselenggaranya Program S2 Pengkajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Manajemen LAPAS UI Angkatan IV/2010 Semester IV bagi 25 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; - Terselenggaranya Program S2 Ketahanan Nasional Kajian Strategi Perencanaan, Strategi dan Kebijakan UI Angkatan VI/2011 Semester II dan III bagi 30 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
D	Penyelenggaraan Program S2 dan S3 Bantuan Beasiswa Mandiri bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	<ul style="list-style-type: none"> - 18 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI mengikuti Program Beasiswa Bantuan Mandiri Pasca Sarjana (S2) yang tersebar di 8 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia; - 9 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI mengikuti Program Beasiswa Bantuan Mandiri Doktor (S2) yang tersebar di 7 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;
E	Penyusunan Evaluasi dan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012; - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012; - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM per Bulan dan per Triwulan;



F	Monitoring dan Evaluasi Diklat Daerah	- Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi Monitoring Diklat pada 22 Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada Tahun 2012.
G	Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi dan Laporan	- Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Evaluasi dan Laporan bagi 20 orang pegawai BPSDM Hukum dan HAM yang menangani evaluasi dan laporan kegiatan dengan hasil kegiatan adalah tersusunnya buku Pedoman Evaluasi Diklat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
H	Studi Banding Penyelenggaraan Diklat PNBP dan Peningkatan Status Akademi ke Sekolah Tinggi	- Tersusunnya laporan studi banding Diklat PNBP dan Peningkatan Status Akademi ke Sekolah Tinggi ke 6 wilayah.
I	Pelatihan Mandiri bagi Pegawai dan Widyaiswara	- 8 orang pegawai dan 10 orang Widyaiswara mengikuti Pelatihan Mandiri, diantaranya di LAN, Univ. Mustopo Fakultas Gigi, dan Law Institut.
J	Kajian Analisis dan Dampak Penilaian Kebutuhan Program Rintisan Gelar.	- Tersusunnya laporan Kajian Analisis dan Dampak Penilaian Kebutuhan Program Rintisan Gelar, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa Program Rintisan Gelar masih sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
K	Capacity Building	- Terselenggara dan tersusunnya laporan Pelatihan Capacity Building di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dengan tema Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas Dan Kerja Tuntas.
L	Pelatihan Mindsetting	- Terselenggara dan tersusunnya laporan Pelatihan Mindsetting yang diikuti oleh 80 pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.
M	Pelatihan Teknis Penghitungan Angka Kredit Widyaiswara	- Terselenggara dan tersusunnya laporan Pelatihan Teknis Penghitungan Angka Kredit Widyaiswara yang diikuti oleh 20 orang pegawai dan Widyaiswara di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.
N	Pelatihan Disiplin bagi Pegawai Masyarakat	- Terselenggara dan tersusunnya laporan Pelatihan Disiplin bagi Pegawai Masyarakat yang diikuti oleh 160 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Akademi Ilmu Masyarakat (AKIP).

Akademi Ilmu Masyarakat pada Tahun 2012 melakukan 2 (dua) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Sekolah Kedinasan Akademi Ilmu Masyarakat (AKIP) pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pendidikan Kedinasan	
A	Layanan Perkantoran	- Terlaksananya pembayaran gaji, dan tunjangan bagi 21 orang pegawai AKIP dan 185 Taruna AKIP; - Tersedianya kebutuhan ATK AKIP

		Tahun 2012 melalui belanja barang; - Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya.
B	Pendidikan Kedinasan AKIP	- Tersedianya kebutuhan ATK dalam rangka menunjang Kegiatan belajar mengajar bagi 185 Taruna AKIP; - 61 orang Taruna AKIP dinyatakan lulus dan menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis Pemasarakatan.

6) Akademi Imigrasi (AIM)

Akademi Imigrasi pada Tahun 2012 melakukan 2 (dua) kegiatan, adapun capaian kegiatan pada Sekolah Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat dari kegiatan di bawah ini:

No	Kegiatan	Output
1	Pendidikan Kedinasan	
A	Layanan Perkantoran	- Terlaksananya pembayaran gaji, dan tunjangan bagi 23 orang pegawai AIM dan 127 Taruna AIM; - Tersedianya kebutuhan ATK AIM Tahun 2012 melalui belanja barang; - Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya
B	Pendidikan Kedinasan AKIP	- Tersedianya kebutuhan ATK dalam rangka menunjang Kegiatan belajar mengajar bagi 127 Taruna AKIP dan 64 orang peserta Diklat Khusus Keimigrasian; - 63 orang Taruna AIM dan 64 orang Diklat Khusus Keimigrasian dinyatakan lulus dan menguasai Ilmu dan Keahlian Teknis Imigrasi.

3. Pencapaian Output DIKLAT menggunakan Anggaran PNBPN Direktorat Jenderal Imigrasi.

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi adalah 6 Pendidikan dan Pelatihan dengan total capaian 452 orang pegawai, berikut perinciannya:

No	Kegiatan Diklat	Jumlah Peserta	Penyelenggara Kegiatan
1	Administrasi Akuntansi Keuangan	33 Orang	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
2	Perencanaan Anggaran	36 Orang	
3	SUSINTEL Imigrasi (3 Angkatan)	88 Orang	Pusat Pengembangan Teknis
4	Pemeriksa Dokumen Keimigrasian	37 Orang	
5	Mindsetting bagi Pegawai Kantor	212 Orang	

	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta (6 Angkatan)		
6	Bendaharawan (2 Angkatan)	46 Orang	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM
Total		452 Orang	

4. Pencapaian Output DIKLAT menggunakan Anggaran PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah 7 Pendidikan dan Pelatihan dengan total capaian 300 orang pegawai, berikut perinciannya:

No	Kegiatan Diklat	Jumlah Peserta	Penyelenggara Kegiatan
1	Kepemimpinan Tingkat IV (2 Angkatan)	78 Orang	Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
2	Kepemimpinan Tingkat IV	40 Orang	
3	Pengadaan Barang dan Jasa	32 Orang	
4	Teknis Fidusia	37 Orang	Pusat Pengembangan Teknis
5	Pelayanan Hukum Tingkat Dasar	37 Orang	
6	Jasa Hukum bagi Pegawai AHU dan Kantor Wilayah	40 Orang	
7	Pelayanan Publik	36 Orang	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM
Total		300 Orang	

5. Pencapaian Output DIKLAT menggunakan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Total capaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang menggunakan DIPA Kantor Wilayah adalah 127 Pendidikan dan Pelatihan dari 30 Kantor Wilayah dengan total capaian 5.445 orang pegawai, berikut perinciannya:

No	Kantor Wilayah	Diklat / Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Manajemen Barang dan Jasa	30 Orang
		Manajemen Perubahan	35 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
		Kepemimpinan Tingkat IV	31 Orang
2	Sumatera Utara	Petugas Pintu Utama	30 Orang
		Pembimbing Masyarakat	30 Orang
		Wali Masyarakat	30 Orang
		Kepemimpinan Tingkat IV	36 Orang
		Pendidikan Dasar Masyarakat	30 Orang
		Manajemen Perubahan	41 Orang
		Pra Jabatan Golongan II	98 Orang
		Peningkatan SDM Bidang Keuangan	30 Orang
		Peningkatan SDM Bidang Tata Usaha	30 Orang

3	Bangka Belitung	Manajemen Barang dan Jasa	30 Orang
		Manajemen Perubahan	30 Orang
		Bimtek Perancang Peraturan Daerah	40 Orang
		Bimbingan Kemasyarakatan	30 Orang
		Bimtek LAKIP	30 Orang
		Bimtek Menembak	30 Orang
		Bimtek Humas dan Protokoler	30 Orang
		Bimtek Informasi dan Komunikasi	30 Orang
4	Sumatera Barat	Kesamaptaan	30 Orang
		Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
5	Jambi	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Kesamaptaan	45 Orang
		Pelatihan Dasar Pemasarakatan	31 Orang
		Pra Jabatan Golongan II	94 Orang
		Pra Jabatan Golongan III	34 Orang
6	Bengkulu	Kesamaptaan	30 Orang
		Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
7	Kepulauan Riau	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Capacity Building	30 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang
		Bimtek Kehumasan	30 Orang
8	Riau	Kesamaptaan	40 Orang
		Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang
		Manajemen Perubahan	106 Orang
		Penjaga Pintu Gerbang Utama	30 Orang
9	Sumatera Selatan	Kesamaptaan	30 Orang
		Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang
		ESQ	100 Orang
10	Lampung	Manajemen Perubahan	76 Orang
		Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Pelatihan Dasar Pemasarakatan	40 Orang
		Capacity Building	140 Orang
11	Banten	Manajemen Perubahan	44 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
12	DKI Jakarta	Bimtek SPIP	170 Orang
		Bimtek Kehumasan	30 Orang
		Bimtek LAKIP	30 Orang
		Bimtek Barang dan Jasa	258 Orang
		Bimtek RKA-KL	80 Orang
13	Jawa Barat	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Pelatihan Dasar Pemasarakatan	30 Orang
		Instruktur Pemasarakatan	30 Orang
14	Jawa Tengah	Kesamaptaan	40 Orang
		Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang
		Bimtek Kehumasan	94 Orang
15	D.I. Yogyakarta	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	22 Orang
		Manajemen Perubahan	120 Orang
16	Jawa Timur	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	102 Orang
		Manajemen Perubahan	76 Orang
		Kesamaptaan	40 Orang
		Sistem Informasi Akuntansi	60 Orang
		Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV	40 Orang
		Pembimbing Kemasyarakatan	40 Orang
		Capacity Building	205 Orang
17	Bali	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
		Administrasi Aparatur Hukum	30 Orang

		Administrasi Pemasyarakatan	30 Orang
18	Nusa Tenggara Timur	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
		Bimtek Lantaskim	15 Orang
		Bimtek Keamanan dan Pembinaan	30 Orang
19	Nusa Tenggara Barat	Kesamaptaan	30 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang
20	Kalimantan Timur	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
21	Kalimantan Selatan	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang
		Manajemen Perubahan	80 Orang
		Bimtek Implementasi SPIP	20 Orang
		Sosialisasi Penyusunan LAKIP	40 Orang
		Sosialisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi	30 Orang
22	Kalimantan Barat	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang
		Prajabatan Golongan II	121 Orang
		Bimtek Implementasi SPIP	30 Orang
		Sosialisasi SPIP	30 Orang
23	Kalimantan Tengah	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang
		Manajemen Perubahan	30 Orang
		Prajabatan Golongan II	60 Orang
		Bimtek SPIP	35 Orang
24	Gorontalo	Kesamaptaan	30 Orang
		Manajemen Perubahan	38 Orang
25	Sulawesi Utara	Programer Komputer	30 Orang
26	Sulawesi Selatan	Manajemen Perubahan	40 Orang
		Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV	40 Orang
		Bimtek SAI dan BMN	66 Orang
		Bimtek Barang dan Jasa	30 Orang
		Bimtek RKA/KL	66 Orang
27	Sulawesi Tengah	Kesamaptaan	30 Orang
		Bimtek SPIP	30 Orang
		Bimtek Kehumasan	30 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang
28	Sulawesi Tenggara	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Manajemen Perubahan	33 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
		Bimtek SPIP	30 Orang
		Bimtek Kehumasan	30 Orang
29	Sulawesi Barat	Manajemen Perubahan	40 Orang
30	Maluku	Manajemen Perubahan	40 Orang
		Kesamaptaan	30 Orang
31	Maluku Utara	Manajemen Perubahan	40 Orang
		Operator Komputer	26 Orang
		Bimtek RKA/KL	25 Orang
32	Papua	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang
		Manajemen Perubahan	37 Orang
		Kesamaptaan	35 Orang
		Intsruktur Pemasyarakatan	25 Orang
		Bimtek Informasi dan Komunikasi	40 Orang
33	Papua Barat	Bimtek Administrasi Kepegawaian	25 Orang
		Manajemen Perubahan	40 Orang

Bidang Kesekretariatan

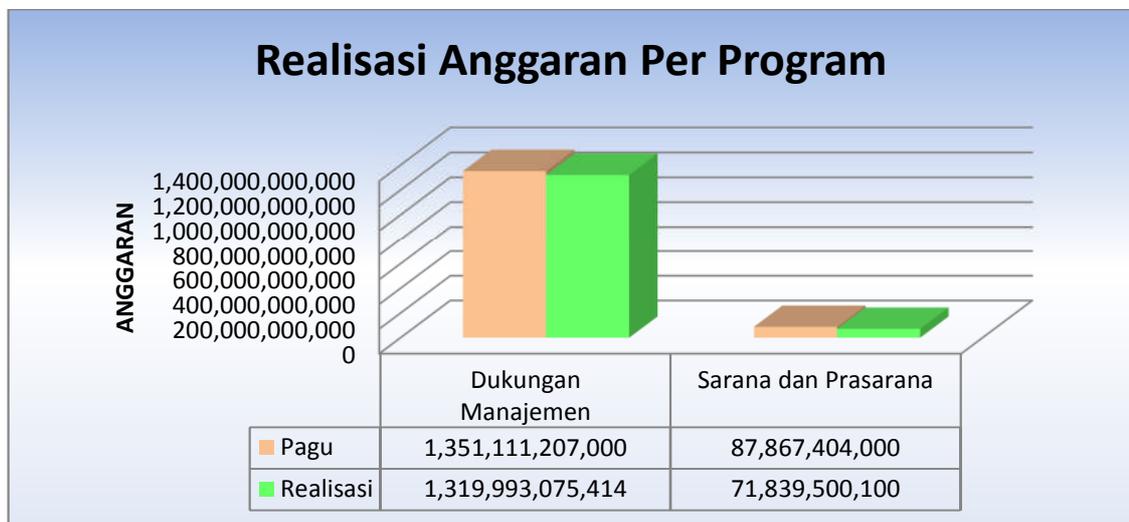
Penyerapan Anggaran

Laporan keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk menghasilkan kinerja yang optimal, sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM secara Umum.

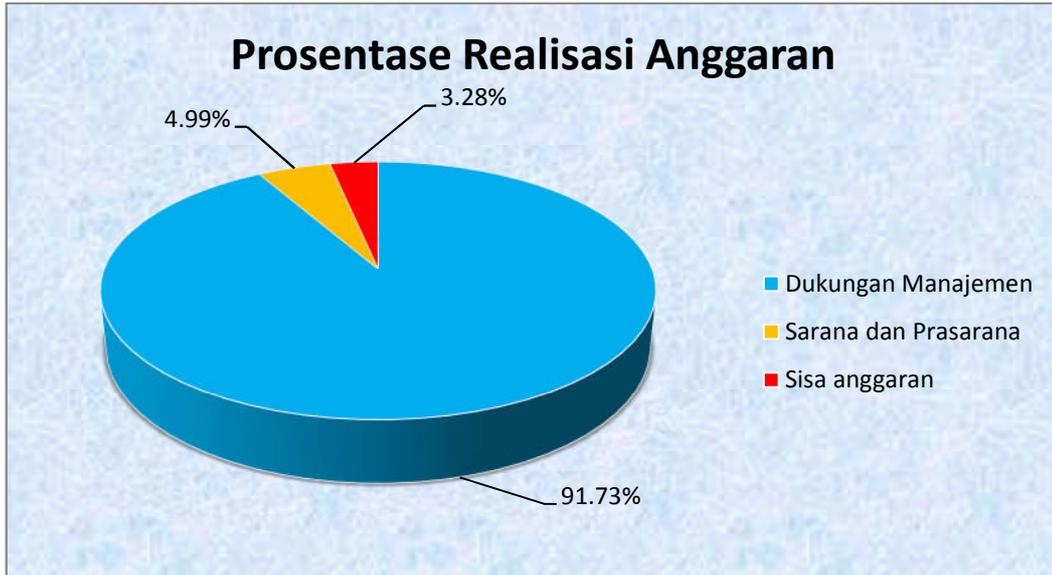
Sebagai unit yang memiliki peran strategis, yaitu *supporting unit*, Sekretariat Jenderal telah melakukan percepatan penyerapan anggaran guna mendukung penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM khususnya dan Pemerintah pada umumnya. Hal ini tergambar pada penyerapan anggaran tahun 2012.

Alokasi anggaran untuk unit Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,438,978,611,000,- dibagi ke dalam 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan utama yang terdiri dari 6 (enam) Biro, 1 (satu) Pusat dan 1 (satu) Program Sarpras. Hingga akhir tahun anggaran 2012, pagu yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,391,776,575,514,- atau 96,72%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Per Program



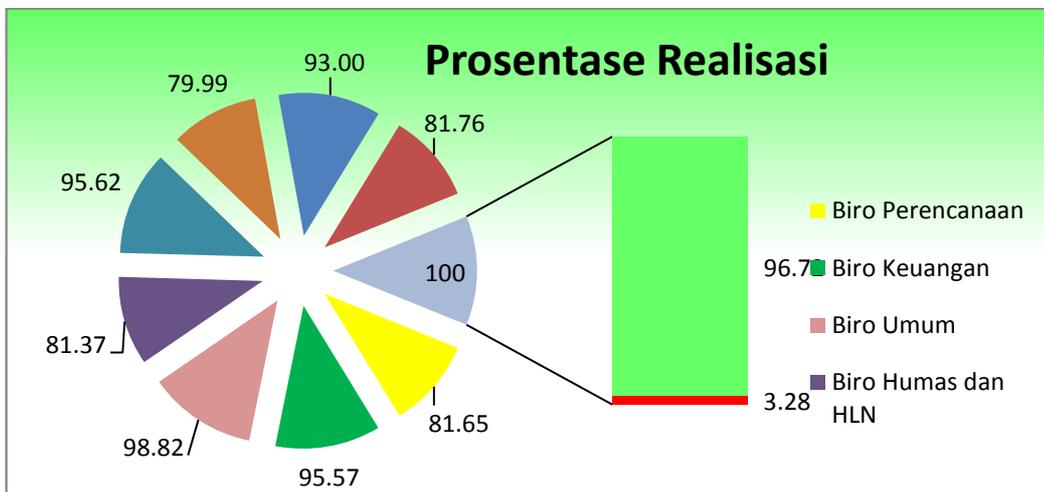
Dari Diagram di atas dapat kita lihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan program telah mencapai rata-rata 94 % dari total anggaran sebesar Rp. 1,438,978,611,000,-. Untuk dapat mengetahui prosentase dari tiap-tiap program dapat kami sajikan sebagai berikut:



2. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II

No	Eselon II	Pagu	Realisasi	%
1	Perencanaan	29,945,058,000	24,450,592,100	81.65
2	Biro Keuangan	45,602,227,000	43,583,784,245	95.57
3	Umum	1,147,153,079,000	1,133,638,960,206	98.82
4	Humas Dan Hln	5,280,192,000	4,296,450,544	81.36
5	Perlengkapan	94,497,442,000	90,358,459,754	95.62
6	Kepegawaian	22,778,452,000	18,219,904,555	79.98
7	Pusjianbang	5,854,757,000	5,444,924,010	93
8	Program Sarpras	87,867,404,000	71,839,500,100	81.76
Total		1,438,978,611,000	1,391,832,575,514	96.72

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Unit Eselon II mencapai rata-rata 88,47% dari total anggaran sebesar Rp. 1,438,978,611,000,-. Untuk dapat mengetahui prosentase dari tiap-tiap Unit Eselon II dapat kami sajikan sebagai berikut:



1. Biro Perencanaan

a) Bagian Tata Laksana

- 1) Sinkronisasi Uraian Jabatan Struktural Dalam Rangka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan yang akan dicapai Analisis Jabatan yaitu dapat digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Perencanaan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan serta untuk memperoleh informasi jabatan yang diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Output : Dokumen Uraian Jabatan Struktural Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 2.396 Uraian Jabatan Struktural



- 2) Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan agar dapat meningkatkan metode pekerjaan, mengurangi kesalahan, mengeliminasi bahan yang tidak perlu dan duplikasi upaya, meningkatkan tanggung jawab dan memperbaiki kinerja pegawai dan dapat menciptakan perilaku organisasi yang signifikan. Outputnya Dokumen Uraian Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari:

- a) 215 Uraian Jabatan Fungsional Tertentu
- b) 263 Uraian Jabatan Fungsional Umum



3) Penataan Tata Laksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan agar terciptanya tertib ketatalaksanaan dalam bidang fasilitatif dan teknis substantif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan terwujudnya tata hubungan kerja/koordinasi yang sinergis antar unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dalam bidang fasilitatif dan teknis substantif. Output : Draft Buku Ketatalaksanaan Bidang Administratif Kementerian Hukum dan HAM. Draft ini mengatur tentang tata administrasi perkantoran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

4) Pencetakan Dokumen Uraian Jabatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan sebagai informasi dan alat pembelajaran, baik bagi pegawai, calon pegawai dalam masa orientasi, para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kegiatan, tugas dan fungsi satuan kerja serta tujuan dari organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya Dokumen Uraian Jabatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Output : Dokumen Uraian Jabatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5) Pembinaan Pengelolaan Ketatausahaan Biro Perencanaan

Tujuan agar tersusun penomoran dan kearsipan yang terorganisir dan terkoordinasinya kegiatan antar bagian di lingkungan Biro Perencanaan. Output : Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Biro Perencanaan yang tertib dan akuntabel.

b) Bagian Organisasi

Kegiatan yang dilakukan bagian Kelembagaan :

a. Sosialisasi ORTA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Output yang dihasilkan adalah pemahaman struktur organisasi, tugas dan fungsi dari ORTA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Evaluasi Kelembagaan Dalam rangka Penataan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Output yang dihasilkan adalah :

- 1) Laporan hasil kegiatan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Draft usulan/data dukung pembentukan baru, perubahan status, peningkatan kelas UPT Pemasarakatan di lingkungan kementerian Hukum dan HAM

- c. Penataan Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Output yang dihasilkan adalah :

- 1) Peraturan Menteri Nomor M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lapas Kelas III
- 2) Peraturan Menteri Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rutan Kelas IIB
- 3) Peraturan Menteri Nomor M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kanim Kelas III
- 4) Peraturan Menteri Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rupbasan Kelas I Gorontalo
- 5) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Rancangan Peraturan Menteri ORTA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 7) Rancangan Peraturan Menteri ORTA UPT Pemasarakatan.
- 8) Rancangan Peraturan Menteri ORTA UPT Imigrasi.
- 9) Draft Usulan penataan kelembagaan unit eselon I.

c) Bagian Program dan Anggaran

Pada tahun 2012 Bagian Program dan Anggaran telah melaksanakan program dan/kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penajaman Prioritas Tahunan

Guna memantapkan penyusunan rencana kegiatan dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dengan skala prioritas tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan kegiatan penajaman prioritas tahunan. Kegiatan ini melakukan pendampingan penyusunan/penyesuaian dokumen usulan RKA-KL di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 disamping itu melakukan peninjauan langsung ke daerah berkaitan

dengan prioritas/rehabilitasi/renovasi bangunan dan sarana prasarana pendukung di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dari kegiatan Penajaman Prioritas Tahunan ini telah dihasilkan *Back-up* RKA-KL tahun 2013 yang telah disesuaikan, Laporan Hasil Peninjauan Satker, dan Dokumen Skala Prioritas Pembangunan/Rehabilitas Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013.

2) Raker Sinkronisasi Kegiatan Biro Kepegawaian dengan BPSDM Hukum dan HAM

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahun 2013 diselenggarakan rapat kerja antara Biro Kepegawaian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen RKA-KL Biro Kepegawaian dan BPSDM tahun 2013 yang telah disinkronkan serta Matrik Sinkronisasi Kegiatan Biro Kepegawaian dan BPSDM tahun 2013.

3) Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran

Memantapkan pelaksanaan perencanaan program dan rencana kerja serta anggaran pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tingkat wilayah serta guna menyatukan persepsi dan kesepahaman dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran perlu dilakukan Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tingkat wilayah.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran diharapkan seluruh satuan kerja dapat menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil dan postur RKA-KL sesuai dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Unit Eselon I dan Kantor Wilayah pada saat Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran merupakan rangkaian kegiatan penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2013 dengan melakukan bimbingan pengisian dan penyusunan rencana kerja dan anggaran ke dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL). yang diikuti para operator satuan kerja di lingkungan setiap kantor wilayah yang menguasai aplikasi RKA-KL .

4) Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM

Renja Kementerian Hukum dan HAM merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014 untuk itu telah disusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Hukum dan HAM tahun

2012 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan mereview rencana kerja Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan perwakilan dari Unit Eselon I.

Dokumen tersebut berisi tentang kegiatan utama, kegiatan pendukung dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja di akhir tahun anggaran sebagaimana Informasi kinerja yang ada dalam Renja K/L.

5) Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012

Guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dengan sasaran menurunnya over kapasitas pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara, dengan diselenggarakannya kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai Inpres nomor 1 dihasilkan Kesepakatan antara Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tentang Percepatan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 dan Penentuan Skala Prioritas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dalam Inpres Nomor 1 tahun 2010.

6) Konsultasi Teknis Alokasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan penyusunan program dan RKA sesuai pagu alokasi anggaran tahun 2013 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan kegiatan yang mendukung penyusunan RKA-KL tersebut melalui kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Program dan RKA Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013. Kegiatan konsultasi teknis tersebut dengan melakukan penyesuaian RKA-KL Pagu Anggaran dengan Pagu Alokasi Anggaran dengan melakukan penyempurnaan terhadap RKA-KL Pagu Anggaran serta melengkapi TOR dan RAB sehingga RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran tahun 2013 sesuai dengan data dukung yang telah diberikan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

7) Koordinasi Penyusunan Program dan RKA Kantor Wilayah

Untuk memberikan pemahaman terhadap penyusunan program dan RKA tahun 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilakukan kegiatan koordinasi sehingga dicapai kesepakatan tentang penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berikut satuan kerjanya. Dalam

penyusunan program dan RKA-KL tahun 2012 terdapat beberapa perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM. Melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dan RKA Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencanaan dan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 sehingga peran serta dan dukungan Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal dapat lebih nyata memberikan pelayanan bidang hukum. Kegiatan ini menghasilkan Nota Kesepahaman Sekretariat Jenderal, Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan perbaikan postur penganggaran di setiap satuan kerja tahun 2012.

8) Penataan Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM dilakukan penyempurnaan dan penataan terhadap ORTA Kantor Wilayah dengan merumuskan kembali tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penataan kelembagaan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion*.

9) Validasi Data Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM

Data pegawai adalah salah satu komponen penting dalam perhitungan alokasi anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga disamping kebutuhan alokasi jenis belanja lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan dan pemetaan kebutuhan riil alokasi anggaran belanja pegawai Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 agar pengalokasian anggaran Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dialokasikan secara optimal tanpa mengurangi efisiensi dan efektifitas alokasi per belanja. Kegiatan Validasi Data Belanja Pegawai diselenggarakan di Kantor Wilayah diikuti oleh para operator yang menguasai aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

10) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran dilaksanakan dengan tujuan pembinaan dan koordinasi antara unit perencana di pusat bersama unit perencana pada satuan kerja di daerah dengan memberikan pemahaman tentang penyusunan anggaran memberikan masukan terhadap permasalahan dalam perencanaan penganggaran. Kegiatan ini dibagi ke dalam serangkaian kegiatan yaitu : anugrah inovasi dalam pelaksanaan tuisi, verifikasi lapangan usulan pembangunan lapas/rutan sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2010

dan pendampingan penyusunan *Disbursement Plan*, *Procurement Plan*, dan kalender kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM

11) Penataan Kelembagaan Jajaran Pemasarakatan dan Jajaran Keimigrasian

- Jajaran Pemasarakatan

Mengingat Kepmen Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, Kepmen Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Kepmen Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi maka perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kegiatan penataan kelembagaan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* yang menghasilkan penyempurnaan organisasi dan tata kerja UPT Pemasarakatan, penguatan tugas fungsi pada Lapas Umum, Lapas Khusus, Rutan, LPAS, Bapas dan Rupbasan serta perubahan nomenklatur di lingkungan UPT Pemasarakatan.

- Jajaran Keimigrasian

Mengingat Kepmen Kehakiman RI Nomor : M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi sebagaimana kebutuhan dan perkembangan organisasi perlu dievaluasi dan penyempurnaan. Penataan kelembagaan di jajaran keimigrasian dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* yang menghasilkan penyempurnaan organisasi dan tata kerja UPT Imigrasi sekaligus penguatan tugas fungsi serta perubahan nomenklatur di beberapa bidang Imigrasi.

12) Tim Forum Data Gender

Tim Forum Data Gender melaksanakan pengarahannya dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang responsif gender, pembekalan materi serta perumusan ruang lingkup kegiatan. Kegiatan difokuskan dalam bentuk sosialisasi dan pembekalan materi bagi para pejabat eselon III dan IV. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memahami hukum, kebijakan dan program pembangunan yang berkeadilan gender serta dapat menyusun rencana program/kegiatan yang responsif gender.

13) Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif

Gender Kementerian Hukum dan HAM dengan membentuk Pokja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan pejabat eselon IV unit eselon I termasuk biro/pusat sebagai komponen perencana. Pokja melakukan rapat anggota, meningkatkan peran fungsi dan kedudukan kelembagaan PUG, menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Data Terpilah Gender dan Lanjutan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Unit Eselon I bagi Pejabat Eselon IV (komponen perencana) sebagai penanggung jawab menyangkut data kepegawaian, SDM, program/kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing unit.

14) Pemantapan Rencana Program dan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM

Guna mendorong meningkatkan responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja prioritas nasional yang dilaksanakan pada masing-masing eselon I, dilakukan *review* pada hasil pelaksanaan prioritas nasional yang selama ini belum dapat diketahui sejauh mana target yang telah dicapai pada masing-masing kegiatan. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan penyusunan strategi dalam mengejar ketertinggalan capaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan rapat kerja pemantapan rencana program dan anggaran unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM

15) FGD Penyelarasan Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM dengan RKP Tahun 2013

Pelaksanaan FGD Penyelarasan Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM dengan RKP Tahun 2013 untuk menyelaraskan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 dengan tujuan merumuskan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 yang efektif, efisien dan akuntabel. Hasil dari FGD ini adalah Dokumen Penyelarasan Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM dengan RKP Tahun 2013

16) FGD Pemantapan Penyusunan Kegiatan TA 2013

Penyelenggaraan FGD Pemantapan Penyusunan Kegiatan TA 2013 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan perencanaan penganggaran, penyusunan data dukung, inventarisasi permasalahan dan solusi yang tepat dalam penyusunan RKA-KL serta menyamakan persepsi tentang Standarisasi Pengukuran Kinerja. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen pemantapan penyusunan kegiatan tahun 2013

- 17) Raker Penajaman Penganggaran Satker Perwakilan Imigrasi Di Luar Negeri
Rapat Kerja Penajaman Penganggaran Satker Perwakilan Imigrasi Di Luar Negeri dilakukan dalam rangka penyusunan/penyesuaian usulan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan pada perwakilan imigrasi di Luar Negeri tahun 2013 sehingga menghasilkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing perwakilan. Rapat kerja diikuti oleh 18 Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen RKA-KL tahun 2013 pada Satuan Kerja Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
- 18) Rakor Sekretariat Jenderal
Penyerapan anggaran yang kurang optimal dalam konteks penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan dampak yang kurang baik pada pengalokasian atau penetapan pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM periode selanjutnya. Oleh karena itu perlu penyelarasan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal agar saling mendukung pencapaian sasaran Kinerja Sekretariat Jenderal. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal menghasilkan penyusunan rencana kerja yang bersesuaian dengan indikator kinerja, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal
- 19) Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Terintegrasi Tepat Waktu dan Akurat
Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagi pegawai yang menangani perencanaan dan penganggaran dilakukan kegiatan yang bersifat membangun motivasi, kerja sama, kepemimpinan, tanggung jawab dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang terus digalakkan. Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Terintegrasi Tepat Waktu dan Akurat dilakukan melalui serangkaian kegiatan *capacity building*, bimbingan tata naskah, keahlian presentasi, serta keprotokolan dan etika. Melalui kegiatan ini menjadi kesempatan membangun *team work* dan diri sendiri di bidang perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas SDM.
- 20) Koordinasi kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012
Dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan APBN tahun 2012 serta meningkatkan target kinerja dan output masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diselenggarakan Kegiatan Koordinasi kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kegiatan ini diberikan

petunjuk dan arahan sekaligus mekanisme pemantauan dan pengendalian kegiatan kepada seluruh pemangku program (pejabat eselon I) dan pemangku kegiatan (pejabat eselon II) sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan output dan outcome yang mendukung pencapaian target RKP tahun 2012. Kegiatan bertujuan menghindari jadwal kegiatan yang tumpang tindih, estimasi penyerapan anggaran, pelaksanaan dan pemantauan reformasi birokrasi serta meningkatkan kinerja pembinaan dan koordinasi masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

d) Bagian Evaluasi dan Laporan

- 1) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2012.

Monitoring dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pelaksanaan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku serta mencapai target hasil yang telah ditentukan. Output yang dihasilkan Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Kerja 33 Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

- 2) Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dibuatlah Aplikasi Program Aksi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Unit Kerja Pembantu Presiden dalam Pengendalian Pembangunan (UKP4), dimana didalam Aplikasi itu terdapat 5 renaksi dan 45 subrenaksi. Tujuan dari program aksi ini adalah pengadministrasian terhadap semua capaian yang dilakukan Kantor Wilayah dan Satuan kerja dalam bentuk data dukung yang valid dan akuntabel dalam rangka menilai kinerja dari Kantor Wilayah. Outputnya adalah Laporan Program Aksi Kantor Wilayah setiap Triwulannya.

- 3) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Dalam rangka pelaksanaan PERMENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, output yang dihasilkan Dokumen LAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012.

- 4) Laporan Capaian Kinerja

Outputnya adalah Dokumen Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

5) Profil Kementerian Hukum dan HAM

Dalam profil Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat foto pejabat, jumlah pegawai berdasarkan gender, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing Direktorat Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Outputnya adalah Profil Kementerian yang telah diunggah dalam website www.kemenkumham.go.id.

e) Bagian Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika

- 1) Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - a) Peserta sosialisasi yang sebagian besar adalah ULP diharapkan sudah bisa melaksanakan lelang secara *e-procurement* (melalui LPSE).
 - b) Tim LPSE Kantor Wilayah sudah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator ULP dan Penyedia.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika (*IT Steering Commite*).
Outputnya Banyak satker telah menggunakan fasilitas – fasilitas berbasis teknologi informasi dan juga terjadi peningkatan dari sisi sumber daya manusia didalam menjalankan pekerjaan yang berbasiskan electronic government (e-gov).
- 3) Kegiatan Admin Pengelola Website Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia outputnya
 - a) Tersajinya content atau informasi yang lebih baik dari Biro, Unit Pusat dan Kantor Wilayah pada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Meningkatnya tanggung jawab para Approver dan Operator Content Management System dalam pengelolaan informasi;
 - c) Ragam informasi yang ditampilkan dari Biro, Unit Pusat dan Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d) Adanya kesadaran pentingnya informasi oleh para Approver dan Operator Content Management System di Biro, Unit Pusat maupun Kantor Wilayah.
- 4) Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) *IT Maturity Model* outputnya Tingkat kematangan satuan kerja didalam penggunaan teknologi informasi sudah dapat dipetakan sehingga penerapa electronic government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilaksanakan dengan baik. Outputnya Tingkat kematangan satuan kerja didalam penggunaan teknologi informasi sudah dapat dipetakan sehingga penerapa electronic government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilaksanakan dengan baik.

5) Kegiatan Electronic Data Processing

- a) Terwujudnya penataan administrasi, prosedur standard operasi, keamanan, backup data dan sistem aplikasi pada situs/portal utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b) Terwujudnya aturan/ketentuan/prosedur pengelolaan keamanan terhadap perangkat website yang terdiri dari server, operating system, aplikasi, data, jaringan dan pengguna di lingkungan Sekretariat Jenderal
- c) Terwujudnya pengoperasian portal utama dan infrastruktur jaringan website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- d) Terwujudnya updating pada situs Kementerian Hukum dan HAM.
- e) Terwujudnya koordinasi dengan Unit Pusat dan Kantor Wilayah dalam upaya peningkatan pendayagunaan telematika secara optimal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

6) Kegiatan Penetrasi Keamanan Jaringan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Outputnya Dapat melihat celah sistem keamanan teknologi informasi yang ada dan segera dapat diperbaiki untuk menunjang kelancaran terlaksananya penerapa electronic government di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

7) Kegiatan Petugas Sistem Pelaporan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Outputnya Data-data yang masuk dalam sistem pelaporan menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2. Biro Keuangan

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi delapan area perubahan dimana salah satunya adalah akuntabilitas, terutama meningkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kegiatan yang ada di masing-masing bagian di biro keuangan pada pelaksanaan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling terkait. Akuntabilitas kinerja pada biro keuangan dapat terlihat dari keberhasilan masing-masing bagian merealisasikan target capaian kerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja biro keuangan tahun 2012 pada masing-masing bagian di biro keuangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing bagian di biro keuangan dapat di ilustrasikan dalam table berikut :

No	Uraian	Indikator Kinerja		%
		Target	Realisasi	
1	Tercapainya Penyusunan DIPA Kem. Hukum dan HAM RI	Rp6.953.496.410.000,-	Rp4.867.639.580.000,-	70
2	Tercapainya Penerimaan PNBP Kem. Hukum dan HAM RI	Rp 532.400.000,-	Rp 493.807.000,-	93
3	Terbentuknya Kepmenkumham Pengangkatan Pengelola Keuangan	Rp 307.800.000,-	Rp 307.244.600,-	98
4	Terselesaikannya Kerugian Negara (Pengembalian Kerugian Negara)	Rp 1.551.075.364,-	Rp 381.181.071	24
5	Tercapainya Laporan Dokumen Realisasi Anggaran (Laporan SSBP, SP2D, SPM)	8892 Laporan	8312 Laporan	93
6	Tercapainya Laporan Keuangan Kem. Hukum dan HAM RI (Laporan Realisasi Pelaksana Anggaran)	Rp7.057.444.285.000,-	Rp2.465.246.073.997,-	27
7	Terbayarnya Biaya Mutasi Pejabat/Pensiunan	Rp 12.341.502.000,-	Rp 11.669.760.910,-	94

Penjelasan capaian kinerja tahun 2012 dari biro keuangan sebagai berikut :

a. Tercapainya Penyusunan DIPA Kem. Hukum dan HAM RI

Pagu anggaran belanja Kementerian Hukum dan HAM dalam tahun 2012 sebesar Rp 6.953.496.410.000,- sesuai dengan pagu APBN-P. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja tahun 2011 terdapat penurunan sebesar (Rp. 7.075.334.856.000 - Rp. 6.953.496.410.000) = Rp. 121.838.446.000,-.

b. Tercapainya Penerimaan PNBP Kem. Hukum dan HAM RI

Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.178.648.000.000,- terdiri dari :

- 1) Sekretaris Jenderal Rp. 790.486.644.000,-
- 2) Inspektorat Jenderal Rp. 6.000.000,-
- 3) Ditjen Administrasi Hukum Umum Rp. 165.156.556.000,-
- 4) Ditjen Pemasyarakatan Rp. 11.000.000,-
- 5) Ditjen Imigrasi Rp. 1.015.906.500.000,-

6) Ditjen Hak Kekayaan Intelektual	Rp.	207.050.000.000,-
7) Ditjen Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.600.000,-
8) Ditjen Hak Asasi Manusia	Rp.	6.000.000,-
9) Badan Pembinaan Hukum Nasional	Rp.	6.000.000,-
10) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM	Rp.	4.800.000,-
11) Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM	Rp.	10.800.000,-

Atas rencana PNPB Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2012 tersebut diharapkan dapat diberikan ijin penggunaan sebesar Rp. 1.370.727.671.600,- untuk dialokasikan pada unit pengguna, sebagai berikut :

1) Direktorat Jenderal AHU	Rp.	49.542.000.000,-
2) Lapas Pemasyarakatan	Rp.	1.092.300.000,-
3) Direktorat Jenderal Imigrasi	Rp.	720.679.460.000,-
4) Direktorat Jenderal HKI	Rp.	51.762.500.000,-
5) Balai Harta Peninggalan (5 Kantor)	Rp.	906.900.000,-
6) Kantor Imigrasi (108 Kantor)	Rp.	546.744.511.600,-

c. Terbentuknya Kepmenkumham Pengangkatan Pengelola Keuangan

Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pemegang uang muka tahun 2012 telah diselesaikan dan dikirimkan kepada seluruh kantor/ UPT. Keputusan yang terdiri dari Kantor Pusat sebanyak 14 Keputusan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 33 Keputusan.

d. terselesaikannya Kerugian Negara (Pengembalian Kerugian Negara)

Kasus kerugian Negara sampai dengan 30 November 2012 berjumlah 24 buah kasus, yang terdiri dari :

- 1) Kasus kerugian Negara Tuntutan Perbendaharaan (TP) berjumlah 4 buah kasus dengan nilai kerugian Rp. 178.753.624,- yang telah diselesaikan sebesar Rp. 34.858.012,- atau sebesar 20 %.
- 2) Kasus Kerugian Negara Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berjumlah 20 kasus dengan nilai kerugian Rp. 1.372.321.740,- dan telah diselesaikan Rp. 346.323.059 atau 25 % dari nilai kerugian Negara.

e. Tercapainya Laporan Dokumen Realisasi Anggaran (Laporan SSBP, SP2D, SPM)

Untuk dapat mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan azas daya guna dan hasil guna anggaran Negara, sebagai sumber monitoring didasarkan pada :

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM)
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Berdasarkan jumlah kantor satuan kerja tersebut, maka jumlah target pelaporan mengenai realisasi 2012 sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) 8892 Laporan
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 8892 Laporan
- 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 8892 Laporan

Rekapitulasi Laporan Anggaran Belanja
1 Januari 2012 s.d. 30 November 2012

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan SSBP	8892 Laporan	8312 Laporan	93
Laporan SP2D	8892 Laporan	8312 Laporan	93
Laporan SPM	8892 Laporan	8312 Laporan	93

f. Tercapainya Laporan Keuangan Kem. Hukum dan HAM RI

Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Hukum dan HAM dalam Semester I TA 2012 sebesar Rp. 2.465.246.073.997,- Atau 34,93 % dari pagu Indikatif sebesar Rp. 7.057.444.285.000,- . Dalam tahun anggaran 2012, Bagian Akuntansi dan Pelaporan telah menetapkan 5 sasaran pelaksanaan tugas yang akan dicapai. Realisasi sampai akhir tahun 2012 menunjukkan bahwa 100 % sasaran pelaksanaan tugas dapat dicapai dengan hasil baik.

Sasaran 1 :Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Sampai Dengan Oktober TA 2012 yang meliputi indikator :

Indikator Kinerja	Pagu / Target	Realisasi	%
Belanja	Rp. 6.953.496.410.000,-	Rp. 4.422.191.140.000,-	63,60
PNBP	Rp. 2.178.648.000.000,-	Rp. 1.652.633.085.784,-	75,86

Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Hukum dan HAM dalam sampai dengan Oktober TA 2012 sebesar Rp. 4.422.191.140.000,- atau 63,6 % dari pagu Indikatif sebesar Rp. 6.953.496.410.000,- . Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan September TA 2012 sebesar Rp. 1.652.633.085.784,- atau 75,86 % dari target nya yang sebesar Rp. 2.178.648.000.000,-

Sasaran 2 :Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA 2012 yang meliputi indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Realisasi Anggaran Belanja	Rp 7.057.444.285.000,-	Rp 2.465.246.073.997,-	34,93

PNBP	Rp 1.789.306.537.450,-	Rp 1.169.904.078.398,-	65,38
------	------------------------	------------------------	-------

Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Hukum dan HAM dalam Semester I TA 2012 sebesar Rp. 2.465.246.073.997,- Atau 34,93 % dari pagu Indikatif sebesar Rp. 7.057.444.285.000,- . Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA 2012 sebesar Rp. 1.169.904.078.398,- atau 65,38 % dari target nya yang sebesar Rp. 1.789.306.537.450,- .

Sasaran 3 : Tercapainya Pelaksanaan Sosialiasasi SAI

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sosialisasi SAI	250 peserta	246 peserta	98

Untuk tahun anggaran 2012, Kegiatan Sosialisasi SAI diselenggarakan pada tanggal 19 s/d 20 Juni 2012 bertempat di Hotel Satelite Surabaya dan diikuti oleh 246 peserta yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 8 Kantor Wilayah yang merupakan petugas operator SAI dimasing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sasaran 4 : Tercapainya Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester II TA 2011

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rekonsiliasi Laporan Keuangan	121 peserta	121 peserta	100

Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2011 diselenggarakan dari tanggal 7 s/d 10 Februari 2012, bertempat di Hotel Isula Bandung yang diikuti oleh masing-masing satu orang staf pengelola administrasi keuangan dan satu orang staf perlengkapan unit eselon I pusat dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM se Indonesia yang berjumlah 121 peserta.

Sasaran 5 : Tercapainya Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA 2012

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rekonsiliasi Laporan Keuangan	88 peserta	88 peserta	100

Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA 2012 diselenggarakan dari tanggal 12 s/d 15 Juli 2012, bertempat di Hotel Aston Bali yang diikuti oleh masing-masing satu orang staf pengelola administrasi keuangan dan satu orang staf perlengkapan unit eselon I pusat dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM se Indonesia yang berjumlah 88 peserta.

g. Terbayarnya Biaya Mutasi Pejabat/Pensiunan

Seluruh biaya mutasi pejabat dan pegawai yang pensiun untuk tahun 2012 telah dilaksanakan pembayarannya dengan baik, meliputi :

1) Realisasi pembayaran biaya pindah (mutasi) pejabat dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2012 periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

a) Biaya pindah / mutasi sebesar	Rp 11.328.700.285,-
b) SK pindah / mutasi sebanyak	1765 SK
c) Realisasi SK pindah / mutasi sebanyak	1286 SK
d) Sisa SK pindah / mutasi yang belum terealisasi	479 SK

2) Realisasi pembayaran biaya pindah pensiun menetap tahun 2012 periode Januari 2012 s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

a) Biaya pindah / mutasi pensiun sebesar	Rp 341.060.625,-
b) SK pindah / mutasi pensiun sebanyak	58 SK
c) Realisasi SK pindah / mutasi pensiun sebanyak	58 SK
d) Sisa SK pindah / mutasi pensiun yang belum terealisasi	0 SK

Sisa SK Pindah / Mutasi dan SK Pindah Pensiun Menetap yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2011 akan dibayarkan pada tahun anggaran 2012, dengan catatan :

- Harus sudah diaudit oleh BPKP
- Mendapat persetujuan dari DITJEN Perbendaharaan dan DITJEN Anggaran

3. Biro Kepegawaian

a. Bagian Umum

1) Pengadaan CPNS

Tahun ini, Tes Kompetensi Dasar CPNS beberapa kementerian dan lembaga dilakukan terpusat di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dengan menggandeng konsorsium 10 perguruan tinggi terkemuka. Dengan sistem yang baru kali pertama diterapkan, tentu masih ada yang perlu disempurnakan. Namun yang paling berbeda adalah, untuk pertama kali ini setiap peserta ujian dapat mengetahui hasil ujiannya secara langsung dan terbuka. Cukup dengan memasukkan nomor peserta, nilai ujian dapat diakses dari situs Kementerian PAN RB Transparansi nilai tersebut sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan.

Capaian kinerja dari pengadaan CPNS adalah hasil seleksi tidak memenuhi seluruh formasi yang dibutuhkan. Dari 2.839 Formasi yang direncanakan akhirnya hanya 2.560 yang diterima. Hal demikian semata-mata karena peserta

yang dinyatakan lulus memang lebih sedikit. Hal tersebut karena lebih mengejar kualitas, bukan kuantitas hasil seleksi.

Seluruh proses seleksi tidak hanya melibatkan pengawas internal, tetapi juga pengawas eksternal, yang terdiri dari unsur Ombudsman, LSM dan mahasiswa. Dalam rapat-rapat di kepanitiaan pusat hadir perwakilan Ombudsman, ICW dan mahasiswa UI. Seluruh proses rapat juga didokumentasikan dengan video, sehingga dapat dilacak ulang bagaimana proses setiap pengambilan keputusan. Semangat seleksi CPNS yang bersih dan antikorupsi ini harus menjadi satu prinsip yang diterapkan untuk semua sistem kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa yang bisa menentukan kelulusan dan keberhasilan adalah hanya hasil tes, hanya hasil kerja. Sistem penilaian berdasarkan prestasi (*merit system*) dengan mengacu pada pemenuhan passing grade yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB.

2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

Capaian kinerja kegiatan ini adalah dengan terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian pada 6 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan peserta sekitar 300 orang yang terdiri dari para pemangku jabatan di bidang kepegawaian sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Implementasi atas kegiatan ini adalah Administrasi Pengelolaan kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM yang lebih kreatif akuntabel dan terarah, untuk memfasilitasi bagi seluruh pegawai perlu adanya kegiatan berkelanjutan untuk memenuhi pembinaan bagi seluruh pegawai, diharapkan hal tersebut bisa memberikan informasi yang terbaru dari pusat kepada daerah mengenai kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian.

3) Peningkatan Motivasi Kinerja pegawai

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan motivasi kinerja pegawai ditemukan beberapa hal dilapangan tentang kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya, seperti adanya peserta yang mengundurkan diri dan digantikan oleh orang lain, padahal peserta yang mengundurkan diri tersebut adalah pegawai yang diharapkan dapat memberi perubahan untuk tempat kerjanya setelah mengikuti kegiatan ini, adanya peserta yang tiba-tiba sakit di tempat pelaksanaan, peserta yang terlambat hadir di karenakan harus menyelesaikan pekerjaannya dahulu di kantor. letak penginapan para peserta yang berjauhan menyulitkan panitia untuk memantau aktivitas para peserta.

Dari temuan tersebut diatas, maka kedepan perlu pembenahan-pembenahan kegiatan, yaitu agar peserta yang ditunjuk benar-benar dapat hadir dan mengikuti

seluruh rangkaian kegiatan dan dipilih yang mampu membangun suasana lebih interaktif lagi antar peserta dan narasumber, serta letak penginapan dan kegiatan agar tidak berjauhan

4) Kegiatan Sistem *Based Performance Management*

Pada kegiatan Sistem Based Performance Management Untuk mempertahankan secara berkelanjutan prestasi dalam penilaian kinerja pegawai yang telah dicapai dalam pembangunan reformasi birokrasi dan kemajuan organisasi, sangat diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkemampuan tinggi dalam reformasi pemerintahan, menyelenggarakan pelayanan publik bermutu.

Untuk penilaian kinerja Pegawai ASN, kewenangannya ada pada Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing. Penilaian kinerja Pegawai ASN didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Pegawai ASN. Penilaian kinerja Pegawai ASN dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya. Penilaian kinerja Pegawai ASN dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai.

Penilaian kinerja Pegawai ASN dilakukan secara objektif, terukur akuntabel, partisipasi, dan transparan. Hasil penilaian kinerja Pegawai ASN dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan aparatur, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

5) Workshop Kewirausahaan dan Pembekalan Mental bagi yang akan Pensiun

Capain kinerja kegiatan Workshop Kewirausahaan dan Pembekalan Mental Bagi yang akan Pensiun yaitu jumlah Pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI yang hadir mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai Kiat Berwirausaha, khususnya bagi pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti dan mempunyai kesiapan secara mental dalam menghadapi purnabhakti.

6) Pengelolaan Administrasi Jaminan Sosial

a) Terjalannya koordinasi yang baik antar pejabat pengemban fungsi kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengurusan dalam pekerjaan administrasi jaminan sosial.

b) Terjalannya koordinasi yang baik antara Instansi terkait, dalam hal permasalahan dalam hubungan kerja dan kebijakan kebijakan untuk memperlancar proses administrasi pegawai di Kementerian Hukum dan HAM RI.

- c) Membuat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor. M.HH-220.KP.04.01. Tahun 2012 Tanggal 22 Mei 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- d) Membuat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor. M.HH-219.KP.04.01. Tahun 2012 Tanggal 22 Mei 2012. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pimpinan Unit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- e) Membuat Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. SEK.-251.KP.04.01 Tahun 2012 Tanggal 22 Juni 2012. Tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Sekretaris Jenderal Menandatangani Keputusan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
- 7) Kegiatan Bimbingan Teknis Kartu Istri/Kartu Suami, Laporan Perkawinan / Perceraian / Kelahiran / Kematian, Cuti PNS, Taspen Dan Taperum PNS Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Dengan dilaksanakannya kegiatan Bimtek Kartu Istri/Kartu Suami, Laporan Perkawinan/Perceraian, Cuti PNS, Taspen, Bum Bapertarum Dan Taperum PNS Pada Kanwil dilingkungan Kementerian Hukum Dan Ham R.I telah terwujud satu pemahaman mengenai prosedur dan proses kerja pengurusan administrasi Kartu Istri/Kartu Suami, Laporan Perkawinan/Perceraian, Cuti PNS, Taspen, Bum Bapertarum Dan Taperum PNS sehingga menciptakan alur prosedur administrasi yang tertib. Terciptanya pemahaman prosedur dan proses kerja pengurusan administrasi kepegawaian kepada pengemban fungsi kepegawaian dilingkungan kanwil agar tercipta administrasi kepegawaian yang akuntabel. Tersusunnya pedoman petunjuk pelaksanaan pengajuan Karis/Karsu, Laporan Perkawinan/Perceraian / Kelahiran / Kematian, Cuti PNS, Taspen, Bum Bapertarum Dan Taperum PNS
- 8) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- Dengan tersusunnya buku himpunan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian yang memuat lengkap seluruh peraturan maka akan ada keseragaman panduan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan dibidang kepegawaian baik di seluruh unit kerja pusat dan unit kerja kantor wilayah . Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian Tahun Anggaran 2012 telah terselenggara dengan baik dan lancar Hasil dari kegiatan tersebut adalah

telah di terbitkannya Buku Himpunan Peraturan-peraturan di bidang Kepegawaian Tahun Anggaran 2012 Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dengan materi peraturan-peraturan yang baru Diharapkan kegiatan ini bersifat berkesinambungan untuk menjadi Program Rutin di lingkungan Biro Kepegawaian-Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

b. Bagian Mutasi Pegawai

1) Fit dan Proper Test

Capaian kinerja pelaksanaan fit and proper test adalah jumlah peserta fit and proper test sebanyak 869 peserta yang telah difit dan proper test, pengisian jabatan dilaksanakan secara transparan dan didasarkan pada kesesuaian antara kompetensi yang diisyaratkan dalam jabatan dan kompetensi dari PNS tersebut, tersedianya profile kompetensi manajerial dari pegawai yang telah mengikuti fit and proper test, tersedianya bahan pelatihan untuk peningkatan kompetensi yang akan diberikan ke BPSDM guna terselenggaranya diklat berbasis kompetensi, Implementasi dari pelaksanaan fit and proper test dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam bidang penataan SDM

2) Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat

Untuk dapat melihat capaian kinerja dan implementasi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012, maka dapat dibagi dalam dua periode Kenaikan Pangkat PNS yaitu :

a) Periode Kenaikan Pangkat April 2012

Setelah di uraikan dalam tahap pelaksanaan diatas, maka dapat dilihat bagaimana capaian kinerja dalam penyelesaian usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Periode April 2012 yang dapat di uraikan lebih jelas sebagai berikut :

- Usul kenaikan pangkat yang masuk = 3.226
- Usul yang telah direalisasikan menjadi SKKP = 3.049
- Usul yang masih di proses di BKN = 177

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Periode April telah mencapai 95%

dari keseluruhan usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM periode April 2012.

Angka capaian ini telah menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana sisanya sebanyak 5% usul kenaikan pangkat periode April tidak dapat diselesaikan karena permasalahan ijazah kelas jauh (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah) dan belum memenuhi syarat kenaikan pangkat April, sehingga kenaikan pangkatnya ditunda sampai memenuhi syarat kenaikan pangkat.

b) Periode Kenaikan Pangkat Oktober 2012

Untuk penyelesaian usul kenaikan pangkat periode Oktober 2012 dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut :

- Usul kenaikan pangkat yang masuk = 2.307
- Usul yang telah direalisasikan menjadi SKKP = 1.804
- Usul yang masih diproses di BKN = 503

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Periode Oktober telah mencapai 78% dari keseluruhan usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM periode Oktober 2012.

Angka capaian ini lebih sedikit mengingat masih banyak proses usul kenaikan pangkat masih banyak yang diproses di BKN, dimana sisanya sebanyak 5% usul kenaikan pangkat periode Oktober tidak dapat diselesaikan karena permasalahan ijazah kelas jauh (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah) dan belum memenuhi syarat kenaikan pangkat April, sehingga kenaikan pangkatnya ditunda sampai memenuhi syarat kenaikan pangkat.

3) Sidang Pembahasan Baperjakat

Dari hasil sidang pembasan baperjakat telah tercapai Surat Keputusan pengangkatan dan Alih tugas eselon II, III, IV dan V sebanyak 1943 Surat Keputusan, surat keputusan Perpanjang dan tidak memperpanjang Batas usia pensiun sebanyak 85 orang dan Surat Keputusan Pemberhentian berjumlah 29 Orang , kegiatan ini dimplementasikan dengan pengisian jabatan dapat dilakukan secara objektif berdasarkan hasil fit and propertest, rekam jejak pegawai dan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Sidang pembahasan Angka Kredit Tenaga Medis

Capaian kinerja yang berjumlah 177 Surat Keputusan penetapan angka medis dan paramedis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada

para pegawai dalam hal mempermudah penetapan angka kredit, penetapan angka kredit ini akan dijadikan dasar bagi fungsional medis dan paramedis dalam mengajukan usulan pengangkatan pertama, kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat.

5) Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu

Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu dengan capaian hasil yaitu terbentuknya rumpun Jabatan Fungsional Tertentu baru yaitu Pemeriksa Keimigrasian, Penyuluh Hukum dan Pembimbing Masyarakat. Tujuan kegiatan ini mensosialisasikan JFT yang telah ada rumpunnya sehingga adanya pilihan dan ketertarikan dari JFU yang belum terakomodasi dalam jabatan struktural. Membentuk rumpun JFT baru sesuai dengan tugas dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing unit utama sehingga diharapkan pembentukan rumpun JFT baru tersebut dapat dianggarkan oleh unit utama pada tahun berikutnya.

6) Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu

Dari hasil penyelenggaraan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu di 13 kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM terdapat pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu baik arsiparis maupun paramedis / perawat namun belum diusulkan untuk diangkat menduduki jabatan fungsionalnya Perlu adanya dorongan para pejabat pengembalian fungsi kepegawaian untuk mendorong para pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan usul pengangkatan jabatan fungsional tertentu.

c. Bagian Pengembangan Karir Pegawai

1) Peningkatan pengembangan SDM dilingkungan Kemenkumham

Capain kinerja pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan terhadap 50 orang pegawai yang diharapkan menghasilkan pribadi – pribadi yang baik secara *inner* maupun *outer* dalam diri setiap pegawai. Kegiatan ini perpaduan antara sistem karir dan sistem prestasi kerja untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada kementerian hukum dan HAM, peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan berkompentensi tinggi untuk mendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksud.

2) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai

Kegiatan FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai menghasilkan kajian gambaran pengembangan karir PNS yaitu tentang alur maupun pola karir dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, Penyusunan dan Analisa Kebutuhan

Diklat Teknis dan Manajerial yang diperlukan terkait dengan pengembangan karir pegawai sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan, Usulan terhadap masalah pelaksanaan diklat teknis dan manajerial dalam rangka pembinaan pegawai khususnya persyaratan untuk menempati jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

3) Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini tercapai hasil peserta yang lulus ujian sebanyak 61 peserta tingkat I dan II Kegiatan ini diimplementasikan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan kepada PNS atas dasar sistem sistem karir dan sistem prestasi kerja.

4) Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana dan Magister

Pelaksanaan kegiatan ini tercapai hasil peserta yang lulus ujian sebanyak 1333 peserta tingkat I dan II Kegiatan ini diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil terutama dalam pembentukan kader pemimpin insan pengayoman dengan menerapkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendidikan kepada seluruh PNS dilingkungan Satuan Kerja Tingkat Pusat maupun Kewilayahan.

d. Bagian Tata Usaha Kepegawaian

Hasil yang dicapai dalam bimbingan teknis SIMPEG, verifikasi dan validasi data pegawai ini adalah terkelolanya data kepegawaian secara online dan up to date karena terpusatnya data kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia dalam satu database, sehingga data kepegawaian dapat terintegrasi dengan baik.

4. Biro Umum

a. Bagian Tata Usaha Kementerian

Kegiatan/hasil-hasil yang telah dicapai pada Bagian Tata Usaha Kementerian adalah

- 1) Menerima surat masuk sebanyak 81.185 surat
- 2) Melaksanakan penomoran Surat Keputusan sebanyak 4.367 SK
- 3) Melaksanakan pengiriman surat dinas sebanyak 53.675 surat
- 4) Menggandakan Surat-Surat Dinas, Surat Keputusan, Surat Undangan, Materi Kegiatan Penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif, materi kegiatan Bimtek SIKD, Materi Kegiatan Petunjuk Teknis Mekanisme dan Pengaksesan Arsip Dinamis Kemenkumham dan lain lain sebanyak 83.438 eksemplar.

b. Bagian Tata Usaha Pimpinan

Kegiatan/hasil-hasil yang telah dicapai pada Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah

1) Subbagian Tata Usaha Menteri

Surat Masuk Eksternal		
No	Asal Surat	Jumlah Surat
1	Pemerintah (LP/LPND)	3719
2	Umum LSM,Ormas,Perorangan	5423
Surat Masuk Eksternal		
1	Sekretariat Jenderal	701
2	Inspektorat Jenderal	730
3	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	803
4	Direktorat Jenderal Imigrasi	358
5	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan	141
6	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	343
7	Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual	125
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	54
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	117
10	Badan Penelitian dan Pengembangan HAM	39
11	Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM	49
12	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1949
Tugas lainnya		
1	Menyusun Konsep Sambutan Pimpinan	73

2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal

No	Uraian	Jumlah Surat
1	Surat dari Biro-Biro kepada Sekretaris Jenderal	3167
2	Surat dari Unit-Unit eselon I	2134
3	Surat dari kantor Wilayah	3194
4	Surat keluar	1539
5	Undangan yang masuk	463
6	Surat dari Instansi luar	3568

3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri

No	Uraian	Jumlah Surat
1	Pencatatan Surat Masuk	563
2	Pencatatan Surat Keluar	44

4) Subbagian Protokol

No	Uraian	Jumlah Kegiatan
1	Koordinasi penerimaan tamu pimpinan dan rapat pimpinan	166
2	Koordinasi perjalanan dinas pimpinan yang terdiri dari perjalanan dinas dalam dan luar negeri	73
3	Koordinasi acara yang dihadiri pimpinan yang terdiri dari penandatanganan MOU, keynote speech dalam seminar, sambutan launching buku, peresmian instansi dan wawancara di stasiun Tv	108
4	Penyiapan Upacara Pelantikan	14
5	Penyiapan Upacara Bendera	14

- c. Bagian Bina Sikap Mental
- d. Kegiatan/hasil-hasil yang telah dicapai pada Bagian Bina Sikap Mental adalah
 - 1) Subbagian Rohani dan Sosial
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan karakter Keteladanan bagi Pejabat Eselon II, III, IV.
 - b) Kegiatan Bimbingan Rohani Pegawai sebanyak 6 kegiatan.
 - 2) Subbagian Kesehatan Pegawai
 - a) Pengadaan Obat obatan yang dilaksanakan setiap triwulan
 - b) Pemeliharaan Alat alat Kesehatan Poliklinik
 - c) Sosialisasi Pedoman pelayanan Kesehatan
 - 3) Subbagian Kesejahteraan
 - a) In House Training
 - b) Penyaluran gula, the, kopi dan susu yang dilakukan sebanyak 4 termin
- e. Bagian Rumah Tangga
 - 1) Pada program Sarana dan Prasarana Bagian Rumah Tangga telah dilaksanakan 49 kegiatan Konstruksi dan konsultasi, 1 kegiatan jasa lainnya dan 9 kegiatan pengadaan barang.
 - 2) Telah melakukan pencatatan surat masuk sebanyak 1790 surat dan pencatatan surat keluar sebanyak 2945 surat.
 - 3) Penomoran surat sesuai kode Klasifikasi

No	Kode Klasifikasi	Jumlah
1	UM	1455
2	PL	728
3	KU	154
4	KP	510
5	PR	43
6	DL	45
7	HM	3
8	OT	2
9	PW	4
10	IN	1

- f. Bagian Pengamanan

5. Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Ormas

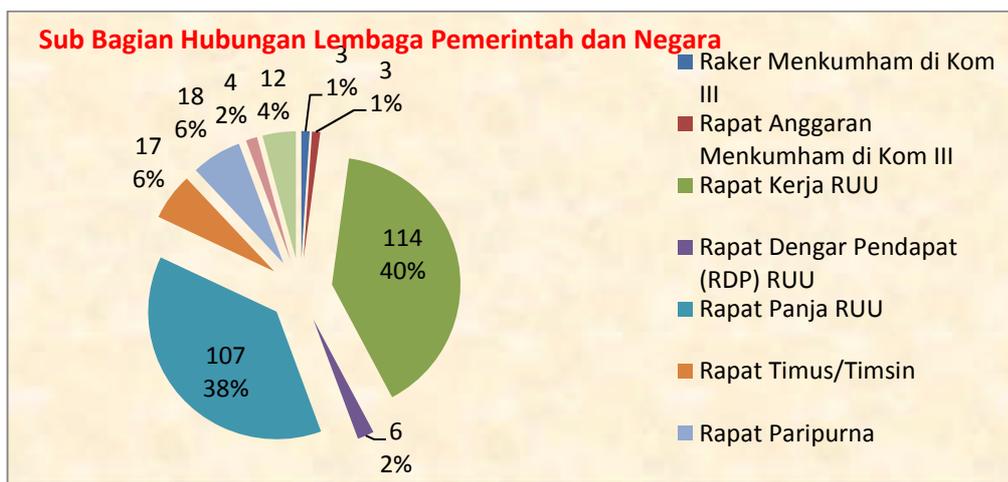
Data kegiatan tahun 2012 menunjukkan bahwa Bagian HLO senantiasa berupaya optimal menyelesaikan setiap kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan. Pelaksanaan kerja Bagian HLO yang baik tidak terlepas pula dari pihak/ instansi lain yang terkait dalam hal koordinasi dan komunikasi, yaitu:

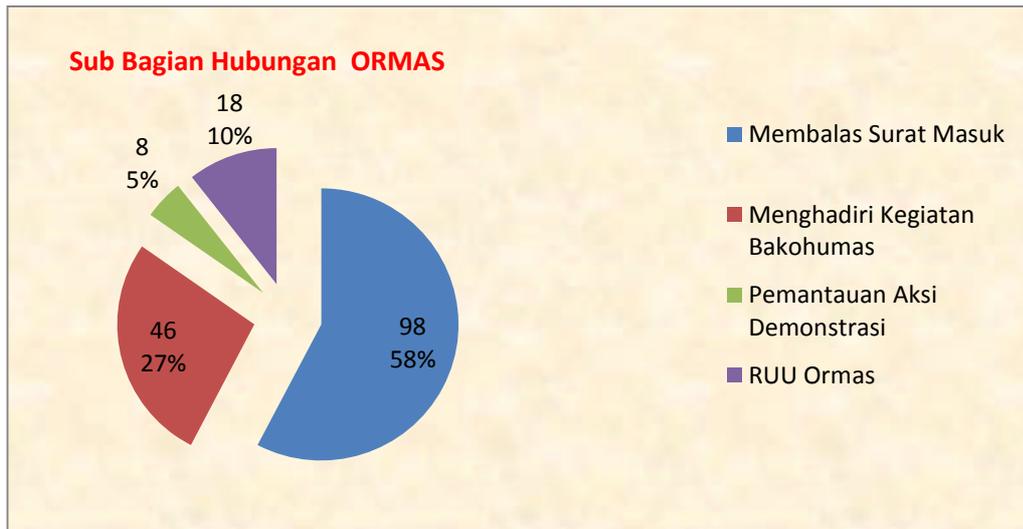
- 1) Internal Kementerian (Unit Utama Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis)
- 2) Eksternal Kementerian:
 - a) DPR
 - b) DPD
 - c) Kemenkominfo
 - d) Setneg
 - e) Kemenpolkam
 - f) Kemendagri
 - g) Forum Bakohumas
 - h) Ormas
 - i) Universitas
 - j) dan lembaga lainnya.

Pada Tahun 2012, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Ormas mempunyai kegiatan sebanyak 4 Kegiatan, antara lain:

- 1) Pertemuan Bakohumas
- 2) Bimtek Kehumasan
- 3) Pembuatan Risalah Pembahasan RUU di DPR RI
- 4) Pemantauan dan Penghimpunan Hasil Kunker Komisi III DPR RI dengan Kanwil

Tabel kinerja Bagian HLO 2012.





Sesuai data yang tersaji sebelumnya, ragam kegiatan Bagian HLO cukup banyak, dan hal ini menjelaskan tentang besarnya peranan Bagian HLO membantu pimpinan dalam menjalin kerjasama dan komunikasi dengan instansi pemerintahan, partai politik, ormas, dan universitas. Penjelasan kegiatan-kegiatan Bagian HLO adalah:

- 1) Kegiatan rapat-rapat di DPR. Peranan Kemenkumham dalam pembentukan peraturan perundang-undangan semakin besar, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011. Sejak UU Nomor 10 Tahun 2004 berlaku dan disempurnakan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik inisiatif pemerintah dan/atau DPR, Komisi I sampai dengan Komisi XI, harus melibatkan Kemenkumham.

Pembahasan RUU di DPR dan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI sangat membutuhkan Menteri Hukum dan HAM dan unsur pimpinan Eselon I Kemenkumham. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan DPR RI sampai dengan Bulan Desember 2012 sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan), diantaranya:

- a) Rapat Kerja Pembahasan RUU sebanyak 114 (seratus empat belas),
- b) Rapat Panja sebanyak 107 (seratus tujuh), Rapat Timus/Timsin sebanyak 17 (tujuh belas)
- c) Rapat Paripurna sebanyak 18 (delapan belas)
- d) Rapat Dengar Pendapat sebanyak 6 (enam)
- e) Rapat Anggaran sebanyak 3 (tiga)
- f) Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham beserta jajaran sebanyak 3 (tiga).

Berdasarkan banyaknya kegiatan tersebut, Bagian HLO mampu memantau dan mengkoordinasikan jadwal-jadwal rapat, sekaligus menyalurkan bahan atau data yang dibutuhkan pimpinan Kemenkumham dan DPR.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan tahun lalu dimana pada rapat koordinasi di Sekretariat Negara (Setneg), muncul ide pembentukan Paguyuban Penghubung Lembaga Negara. Dalam rakor tersebut dibahas mengenai pentingnya peranan penghubung di DPR dilaksanakan oleh pejabat eselon II. Hal ini dimaksudkan agar pejabat eselon II mampu menjadi penghubung, sebagai jembatan komunikasi dengan lembaga lain. Selain itu peran penghubung juga bertujuan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dimiliki di dalam lembaga negara tersebut kepada masyarakat dan lembaga terkait. Namun demikian hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum adanya *follow up* terhadap wacana tersebut.

2) Kunjungan Kerja dan Kunjungan Lapangan

Peranan penghubung antara Komisi III DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM relatif dapat berjalan baik. Hal ini dapat terlihat dengan terlaksananya pendampingan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Kantor Wilayah sebanyak 12 (dua belas) kali. Namun masih terdapat kendala dalam pendampingan terhadap kunjungan ke Kanwil yang tidak dapat terlaksana berkaitan dengan kunjungan lapangan dan kunjungan kerja spesifik terkait mencari masukan dalam pembentukan RUU. Ini disebabkan dana yang tidak dianggarkan pada anggaran tahun 2012, karena sifat kunjungan yang insidental. Dari keterbatasan tersebut, pendampingan kunjungan lapangan Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham terlaksana sebanyak 4 (empat) kali. Untuk tahun 2013 hal ini sudah diantisipasi dengan membuat anggaran yang dapat dipergunakan apabila diperlukan.

3) Bimbingan Teknis Kehumasan

Bimbingan Teknis Kehumasan dilaksanakan untuk meng *upgrade* kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya SDM dari Kanwil dalam bidang Kehumasan terutama dalam menghadapi tantangan ke depan dimana humas diharapkan semakin aktif dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan dari peserta terlebih karena Bimbingan Teknis tahun 2012 lebih ditujukan kepada staf yang sehari-hari bertugas di lapangan.

4) Rapat, seminar, *workshop* yang diselenggarakan Forum Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas). Forum Bakohumas merupakan suatu wadah

perhimpunan humas-humas Kementerian/Lembaga dan BUMN. Tujuan Forum Bakohumas adalah untuk membentuk suatu hubungan kerjasama diseminasi informasi antara anggotanya. Dalam Forum Bakohumas setiap program, kebijakan, produk perundangan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga disosialisasikan agar tiap anggota Bakohumas mengetahui dan menyebarkannya di instansi masing-masing. Sepanjang tahun 2012, Sub

5) Bagian Ormas telah menghadiri undangan Pertemuan Bakohumas sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan membalas surat masuk sebanyak 98 (sembilan puluh delapan), jumlah surat masuk yang diterima di Bagian HLO sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua). Hasil setiap seminar dan balasan surat masuk tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya diarahkan untuk disebarluaskan di website kementerian atau di Majalah Hukum dan HAM.

Disamping mengikuti undangan Forum Bakohumas, Bagian HLO telah menyelenggarakan Pertemuan Bakohumas di bulan Agustus 2012. Pada penyelenggaraan tersebut, humas-humas pemerintah yang hadir sebanyak 50 (lima puluh) Kementerian/ Lembaga. Tema yang menjadi topik pembahasan yaitu, “Peranan Kemenkumham dalam mensukseskan pelaksanaan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.” Dalam penyelenggaraan tersebut, anggota Bakohumas mendapatkan informasi sesuai dengan tema pertemuan, dan yang menjadi narasumber yaitu Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dr. H. Wahiddudin Adams, dan Kepala BPHN, DR. Wicipto Setiadi.

6) Pemantauan unjuk rasa dan fasilitator audiensi/pertemuan antara Ormas/LSM, Universitas, dan Partai Politik. Dibukanya kebebasan bersikap, berserikat, mengemukakan pendapat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat, di era reformasi menjadi kewajiban Kemenkumham untuk membuka saluran komunikasi seluas-luasnya.

b. Bagian Kerja Sama Luar Negeri

1) Kegiatan Rutin

a) SubBagian Kerja Sama Badan-Badan Internasional

Mengikuti rapat yang terkait kerjasama dengan Badan-Badan Internasional yang ada di Indonesia. Dari keikutsertaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 2 (dua) kali rapat membahas *Mutual of Understanding* dengan Badan-Badan Internasional.
- 5 (lima) kali melakukan rapat koordinasi dengan Badan-Badan Internasional.

- 5 (lima) kali menghadiri Forum diskusi mengenai permasalahan Internasional.

b) SubBagian Kerja Sama Antar Negara

Rapat yang dihadiri oleh Subbagian Kerja Sama Antar Negara adalah untuk membahas proses pembuatan *Mutual of Understanding* (MoU) anatar Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) kali menghadiri rapat untuk membahas MoU dengan negara lain.
- 6 (enam) kali rapat koordinasi dengan Unit Eselon I.
- 7 (tujuh) kali mengikuti seminar.

c) SubBagian Evaluasi dan Pelaporan

Rapat yang dihadiri SubBagian Evaluasi dan Pelaporan, dapat dirinci sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kali rapat untuk membahas mengenai rencana kerja dan anggaran.
- 6 (enam) kali rapat untuk membahas mengenai evaluasi.
- 7 (tujuh) kali rapat untuk membahas mengenai laporan.
- 4 (empat) kali mengikuti rapat koordinasi kerja.
- 2 (dua) kali mengikuti seminar.
- Pengadaan.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan Biro Humas dan KLN telah menyelenggarakan 17 pengadaan barang dan jasa. (lampiran 1)

- Paparan

Pembuatan paparan, diperlukan sebagai penunjang pimpinan dalam memberikan penjelasan kegiatan pada Biro Humas dan KLN sebanyak 5 bahan paparan.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tahun 2012, Bagian Kerja Sama Luar Negeri telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

a) *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion dilaksanakan pada 7 Juni 2012, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Maksud dari kegiatan FGD ini adalah untuk menyukseskan peran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b) Rapat Koordinasi Inter Kementerian.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26-28 september 2012 bertempat di Hotel Grand Seriti Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta .

c. Bagian Informasi dan Komunikasi

Bagian Informasi dan Komunikasi melakukan program kegiatan di bidang Pencitraan, Pelayanan Informasi Publik, dan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan untuk membangun *image* / pencitraan yang positif bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk:

- 1) Majalah
- 2) Press conference
- 3) Peliputan kegiatan Menteri Hukum dan HAM
- 4) Media visit
- 5) Press tour
- 6) Pembuatan billboard, banner, backdrop, spanduk dan leaflet
- 7) Penerbitan buku
- 8) Produk multimedia
- 9) Advertorial
- 10) Sosialisasi Permen Keterbukaan Informasi Publik
- 11) Legal expo institusi pembangunan hukum dan HAM
- 12) Keikutsertaan dari lembaga negara dan Perguruan Tinggi
- 13) Koordinasi PPKI
- 14) Langganan surat kabar dan majalah
- 15) Rakernis Kehumasan
- 16) Pengembangan koleksi perpustakaan
- 17) Dokumentasi kegiatan Menteri
- 18) Pembuatan transkrip dan pidato Menteri
- 19) Bimbingan Teknis Kehumasan

g. Bagian Fasilitas dan Pengaduan Masalah Hukum

- 1) Penguatan Kesekretariatan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Output kegiatan ini adalah :

- a) Draft Peraturan Menteri tentang Standarisasi Honorarium Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris
 - b) Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- 2) Konsinyering Penyusunan Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan serta Kode Etik Majelis Pengawas Notaris

Adapun output dari kegiatan ini adalah :

- a. Draft Peraturan Menteri tentang Tata Tertib dan Pedoman Perilaku Anggota Majelis Pengawas Notaris
- b. Draft Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

3) Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Output dari kegiatan ini adalah terwujudnya wewenang pengawasan atas Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris secara efektif dan efisien dengan kinerja yang berhasil guna dan berdayaguna.

6. Biro Perlengkapan

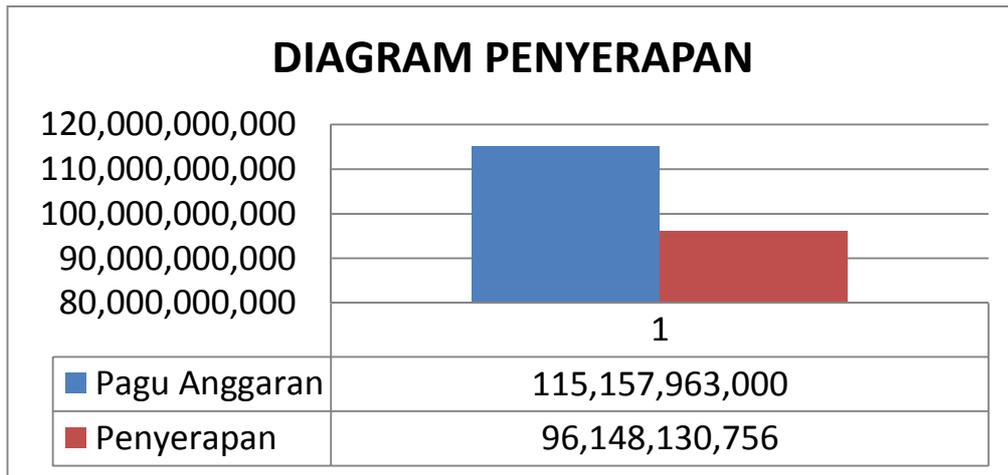
Berdasarkan data tersebut dalam Bab II maka dapat digambarkan tentang capaian kinerja Biro Perlengkapan pada tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

- a. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA Sekretariat Jenderal tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 143,551,605,000,-
- b. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 96,148,130,756 atau sekitar 66,98%.

Hal ini belum menggambarkan penyerapan atau realisasi sesungguhnya dari pelaksanaan kegiatan di Biro Perlengkapan pada tahun anggaran 2012 disebabkan ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh unit lain dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui penerbitan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nilai
a.	Pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk Mutasi Narapidana	Rp. 1,041,770,000,-
b.	Pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk BAMA	Rp. 20,000,000,000,-
c.	Pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk Operasional Kantor Baru	Rp. 7,351,872,000,-
Jumlah		Rp. 28,393,642,000,-

- c. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Biro Perlengkapan sebesar Rp. 143,551,605,000,- dikurangi nilai SKPA yaitu Rp. 28,393,642,000,- adalah Rp. 115,157,963,000,- dengan nilai penyerapan sebesar Rp. 96,148,130,756,- atau sekitar 83,49% untuk sejumlah 189 kegiatan baik fisik maupun non fisik. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini :



d. Terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi dilingkungan Biro Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam 8 Area Perubahan, 42 Indikator dan 76 Parameter yang salah satu indikatornya adalah “meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankannya opini WTP oleh Kementerian dan meningkatnya implementasi *e-procurement* barang/jasa maka pada tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara yang mencakup 33 Kantor Wilayah dan 14 Satker yang berada di unit pusat dengan *Output* dari kegiatan ini adalah ditandatanganinya sebanyak 47 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Kemudian sekitar \pm 78 kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*).

Berikut ini tabel perkembangan peningkatan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI yang didalamnya juga termasuk Laporan BMN dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

No	Opini	Tahun		
		2009	2010	2011
1	WTP-DPP	√	√	
2	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)			√

Disamping kegiatan sebagaimana tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi diantaranya satu parameter dari 76 parameter yang ada yaitu adanya kegiatan *assurance* (monitoring, evaluasi dan *compliance audit*) dan *consulting* (sosialisasi, bimbingan teknis) terhadap penyusunan Laporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan yaitu dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan/pelatihan administrasi perlengkapan

pada Kantor Wilayah dengan memanggil pejabat/petugas pengelola perlengkapan dari setiap unit kerja yang ada dalam jajarannya dengan jumlah peserta rata-rata 40 (lima puluh lima) orang untuk setiap Kantor Wilayah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibiayai dari DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2012 sebesar Rp. 652,997,000,- diadakan pada 5 (lima) Kantor Wilayah di 5 propinsi yaitu :

No	Unit Kerja
1	Maluku
2	Nusa Tenggara Barat
3	Sumatera Barat
4	Papua
5	Kalimantan Tengah

b. Kegiatan Peningkatan Wawasan dan Pembinaan Administrasi Pengelola BMN

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2012 di Hotel Harris Bandung Jawa Barat dengan diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri Para Kepala Bagian Umum dan Kasubbag. Keuangan dan Perlengkapan Kantor Wilayah, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Unit Utama. Adapun biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal tahun 2012 sebesar Rp. 683,592,000,- dengan *output* 1 (satu) dokumen laporan pembinaan dan 1 (satu) dokumen rencana aksi penertiban Barang Milik Negara Tahap II tahun 2013 serta *outcomes* berupa peningkatan pemahaman terhadap Para Kepala Bagian Umum dan Kasubbag. Keuangan dan Perlengkapan Kantor Wilayah, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Unit Utama tentang pengelolaan BMN.

c. Kegiatan Percepatan Sertipikat Tanah

Pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Menyeleksi usulan-usulan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. Menyusun data/usulan yang lengkap;
- c. Mengalokasikan dana ke UPT;
- d. Melaksanakan evaluasi lapangan/monitoring;
- e. Melaporkan hasil evaluasi.

Dari kegiatan ini ada peningkatan jumlah tanah yang sudah mempunyai dokumen kepemilikan berupa surat sertifikat tanah seluas 69,159,982 M² (24,38%) dari jumlah tanah seluruhnya 283,672,026 M² dan tanah yang belum bersertifikat seluas 214,512,044 M² (75,62%). Pada tahun 2012 diusulkan biaya sebesar Rp. 128,317,000,- untuk pengurusan sertifikat tanah seluas 180,731 M² melalui SKPA pada 10 Satuan Kerja dengan rincian balik nama seluas 29,916 M² dan sertifikat baru seluas 150,815 M².

d. Kegiatan Pemutakhiran & Rekonsiliasi Data BMN

Kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN adalah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN yang direalisasi sesuai ketersediaan anggaran dalam DIPA dialokasikan yaitu 2 kali kegiatan dalam setahun (semester 1 dan 2). Adapun sasaran dari kegiatan ini mencakup 33 Kantor Wilayah dan 14 Satker yang berada di unit pusat. *Output* dari kegiatan ini adalah ditandatangani sebanyak 47 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

e. Kegiatan Pembinaan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penatausahaan BMN

Kegiatan ini dilandasi Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mengharuskan penggunaan aplikasi Simak BMN dalam melakukan penatausahaan BMN.

Sasaran pembinaan kegiatan ini adalah satker-satker yang berada dibawah seluruh kantor wilayah khususnya yang berada di ibukota propinsi. Dari hasil pemetaan (*mapping*) permasalahan implementasi kebijakan penatausahaan BMN direkomendasikan langkah-langkah penyelesaian dan disusun kebijakan penatausahaan BMN.

Lingkup kegiatan ini meliputi :

- 1) Diskusi singkat tentang penatausahaan BMN dengan penanggungjawab, pelaksana dan petugas penatausahaan BMN.
- 2) Penelusuran transaksi perolehan, perubahan dan pengurangan BMN.
- 3) Pengambilan data BMN (*back up*).
- 4) Menyusun risalah monitoring.

Dalam rangka evaluasi implementasi kebijakan penatausahaan BMN maka dilakukan analisis terhadap hasil mapping permasalahan disamping perkembangan peraturan-peraturan yang terkait di bidang penatausahaan BMN dan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai *output* dari kegiatan ini telah dikeluarkan instrumen kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.PL.04.03-12 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pengesahan barang hibah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

- 3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.KP.04.01-41 tanggal 4 April 2012 tentang Penyusutan barang persediaan khususnya beras pada satuan kerja pemasyarakatan.
 - 4) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.PL.04.03-362 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perubahan Kodifikasi Beras.
 - 5) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.PL.04.03-439 tanggal 27 Juni 2012 tentang Kodifikasi dan Harga Satuan Beras dalam Aplikasi persediaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- f. Kegiatan Penyempurnaan Buku Pedoman Penatausahaan BMN tahun 2008
- Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan peraturan terkait bidang pengelolaan BMN maka perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan internal Kementerian termasuk kebijakan yang mengatur penatausahaan BMN. Guna menindaklanjutinya maka tahun 2012 dilakukan penyempurnaan atas pedoman penatausahaan BMN yang disusun tahun 2008.
- Penyempurnaan pedoman penatausahaan BMN tersebut dilanjutkan dengan pencetakan buku sebanyak 1000 buah dengan peruntukkan seluruh kantor/satuan kerja.
- g. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan SIMAK BMN
- Sesuai dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaksana penatausahaan BMN maka perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi bidang BMN. Pada tahun anggaran 2012 pembinaan dilakukan terhadap 123 calon petugas penatausahaan BMN pada 8 (delapan) Kantor Wilayah.
- h. Kegiatan Penetapan Status BMN
- Kegiatan penetapan status BMN tahun 2012 dalam bentuk sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa satuan kerja yang ada di satu propinsi untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan mekanisme penetapan status dengan nara sumber dari KPKLN setempat dan setiap satuan kerja yang menghadiri kegiatan diminta untuk membawa berkas atau dokumen berkaitan dengan usulan penetapan status yang selanjutnya setelah dokumen lengkap diusulkan kepada KPKNL atau Kanwil DJKN untuk dimintakan surat keputusan tentang penetapan status.
- Pada tahun ini, kegiatan telah dilakukan di 5 (lima) Kantor Wilayah yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat dengan anggaran sebesar Rp. 161,735,000,- yang dibebankan pada pagu anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2012.

i. Kegiatan Penilaian dan Uji Kelayakan Pemanfaatan BMN

Kegiatan penilaian dan uji kelayakan pemanfaatan BMN merupakan kegiatan yang sifatnya monitoring terhadap beberapa satuan kerja yang diambil secara sampling dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam satuan kerja tersebut terdapat pemanfaatan BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila ditemukan adanya kesalahan pemanfaatan BMN maka dilakukan pembinaan sekaligus diminta satuan kerja yang bersangkutan segera mengusulkan pemanfaatannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan uji kelayakan pemanfaatan BMN telah dilakukan monitoring di 7 (tujuh) Kantor Wilayah yaitu Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam dengan anggaran sebesar Rp. 115,190,000,- yang dibebankan pada pagu anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2012.

j. Kegiatan Penertiban dan Penyelesaian Sengketa Pengelolaan BMN

Kegiatan ini yang bersifat monitoring ini dilaksanakan pada beberapa satuan kerja yang mengalami permasalahan berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengelolaan BMN dengan cara mendatangi lokasi dan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap penghuni dengan didampingi oleh pejabat dilingkungan Kanwil dengan anggaran sebesar Rp. 139,405,000,- yang dibebankan pada pagu anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2012.

k. Kegiatan Percepatan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli pengadaan barang dan jasa yang profesional dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diselenggarakan pada tanggal 05 sampai dengan tanggal 09 November 2012, bertempat di Hotel Ramada Kuta, Denpasar, Bali. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme kepada para peserta dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Peserta kegiatan ini 10 Kantor Wilayah yaitu; Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali dan Sulawesi Barat dengan masing-masing Kanwil mengirimkan 20 orang peserta, sehingga jumlah peserta dari Kanwil seluruhnya 200 orang dan para pegawai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan dengan mengirimkan masing-masing sebanyak 5 orang.

l. Pembinaan Tenaga Ahli Pengadaan Barang Jasa

Pada tahun anggaran 2012 juga telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan DIPA tahun 2012

Nomor : 0005/013-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan telah diselenggarakan pada tanggal 04 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012, bertempat di Hotel Harris, Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diikuti oleh 10 Kantor Wilayah yaitu; Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Bali dengan mengirimkan 20 orang peserta/kanwil, sehingga jumlah peserta sebanyak 200 orang.

7. Pusjianbang

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012

No	Kegiatan	Output	Hambatan Pelaksanaan
1	Penyelenggaraan Kajian (HKI,PAS,IM,YANKUM,ADFAS)	12 Laporan /Rekomendasi	Tidak ada hambatan
2	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (HKI,PAS,IM,YANKUM,ADFAS)	12 Laporan /Rekomendasi	Tidak ada hambatan
3	Penyelenggaraan Kajian Luar Negeri (PASdan IM)	2 Laporan /Rekomendasi	Tidak ada hambatan
4	Perumusan kebijakan Teknis/Action Plan	1 Laporan	Tidak ada hambatan
5	Perumusan Masalah Penelitian	1 Laporan	Tidak ada hambatan
6	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	1 Laporan	Tidak ada hambatan
7	Perpustakaan		Kurang tersedianya literatur pendukung kegiatan litbang
8	Penerbitan Jurnal	3Terbit	Kurang tersedianya naskah
9	Bimtek Penelitian & Pengembangan	3 Laporan	Tidak ada hambatan
10	Sosialisasi	2 Laporan	Tidak ada hambatan
11	Seminar	1 Laporan	Tidak ada hambatan
12	Penyusunan RKA-KL	1 Dokumen RKAKL	Tidak ada hambatan
13	Monitoring	2 laporan	Tidak ada hambatan
14	Pengelola Keuangan	Laporan	
15	Pengelola Perlengkapan		

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Masih banyaknya Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam kewenangannya.
2. Terjadi perubahan-perubahan kegiatan yang dilakukan oleh unit pada beberapa Direktorat menyebabkan kesulitan dalam menyusun revisi RKA-KL selama TA 2012
3. Dalam penyampaian laporan kegiatan/bulanan dari masing-masing Direktorat masih tidak memperhatikan ketetapan waktu.
4. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik;
5. Kurangnya koordinasi antar masing-masing direktorat;
6. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
7. Dibutuhkan pendidikan tambahan untuk menambah keahlian pegawai.
8. Masih kurangnya optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.

A. Penutup

Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2012 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2012. Dalam laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merubah dan memperbaiki diri agar dapat mengikuti dan menjalankan program pemerintah untuk memenuhi kepuasan publik.

Dalam laporan ini tergambar kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi pemerintahan yang berupaya mewujudkan sistem hukum nasional dalam menjamin tegaknya supremasi hukum, kepastian hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, terutama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seringkali harus berhadapan dengan opini publik yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam kondisi demikian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas terus-menerus di realisasikan melalui serangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP).

Diharapkan ada kesamaan gerak dan kesatuan langkah segenap aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjawab keinginan masyarakat selama Tahun 2012. Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

B. Saran

- a. Perlu penguatan koordinasi internal dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau kepada masyarakat, dengan mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan terkait peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan sumber daya manusia pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia harus terus dilakukan, dengan menambah kemampuan dan keterampilan pegawai akan meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi.



- c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu institusi yang menjadi contoh Wilayah Bebas Korupsi maka perlu meningkatkan sistem dan mekanisme kegiatan pemberantasan korupsi sesuai dengan kriteria penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan melakukan pelayanan publik yang jujur dan transparan.